

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG
2020**



Walikota Tangerang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan syukur Alhamdulillahi Robbil 'Alamiin, kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat, Inayah dan Hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tangerang memuat informasi kinerja Pemerintah Kota Tangerang dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2019.

Analisis dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pembangunan agar lebih relevan, efektif, efisien, berdampak dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan di Kota Tangerang kurun waktu Tahun 2019, merupakan Tahun Pertama periode RPJMD 2019-2023, dalam rangka mewujudkan visi Kota Tangerang “TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG

YANG SEJAHTERA, BERAKHLAKUL KARIMAH DAN BERDAYA SAING". Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Tangerang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, dan aparatur pemerintah daerah.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kota Tangerang Tahun 2019.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
I.1 Latar Belakang	I-1
I.2 Kondisi Kota Tangerang	I-2
I.2.1 Letak dan Kondisi Geografis	I-2
I.2.2 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi.....	I-2
I.2.3 Kondisi Topografi	I-3
I.2.4 Aparat Pemerintah	I-3
I.2.5 Perekonomian	I-6
I.2.5.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	I-6
I.2.5.2 Pertumbuhan Ekonomi	I-8
I.2.5.3 PDRB per Kapita	I-10
I.2.5.4 Inflasi	I-10
I.2.6 Bidang Keuangan Daerah	I-11
I.2.7 Bidang Sosial Budaya	I-12
I.2.7.1 Penduduk.....	I-12
I.2.7.2 Tenaga Kerja	I-14
I.2.7.3 Kesehatan.....	I-16
I.2.7.4 Pendidikan.....	I-17
I.2.7.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	I-18
I.3 Kedudukan, Kewenangan Dan Tugas Pokok Serta Struktur Organisasi	I-19
I.3.1 Kedudukan	I-19
I.3.1.1 Aspek Politik	I-19
I.3.1.2 Aspek Administrasi/Manajemen Pemerintah	I-20
I.3.2 Kewenangan	I-20
I.3.3 Tugas Pokok	I-22
I.3.4 Struktur Organisasi.....	I-22
I.4 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Daerah	I-24
I.4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	I-24

I.4.2	Isu Strategis Pembangunan Daerah	I-39
I.5	Sistematika LKIP 2019	I-52
BAB II. PERENCANAAN KINERJA		II-1
II.1	Rencana Strategis	II-1
II.2	Visi.....	II-2
II.3	Misi	II-4
II.4	Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kota Tangerang.....	II-6
II.5	Sasaran Dan Indikator Sasaran RPJMD	II-7
II.6	Strategi Dan Arah Kebijakan	II-9
II.7	Indikator Kinerja Utama	II-18
II.8	Perjanjian Kinerja Kota Tangerang Tahun 2019.....	II-22
II.9	Rencana Anggaran Tahun 2019.....	II-25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018.....		III-1
III.1	Kerangka Pengukuran Kinerja.....	III-2
III.2	Capaian Indikator Makro.....	III-4
III.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	III-6
III.2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	III-8
III.2.3	Tingkat Kemiskinan	III-10
III.2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	III-13
III.2.5	Indeks Kepuasan Masyarakat	III-14
III.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Tangerang Tahun 2019	III-16
III.4	Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja Tujuan Dan Sasaran Strategis	III-19
III.4.1	Tujuan 1	III-22
III.4.2	Tujuan 2	III-26
III.4.3	Tujuan 3	III-29
III.4.4	Tujuan 4	III-53
III.4.4	Tujuan 5	III-61
III.4.6	Sasaran 1	III-65
III.4.7	Sasaran 2.....	III-72
III.4.8	Sasaran 3.....	III-78
III.4.9	Sasaran 4.....	III-83
III.4.10	Sasaran 5.....	III-86
III.4.11	Sasaran 6.....	III-98
III.4.12	Sasaran 7.....	III-107
III.4.13	Sasaran 8.....	III-115

III.4.14	Sasaran 9	III-123
III.4.15	Sasaran 10	III-142
III.4.16	Sasaran 11	III-147
III.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	III-153
III.6	Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja	III-158
III.6	Prestasi dan Penghargaan	III-169
BAB IV. PENUTUP	IV-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2015-2019	I-6
Tabel 1.2	PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2015-2019	I-7
Tabel 1.3	Struktur Perekonomian Kota Tangerang Berdasarkan Kelompok Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (%).....	I-8
Tabel 1.4	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2015-2019 ...	I-8
Tabel 1.5	PDRB Kota Tangerang Tahun 2015-2019	I-10
Tabel 1.6	Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2015-2019	I-11
Tabel 1.7	Komposisi Belanja Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI).....	I-12
Tabel 1.8	Jumlah Penduduk, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Tahun 2019	I-12
Tabel 1.9	Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Rasio Ketergantungan di Kota Tangerang Tahun 2015-2019	I-13
Tabel 1.10	Perkembangan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang	I-14
Tabel 1.11	Indikator ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2015-2019	I-15
Tabel 1.12	Indikator IPM Kota Tangerang Tahun 2015-2019	I-18
Tabel 1.13	Isu Strategis Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2019-2023.....	I-39
Tabel 2.1	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2019-2023	II-7
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023.....	II-8
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019-2023.....	II-19
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019	II-23
Tabel 2.5	Komposisi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019.....	II-25
Tabel 3.1	Perkembangan Indikator Makro Kota Tangerang Tahun 2015- 2019.....	III-5

Tabel 3.2	Perbandingan Indikator Makro Kota Tangerang dengan Provinsi Banten.....	III-6
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Indikator Makro Kota Tangerang Tahun 2019.....	III-6
Tabel 3.4	Komponen IPM Kota Tangerang Tahun 2015-2019	III-7
Tabel 3.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2015-2019	III-8
Tabel 3.6	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang Tahun 2015-2019	III-11
Tabel 3.7	Nilai IKM Kota Tangerang Tahun 2015-2019.....	III-15
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Tangerang Tahun 2019.....	III-16
Tabel 3.9	Ketercapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Terhadap Target Tahun 2019.....	III-19
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Tujuan 1	III-22
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Tujuan 2	III-26
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Tujuan 3	III-29
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Tujuan 4	III-53
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Tujuan 5	III-61
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Sasaran 1	III-65
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Sasaran 2	III-72
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Sasaran 3	III-78
Tabel 3.18	Jumlah PMKS di Kota Tangerang Tahun 2018-2019.....	III-79
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Sasaran 4	III-83
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Sasaran 5	III-86
Tabel 3.21	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2015-2019	III-88
Tabel 3.22	Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2007-2018	III-94
Tabel 3.23	Nilai IKM Kota Tangerang Tahun 2015-2019.....	III-96
Tabel 3.24	Capaian Kinerja Sasaran 6	III-98
Tabel 3.25	Titik Penanganan Kemacetan Kota Tangerang Tahun 2019	III-104
Tabel 3.26	Capaian Kinerja Sasaran 7	III-107
Tabel 3.27	Luas Kawasan Kumuh Tahun 2019	III-109
Tabel 3.28	Jaringan Perpipaan Air Minum yang dibangun Tahun 2016-2019.....	III-111
Tabel 3.29	Pembangunan Septic Tank Komunal Tahun 2019.....	III-113
Tabel 3.30	Pembangunan Jamban Tahun 2019.....	III-113
Tabel 3.31	Capaian Kinerja Sasaran 8	III-115

Tabel 3.32	Sebaran Luasan Genangan dan Banjir Tahun 2018.....	III-116
Tabel 3.33	Target Lokasi Penurunan Luasan Genangan dan Banjir Tahun 2019.....	III-118
Tabel 3.34	Realisasi Penurunan Luasan Genangan dan Banjir Tahun 2019.....	III-119
Tabel 3.35	Capaian Kinerja Sasaran 9	III-123
Tabel 3.36	Perhitungan IPA untuk IKLH Kota Tangerang Tahun 2019	III-126
Tabel 3.37	Perhitungan Indeks Pencemaran Udara	III-127
Tabel 3.38	Perhitungan Indeks Tutupan Hutan/Lahan	III-128
Tabel 3.39	Pengurangan Sampah Di Kota Tangerang Tahun 2019.....	III-136
Tabel 3.40	Penanganan Sampah Di Kota Tangerang Tahun 2019.....	III-139
Tabel 3.41	Capaian Kinerja Sasaran 10	III-142
Tabel 3.42	Capaian Kinerja Sasaran 11	III-147
Tabel 3.43	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019.....	III-154
Tabel 3.44	Komposisi Belanja Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)	III-154
Tabel 3.45	Anggaran yang Digunakan dan yang Telah Digunakan untuk Mendukung Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	III-163
Tabel 3.46	Prestasi dan Penghargaan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019.....	III-169

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kota Tangerang.....	I-3
Gambar 1.2	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2015-2019	I-9
Gambar 1.3	Grafik Perkembangan Inflasi Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2015-2019.....	I-11
Gambar 1.4	Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Tangerang 2015-2019	I-16
Gambar 1.5	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Tangerang Tahun 2015-2019.....	I-16
Gambar 1.6	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Tangerang Tahun 2015-2019	I-17
Gambar 1.7	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Tangerang Tahun 2015-2019.....	I-18
Gambar 2.1	Komposisi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019	II-26
Gambar 3.1	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang Tahun 2015-2019 dan Perbandingannya dengan Provinsi Banten dan Nasional.....	III-9
Gambar 3.2	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Tangerang dan Provinsi Banten 2015-2019.....	III-11
Gambar 3.3	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tangerang dan Provinsi Banten 2015-2019	III-12
Gambar 3.4	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tangerang Tahun 2015-2019	III-14
Gambar 3.5	Capaian IKU Kota Tangerang Tahun 2019.....	III-21
Gambar 3.6	Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Paket A	III-66
Gambar 3.7	Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B	III-69
Gambar 3.8	Capaian Nilai AKIP Kota Tangerang.....	III-88
Gambar 3.9	Sebaran Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2019.....	III-100
Gambar 3.10	Jumlah Titik Kemacetan 2019-2023.....	III-103
Gambar 3.11	Titik Kemacetan Tertangani Pada Tahun 2019.....	III-103
Gambar 3.12	Sebaran Luasan Genangan dan Banjir Tahun 2018.....	III-115

Gambar 3.13	Target Lokasi Penurunan Luas Genangan dan Banjir Tahun 2019.....	III-117
Gambar 3.14	Realisasi Lokasi Penurunan Luas Genangan dan Banjir Tahun 2019.....	III-119
Gambar 3.15	Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019	III-155

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Kota Tangerang

Tahun 2019

Pemerintah Kota Tangerang telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2019 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023, dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Tahun 2019 terhadap 28 (Dua Puluh Delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat digambarkan bahwa 18 indikator capaiannya melebihi target (64,29%), 6 indikator

capaiannya sesuai target (21,43%), dan 4 indikator belum mencapai target (14,29%). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, rata-rata capaian kinerja indikator Tahun 2019 adalah sebesar 105,11%, atau kategori Sangat Tinggi. Hal ini mengindikasikan keberhasilan pencapaian target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tangerang 2019-2023.

Pada Tahun Anggaran 2019, pencapaian kinerja 5 (Lima) tujuan dan 11 (Sebelas) sasaran strategis pada RPJMD Kota Tangerang termasuk 28 (Dua Puluh Delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Tangerang yang dilaksanakan pada Badan, Dinas dan Kantor serta Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.039.952.537.109,09 dengan realisasi anggaran mencapai Rp4.371.017.084.765,016 atau 86,72% (data sebelum dilakukan audit oleh BPK).



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dengan menerapkan penyelenggaraan *good governance* yang didukung dengan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP didasarkan pada beberapa regulasi yaitu Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang wajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Kota Tangerang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP Kota Tangerang Tahun 2018 mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023, Rencana Kinerja Tahun 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2019.



I.2. KONDISI KOTA TANGERANG

I.2.1 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, wilayah Kota Tangerang terletak antara $6^{\circ}6'$ - $6^{\circ}13'$ Lintang Selatan (LS) dan $106^{\circ}36'$ - $106^{\circ}42'$ Bujur Timur (BT). Kota Tangerang berjarak ±60 km dari Ibukota Provinsi Banten dan ±27 km dari Ibukota Negara Republik Indonesia, DKI Jakarta. Pesatnya perkembangan Kota Tangerang didukung oleh tersedianya sistem jaringan transportasi terpadu dengan kawasan Jabodetabek, serta memiliki aksesibilitas yang baik terhadap simpul transportasi berskala nasional dan internasional, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Internasional Tanjung Priok, Pelabuhan Merak serta Pelabuhan Bojonegara. Letak geografis Kota Tangerang yang strategis tersebut telah mendorong pertumbuhan aktivitas industri, perdagangan dan jasa yang merupakan basis perekonomian Kota Tangerang saat ini.

I.2.2 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Tangerang adalah 164,54 Km² (tidak termasuk luas Bandara Soekarno-Hatta sebesar 19,69 km²). Secara administrasi Kota Tangerang terdiri dari 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Sepatan Timur di Kabupaten Tangerang;

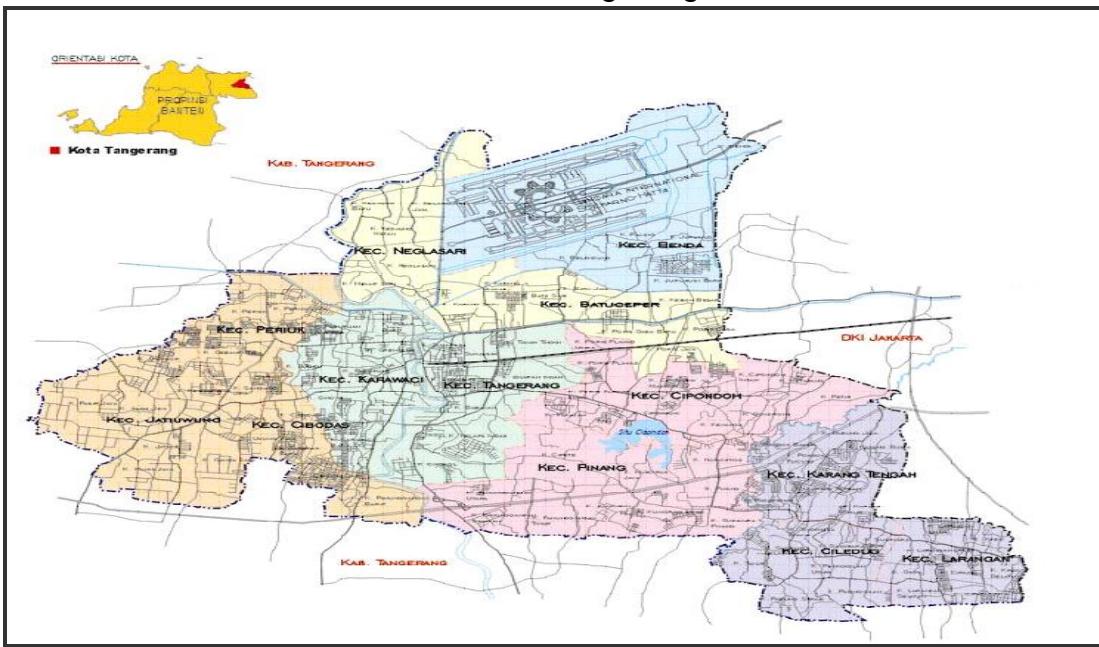
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua di Kabupaten Tangerang serta Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren di Kota Tangerang Selatan;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Cikupa di Kabupaten Tangerang; dan

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan di Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 1.1
Peta Kota Tangerang



I.2.3 Kondisi Topografi

Wilayah Kota Tangerang rata-rata berada pada ketinggian 10 - 18 meter di atas permukaan laut. Bagian Utara memiliki rata-rata ketinggian 10 meter di atas permukaan laut, sedangkan bagian Selatan memiliki ketinggian 18 meter di atas permukaan laut, seperti Kecamatan Ciledug, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Karang Tengah. Dilihat dari kemiringan tanahnya, sebagian besar Kota Tangerang mempunyai tingkat kemiringan tanah 0-3% dan hanya sebagian kecil di bagian Selatan kota kemiringan tanahnya antara 3-8%, yaitu berada di Kelurahan Parung Serab, Kelurahan Paninggilan Selatan dan Kelurahan Cipadu Jaya.

I.2.4 Aparat Pemerintah

Aparat Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2019 tercatat sejumlah 8.128 orang, yang terdiri dari:

a. Jenis Kelamin

- | | |
|-----------|---------------|
| Laki-laki | : 3.327 orang |
| Perempuan | : 4.801 orang |



b. Golongan

Golongan I : 135 orang

Golongan II : 1.164 orang

Golongan III : 4.753 orang

Golongan IV : 2.076 orang

c. Jabatan Struktural yang terdiri dari:

Esselton II : 31 orang

Esselton III : 151 orang

Esselton IV : 1.045 orang

d. Jabatan fungsional yang terisi sebanyak 4.441 orang, terdiri dari:

1. Tenaga Guru : 3.668 orang

2. Tenaga Kesehatan : 583 orang

3. Analis Kepegawaian : 10 orang

4. Assessor SDM Aparatur : 5 orang

5. Auditor : 21 orang

6. P2UPD : 19 orang

7. Pengujji Kendaraan Bermotor : 6 orang

8. Perencana : 2 orang

9. Pranata Komputer : 23 orang

10. Widya swara : 2 orang

11. Pengawas Sekolah : 67 orang

12. Penilik : 55 orang

13. Arsiparis : 1 orang

14. Penera : 4 orang

15. Pengantar Kerja : 1 orang

16. Polisi Pamong Praja : 4 orang

17. Pranata Hubungan Masyarakat : 5 orang

e. Tingkat Pendidikan :

SD : 100 orang

SMP : 119 orang

SLTA : 1.003 orang

D1 : 34 orang



- D2 : 344 orang
- D3 : 528 orang
- D4 : 131 orang
- S1 : 5.012 orang
- S2 : 848 orang
- S3 : 9 orang

Sumber : BKPSDM Kota Tangerang, 2019

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat Pemerintah Kota Tangerang telah dilakukan dengan berbagai program melalui pemberian penghargaan, pendidikan, pelatihan teknis umum dan fungsional serta pemberian hukuman dan pembinaan.

a. Pemberian penghargaan

- 1) Satyalancana dengan masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun sejumlah 703 orang, yang terdiri dari :
 - ⇒ Satyalancana Karya Satya 30 Tahun : 151 orang.
 - ⇒ Satyalancana Karya Satya 20 Tahun : 119 orang.
 - ⇒ Satyalancana Karya Satya 10 Tahun : 433 orang.
- 2) Pemberian Penghargaan Kenaikan Pangkat sejumlah 1.647 orang.
- 3) Pemberian penghargaan Purna Tugas sejumlah 312 orang.

b. Pendidikan Pelatihan yang meliputi :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan : 257 orang.
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan : 50 orang, terdiri dari :
 - ⇒ Diklatpim II : 2 orang.
 - ⇒ Diklatpim III : 8 orang.
 - ⇒ Diklatpin IV : 42 Orang.
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional melalui pengiriman pada lembaga pendidikan dan pelatihan : 1.158 orang, dengan rincian :
 - ⇒ Pendidikan dan pelatihan teknis : 915 orang.
 - ⇒ Pendidikan dan pelatihan fungsional : 243 orang.



c. Pemberian Hukuman

Pelanggaran Disiplin Pegawai sebanyak 16 orang yang terdiri dari Pelanggaran disiplin pegawai tingkat ringan 4 orang, tingkat sedang 2 orang dan pelanggaran disiplin tingkat berat sebanyak 10 orang.

I.2.5 Perekonomian

I.2.5.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah, yang dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah. Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kota Tangerang tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019*)
	Rp Miliar				
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.736,20	1.938,84	2.112,47	2.325,25	2.557,33
B. Pertambangan dan Penggalian	-	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	40.120,08	42.036,02	44.990,46	47.886,03	50.592,55
D. Pengadaan Listrik dan Gas	250,35	250,38	285,15	307,63	331,26
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	73,74	79,90	88,35	96,25	103,16
F. Konstruksi	8.643,22	9.311,99	10.189,12	11.403,67	12.712,46
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.099,18	13.640,06	14.899,15	16.681,65	18.699,09
H. Transportasi dan Pergudangan	36.392,10	42.069,88	46.538,71	51.894,17	54.405,23
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.691,12	1.856,16	2.054,21	2.212,47	2.384,99
J. Informasi dan Komunikasi	5.476,81	5.957,41	6.718,53	7.118,53	7.495,92
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.083,52	3.589,27	3.863,49	4.280,05	4.502,41
L. Real Estat	6.159,24	6.808,92	7.685,86	8.568,80	9.683,57
M,N. Jasa Perusahaan	1.216,57	1.336,02	1.486,40	1.632,77	1.803,78
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.443,11	1.581,52	1.716,40	1.856,91	2.009,92
P. Jasa Pendidikan	2.593,17	2.829,53	3.157,71	3.577,11	4.018,82
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.002,63	1.088,20	1.204,06	1.342,54	1.488,54
R,S,T,U. Jasa lainnya	1.669,81	1.808,12	2.015,48	2.223,79	2.448,79
PDRB ADHB Kota Tangerang	124.650,83	136.182,24	149.005,54	163.407,63	175.237,82



Sumber: BPS Kota Tangerang, 2020
*) angka sementara

Tabel 1.2
PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019*)
	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.290,04	1.389,13	1.473,07	1.574,82	1.681,75
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	35.049,96	36.045,90	37.352,39	38.561,48	39.783,75
D. Pengadaan Listrik dan Gas	157,08	162,87	172,55	179,78	186,54
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	70,48	75,34	81,45	86,56	92,01
F. Konstruksi	6.456,08	6.850,60	7.309,90	7.837,44	8.482,46
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.921,93	12.321,32	12.938,04	14.062,08	15.297,35
H. Transportasi dan Pergudangan	14.130,19	15.233,68	16.553,89	17.711,30	16.990,82
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.294,18	1.402,83	1.527,64	1.634,52	1.749,28
J. Informasi dan Komunikasi	6.666,41	7.243,73	7.912,81	8.504,69	9.257,36
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.409,29	2.722,27	2.810,66	3.016,29	3.106,45
L. Real Estat	5.615,61	6.051,16	6.542,00	7.025,85	7.686,99
M,N. Jasa Perusahaan	910,62	974,99	1.044,92	1.119,05	1.198,50
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	984,14	1.057,38	1.112,19	1.177,69	1.247,29
P. Jasa Pendidikan	1.891,04	2.028,28	2.179,68	2.342,90	2.518,62
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	796,83	847,99	916,19	979,77	1.047,86
R,S,T,U. Jasa lainnya	1.163,71	1.247,11	1.347,28	1.453,08	1.563,52
PDRB ADHK Kota Tangerang	90.807,59	95.654,62	101.274,68	107.267,32	111.890,54

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2020
*) angka sementara

Selama periode 2015-2019, perekonomian Kota Tangerang telah beralih dari kelompok lapangan usaha sekunder ke kelompok lapangan usaha tersier yang terlihat dari kenaikan/penurunan peranan masing-masing kelompok lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Tangerang.

Pada Tahun 2015, kelompok lapangan usaha sekunder memberikan sumbangan sebesar 39,38 persen, kemudian Tahun 2019, menurun menjadi 36,37 persen. Sedangkan peningkatan kelompok lapangan usaha tersier, yang semula pada Tahun 2015 berperan sebesar 59,23 persen, meningkat menjadi 62,17 persen pada Tahun 2019. Kelompok lapangan usaha yang



paling kecil peranannya dalam perekonomian Kota Tangerang adalah kelompok lapangan usaha primer.

Tabel 1.3
Struktur Perekonomian Kota Tangerang Berdasarkan
Kelompok Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (%)

Kelompok	2015	2016	2017	2018	2019*)
Primer	1,39	1,42	1,58	1,44	1,46
Sekunder	39,38	37,95	41,42	36,98	36,37
Tersier	59,23	60,63	57,00	61,58	62,17
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2020

*) angka sementara

I.2.5.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Pada Tahun 2019 perekonomian Kota Tangerang mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini terlihat dari laju pertumbuhan PDRB ADHK Kota Tangerang Tahun 2019 sebesar 4,31%, sedangkan periode Tahun 2015 sampai dengan 2018 pertumbuhannya di atas 5%. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2019 tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Real Estate sebesar 9,41%. Hampir semua lapangan usaha ekonomi PDRB pada Tahun 2019 mencatat pertumbuhan yang positif kecuali satu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu Transportasi dan Pergudangan sebesar -4,07%. Salah satu penyebabnya adalah turunnya tarif komoditas angkutan udara disebabkan harga angkutan udara yang telah mencapai batas tertingginya dan keluarnya keputusan pemerintah yang mengatur tarif angkutan udara, yaitu keputusan Menteri Perhubungan No. 106 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 yang menurunkan tarif batas atas sebanyak 12%-16%.

Tabel 1.4
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang,
Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2015-2019

Tahun	LPE (%)		
	Kota Tangerang	Provinsi Banten	Nasional
2015	5,37	5,45	4,88
2016	5,34	5,28	5,02
2017	5,88	5,71	5,07

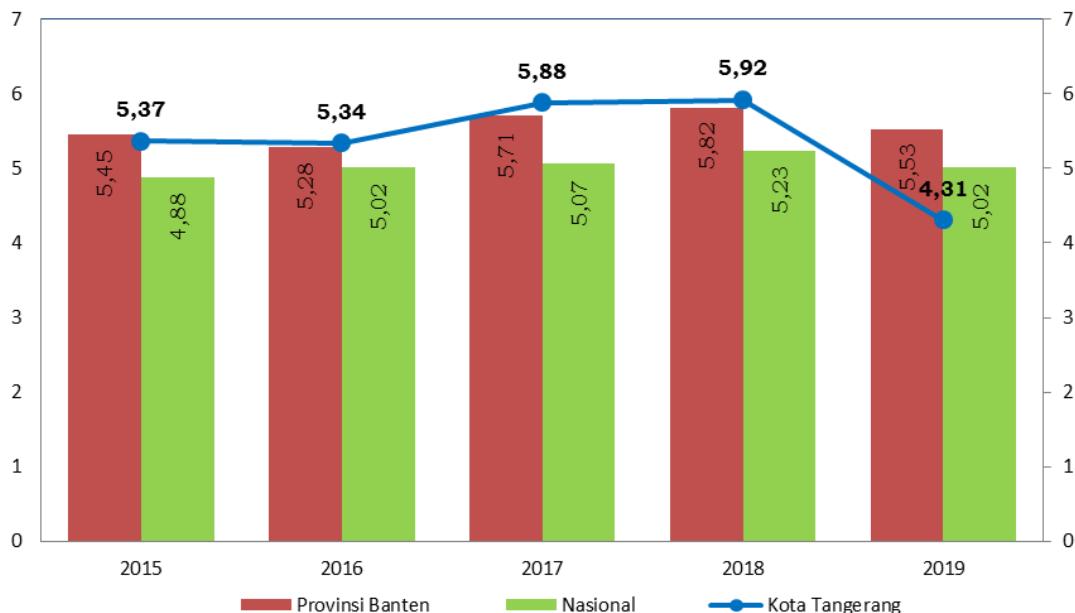


Tahun	LPE (%)		
	Kota Tangerang	Provinsi Banten	Nasional
2018	5,92	5,82	5,23
2019*)	4,31	5,53	5,02

Sumber: BPS RI, Kota Tangerang dan Banten, 2020

*) angka sementara

Gambar 1.2
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang,
Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber: BPS RI, Kota Tangerang dan Banten

Selama periode 2016-2018, laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Tingkat Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara regional Banten dan Nasional. Namun pada Tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang mengalami penurunan yang sangat signifikan bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nasional.

Secara umum, pada periode 2015-2018 pertumbuhan ekonominya cukup stabil terhadap gangguan/guncangan eksternal, baik dalam tataran global ataupun nasional. Pada Tahun 2018, di tengah masih melemahnya perekonomian global dan nasional, Kota Tangerang tetap dapat



mempertahankan LPE-nya di atas Provinsi Banten dan Nasional. Akan tetapi pada Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang menurun sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan Nasional.

I.2.5.3 PDRB per Kapita

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada Tahun 2019, secara agregat PDRB per kapita Kota Tangerang mencapai 78,59 juta rupiah, meningkat 4,76% bila dibandingkan dengan Tahun 2018 yang sebesar 75,02 juta rupiah. Peningkatan tersebut tidak sebesar dengan peningkatan pada tahun sebelumnya, selama periode 2016-2018 berturut-turut sebesar 7,30% dan 7,49%.

Tabel 1.5
PDRB per Kapita Kota Tangerang Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019*)
PDRB per Kapita (Juta Rp)	61,61	65,04	69,79	75,02	78,59
Indeks Perkembangan PDRB per Kapita (2010=100)	166,51	175,78	188,62	202,76	212,41
Pertumbuhan PDRB per Kapita	11,23	5,57	7,30	7,49	4,76

Sumber: BPS Kota Tangerang, *) diolah

I.2.5.4 Inflasi

Kota Tangerang selama periode 2015-2019 cenderung dapat mengendalikan tingkat inflasi tiap tahunnya. Pada periode ini Kota Tangerang dapat mengendalikan inflasi pada posisi satu digit, bahkan tingkat inflasi dibawah 5%. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks selama Tahun 2019, berturut-turut adalah kelompok Bahan Makanan sebesar 5,58%, kelompok Sandang sebesar 4,30%, kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 3,29%, kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 1,15%, kelompok Transportasi dan Komunikasi sebesar 0,78% dan kelompok Kesehatan sebesar 20,26%. Adapun komoditas dari kelompok bahan makanan yang dominan memberikan andil inflasi di Kota Tangerang Tahun 2019 adalah kacang-kacangan. Sedangkan komoditas dari kelompok makanan jadi, minuman,



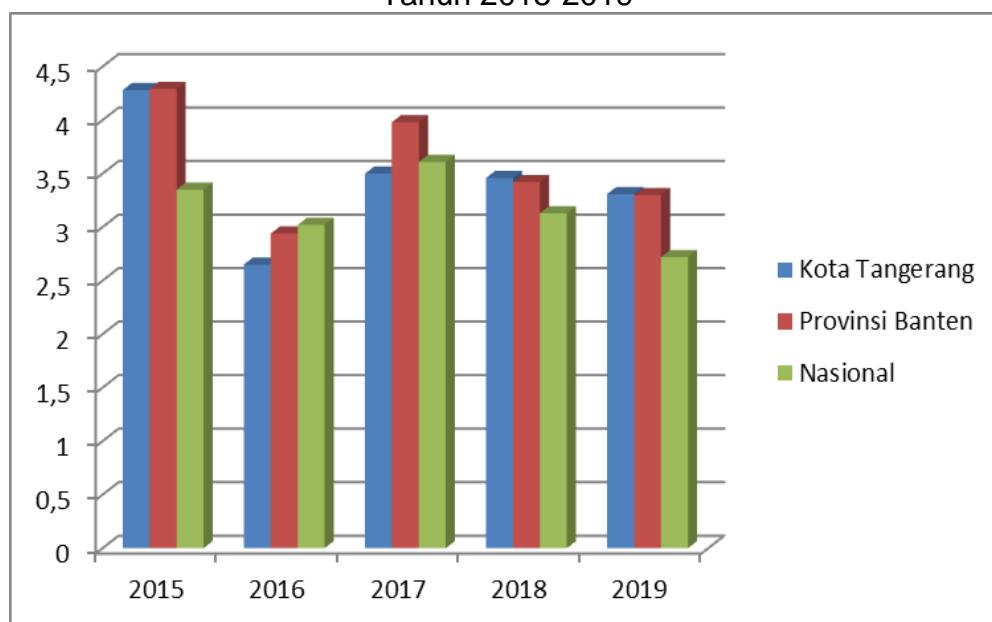
rokok dan tembakau yang dominan memberikan andil inflasi Tahun 2019 adalah tembakau dan minuman beralkohol.

Tabel 1.6
Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2015-2019

Tahun	Inflasi (%)		
	Kota Tangerang	Provinsi Banten	Nasional
2015	4,28	4,29	3,35
2016	2,65	2,94	3,02
2017	3,50	3,98	3,61
2018	3,46	3,42	3,13
2019	3,31	3,30	2,72

Sumber: BPS RI, Kota Tangerang dan Banten, 2020

Gambar 1.3
Grafik Perkembangan Inflasi Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber: BPS RI, Kota Tangerang dan Banten, 2020

I.2.6 Bidang Keuangan Daerah

Belanja daerah Pemerintah Kota Tangerang pada tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. 5.039.952.537.109,08 dengan komposisi 29,92% belanja tidak langsung dan 70,08% belanja langsung sebagaimana tabel berikut.



Tabel 1.7
Komposisi Belanja Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Komposisi	
				Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	Belanja Tidak Langsung	1.571.939.645.164,57	1.490.076.361.648,00	31,19	34,09
2	Belanja Langsung	3.468.012.891.944,51	2.881.008.403.368,00	68,81	65,91
	Jumlah	5.039.952.537.109,08	4.371.084.765.016,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020

I.2.7 Bidang Sosial Budaya

I.2.7.1 Penduduk

Jumlah Penduduk Kota Tangerang Tahun 2019 diproyeksi berjumlah 2.229.901 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,02 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki. Sedangkan komposisinya masih sama seperti tahun sebelumnya didominasi oleh penduduk usia produktif dengan rasio beban ketergantungan sebesar 38,87 atau setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung kurang lebih 39 penduduk usia non produktif.

Sebagai daerah yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara, Kota Tangerang dikatakan daerah cukup padat, setiap kilometer persegi dihuni oleh 13.552 jiwa di mana Kecamatan Ciledug merupakan kecamatan terpadat dengan penghuni 23.305 jiwa untuk setiap kilometer persegiya, dan Kecamatan Neglasari merupakan kecamatan yang paling rendah tingkat kepadatannya dengan penghuni 7.425 jiwa untuk setiap kilometer persegiya.

Tabel 1.8
Jumlah Penduduk, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Tahun 2019

No.	Kecamatan	Penduduk			Sex Ratio	Luas (Km2)	Kepadatan/ Km2
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah			
1	Ciledug	104.348	100.037	204.385	104,31	8,77	23.305
2	Larangan	105.761	102.452	208.213	103,23	9,40	22.150
3	Karang Tengah	73.192	71.997	145.189	101,66	10,47	13.867
4	Cipondoh	167.098	162.990	330.088	102,52	17,91	18.430
5	Pinang	109.777	106.600	216.377	102,98	21,59	10.022



No.	Kecamatan	Penduduk			Sex Ratio	Luas (Km2)	Kepadatan/ Km2
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah			
6	Tangerang	95.636	90.581	186.217	105,58	15,79	11.793
7	Karawaci	90.591	90.293	180.884	100,33	13,48	13.419
8	Jatiuwung	65.953	58.777	124.730	112,21	14,41	8.656
9	Cibodas	78.110	77.476	155.586	100,82	9,61	16.190
10	Periuk	77.033	73.751	150.784	104,45	9,54	15.805
11	Batu Ceper	53.411	50.237	103.648	106,32	11,58	8.951
12	Neglasari	61.880	57.520	119.400	107,58	16,08	7.425
13	Benda	54.108	50.292	104.400	107,59	5,92	17.635
Kota Tangerang		1.136.898	1.093.003	2.229.901	104,02	164,55	13.552

Sumber: BPS Kota Tangerang dan Banten (diolah)

Tabel 1.9
Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Rasio Ketergantungan
Di Kota Tangerang Tahun 2015-2019

No.	Kelompok Umur	Jumlah (jiwa)				
		2015	2016	2017	2018*)	2019*)
1	0-4	205.159	193.447	205.207	204.872	218.701
2	5-9	173.346	173.310	183.992	188.086	196.738
3	10-14	141.040	142.437	146.016	149.760	145.417
4	15-19	163.261	169.376	163.669	163.726	149.318
5	20-24	198.183	199.819	200.293	201.482	207.122
6	25-29	221.650	223.192	225.388	226.498	227.857
7	30-34	214.543	222.437	219.766	221.788	223.097
8	35-39	184.722	191.389	193.053	196.986	198.129
9	40-44	157.473	164.667	168.186	173.269	179.957
10	45-49	129.021	136.303	141.304	147.335	149.560
11	50-54	99.991	105.949	111.528	117.636	125.282
12	55-59	72.814	79.147	83.217	88.421	92.223
13	60-64	38.111	40.838	44.557	48.223	52.226
14	65-69	22.116	24.230	25.325	27.290	30.810
15	70+	25.675	27.165	28.390	29.932	33.464
	Jumlah	2.047.105	2.093.706	2.139.891	2.185.304	2.229.901
	Rasio Ketergantungan	38,34	36,57	37,97	37,84	38,87

Sumber: BPS Kota Tangerang dan Banten

*) Proyeksi Penduduk Banten 2010-2020



Tabel 1.10
Perkembangan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Tangerang

No.	Kecamatan	Jumlah (jiwa)					LPP 2010- 2019 (%)
		2015	2016	2017	2018	2019*)	
1	Ciledug	179.824	186.450	192.391	191.814	204.385	2,99
2	Larangan	189.955	194.870	198.950	202.584	208.213	2,24
3	Karang Tengah	134.589	137.510	139.810	143.529	145.189	1,88
4	Cipondoh	274.201	290.783	302.972	294.589	330.088	4,29
5	Pinang	192.061	198.354	203.868	204.849	216.377	2,99
6	Tangerang	172.665	176.397	179.335	184.142	186.217	1,87
7	Karawaci	178.989	179.891	179.914	190.942	180.884	0,27
8	Jatiuwung	121.493	117.043	124.066	129.414	124.730	0,19
9	Cibodas	151.815	153.163	153.768	161.930	155.586	0,53
10	Periuk	142.911	145.206	146.820	152.411	150.784	1,31
11	Batu Ceper	99.107	100.489	101.386	105.692	103.648	1,08
12	Neglasari	113.719	115.412	116.552	121.276	119.400	1,19
13	Benda	95.776	98.138	100.059	102.132	104.400	2,07
	Kota Tangerang	2.047.105	2.093.706	2.139.891	2.185.304	2.229.901	2,04

Sumber: BPS Kota Tangerang dan Banten

*) Proyeksi Penduduk Banten 2010-2020

Perkembangan jumlah penduduk Kota Tangerang selama periode 2015-2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada Tahun 2015 jumlah penduduk Kota Tangerang berjumlah 2.047.105 jiwa, kemudian mengalami peningkatan menjadi 2.093.706 jiwa pada Tahun 2016, atau mengalami perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,28%. Pada Tahun 2017, jumlah penduduk bertambah menjadi sebesar 2.139.891 jiwa, atau dengan laju pertumbuhan penduduk melambat menjadi 2,21%. Dan pada Tahun 2018, jumlah penduduk bertambah menjadi 2.185.304 jiwa, atau dengan laju pertumbuhan penduduk melambat menjadi 2,12%. Dan pada Tahun 2019, jumlah penduduk bertambah menjadi 2.229.901 jiwa, atau dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,04%.

I.2.7.2 Tenaga Kerja

Situasi ketenagakerjaan di Kota Tangerang selama lima tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif, walaupun tidak terjadi di semua indikator



ketenagakerjaan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), yaitu dari 64,68% pada Tahun 2015, kemudian naik menjadi 64,99% Tahun 2017, namun menurun menjadi 63,67% pada Tahun 2018 dan kembali naik menjadi 65,70% pada Tahun 2019. TPAK merupakan indikator kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi.

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kota Tangerang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2015, jumlah penduduk usia kerja di Kota Tangerang sebesar 1,53 juta orang, kemudian meningkat menjadi 1,65 juta orang pada Tahun 2018. Kondisi ini menggambarkan bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk yang siap bekerja semakin bertambah di Kota Tangerang.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Tangerang pada Tahun 2015 sebesar 91,92% dan meningkat pada Tahun 2019 menjadi 92,87%. Peningkatan laju TKK di Tahun 2019 diikuti dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu dari 8,00% pada Tahun 2015 menjadi 7,13% pada Tahun 2019.

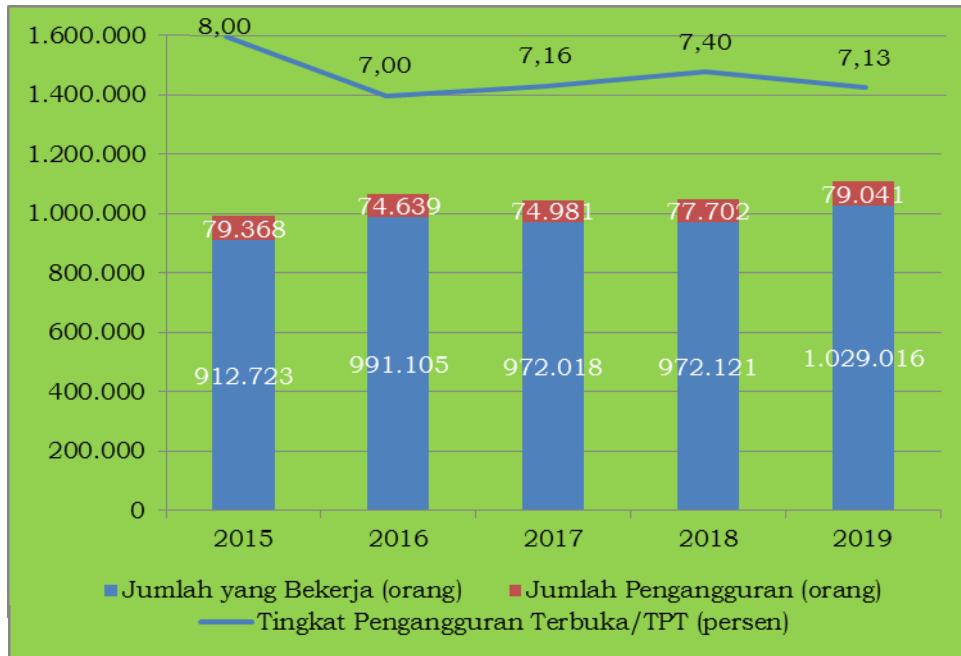
Tabel 1.11
Indikator Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Usia Kerja (orang)	1.533.913	1.584.512	1.611.064	1.648.869	1.686.540
Angkatan Kerja (orang)	992.091	1.065.744	1.046.999	1.049.823	1.108.057
Jumlah yang Bekerja (orang)	912.723	991.105	972.018	972.121	1.029.016
Jumlah Pengangguran (orang)	79.368	74.639	74.981	77.702	79.041
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (persen)	64,68	67,26	64,99	63,67	65,70
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (persen)	8,00	7,00	7,16	7,40	7,13
Tingkat Kesempatan Kerja/TKK (persen)	91,92	93,00	92,84	92,60	92,87

Sumber: BPS Banten dan Kota Tangerang



Gambar 1.4
Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Tangerang
Tahun 2015-2019

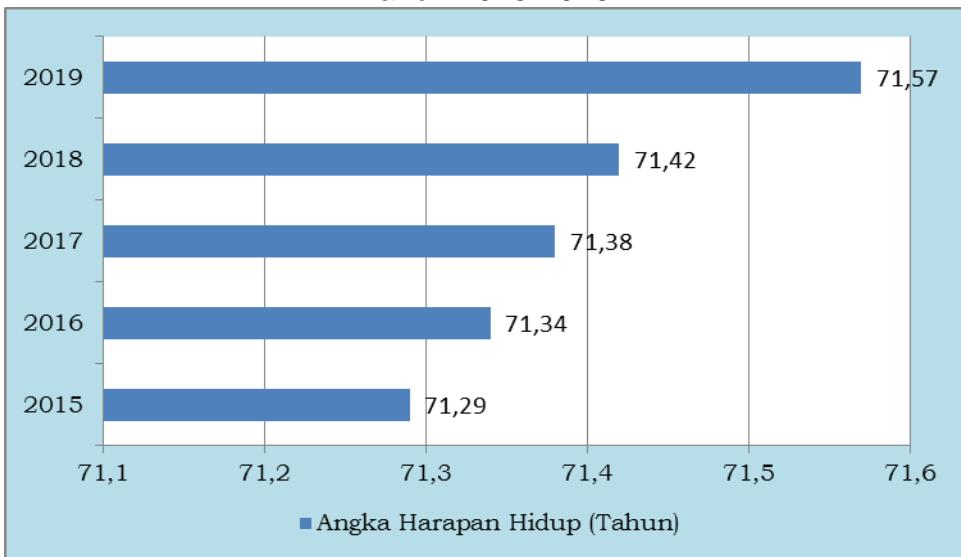


Sumber: BPS Banten dan Kota Tangerang

I.2.7.3 Kesehatan

Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari angka lama harapan hidup. Semakin tinggi angka lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi pula derajat kesehatannya.

Gambar 1.5
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Tangerang
Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Banten dan Kota Tangerang



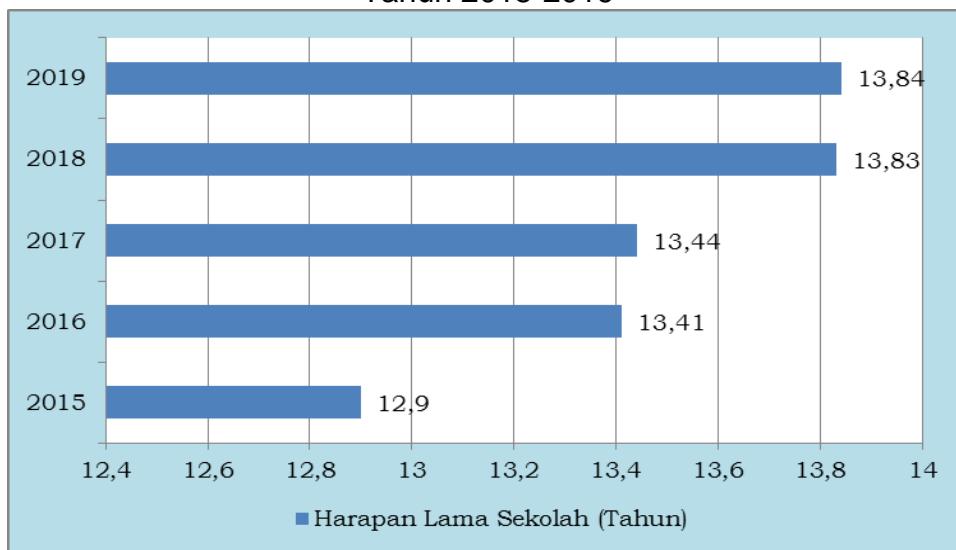
Angka Harapan Hidup penduduk Kota Tangerang pada Tahun 2015 sebesar 71,29 tahun dan pada Tahun 2019 meningkat menjadi 71,57 tahun. Hal ini berarti menunjukkan penambahan sebesar 0,28 tahun atau terjadi peningkatan sebesar 0,39%.

I.2.7.4 Pendidikan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan atau pencapaian pendidikan penduduk suatu daerah digunakan dua indikator, yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Informasi mengenai harapan lama sekolah, mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dan perluasan kesempatan dalam bidang pendidikan di suatu wilayah. Adapun rata-rata lama sekolah dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan. Semakin lama rata-rata tahun pendidikan penduduk di suatu wilayah, akan semakin tinggi pula mutu sumber daya manusianya.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Tangerang pada Tahun 2015 sebesar 12,90 tahun dan Tahun 2019 meningkat menjadi 13,84 tahun, yang artinya setiap penduduk yang berusia 7 tahun pada Tahun 2019 dapat berharap untuk bersekolah selama 13 tahun lebih, atau sampai dengan kuliah semester I.

Gambar 1.6
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Tangerang
Tahun 2015-2019

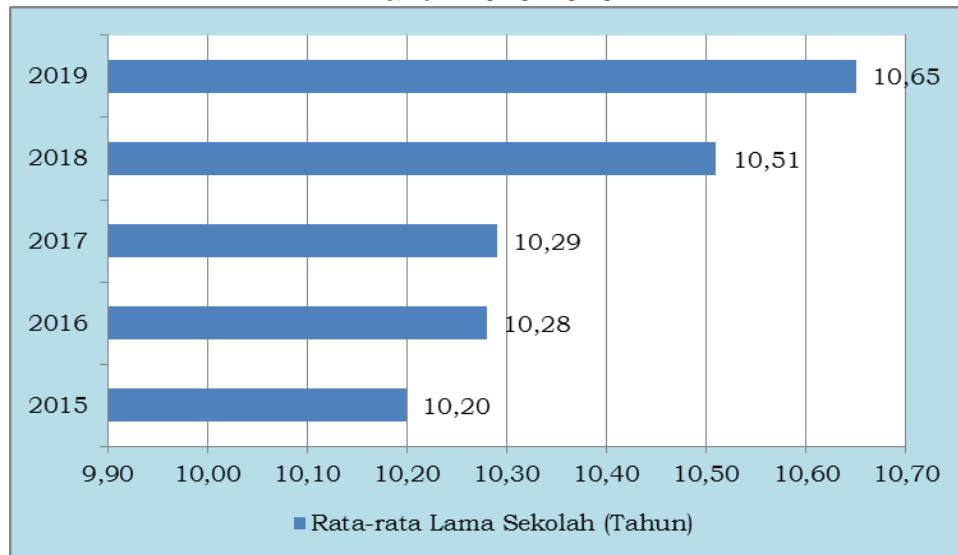


Sumber: BPS Banten dan Kota Tangerang



Rata-rata Lama Sekolah Kota Tangerang selama periode 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Peningkatannya ini jelas menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Kota Tangerang secara rata-rata telah meningkat. Dengan demikian, semakin terbuka peluang bagi penduduk Kota Tangerang untuk lebih meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraannya.

Gambar 1.7
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Tangerang
Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Banten dan Kota Tangerang

I.2.7.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah di Kota Tangerang diorientasikan untuk pembangunan manusia, dengan maksud agar semua masyarakat Kota Tangerang memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Hasil upaya tersebut dapat tergambaran didalam perolehan Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:

Tabel 1.12
Indikator IPM Kota Tangerang Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Komponen IPM						
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,29	71,34	71,38	71,42	71,57
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,90	13,41	13,44	13,83	13,84
3	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,20	10,28	10,29	10,51	10,65
4	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rp)	13.766	13.911	14.104	14.443	14.860



No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Indikator IPM						
1	Indeks Kesehatan	78,61	78,98	79,05	79,15	79,34
2	Indeks Pendidikan	69,83	71,52	71,63	73,45	73,94
3	Indeks Pengeluaran	79,90	80,22	80,64	81,37	82,24
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		76,08	76,81	77,01	77,92	78,43

Sumber: BPS (data diolah)

Perkembangan IPM Kota Tangerang selama ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada Tahun 2015 IPM Kota Tangerang sebesar 76,08 pada Tahun 2016 meningkat menjadi 76,81, pada Tahun 2017 meningkat menjadi 77,01 poin, dan pada Tahun 2018 meningkat menjadi 77,92 poin, serta pada Tahun 2019 diperkirakan meningkat lagi menjadi 78,43 poin. Hal ini berarti menunjukkan penambahan sebesar 2,35 poin atau terjadi peningkatan sebesar 3,00%.

I.3. KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI

I.3.1 Kedudukan

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kota Tangerang dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu:

I.3.1.1 Aspek Politik

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Tangerang dari aspek politik ditandai dengan program legislatif dalam membahas perubahan atas peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah.



I.3.1.2 Aspek Administrasi/Manajemen Pemerintah

Pemerintah Kota Tangerang dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik.

I.3.2 Kewenangan

Kota Tangerang sebagai daerah otonomi, kewenangannya mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Tangerang menyelenggarakan 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 5 (lima) urusan pilihan untuk menyelenggarakan pengembangan sektor unggulan, serta menyelenggarakan Unsur penunjang Urusan Pemerintahan.

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan
- 6) Sosial.



- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar:
 - 1) Tenaga Kerja;
 - 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 3) Pangan;
 - 4) Pertanahan;
 - 5) Lingkungan Hidup;
 - 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 9) Perhubungan;
 - 10) Komunikasi dan Informatika;
 - 11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - 12) Penanaman Modal;
 - 13) Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 14) Statistik;
 - 15) Persandian;
 - 16) Kebudayaan;
 - 17) Perpustakaan; dan
 - 18) Kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan:
 - 1) Pertanian;
 - 2) Pariwisata;
 - 3) Kelautan dan Perikanan;
 - 4) Perdagangan; dan
 - 5) Perindustrian.
- d. Unsur penunjang Urusan Pemerintahan
 - 1) Perencanaan;
 - 2) Keuangan;
 - 3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - 4) Penelitian dan Pengembangan.



I.3.3 Tugas Pokok

Pemerintah Kota Tangerang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar Terwujudnya Kota Tangerang Yang Sejahtera, Berakhhlakul Karimah Dan Berdaya Saing.

I.3.4 Struktur Organisasi

Kota Tangerang sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Banten, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Pada Tahun 2016 telah dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang pembentukan dan struktur organisasi serta tugas, pokok dan fungsi dari SKPD di Pemerintah Kota Tangerang. Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tersebut menjadi dasar pembentukan dan struktur organisasi, serta kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas SKPD. Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 terdiri atas:

A. Walikota dan Wakil Walikota

Kepala Daerah Kota Tangerang Periode Tahun 2019-2023 dipimpin oleh Walikota H. Arief R. Wismansyah dan Wakil Walikota H. Sachrudin.

Perangkat Daerah Kota Tangerang terdiri atas:

B. Sekretariat Daerah

C. Sekretariat DPRD

D. Inspektorat

E. Dinas Daerah, terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4) Dinas Perumahan dan Permukiman
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja



- 6) Dinas Sosial
- 7) Dinas Ketenagakerjaan
- 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 9) Dinas Ketahanan Pangan
- 10) Dinas Pertanahan
- 11) Dinas Lingkungan Hidup
- 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 13) Dinas Perhubungan
- 14) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 15) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 16) Dinas Koperasi dan UKM
- 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 18) Dinas Pemuda dan Olahraga
- 19) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 20) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

F. Badan, terdiri dari:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Badan Pengelola Keuangan Daerah
- 3) Badan Pendapatan Daerah
- 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

G. Perangkat Daerah lain, terdiri dari

- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah
- 3) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

H. Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari:

- 1) Tangerang dengan 8 Kelurahan
- 2) Jatiuwung dengan 6 Kelurahan
- 3) Batuceper dengan 7 Kelurahan
- 4) Benda dengan 5 Kelurahan
- 5) Cipondoh dengan 10 Kelurahan
- 6) Ciledug dengan 8 Kelurahan



- 7) Karawaci dengan 16 Kelurahan
- 8) Periuk dengan 5 Kelurahan
- 9) Cibodas dengan 6 Kelurahan
- 10) Neglasari dengan 7 Kelurahan
- 11) Pinang dengan 11 Kelurahan
- 12) Karang Tengah dengan 7 Kelurahan, dan
- 13) Larangan dengan 8 Kelurahan.

I.4. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

I.4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan terkait pembangunan daerah mencakup permasalahan pembangunan daerah pada aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

a. Aspek Geografi dan Demografi

Beberapa permasalahan pembangunan daerah Kota Tangerang dari aspek geografi dan demografi adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya migrasi penduduk yang masuk ke wilayah Kota Tangerang.
- Terjadinya ekspansi pemanfaatan lahan untuk permukiman yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan prasarana dan sarana serta fasilitas perkotaan.
- Turunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Kondisi topografi yang cukup landai menjadi tantangan tersendiri karena hal ini menyebabkan Kota Tangerang memiliki potensi genangan dan banjir.
- Tidak berfungsinya dengan baik sungai-sungai di wilayah Kota Tangerang sebagai badan air penerima dalam sistem drainase yang dapat menyebabkan terjadinya genangan dan banjir.



- Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal dasar pembangunan daerah Kota Tangerang jika memiliki kualitas yang memadai, namun sebaliknya apabila tidak berkualitas dapat menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu, penanganan kependudukan tidak hanya pada upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Di samping itu, jumlah penduduk yang besar juga berimplikasi pada peningkatan kebutuhan perluasan kesempatan kerja atau lapangan kerja.

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan pembangunan daerah Kota Tangerang dari aspek kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

- Keterbatasan kemampuan masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar hidup (pangan, rumah, pendidikan, kesehatan) dan mendapatkan pekerjaan serta penghasilan yang layak.
- Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dan perlunya optimalisasi koordinasi penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD.
- Belum optimalnya kualitas gizi masyarakat.
- Belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan.
- Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan.
- Masih rendahnya angka harapan lama sekolah, yaitu baru mencapai 13,83 tahun (2018), masih di bawah standar global (UNDP) yaitu 18 tahun.
- Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah, yaitu baru mencapai 10,51 tahun (2018), masih di bawah standar global (UNDP) yaitu 15 tahun.
- Relatif tingginya laju inflasi Kota Tangerang dan belum optimalnya pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat.



c. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan pembangunan daerah Kota Tangerang dari aspek pelayanan umum sebagai berikut:

- Ketersediaan fasilitas PAUD, pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs yang memadai dan terjangkau masih perlu ditingkatkan.
- Ketersediaan tenaga pendidik non formal masih terbatas.
- Penerapan RPP, KTSP, dan MBS untuk satuan pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs masih perlu ditingkatkan.
- Tingkat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal.
- Jalinan kerjasama pendidikan dengan dunia usaha/dunia industri belum optimal.
- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan belum optimal.
- Akses masyarakat terhadap tingkat pelayanan kesehatan yang bermutu perlu ditingkatkan untuk seluruh lapisan masyarakat.
- Masih beredarnya bahan-bahan berbahaya dan mudahnya memperoleh bahan-bahan berbahaya tersebut serta belum adanya regulasi dari pemerintah yang mengatur secara jelas peredaran bahan-bahan tersebut.
- Tingkat kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat belum sepenuhnya menjadi budaya hidup masyarakat, seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang:
 - a. Bahan berbahaya.
 - b. Kesehatan lingkungan.
 - c. Pemeriksaan kesehatan pra usila dan usila.
 - d. Kunjungan ibu hamil K4.
 - e. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
- Tingkat ketersediaan data dasar kesehatan masih perlu ditingkatkan.
- Belum memadainya sarana dan prasarana dinas kesehatan untuk mendukung pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- Belum semua unit Dinas Kesehatan memiliki Standar Operasional Prosedur, dan belum tersusunnya Standar Pelayanan Publik (SPP)



pada unit-unit yang memberikan pelayanan kepada publik (masyarakat).

- Belum sesuaiya kebutuhan obat dengan perencanaannya.
- Masih rendahnya tingkat pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan penggunaan obat dan bahan berbahaya
- Masih rendahnya persentase posyandu purnama & mandiri.
- Masih rendahnya persentase posyandu aktif.
- Cukup tingginya persentase balita gizi buruk.
- Masih banyaknya prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi.
- Masih tingginya prevalensi balita gizi kurang.
- Masih rendahnya persentase bayi 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif.
- Masih adanya rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan.
- Masih adanya keluarga yang belum memiliki jamban yang memenuhi syarat kesehatan.
- Tingkat prevalensi TB Paru yang relatif besar.
- Masih rendahnya persentase penemuan dan penanganan Pneumonia Balita.
- Meningkatnya Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) (per 100.000 penduduk).
- Rasio dokter umum per satuan penduduk masih dibawah standar yang telah ditetapkan
- Rasio bidan per satuan penduduk masih dibawah standar yang telah ditetapkan
- Rasio perawat per satuan penduduk masih dibawah standar yang telah ditetapkan
- Kurang memadainya kondisi sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling yang ada.
- Kurangnya kesiapan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan pada pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS).
- Belum optimalnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.



- Masih adanya kematian ibu, kematian bayi dan balita.
- Belum optimalnya cakupan pelayanan nifas.
- Rendahnya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani.
- Kurangnya pelayanan tumbuh kembang anak dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di Puskesmas.
- Kurangnya jumlah dan jenis tenaga yang dibutuhkan di RS.
- Terbatasnya sarana prasarana, alat kesehatan dan obat-obatan RS.
- Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan lingkungan, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan saluran drainase.
- Belum optimalnya upaya peningkatan pelayanan pengelolaan air minum dan air limbah.
- Masih adanya titik-titik genangan banjir.
- Belum optimalnya koordinasi lintas SKPD untuk melaksanakan kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan infrastruktur kewilayahannya.
- Belum optimalnya upaya pengembangan sistem air limbah setempat yang memadai terkendala oleh ancaman pencemaran air tanah, karena jarak sumur warga dengan septictank (>10 m) tidak memenuhi syarat.
- Belum optimalnya upaya pengembangan pelayanan air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan harus didahului oleh kegiatan pendataan, kajian dan penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum.
- Belum optimalnya upaya peningkatan ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari diperlukan kegiatan pendataan, kajian, monitoring, pemantauan dan sosialisasi.
- Belum optimalnya upaya pengembangan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU harus didahului oleh kegiatan pendataan, pemetaan dan pengadaan lahan.



- Belum optimalnya upaya peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni, terkendala oleh melambungnya harga rumah flat yang tidak terjangkau oleh MBR.
- Belum optimalnya upaya peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau, terkendala oleh harga tanah yang sangat tinggi.
- Belum optimalnya upaya pengurangan luasan permukiman kumuh harus didahului oleh kegiatan survey, perencanaan teknis dan rehabilitasi.
- Ketersediaan Jalan Kota yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota terkendala karena terbatasnya lebar damija.
- Ketersediaan jalan kota yang memudahkan masyarakat per-individu melakukan perjalanan terkendala karena terbatasnya lebar damija.
- Kapasitas sungai, resapan air, tandon air dan drainase tidak memadai.
- Jaringan drainase belum terhubung dengan optimal.
- Permasalahan kewenangan penanganan yang merupakan kewenangan pusat dan propinsi.
- Terlambatnya penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang harus mengikuti tata cara evaluasi sebagaimana diatur dengan Permendagri Nomor 28 Tahun 2008 yang membutuhkan waktu yang lama menjadikan hambatan bagi penyelesaian Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan dan Peraturan Zonasi sebagai pedoman dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang dan ijin mendirikan bangunan.
- Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh di beberapa kelurahan, hal tersebut disebabkan sulitnya lahan terutama untuk menunjang kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin (pembangunan MCK komunal dan sumur dalam) karena tidak ada biaya pengganti lahan.
- Belum optimalnya pelaksanaan program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.



- Masih kurangnya pemahaman pemilik atau pengguna bangunan melaksanakan sistem proteksi kebakaran.
- Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran belum sesuai standar kualifikasi.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban.
- Belum terjalinnya koordinasi yang intens dan terpadu antar instansi dalam penanggulangan kebakaran dan banjir.
- Belum adanya sistem komunikasi dalam upaya sosialisasi dan penyebaran informasi kebakaran dan bencana lain.
- Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda Kantramtibmas.
- Belum optimalnya pelaksanaan program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
- Masih terbatasnya sarana-prasarana pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
- Masih tingginya jumlah pelanggar Perda.
- Kurangnya aparatur personil Tramtib dan hasil pengawasan Kantramtibmas di wilayah.
- Luasnya jangkauan wilayah penertiban yang kurang didukung oleh sarana-prasarana penunjang kegiatan.
- Masih maraknya penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di kalangan Pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum lainnya.
- Berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, serta masih banyaknya pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan.
- Belum jelasnya konsep pengawasan dalam penyusunan peraturan dan pelayanan perizinan, serta pendataan yang terkait dengan pendidikan ideologi asing, pengawasan orang asing, dan pengendalian organisasi sosial politik masyarakat.



- Kurangnya sosialisasi/penyuluhan tentang peraturan daerah di Kota Tangerang.
- Belum optimalnya tingkat dan cakupan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan PMKS.
- Pengentasan kemiskinan belum tuntas dan belum fokus sesuai dengan struktur permasalahan masyarakat miskin.
- Belum optimalnya upaya pemanfaatan sumberdaya untuk peningkatan kesejahteraan sosial dalam masyarakat dalam pemberdayaan.
- Belum optimalnya pelayanan panti yang sejalan dengan Standar Mutu Panti Sosial.
- Belum tersedianya panti rehabilitasi sosial milik pemerintah daerah.
- Belum optimalnya pembinaan terhadap Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).
- Belum optimalnya pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial.
- Belum optimalnya pemberian bantuan sosial korban bencana pada masa tanggap darurat.
- Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam melakukan evakuasi korban bencana.
- Kualitas dan kompetensi tenaga kerja belum memadai dengan spesifikasi kebutuhan pembangunan dan dunia kerja.
- Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi.
- Terbatasnya akses dan daya saing tenaga kerja lokal terhadap kesempatan kerja.
- Terbatasnya ketersediaan lapangan kerja.
- Rawan perselisihan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.
- Masih rendahnya jaminan kesejahteraan bagi tenaga kerja.
- Masih terbatasnya lapangan kerja formal.
- Masih adanya kasus unjuk rasa/mogok kerja.



- Terdapatnya perusahaan yang melanggar peraturan perundang undangan ketenagakerjaan.
- Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan terhadap kekerasan.
- Belum optimalnya upaya perlindungan anak terhadap kekerasan dan eksplorasi kerja.
- Adanya masa transisi perubahan peraturan pengadaan tanah dari aturan lama ke aturan baru.
- Masih tingginya tingkat pencemaran air sungai dan situ/danau.
- Masih tingginya tingkat pencemaran air tanah.
- Masih tingginya tingkat pencemaran udara dan kebisingan.
- Belum optimalnya upaya pelayanan pengelolaan persampahan.
- Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
- Masih rendahnya tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap pentingnya Dokumen/Ijin lingkungan, (Air, Udara dan Tanah).
- Masih sdanya pengelolaan air limbah (IPAL) dari sektor industri dan rumah tangga yang masih melebihi BML.
- Adanya Pengelolaan limbah sumber tidak Bergerak (cerobong) dari sektor industri dan Kendaraan yang melintas (Sumber Bergerak) yang masih melebihi BML.
- Luasan lahan dan/atau tanah kritis dan tanah untuk produksi biomassa belum ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya.
- Adanya usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengelolaan limbah B3.
- Masih kurangnya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.
- Masih kurangnya sistem penanganan sampah di perkotaan.
- Masih kurangnya lokasi RTH yang tersedia di Kota Tangerang.
- Kurang optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dikarenakan keterbatasan Pengembangan Aplikasi



SIAK dan kendala jaringan komunikasi data serta belum optimalnya pengembangan aplikasi SIAK.

- Susahnya merevisi hasil pencetakan e-KTP dan KK serta terlambatnya pendistribusian KTP elektronik dari Kementerian Dalam Negeri.
- Masih adanya penduduk wajib KTP yang belum terekam dan tercetak serta terlambatnya pendistribusian KTP elektronik dari Kementerian Dalam Negeri.
- Belum optimalnya jaringan internet dari Disdukcapil, kurangnya sarana prasarana dan SDM aparatur yang menangani administrasi kependudukan.
- Belum terkoneksi jaringan SIAK secara Nasional.
- Masih terbatasnya penyediaan Sarana-Prasarana yang dimiliki yang mendukung pelayanan dinas.
- Kurangnya implementasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang dokumen kependudukan.
- Kurangnya kompetensi dan jumlah SDM aparatur pada Dinas.
- Peran serta masyarakat dalam pembangunan belum diberdayakan secara optimal.
- Terbatasnya fungsi kelembagaan masyarakat dalam rangka peran serta pembangunan.
- Belum optimalnya koordinasi lintas SKPD untuk melaksanakan pembinaan sosial kemasyarakatan.
- Belum optimalnya upaya pemberdayaan kapasitas dan potensi ekonomi keluarga untuk mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga.
- Masih terbatasnya akses keluarga pra sejahtera terhadap sistem ekonomi formal.
- Masih rendahnya kepesertaan akseptor KB Metode Jangka Panjang.
- Terbatasnya tenaga penyuluhan KB di lapangan.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga sejahtera.



- Belum optimalnya penggunaan data miskin keluarga sebagai sasaran program.
- Makin meningkatnya kepadatan lalu lintas yang menimbulkan masih terjadinya titik rawan kemacetan di beberapa bagian wilayah kota;
- Masih rendahnya kualitas layanan angkutan umum yang belum mampu mengakomodir kebutuhan mobilitas masyarakat menyebabkan kecenderungan kegiatan transportasi masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan sarana transportasi pribadi dibanding dengan angkutan umum;
- Masih rendahnya tingkat kebersihan di lingkungan terminal;
- Belum optimalnya pemanfaatan terminal penumpang umum sebagai titik transfer moda angkutan yang disebabkan oleh minimnya fasilitas penunjang terminal yang tersedia;
- Belum memadainya kapasitas fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mendukung keselamatan, keteraturan, ketertiban lalu lintas orang dan kendaraan;
- Masih terbatasnya kapasitas alat uji kendaraan bermotor;
- Masih kurangnya titik PJU di sepanjang jalan di Kota Tangerang.
- Belum optimalnya upaya pelayanan kepada masyarakat terkait perkembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang menuntut adannya sistem yang cepat, tepat dan mudah diakses.
- Belum memadainya kemampuan SDM dan kelembagaan UMKM;
- Kualitas produk UMKM masih perlu ditingkatkan agar lebih kompetitif;
- Terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan;
- Terbatasnya akses UMKM terhadap pasar;
- Kemampuan SDM dan kelembagaan koperasi belum memadai;
- Pola kemitraan antara UMKM dengan usaha besar belum optimal;
- Peran dan kapasitas usaha kecil dan menengah (UKM) dan koperasi belum optimal;
- Belum memadainya akses UKMK terhadap sumber daya produktif.
- Pelayanan dan regulasi penanaman modal masih perlu ditingkatkan.



- Masih terbatasnya ketersediaan anggaran untuk meningkatkan peran serta kepemudaan;
- Masih rendahnya peranserta pemuda dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan narkoba, dan HIV/AIDS;
- Belum terpenuhinya standar mutu organisasi olahraga dari berbagai organisasi olahraga daerah;
- Belum optimalnya prestasi cabang olahraga;
- Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga;
- Masih adanya pemuda dari keluarga miskin yang menganggur atau belum memiliki pekerjaan layak;
- Belum optimalnya upaya penyediaan sarana pemuda dan olah raga bagi seluruh masyarakat di kota Tangerang hingga tingkat kelurahan;
- Belum tersedianya mess atlit dan sport centre untuk melakukan pemusatan latihan jangka panjang terhadap atlit dalam mengikuti kejuaraan tingkat provinsi maupun nasional.
- Ketersediaan dan kelengkapan data statistik yang mutakhir belum memadai;
- Belum idealnya laporan/publikasi data statistik;
- Minimnya aparatur yang memiliki latar belakang kompetensi, pengalaman, dan pendidikan di bidang statistika;
- Masih tersebarluasnya berbagai hasil data/informasi statistik dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan inovasi daerah di masing-masing SKPD.
- Belum optimalnya upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
- Masih rendahnya kerjasama pengelolaan kekayaan budaya;
- Belum optimalnya upaya inventarisasi yang baik terhadap lembaga adat dan budaya;
- Belum optimalnya upaya penyelenggaraan festival seni dan budaya;
- Masih minimnya sarana dan prasarana untuk pementasan seni dan budaya.
- Belum tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat secara menyeluruh sehingga belum bisa menjadi budaya hidup masyarakat;



- Belum optimalnya pelayanan perpustakaan daerah;
- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas koleksi bahan pustaka;
- Belum optimalnya upaya pengembangan koleksi bahan pustaka;
- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membaca.
- Arsip SKPD belum tertata dengan baik karena kurang optimalnya pengolahan dan penataan arsip di setiap SKPD;
- Pengelolaan arsip di SKPD belum menggunakan sistem informasi kearsipan daerah yang terintegrasi dan terstandarisasi;
- Depo Arsip di Kantor Arsip Daerah dan setiap SKPD belum memenuhi standar;
- Rendahnya minat masyarakat dalam budidaya perikanan;
- Nilai tambah usaha perikanan budidaya lebih rendah dari aktivitas perkotaan menyebabkan alih profesi dari petani perikanan ke aktivitas perkotaan;
- Keterbatasan lahan untuk budidaya perikanan;
- Penurunan kualitas sumber daya air yang mengakibatkan menurunnya kualitas dan produktivitas hasil perikanan budidaya.
- Belum optimalnya upaya pengembangan objek dan daya tarik wisata daerah;
- Belum optimalnya upaya pengembangan pemasaran pariwisata daerah;
- Kurangnya pengembangan destinasi pariwisata;
- Kebijakan pengelolaan lahan yang belum jelas, serta rendahnya keikutsertaan swasta dalam pengembangan kepariwisataan daerah.
- Semakin sempitnya areal lahan pertanian garapan petani sehingga nilai ekonomis kegiatan pertanian semakin menurun;
- Kepemilikan lahan pertanian umumnya tidak dikuasai oleh pelaku usaha pertanian sehingga tidak ada jaminan untuk mempertahankan kegiatan budidaya pertanian;
- Masih kurangnya minat masyarakat dalam budidaya tanaman;
- Terbatasnya jumlah penyuluhan dalam mendampingi kegiatan pertanian di masyarakat;



- Semakin berkurangnya lahan pertanian;
- Semakin terbatasnya lahan untuk budidaya ternak;
- Masih rendahnya produksi pertanian, peternakan, dan perikanan;
- Masih rendahnya kualitas produk pertanian, peternakan, dan perikanan.
- Belum optimalnya upaya pembinaan pedagang kaki lima dan pedagang asongan;
- Belum optimalnya perlindungan konsumen karena terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan;
- Belum optimalnya upaya peningkatan usaha Mikro bagi penduduk miskin;
- Semakin tingginya tingkat persaingan iklim investasi;
- Semakin kompetitifnya tingkat persaingan usaha dan kualitas produk perekonomian;
- Semakin meningkatnya persaingan perdagangan;
- Rendahnya industri yang berwawasan lingkungan;
- Belum memadainya kualitas dan kapasitas SDM dan kelembagaan IKM;
- Terbatasnya akses IKM pada permodalan;
- Daya saing produk IKM yang kurang kompetitif di pasar regional dan nasional;
- Kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar belum terjalin dengan baik;
- Terbatasnya akses IKM terhadap pasar;
- Penyerapan aspirasi masyarakat dalam proses Musrenbang sangat terbatas;
- Sistem informasi tentang perencanaan dan evaluasi pembangunan belum optimal;
- Mekanisme pengumpulan data dari SKPD yang belum optimal;
- Koordinasi lintas bidang internal Bappeda yang belum maksimal;
- Kompetensi aparatur perencana yang belum merata;



- Sistem perencanaan-penganggaran, pengendalian, dan evaluasi-pelaporan sebagian masih manual sehingga belum bisa terintegrasi dalam satu sistem;
- Belum lengkapnya peraturan, SOP yang digunakan sebagai standar acuan perencanaan, penganggaran dan evaluasi;
- Tingkat akurasi data perencanaan, pelaporan dan evaluasi yang kurang optimal;
- Kurangnya pemahaman aparatur perencanaan di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta masih kurangnya pemahaman masyarakat secara menyeluruh terhadap perencanaan pembangunan. Oleh sebab itu usulan lebih banyak bersifat fisik serta kurang menyentuh non fisik;

d. Aspek Daya Saing Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kota Tangerang dari aspek daya saing daerah sebagai berikut:

- Tingkat kemandirian daerah Kota Tangerang relatif masih rendah.
- Volume lalu lintas melebihi kapasitas, yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi dan rendahnya pertumbuhan jalan.
- Geometri jalan (layout simpang tidak memadai).
- Hambatan samping, seperti banyaknya akses keluar masuk lahan di sisi jalan, banyaknya PKL yang berjualan di bahu jalan atau bahkan di badan jalan, angkutan umum yang berhenti di badan jalan mencari penumpang, pejalan kaki menyeberang tidak pada tempatnya, dan sebagainya.
- Adanya bandara internasional Soekarno Hatta menyebabkan banyak arus perjalanan darat di Kota Tangerang dari dan ke bandara merupakan lalu lintas menerus.
- Konflik lalu lintas, seperti perlintasan kereta api sebidang, jarak antar persimpangan terlalu pendek, banyak tercampurnya lalu lintas menerus dan lalu lintas lokal.



- Kualitas sumber daya manusia Kota Tangerang masih tergolong rendah dengan rasio lulusan S1/S2/S3 baru mencapai 8,24%.

I.4.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan permasalahan di atas, berikut diidentifikasi berbagai isu strategis pembangunan Kota Tangerang Tahun 2019-2023 beserta permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Tabel 1.13
Isu Strategis Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2019-2023

Isu Strategis/Sub Isu Strategis		Permasalahan			
		Permasalahan Pokok		Permasalahan	
1	Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.1	Pendidikan				
	1.1.1	Akses, kualitas dan daya saing pendidikan yang belum memadai	1.1.1.1	Akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan SMP/MTs yang berkualitas belum terpenuhi sepenuhnya	1 Daya tampung SMP/MTs/Sederajat belum memadai
			1.1.1.2	Kualitas pendidikan masyarakat belum mendukung daya saing SDM masyarakat	1 Kualitas sarana pendidikan (PAUD/TK/RA; SD/MI; SMP/MTs) belum sepenuhnya memadai, layak dan sesuai dengan standar 2 Tingkat kompetensi pendidik belum sepenuhnya sesuai standar ideal 3 Tingkat pelayanan pengelolaan pendidikan (manajemen, kurikulum) belum memadai 4 Pendidikan non formal belum optimal
	1.1.2	Pendidikan karakter akhlak mulia dan budaya lokal belum optimal	1.1.2.1	Kurikulum pendidikan karakter dan budaya lokal belum dikembangkan dan diterapkan secara optimal	1 Kurikulum pendidikan karakter (akhlak mulia) belum dikembangkan secara memadai



Isu Strategis/Sub Isu Strategis		Permasalahan				
		Permasalahan Pokok		Permasalahan		Akar (Penyebab) Permasalahan
		1.1.3	Budaya gemar membaca masyarakat belum tumbuh dengan baik	1.1.3.1	Cakupan literasi dan gemar membaca masyarakat belum memadai	1 Kapasitas pelayanan perpustakaan belum memadai 2 Kesadaran masyarakat untuk membaca belum maksimal
1.2	Kesehatan	1.2.1	Derajat kesehatan yang belum memadai	1.2.1.1	Kualitas gizi masyarakat belum sepenuhnya baik	1 Perilaku hidup masyarakat yang sadar gizi belum tumbuh dengan baik 2 Edukasi gizi seimbang kepada masyarakat belum maksimal
				1.2.1.2	Kesehatan lingkungan belum memadai	1 Perilaku pola hidup masyarakat yang sadar sehat belum tumbuh dengan baik 2 Fasilitas sanitasi lingkungan permukiman belum memadai
				1.2.1.3	Kematian ibu melahirkan masih terjadi	1 Kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan ibu melahirkan belum maksimal 2 Peran posyandu belum optimal
				1.2.1.4	Pelayanan kesehatan belum optimal	1 Daya tampung fasilitas kesehatan belum memadai 2 Ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan belum memadai
				1.2.1.5	Pemasyarakatan olahraga masyarakat belum optimal	1 Keterbatasan fasilitas olahraga 2 Gerakan pemasyarakatan olahraga belum optimal
1.3	Kemiskinan	1.3.1	Jumlah masyarakat miskin masih cukup tinggi	1.3.1.1	Pemberdayaan masyarakat secara terintegrasi belum optimal dilakukan	1 Akses terhadap perumahan yang layak huni terbatas 2 Akses terhadap pemenuhan kebutuhan pangan pokok terbatas 3 Akses terhadap lapangan kerja terbatas 4 Akses status kepemilikan aset belum memadai



Isu Strategis/Sub Isu Strategis		Permasalahan			Akar (Penyebab) Permasalahan
		Permasalahan Pokok	Permasalahan		
					5 Aktivitas usaha ekonomi mikro belum berkembang dengan baik
					6 Akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas yang terbatas
					7 Implementasi program penanggulangan kemiskinan (PKH, KUBE, JKN KIS, KIP, KS, dll) belum optimal berjalan
		1.3.1.2 Data/informasi kemiskinan belum memadai		1 Pendataan dan verifikasi masyarakat miskin belum optimal	
		1.3.1.2 Data/informasi kemiskinan belum memadai		2 Kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan memverifikasi belum maksimal	
	1.3.2 Perlindungan dan pemberdayaan PMKS yang belum optimal	1.3.2.1 Perlindungan PMKS belum sepenuhnya menjangkau keseluruhan PMKS yang ada		1 Ketersediaan data/informasi yang terkini terkait PMKS belum memadai	
	1.3.2 Perlindungan dan pemberdayaan PMKS yang belum optimal	1.3.2.1 Perlindungan PMKS belum sepenuhnya menjangkau keseluruhan PMKS yang ada		2 Fasilitas pelayanan perlindungan sosial PMKS belum memadai	
	1.3.2 Perlindungan dan pemberdayaan PMKS yang belum optimal	1.3.2.2 Pemberdayaan PMKS belum maksimal		1 Keterbatasan SDM pengelola	
	1.3.2 Perlindungan dan pemberdayaan PMKS yang belum optimal	1.3.2.2 Pemberdayaan PMKS belum maksimal		2 Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap PMKS belum maksimal	
	1.3.2 Perlindungan dan pemberdayaan PMKS yang belum optimal	1.3.2.3 Optimalisasi potensi sumber daya dan tenaga sukarelawan kesejahteraan sosial (TSKS) belum optimal		1 Keterbatasan jumlah TSKS	
	1.3.2 Perlindungan dan pemberdayaan PMKS yang belum optimal	1.3.2.3 Optimalisasi potensi sumber daya dan tenaga sukarelawan kesejahteraan sosial (TSKS) belum optimal		2 Fasilitasi TSKS belum memadai	
	1.3.3 Stabilitas ketersediaan pangan yang berkualitas belum memadai	1.3.3.1 Pengelolaan pangan belum optimal		1 Pengawasan pengendalian pangan belum optimal	
	1.3.3 Stabilitas ketersediaan pangan yang berkualitas belum memadai	1.3.3.1 Pengelolaan pangan belum optimal		2 Manajemen logistik pangan strategis (pokok) belum memadai	
	1.3.3 Stabilitas ketersediaan pangan yang berkualitas belum memadai	1.3.3.1 Pengelolaan pangan belum optimal		3 Kerjasama penyediaan pangan dengan daerah penghasil pangan belum optimal	



Isu Strategis/Sub Isu Strategis		Permasalahan			Akar (Penyebab) Permasalahan
		Permasalahan Pokok	Permasalahan		
			1.3.3.2 Ketersediaan lahan pertanian dan budidaya perikanan yang terbatas sehingga mengurangi dukungan sektor pertanian dan perikanan terhadap pasokan pangan	1 2	Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Penegakan regulasi belum maksimal
			1.3.3.3 Diversifikasi pangan non beras belum memadai	1	Pengembangan pangan lokal non beras belum dibudayakan
1.4	Pengangguran				
1.4.1	Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas dan kesempatan berusaha yang belum memadai	1.4.1.1 Pengembangan sektor ekonomi padat karya belum tumbuh secara optimal	1.4.1.1.1 Ketersediaan fasilitas pendidikan ketenagakerjaan belum memadai	1	Belum adanya insentif usaha padat karya
			1.4.1.1.2 Keterbatasan kapasitas SDM, manajemen, modal dan pemasaran pelaku wirausaha baru	2	Kesempatan berusaha (wirausaha) belum berkembang
			1.4.1.1.3 Edukasi dan pendampingan calon wirausaha baru belum maksimal dan berkelanjutan	3	Belum adanya insentif pengembangan wirausaha baru
		1.4.2.1 Kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang belum memadai	1.4.2.1.1 Keterbatasan skill/kemampuan calon tenaga kerja/tenaga kerja yang ada	1	Kualitas calon dan tenaga kerja belum sesuai yang diharapkan para pelaku usaha
			1.4.2.1.2 Ketersediaan fasilitas pendidikan ketenagakerjaan belum memadai	2	Ketersediaan fasilitas pendidikan ketenagakerjaan belum memadai
			1.4.2.1.3 Keterbatasan instruktur pelatihan tenaga kerja yang kompeten	3	Keterbatasan instruktur pelatihan tenaga kerja yang kompeten
		1.4.2.2 Produktivitas tenaga kerja belum berdaya saing	1.4.2.2.1 Keterbatasan skill/kemampuan tenaga kerja yang ada	1	Produktivitas tenaga kerja belum berdaya saing
			1.4.2.2.2 Budaya kerja produktif belum tumbuh maksimal	2	Keterbatasan skill/kemampuan tenaga kerja yang ada



Isu Strategis/Sub Isu Strategis	Permasalahan				
	Permasalahan Pokok	Permasalahan		Akar (Penyebab) Permasalahan	
1.5 Pelayanan Publik					
1.5.a Pelayanan Administratif					
	1.5.1 Pelayanan pertanahan belum memadai	1.5.1.1 Belum semua asset milik pemda bersertifikat	1	Data aset milik pemda belum terupdate dan terintegrasi dengan baik	
		1.5.1.2 Tingkat pengadaan lahan untuk pembangunan belum memadai	1	Keterbatasan ketersediaan lahan yang dapat diadakan	
		1.5.1.2 Tingkat pengadaan lahan untuk pembangunan belum memadai	2	Koordinasi kebutuhan lahan untuk pembangunan dengan OPD pengguna belum berjalan optimal	
		1.5.1.3 Rasio tanah bersertifikat masyarakat masih belum memadai	1	Fasilitasi sertifikasi tanah milik masyarakat khususnya masyarakat miskin belum memadai	
	1.5.2 Pelayanan administrasi kependudukan belum optimal	1.5.2.1 Pelayanan pencetakan E-KTP menunggu pemerintah pusat	1	Partisipasi aktif masyarakat belum maksimal	
		1.5.2.1 Pelayanan pencetakan E-KTP menunggu pemerintah pusat	2	Pola pelayanan masih belum optimal	
		1.5.2.2 Pelayanan Kartu Keluarga, Akte Lahir, Akte Kematian dan Akte Nikah belum terintegrasi dengan baik	1	Partisipasi aktif masyarakat belum maksimal	
		1.5.2.2 Pelayanan Kartu Keluarga, Akte Lahir, Akte Kematian dan Akte Nikah belum terintegrasi dengan baik	2	Pola pelayanan masih belum optimal	
	1.5.3 Pelayanan komunikasi dan informatika belum optimal	1.5.3.1 Integrasi pelayanan publik online belum optimal	1	Ketersediaan infrastruktur data center, layanan internet/intranet, standarisasi dan integrasi aplikasi sistem informasi pelayanan publik dan pemerintahan belum memadai	
	1.5.4 Pelayanan statistik belum optimal	1.5.4.1 Ketersediaan data yang terkini dan tepat waktu belum memadai	1	Keterbatasan kapasitas SDM	
		1.5.4.1 Ketersediaan data yang terkini dan tepat waktu belum memadai	2	Pendataan belum optimal	
	1.5.5 Pendayagunaan persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal	1.5.5.1 Belum optimalnya peningkatan upaya persandian dalam mengamankan informasi pemerintah daerah	1	Keterbatasan kapasitas SDM dan teknologi persandian	



Isu Strategis/Sub Isu Strategis		Permasalahan			
		Permasalahan Pokok	Permasalahan		Akar (Penyebab) Permasalahan
	1.5.6	Pelayanan kearsipan belum optimal	1.5.6.1	Kapasitas dan kualitas pendukung kearsipan belum memadai	1 Keterbatasan SDM arsiparis yang berkualitas
					2 Kemampuan berarsip yang baku belum optimal
					3 Keterbatasan sarana pendukung arsip
	1.5.7	Kualitas perencanaan pembangunan belum optimal	1.5.7.1	Ketersediaan SDM perencana yang berkualitas belum memadai	1 Pelatihan perencanaan belum memadai
					1 Pemahaman perencanaan bagi aparatur dan masyarakat belum memadai
					1 Mekanisme musrenbang bersifat formalitas
	1.5.8	Kapasitas potensi keuangan daerah belum dioptimalkan	1.5.8.1	Pendapatan daerah belum optimal	1 Pendapatan daerah belum menjangkau keseluruhan potensi yang ada
					2 Perusahaan Daerah belum dapat memberikan kontribusi yang optimal
					3 Pendayagunaan aset belum optimal
					4 Kurang optimalnya kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan swasta dan BUMN yang dapat meningkatkan pendapatan Daerah
					1 Perlunya menambah usaha dalam bentuk perusahaan daerah sesuai dengan perkembangan dunia usaha di Kota Tangerang
	1.5.9	Kinerja aparatur belum optimal	1.5.9.1	Kapasitas dan kompetensi aparatur belum maksimal	2 Kontribusi peran Bandara Soeta untuk dapat menambah pendapatan daerah belum optimal
					1 Pelatihan aparatur berbasis kompetensi belum memadai



Isu Strategis/Sub Isu Strategis		Permasalahan			Akar (Penyebab) Permasalahan
		Permasalahan Pokok	Permasalahan		
					2 Keterbatasan kualifikasi teknis aparatur
		1.5.9.2	Budaya kerja yang berintegritas dan profesional masih perlu ditingkatkan terus menerus	1 Implementasi aturan reward dan punishment belum optimal	1
		1.5.10	Dukungan penelitian berbasis inovasi pembangunan belum memadai	1.5.10.1 Kemampuan adaptasi IPTEK dan inovasi masyarakat belum berkembang dengan baik	2 Pembinaan orientasi budaya kerja yang produktif belum memadai
		1.5.11	Kualitas pengawasan belum optimal	1.5.11.1 Perumusan tujuan pengawasan dan penetapan area audit belum mencerminkan tujuan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah	1 Edukasi IPTEK dan inovasi kepada masyarakat belum memadai
				1.5.11.2 Penetapan prioritas audit dan identifikasi sumber daya belum memiliki dasar pertimbangan yang memadai	2 Keterbatasan media/fasilitas pengembangan IPTEK dan inovasi
				1.5.11.3 Tenaga auditor masih kurang memadai	3 Keterbatasan SDM pengembangan IPTEK/inovasi
				1.5.11.4 Pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan belum optimal	1 belum fokusnya pengawasan pada aspek-aspek penting pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan APBD, pelaksanaan APBD, serta pertanggungjawaban & pengendalian APBD
					1 kurangnya pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri terhadap kebijakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang mengacu kepada kebijakan pengawasan yang ditetapkan
					1 perlu penambahan auditor
					2 peningkatan kapasitas auditor dengan mengikuti diklat sertifikasi, diklat keahlian khusus, dan diklat substansi teknis lainnya
					1 kurangnya data yang dibutuhkan



Isu Strategis/Sub Isu Strategis		Permasalahan				Akar (Penyebab) Permasalahan
		Permasalahan Pokok		Permasalahan		
						2 Updating data yang kurang tepat waktu untuk digunakan
		1.5.12	Pelayanan PATEN Kecamatan belum optimal			
1.5.b	Pelayanan Regulasi					
		1.5.13	Pelayanan regulasi belum optimal	1.5.13.1	Pengembangan regulasi (peraturan daerah dan peraturan kepala daerah) yang mendukung pembangunan perlu ditingkatkan	
				1.5.13.2	Penegakan regulasi (peraturan daerah dan peraturan kepala daerah) belum optimal	
				1.5.13.3	Evaluasi regulasi (peraturan daerah dan peraturan kepala daerah) yang menghambat pembangunan belum optimal	
1.5.c	Pelayanan Jasa			1.5.13.4	Pengembangan regulasi SOP pelayanan publik belum optimal	
				1.5.14.1	Kapasitas fasilitas dan SDM pemadam kebakaran belum memadai	1 Ketersediaan fasilitas pemadam kebakaran belum memadai
		1.5.14	Penanggulangan bencana kebakaran belum optimal			2 Kapasitas SDM pemadam kebakaran yang bersertifikat belum memadai
2	Daya Saing Infrastruktur Kota			1.5.14.2	Potensi Instalasi listrik rumah tangga belum sepeuhnya memenuhi standar keselamatan bangunan	1 Instalasi listrik rumah tangga belum sepeuhnya memenuhi standar keselamatan bangunan
	2.1 Kemacetan dan Pelayanan Transportasi yang Handal					



Isu Strategis/Sub Isu Strategis		Permasalahan			
		Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar (Penyebab) Permasalahan	
2.1	2.1.1	Penanganan kemacetan yang belum teratasi	2.1.1.1 Ketersediaan prasarana dan simpul transportasi yang berkualitas belum memadai	1 Ketersediaan jalan yang belum memadai 2 Masih banyaknya persimpangan jalan sebidang 3 Tingkat ketersediaan lahan parkir yang belum memadai	1 Ketersediaan jalan yang belum memadai 2 Masih banyaknya persimpangan jalan sebidang 3 Tingkat ketersediaan lahan parkir yang belum memadai
			2.1.1.2 Budaya tertib berlalu lintas pengguna jalan masih rendah	1 Budaya tertib berlalu lintas pengguna jalan belum memadai 2 Penegakan tertib berlalu lintas belum optimal	1 Budaya tertib berlalu lintas pengguna jalan belum memadai 2 Penegakan tertib berlalu lintas belum optimal
			2.1.1.3 Pelanggaran penggunaan badan jalan	1 Penggunaan sebagian badan jalan untuk aktivitas yang tidak sesuai peruntukannya sehingga mempersempit kapasitas jalan 2 Penegakan pelanggaran belum optimal	1 Penggunaan sebagian badan jalan untuk aktivitas yang tidak sesuai peruntukannya sehingga mempersempit kapasitas jalan 2 Penegakan pelanggaran belum optimal
	2.1.2	Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dan handal belum memadai	2.1.2.1 Ketersediaan sarana angkutan umum belum memadai dan terintegrasi dengan baik	1 Ketersediaan angkutan umum yang belum memadai 2 Integrasi antar moda angkutan umum yang belum bertata dengan baik	1 Ketersediaan angkutan umum yang belum memadai 2 Integrasi antar moda angkutan umum yang belum bertata dengan baik
2.2	Banjir dan Genangan	Banjir dan genangan yang masih terjadi	2.2.1.1 Kapasitas jaringan drainase dan kualitas sumber daya air yang belum memadai	1 Ketersediaan dan kapasitas jaringan drainase belum memadai 2 Kondisi sungai, situs yang semakin kritis	1 Ketersediaan dan kapasitas jaringan drainase belum memadai 2 Kondisi sungai, situs yang semakin kritis
			2.2.1.2 Ketersediaan media penyerap air hujan yang terbatas	1 Ketersediaan tandon air (embung) penampung banjir belum memadai 2 Ketersediaan sumur resapan air belum memadai	1 Ketersediaan tandon air (embung) penampung banjir belum memadai 2 Ketersediaan sumur resapan air belum memadai
			2.2.1.3 Pelanggaran penggunaan sempadan sungai,	1 Pelanggaran penggunaan sempadan sungai dan	



Isu Strategis/Sub Isu Strategis		Permasalahan			
		Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar (Penyebab) Permasalahan	
			badan drainase serta kesadaran masyarakat akan kebersihan yang cukup rendah		drainase
				2	Penyumbatan sampah pada jaringan drainase akibat perilaku masyarakat yang belum sadar kebersihan
				3	Penegakan pelanggaran belum optimal
2.3	Permukiman Kumuh, Layak Huni Dan Terjangkau				
	2.3.1	Permukiman kumuh yang belum seluruhnya ditata	2.3.1.1	Keberadaan rumah tidak layak huni serta dukungan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masih belum memadai	1 Belum semua rumah tidak layak huni dibedah
				2	Sarana prasana lingkungan permukiman kurang dipelihara
			2.3.1.2	Aspek sosial ekonomi masyarakat penghuni kawasan kumuh belum diberdayakan secara optimal	1 Pemberdayaan ekonomi rumah tangga masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh belum optimal
				2	Perilaku masyarakat yang belum tertib dan bersih
	2.3.2	Ketersediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat	2.3.2.1	Keterbatasan lahan yang memadai dan terjangkau untuk membangun rumah	1 Pembangun rumah susun belum memadai
				2	Regulasi insentif pembangunan rumah susun belum memadai
2.4	Sanitasi Lingkungan Permukiman (Air Bersih dan Air Limbah Domestik)				



Isu Strategis/Sub Isu Strategis		Permasalahan			
		Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar (Penyebab) Permasalahan	
2.4		2.4.1 Ketersediaan sanitasi lingkungan permukiman yang belum memadai	2.4.1.1 Cakupan pelayanan air bersih yang berkualitas belum memadai	1	Keterbatasan sumber air baku
				2	Ketersediaan jaringan SPAM perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah
			2.4.1.2 Pengelolaan air limbah domestik dan MCK belum memadai	1	Ketersediaan fasilitas penampung dan pengolah limbah domestik yang terbatas
				2	Ketersediaan sarana MCK rumah tangga dan komunal yang berkualitas belum memadai
2.5	Persampahan	2.5.1 Pengelolaan persampahan yang belum optimal	2.5.1.1 Tingkat kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah belum berkembang dengan baik	1	Perilaku hidup bersih dan pengurangan sampah anorganik (plastik) masyarakat belum memadai
				1	Masih kurangnya fasilitas pengurangan sampah
			2.5.1.2 Fasilitas pengelolaan sampah belum memadai	2	Masih kurangnya sistem penanganan sampah
2.6	Pencemaran Lingkungan	2.6.1 Degradasi kualitas lingkungan hidup	2.6.1.1 Tingkat pencemaran semakin meningkat	1	Aktivitas ekonomi yang masih cenderung belum ramah lingkungan
				2	Penegakan regulasi lingkungan belum optimal
				1	Ketersediaan lahan untuk RTH terbatas
			2.6.1.2 Tingkat ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) belum memadai	2	Perilaku masyarakat cenderung boros energi
				1	Pengembangan energi alternatif baru terbarukan yang ramah lingkungan belum memadai
			2.6.2.1 Pola hidup dan perilaku masyarakat dalam penggunaan energi yang masih belum efisien dan cenderung boros		



Isu Strategis/Sub Isu Strategis		Permasalahan			
		Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar (Penyebab) Permasalahan	
2.7	Ruang Terbuka Publik				
	2.7.1	Tingkat ketersediaan ruang terbuka publik belum memadai	2.7.1.1	Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) belum memadai	1 Ketersediaan lahan untuk RTH terbatas
			2.7.1.2	Ketersediaan dan pengelolaan taman tematik belum optimal	1 Ketersediaan lahan untuk taman terbatas dan fasilitas taman yang perlu ditingkatkan
	2.7.2	Kualitas penataan ruang kota yang belum memadai dan optimal	2.7.2.1	Tingkat ketersediaan perencanaan tata ruang belum memadai	1 Penyelesaian dokumen tata ruang belum memadai
			2.7.2.2	Pemanfaatan ruang belum optimal	1 Tingkat pelanggaran pemanfaatan ruang masih terjadi 2 Tingkat penegakan regulasi penataan ruang belum maksimal 3 Tingkat kesadaran masyarakat dalam penataan ruang yang belum maksimal
3	Daya Saing Perekonomian Daerah				
3.1	Investasi				
	3.1.1	Pelayanan perijinan dan investasi belum optimal	3.1.1.1	Pelayanan perijinan terpadu satu pintu online belum optimal	1 Keterbatasan SDM dan manajemen pengelola 2 Belum semua aplikasi pelayanan perijinan dan investasi terintegrasi dengan baik
			3.1.1.2	Data/informasi potret investasi dan promosi investasi belum optimal	1 Keterbatasan data dan analisis investasi 2 Kurangnya promosi investasi 3 Kerjasama dengan pengelola investasi belum berkembang dengan baik
			3.1.1.3	Regulasi investasi yang sederhana, berinsentif belum memadai	1 Tumpang tindih peraturan yang berpotensi menghambat investasi
3.2	UMKM				
	3.2.1	Peran UKM dan Koperasi sebagai pelaku usaha ekonomi kerakyatan belum	3.2.1.1	Kualitas produk UKM belum memadai	1 Kualitas skill SDM UKM belum memadai



Isu Strategis/Sub Isu Strategis		Permasalahan			
		Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar (Penyebab) Permasalahan	
		tumbuh dan berkembang dengan baik			
				2 Manajemen usaha masih tradisional	
				3 Keterbatasan permodalan	
				4 Keterbatasan akses pemasaran	
				5 Dukungan intensif, pendampingan konseling bisnis belum memadai	
				6 Fasilitasi sarana produksi belum memadai	
				7 Adaptasi IPTEK belum diterapkan (E-Commerce produk UKM)	
		3.2.1.2 Pemberdayaan koperasi aktif yang belum optimal		1 Kapasitas SDM belum memadai	
				2 Kemampuan manajemen usaha masih terbatas	
	3.2.2 Pengelolaan pariwisata belum optimal	3.2.2.1 Destinasi pariwisata belum dikelola dan dikembangkan dengan optimal		1 Dukungan regulasi belum memadai	
		3.2.2.2 Fasilitas pendudukng pariwisata belum memadai		1 Kualitas hotel, restoran, jasa pendukung pariwisata belum memadai	
		3.2.2.3 Promosi pariwisata belum maksimal		1 Keterbatasan media input promosi pariwisata	
		3.2.2.4 Kualitas SDM dan manajemen pariwisata belum memadai		1 Pelatihan skill pariwisata belum memadai	
				2 Manajemen pariwisata belum inovatif	
				3 Budaya sapta pesona masyarakat belum tumbuh dengan baik	
	3.2.3 Pengelolaan perdagangan belum optimal	3.2.3.1 Pengelolaan pasar tradisional yang berstandar nasional, modern, bersih dan sehat belum memadai		1 Manajemen pengelolaan pasar yang masih tradisional	
				2 Pengelolaan pasar belum berdaptasi dengan perkembangan IPTEK (E-commerce pasar)	



Isu Strategis/Sub Isu Strategis		Permasalahan			
		Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar (Penyebab) Permasalahan	
			3.2.3.2 Lokasi pedagang kaki lima yang belum tertata dengan baik	1 Keterbatasan lahan	
				2 Perilaku PKL yang tidak tertib	
	3.2.4 Kualitas produk industri dan IKM yang belum berdaya saing	3.2.4.1 Daya saing produk industri belum kompetitif		1 Fasilitasi sertifikasi kualitas produk industri belum optimal	
				2 Penerapan teknologi yang belum berdaya saing	
		3.2.4.2 Kualitas produk IKM belum memadai		1 Kualitas skill SDM IKM belum memadai	
				2 Manajemen usaha masih tradisional	
				3 Keterbatasan permodalan	
				4 Keterbatasan akses pemasaran	
				5 Dukungan intensif, pendampingan konseling bisnis belum memadai	
				6 Fasilitasi sarana produksi belum memadai	
				7 Keberdaan IKM belum tertata dengan basis produk unggulan (kampoeng IKM)	

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023

I.5. SISTEMATIKA LKIP 2019

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Tangerang Tahun 2019



berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis maupun penetapan kinerja yang berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023, serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I - Pendahuluan

Menjelaskan hal-hal umum tentang organisasi, dasar hukum terbentuknya organisasi, tujuan terbentuknya organisasi, aspek strategis organisasi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada organisasi (gambaran umum tupoksi) serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi dan potensi organisasi yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan organisasi.

Bab II - Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menyajikan gambaran singkat mengenai Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023 dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran utama (yang menggambarkan fungsi utama organisasi) yang ingin diraih organisasi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi organisasi.



Bab III - Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan uraian :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kota Tangerang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis/pembangunan daerah sesuai dengan hasil pengukuran organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi/penyerapan anggaran organisasi/OPD yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Kota Tangerang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV - Penutup

Menyajikan simpulan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa/tahun mendatang.

Lampiran - Lampiran

Penjelasan lebih lanjut yang tidak diuraikan dalam badan teks laporan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

II.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dalam bab ini menyajikan secara singkat mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2019, termasuk menyajikan gambaran singkat sasaran utama (yang menggambarkan fungsi utama organisasi) yang ingin diraih organisasi pada tahun yang bersangkutan serta kaitannya dengan capaian visi dan misi organisasi.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), RPJM merupakan rencana strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Hal ini memerlukan integrasi antara



keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, yang diharapkan akan dapat memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistik dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategi tersebut, diharapkan instansi pemerintah akan selaras dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi.

II.2 VISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Berdasarkan kondisi Kota Tangerang pada saat ini, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki serta berpedoman pada Visi Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 yang termuat dalam RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025 yaitu:

“KOTA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN LESTARI BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH”, dengan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhhlak Mulia, Maju dan Berdaya Saing.



2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing.
3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari.
4. Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota yang Memadai dan Berdaya Saing.
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Walikota dan Wakil Walikota Tangerang periode 2019-2023 mempunyai visi sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG SEJAHTERA,
BERAKHLAKUL KARIMAH DAN BERDAYA SAING”**

Pernyataan visi di atas mempunyai makna sebagai berikut:

Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera

Kota Tangerang yang sejahtera diwujudkan dengan tercapainya taraf kehidupan masyarakat yang baik dan berkualitas sehingga terbentuk kehidupan masyarakat yang makmur dan berkeadilan serta menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek dalam pembangunan.

Terwujudnya Kota Tangerang yang Berakhlakul Karimah

Kota Tangerang yang berakhlakul kharimah diwujudkan dengan tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku akhlak mulia yang dicerminkan melalui kualitas hubungan antar manusia dengan Tuhan dan hubungan antar manusia itu sendiri, dan menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani, serta tercukupi kebutuhan material spiritual, sehingga mampu mewujudkan sebuah masyarakat madaniyyah dan hidup menuju negeri yang adil, makmur, dan diberkati (baldatun toyibatun warabun ghafur).



Terwujudnya Kota Tangerang yang Berdaya Saing

Kota Tangerang yang berdaya saing diwujudkan dengan tercapainya sumber daya manusia (SDM) yang inovatif, kreatif dan kompetitif; perekonomian daerah yang inovatif, kreatif, kompetitif dan berkeadilan; infrastruktur, fasilitas, permukiman kota yang inovatif dan kompetitif dan lingkungan hidup; serta didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, prima, inovatif, kreatif dan kompetitif dalam menyongsong era kompetisi dengan daerah lainnya baik dalam lingkup wilayah sekitar, nasional maupun internasional.

II.3 MISI

Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Untuk pencapaian visi sebagaimana telah dikemukakan tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) pernyataan misi Pemerintah Kota Tangerang. Misi tersebut sekaligus merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Tangerang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Misi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2019-2023 berdasarkan misi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang terpilih adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kota Tangerang yang cerdas, sehat, berakhlak mulia dan berdaya saing. Daya saing sumber daya manusia (SDM) masyarakat ini diwujudkan dengan tercapainya kualitas SDM masyarakat yang inovatif, kreatif dan kompetitif dalam menyongsong era



kompetisi dengan daerah lainnya baik dalam lingkup wilayah sekitar, nasional maupun internasional.

Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat akan berjalan dengan optimal apabila ditunjang oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif. Kemajuan dan inovasi pelayanan publik dihadirkan agar daya saing tata kelola pemerintahan Kota Tangerang mampu menjawab tuntutan masyarakat dan dapat turut andil dan mengambil peran penting di dalam era kompetisi dengan daerah lainnya baik dalam lingkup wilayah sekitar, nasional maupun internasional.

Misi 2 : Bersama Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas perkotaan ditujukan untuk mewujudkan kota layak huni yang nyaman, asri, modern dan berdaya saing. Peningkatan penyediaan infrastruktur dan fasilitas perkotaan yang berkualitas, modern dan berdaya saing mutlak diperlukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dalam rangka mendukung berlangsungnya kegiatan perekonomian yang produktif, inovatif, kreatif dan kompetitif serta berkelanjutan dan keseimbang antara aspek sosial dan ekonomi dengan kelestarian lingkungan hidup sehingga pada akhirnya mampu menjadi faktor pendukung bagi tercapainya kota layak huni yang nyaman, asri, modern dan berdaya saing. Sehingga diharapkan kualitas infrastruktur dan fasilitas perkotaan Kota Tangerang dapat turut andil mendukung peningkatan daya saing kota di dalam era kompetisi dengan daerah lainnya baik dalam lingkup wilayah sekitar, nasional maupun internasional.

Misi 3 : Bersama Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berkeadilan

Peningkatan kualitas perekonomian masyarakat ditujukan untuk mewujudkan daya saing perekonomian kota. Daya saing perekonomian kota ini diwujudkan dengan tercapainya kualitas taraf perekonomian masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang sekaligus berdampak pada upaya



penciptaan keadilan perekonomian bagi seluruh lapisan masyarakat. Pencapaian perekonomian kota yang berkualitas, berkeadilan dan berdaya saing ini dilakukan dengan memajukan kualitas dan daya saing sektor-sektor unggulan kota (jasa, perdagangan, industri) yang didukung dengan inovasi, kreativitas dan kemitraan usaha dari seluruh pelaku usaha ekonomi masyarakat baik UMKM dan koperasi maupun usaha besar. Sehingga diharapkan perekonomian masyarakat dan Kota Tangerang dapat turut andil dan mengambil peran penting serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam era kompetisi dengan daerah lainnya baik dalam lingkup wilayah sekitar, nasional maupun internasional.

II.4 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA TANGERANG

Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Berikut ini diuraikan mengenai tujuan pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 dan keterkaitannya dengan misi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2019-2023.



Tabel 2.1
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kota Tangerang Tahun 2019-2023

Misi		Tujuan		Sasaran	
1	Bersama mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas	1.1	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
		1.2	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat	1.2.1	Menurunnya kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
		1.3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	1.3.1	Meningkatnya kesempatan kerja
2	Bersama meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	2.1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar perkotaan	2.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi perkotaan
				2.1.2	Meningkatnya kualitas permukiman
				2.1.3	Meningkatnya kualitas drainase dan sumber daya air
				2.1.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
3	Bersama meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan	3.1	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat yang berdaya saing	3.1.1	Meningkatnya investasi daerah
				3.1.2	Meningkatnya perekonomian masyarakat

II.5 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN RPJMD

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat



dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya.

Berikut ini diuraikan mengenai Sasaran Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023.

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah
Kota Tangerang Tahun 2019-2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	
		Uraian	Satuan
1.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1 Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%
		2 Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%
1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Angka kematian bayi (AKB)	Orang per 1.000 kelahiran hidup
		2 Angka kematian ibu (AKI)	Orang per 100.000 kelahiran hidup
		3 Angka kesakitan	Orang per 100.000 penduduk
1.2.1	Menurunnya kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Orang
1.2.2	Meningkatnya kesempatan kerja	1 Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%
1.3.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	1 Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Daerah	A, BB, B, CC, C, D
		2 Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP/ TMP
		3 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik	Point
2.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi perkotaan	1 Persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai	%
		2 Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan	Km/jam
2.1.2	Meningkatnya kualitas permukiman	1 Persentase permukiman kumuh	%
		2 Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%
		3 Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%
2.1.3	Meningkatnya kualitas drainase dan sumber daya air	1 Luas banjir dan genangan	Ha
2.1.4	Meningkatnya kualitas	1 Indeks kualitas lingkungan hidup	Point



No.	Sasaran	Indikator Sasaran	
		Uraian	Satuan
	lingkungan hidup	(IKLH)	
		2 Tingkat pengelolaan sampah	%
3.1.1	Meningkatnya investasi daerah	1 Nilai investasi (PMA dan PMDN)	Rp. Triliyun
3.1.2	Meningkatnya perekonomian masyarakat	1 Laju inflasi 2 Indeks gini (gini rasio)	% Point

II.6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berikut ini diuraikan mengenai Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023.

1. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 pada Misi 1 : Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berintegritas adalah sebagai berikut:

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat				
		1.1.1.1	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pendidikan karakter, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan non formal		



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		1.1.1.1.1 Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kurikulum, manajemen kelembagaan, sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan, minat, bakat, prestasi peserta didik, serta penguatan pendidikan karakter akhlak mulia, kesuilaan, budaya, kreatif dan inovatif serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan non formal
	1.1.1.2 Pengembangan dan pemasyarakatan budaya baca masyarakat serta peningkatan pelayanan perpustakaan	1.1.1.2.1 Mengembangkan dan meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sistem, sarana, prasarana, fasilitas dan SDM perpustakaan
1.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
	1.1.2.1.1 Peningkatan kemandirian kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan	1.1.2.1.1.1 Meningkatkan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat untuk peningkatan upaya kesehatan keluarga, lingkungan, gizi masyarakat serta pencegahan dan pengendalian penyakit
	1.1.2.1.1.2 Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan masyarakat dan kunjungan petugas kesehatan ke warga	
	1.1.2.1.3 Mengembangkan dan meningkatkan jaminan, SDM dan promosi kesehatan serta mengembangkan dan mengoptimalkan posyandu	
	1.1.2.2.1 Peningkatan prestasi dan pemasyarakatan olahraga	1.1.2.2.1.1 Mengembangkan dan mengelola sarana, prasarana dan fasilitas olah raga serta meningkatkan prestasi dan pemasyarakatan olahraga



Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1.2.1	Menurunnya kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)				
		1.2.1.1	Perlindungan, pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat miskin		
		1.2.1.1.1	Meningkatkan perlindungan, jaminan dan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pemberdayaan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial serta memperluas dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat miskin		
		1.2.1.2	Penguatan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak		
		1.2.1.2.1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
		1.2.1.3	Peningkatan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga		
		1.2.1.3.1	Meningkatkan advokasi dan pelayagunaan PLKB dan kader KB serta memperkuat kesertaan KB dan ketahanan kesejahteraan keluarga		
1.2.2	Meningkatnya kesempatan kerja				
		1.2.2.1	Perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan kualitas tenaga kerja		
		1.2.2.1.1	Memperluas bursa tenaga kerja dan wirausaha serta mengembangkan kelembagaan, pelatihan, serifikasi kompetensi, produktivitas, penempatan		



Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				dan perlindungan tenaga kerja	
		1.2.2.2	Pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan	1.2.2.1	Mengembangkan, meningkatkan dan membina kualitas SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana kepemudaan
1.3.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik				
		1.3.1.1	Pengembangan dan peningkatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.3.1.1	Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur data center, layanan internet/intranet, standarisasi dan integrasi aplikasi sistem informasi pelayanan publik dan pemerintahan serta meningkatkan desiminasi dan kemitraan komunikasi publik untuk mendukung smart city
		1.3.1.2	Pengembangan, pengelolaan dan publikasi data statistik daerah	1.3.1.2.1	Mengembangkan dan meningkatkan sistem dan pelayanan dalam pengelolaan dan publikasi data statistik daerah
		1.3.1.3	Peningkatan sistem persandian daerah		
				1.3.1.3.1	Meningkatkan keamanan sistem persandian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
		1.3.1.4	Optimalisasi tata kelola kelembagaan, peningkatan kualitas SDM aparatur	1.3.1.4.1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana, SDM aparatur, tata kelola keuangan, perencanaan, dan publikasi data/informasi perangkat daerah serta



Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
					pelayanan operasional UPT yang memadai dan berkualitas
		1.3.1.5	Harmonisasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah	1.3.1.5.1	Meningkatkan pembinaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
				1.3.1.5.2	Meningkatkan dukungan kapasitas dan kinerja DPRD
		1.3.1.6	Peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan	1.3.1.6.1	Meningkatkan pelayanan paten kecamatan dan kelurahan serta koordinasi & pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah kecamatan dan kelurahan
				1.3.1.6.2	Meningkatkan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
		1.3.1.7	Peningkatan sistem dan kualitas perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan	1.3.1.7.1	Mengembangkan dan meningkatkan sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, komunikatif, dan berkualitas
				1.3.1.7.2	Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah serta mendayagunakan penelitian dan pengembangan pembangunan yang inovatif
		1.3.1.8	Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan	1.3.1.8.1	Mengembangkan dan meningkatkan sistem pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
		1.3.1.9	Optimalisasi potensi sumber pendapatan daerah serta peningkatan sistem tata kelola keuangan daerah dan aset		



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		1.3.1.9.1	Mengembangkan dan meningkatkan intensifikasi potensi sumber pendapatan, kualitas sistem dan pelayanan pendapatan daerah
		1.3.1.9.2	Meningkatkan sistem pengelolaan anggaran dan akuntasi keuangan daerah serta pengelolaan pemanfaatan aset daerah
		1.3.1.10	Peningkatan kualitas SDM apartur yang profesional, kreatif, inovatif dan berintegritas
		1.3.1.10.1	Mengembangkan dan meningkatkan sistem pengelolaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan SDM apartur
		1.3.1.11	Penataan status kepemilikan tanah pemerintah daerah dan peningkatan advokasi dan pengawasan tanah milik pemerintah daerah
		1.3.1.11.1	Mengembangkan sistem penataan dan status kepemilikan tanah pemerintah daerah serta meningkatkan advokasi dan pengawasan tanah milik pemerintah daerah
		1.3.1.12	Pengembangan dan pengelolaan sistem kearsipan
		1.3.1.12.1	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem kearsipan online dan tata kelola kearsipan yang baku sesuai standar
		1.3.1.13	Peningkatan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan pencatatan sipil
		1.3.1.13.1	Mengembangkan dan meningkatkan sistem online dan mobile dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		1.3.1.14	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat penanggulangan bencana serta
		1.3.1.14.1	Meningkatkan penegakan hukum, ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup masyarakat



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		1.3.1.14.2 Meningkatkan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dalam negeri dan ketahanan bangsa
		1.3.1.14.3 Meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana
	1.3.1.15 Pembangunan gedung pemerintah daerah dan pelayanan publik	
		1.3.1.15.1 Membangun dan memelihara gedung pemerintah daerah dan pelayanan public

2. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 pada Misi 2 : Bersama Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kota Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi perkotaan		
	2.1.1.1 Pengembangan integrasi dan sistem serta kualitas transportasi peningkatan pengelolaan angkutan umum dan lalu lintas	
		2.1.1.1.1 Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem transportasi umum, meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana, prasarana angkutan umum dan penerangan jalan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian dan penertiban angkutan jalan
	2.1.1.2 Pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan	2.1.1.2.1 Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan
2.1.2 Meningkatnya kualitas permukiman		
	2.1.2.1 Pengembangan dan penataan permukiman serta peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah domestik	



Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
2.1.2				2.1.2.1.1	Merehabilitasi rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas parasana sarana dasar permukiman serta mengembangkan rumah susun layak huni yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
				2.1.2.1.2	Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan pelayanan bangunan
				2.1.2.1.3	Pengembangan jaringan penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik
2.1.3	Meningkatnya kualitas drainase dan sumber daya air				
2.1.4		2.1.3.1	Pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas sistem jaringan drainase dan sumber daya air		
				2.1.3.1.1	Mengembangkan kapasitas dan merehabilitasi sistem jaringan drainase dan sumber daya air
2.1.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				
		2.1.4.1	Peningkatan penataan dan kapasitas lingkungan hidup serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta Pengelolaan persampahan berbasis masyarakat dan peningkatan kapasitas TPA		
				2.1.4.1.1	Meningkatkan penataan dan kapasitas lingkungan hidup serta pemantauan kualitas, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
				2.1.4.1.2	Mengembangkan pengelolaan persampahan berbasis 3R dan kapasitas TPA
		2.1.4.2	Pengembangan ketersediaan dan peningkatan kualitas ruang terbuka		
				2.1.4.2.1	Pengembangan ruang terbuka hijau, taman, tempat bermain anak dan kelurga serta dekorasi kota



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2.1.4.3	Peningkatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	
		2.1.4.3.1 Menyusun dan mensosialisasikan rencana tata ruang, mengendalikan pemanfaatan ruang serta menyediakan lahan untuk pembangunan infrastruktur

3. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 pada Misi 3 : Bersama Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Mandiri Dan Berkeadilan adalah sebagai berikut:

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3.1.1 Meningkatnya investasi daerah		
	3.1.1.1 Peningkatan iklim investasi yang kondusif	3.1.1.1.1 Menyederhanakan sistem dan mempermudah pelayanan investasi, pelayanan perizinan dan non peizinan, serta mengembangkan insentif dan disinsentif investasi
3.1.2 Meningkatnya perekonomian masyarakat		
	3.1.2.1 Pengembangan, penataan, dan peningkatan industri, perdagangan, UMKM dan koperasi, pariwisata, serta pertanian dan perikanan	3.1.2.1.1 Mengembangkan dan meningkatkan pasar tradisional yang bersih dan modern serta tata niaga perdagangan serta membina pelaku usaha perdagangan 3.1.2.1.2 Mengembangkan produk industri kecil menengah (IKM) yang kreatif dan inovatif 3.1.2.1.3 Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi 3.1.2.1.4 Meningkatkan pemberdayaan kapasitas kelembagaan, SDM, kualitas produk yang kreatif dan inovatif, promosi dan pemasaran usaha mikro 3.1.2.1.5 Mengembangkan potensi, destinasi, promosi, sumber daya manusia, fasilitas dan jasa pendukung pariwisata



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.1.2.1.6 Meningkatkan kualitas sumber daya (fasilitas, peralatan, sanggar, SDM) kebudayaan serta mengembangkan festival budaya dan pagelaran kesenian daerah, taman budaya, musium kota dan kawasan cagar budaya
		3.1.2.1.7 Mengendalikan stabilitas ketersediaan dan mengembangkan kerjasama penyediaan bahan pangan strategis dengan pihak lain serta mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan kesehatan hewan

II.7 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pelaksanaan penyelarasan terhadap sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Tangerang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah melalui Peraturan Walikota Tangerang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang, sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang
Tahun 2019-2023

Misi 1 : Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berintegritas

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi (Cara Pengukuran)/ Definisi	Sumber Data
1.1	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pendidikan (Indeks pengetahuan)	Point	Indeks Pendidikan (indeks pengetahuan) pada IPM = Rata-rata hasil penjumlahan dari indeks harapan lama sekolah (HLS) dan indeks rata-rata lama sekolah (RLS)	BPS, Dinas Pendidikan
		Indeks Kesehatan (Indeks harapan hidup)	Point	Indeks Kesehatan (Indeks harapan hidup) pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	BPS, Dinas Kesehatan
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/Paket A dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun dikali 100%	BPS, Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/Paket B dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun dikali 100%	BPS, Dinas Pendidikan
1.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB)	Orang per 1.000 kelahiran hidup	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) selama 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama dikali 1000	BPS, Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu (AKI)	Orang per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas selama 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama dikali 100.000	BPS, Dinas Kesehatan
		Angka Kesakitan	Orang per 100.000 penduduk	Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktivitas dibagi jumlah penduduk dikali 100.000	BPS, Dinas Kesehatan
1.2	Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (persentase penduduk miskin)	%	Jumlah penduduk miskin (berdasarkan garis kemiskinan dibagi jumlah penduduk dikali 100%)	BPS, Dinas Sosial
1.2.1	Menurunnya Kemiskinan Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan	Dinas Sosial



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi (Cara Pengukuran)/ Definisi	Sumber Data
	Sosial (PMKS)			atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani & sosial) secara memadai & wajar	
1.2.2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%	BPS, Dinas Ketenagakerjaan
1.3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh KemenPAN-RB	Sekretariat Daerah
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik	Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Daerah	A, BB, B, CC, C, D	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kota Tangerang	Bappeda
		Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP/ TMP	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tangerang	BPKD
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik	Point	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sekretariat Daerah

Misi 2 : Bersama Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kota Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi (Cara Pengukuran)/ Definisi	Sumber Data
2.1	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan	Indeks Sarana Prasarana Perkotaan	Point	Rata-rata hasil penjumlahan dari Indeks Kualitas Jalan & Jembatan yang Memadai (KJJM), Indeks Kecepatan Perjalanan Rata-rata (KPR), Indeks Penanganan Permukiman Kumuh (PPK), Indeks Pelayanan Air Minum (PAM), Indeks Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik (PPLD), Indeks Penanganan Banjir & Genangan (IPG), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) dan Indeks Pelayanan Persampahan (PP)	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Dinas Perkim & Dinas LH
2.1.1	Meningkatnya	Persentase kualitas	%	Rata-rata hasil penjumlahan dari	Dinas PUPR



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi (Cara Pengukuran)/ Definisi	Sumber Data
	Kualitas Pelayanan Transportasi Perkotaan	jalan dan jembatan yang memadai		proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik (panjang jaringan kota dalam kondisi baik dibagi panjang seluruh jaringan jalan kota dikali 100%) dan rasio jumlah jembatan dalam kondisi baik (jumlah jembatan dalam kondisi baik dibagi seluruh jumlah jembatan dikali 100%)	
		Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan	Km/jam	Rata-rata dari jarak tempuh dibagi waktu tempuh perjalanan kendaraan	Dinas Perhubungan
2.1.2	Meningkatnya Kualitas Permukiman	Persentase permukiman kumuh	%	Luas permukiman kumuh dibagi luas seluruh wilayah permukiman dikali 100%	Dinas Perkim
		Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	Jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dibagi jumlah penduduk Kota Tangerang dikali 100%	Dinas Perkim
		Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dibagi jumlah penduduk Kota Tangerang dikali 100%	Dinas Perkim
2.1.3	Meningkatnya Kualitas Drainase dan Sumber Daya Air	Luas banjir dan genangan	Ha	Luas banjir dan genangan di wilayah Kota Tangerang	Dinas PUPR
2.1.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	$\text{IKLH} = (\text{IPA} \times 30\%) + (\text{IPU} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%)$ IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IPA : Indeks Pencemaran Air IPU : Indeks Pencemaran Udara ITH : Indeks Tutupan Lahan	Dinas LH
		Tingkat Pengelolaan Sampah	%	Volume sampah yang dikelola dibagi volume potensi timbulan sampah dikali 100% Sampah yang dikelola = sampah yang dikurangi dan sampah yang ditangani Potensi timbulan sampah = 0,7kg/org/hari x jumlah penduduk	Dinas LH



Misi 3 : Bersama Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Mandiri Dan Berkeadilan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi (Cara Pengukuran)/ Definisi	Sumber Data
3.1	Meningkatkan Kualitas Perekonominian Masyarakat yang Berdaya Saing	Nilai PDRB	Rp. Triliyun	Nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) Kota Tangerang	BPS, Bappeda, Dinas Kominfo
		Indeks Pengeluaran (daya beli)	Point	Nilai Indeks Pengeluaran (daya beli) pada IPM	BPS, Bappeda, Dinas Kominfo
3.1.1	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	Rp. Triliyun	Hasil penjumlahan dari nilai (jumlah) penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kota Tangerang	Dinas PMPTSP
3.1.2	Meningkatnya Perekonominian Masyarakat	Laju Inflasi	%	IHK tahun tertentu dikurang IHK tahun sebelumnya dibagi IHK tahun sebelumnya dikali 100% IHK : Indeks Harga Konsumen	BPS, Bappeda, Dinas Kominfo, Sekretariat Daerah
		Indeks Gini (gini rasio)	Point	Nilai Indeks Gini (gini rasio) kota Tangerang	BPS, Bappeda, Dinas Kominfo

II.8 PERJANJIAN KINERJA KOTA TANGERANG TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.



Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019 mengacu pada dokumen RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2019, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2019. Pemerintah Kota Tangerang telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Misi 1				
1.1	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pendidikan (Indeks pengetahuan)	Point	73,81
		Indeks Kesehatan (Indeks harapan hidup)	Point	79,22
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,53
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	98,97
1.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB)	Orang per 1.000 kelahiran hidup	2,99
		Angka Kematian Ibu (AKI)	Orang per 100.000 kelahiran hidup	24,67
		Angka Kesakitan	Orang per 100.000 penduduk	344
1.2	Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (persentase penduduk miskin)	%	4,53
1.2.1	Menurunnya Kemiskinan Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Orang	113.717
1.2.2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,84
1.3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	60
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik	Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Daerah	A, BB, B, CC, C, D	B
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/ WDP/ TMP	WTP



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Pemerintah Daerah		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik	Point	82,6
Misi 2				
2.1	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan	Indeks Sarana Prasarana Perkotaan	Point	71,28
2.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Perkotaan	Persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai	%	85,67
		Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan	Km/jam	21
2.1.2	Meningkatnya Kualitas Permukiman	Persentase permukiman kumuh	%	0,14
		Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100
		Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100
2.1.3	Meningkatnya Kualitas Drainase dan Sumber Daya Air	Luas banjir dan genangan	Ha	382,98
2.1.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	54,42
		Tingkat Pengelolaan Sampah	%	100,00
Misi 3				
3.1	Meningkatkan Kualitas Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing	Nilai PDRB	Rp. Triliyun	114,12
		Indeks Pengeluaran (daya beli)	Point	81,5
3.1.1	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	Rp. Triliyun	7,13
3.1.2	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Laju Inflasi	%	3,50



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Indeks Gini (gini rasio)	Point	0,35

II.9 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Selama Tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Tangerang penganggarannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang sebesar Rp.5.039.952.537.109,08. Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk pendanaan belanja tidak langsung sebesar Rp.1.490.076.361.648,00 dan belanja langsung sebesar Rp.2.881.008.403.368,00. Alokasi anggaran belanja langsung tersebut diperuntukan bagi pendanaan program dan kegiatan pada 46 OPD yang meliputi 6 urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 5 Urusan Pilihan dan 8 Urusan Penunjang. Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 dengan komposisi belanja APBD Kota Tangerang, sebagai berikut :

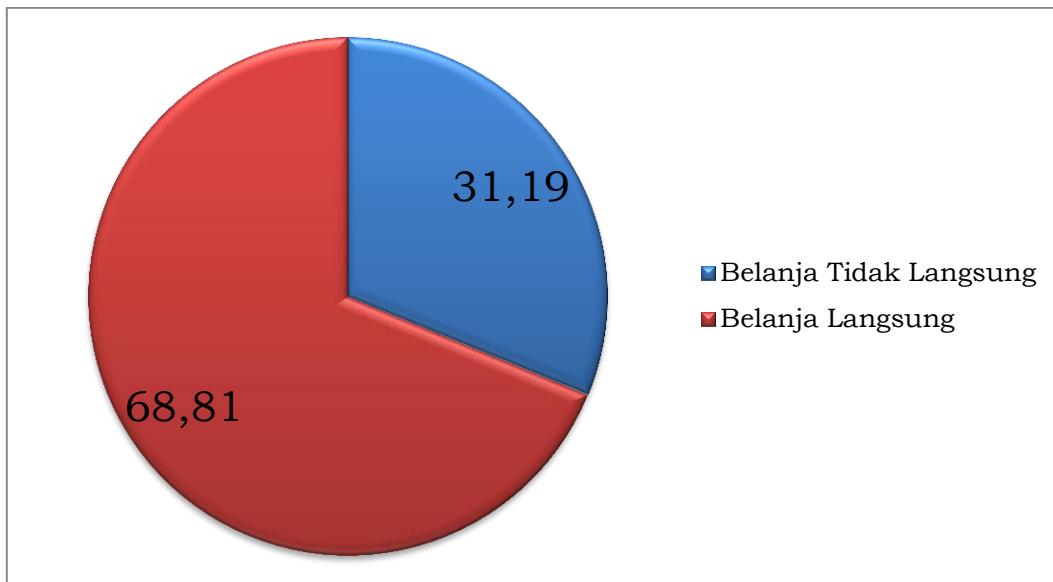
Tabel 2.5
Komposisi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Tangerang
Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Rencana Anggaran (Rp)	Komposisi Anggaran (%)
1	Belanja Tidak Langsung	1.571.939.645.164,57	31,19
2	Belanja Langsung	3.468.012.891.944,52	68,81
	Jumlah	5.039.952.537.109,09	100,00

Sumber: APBD Perubahan Tahun 2019



Gambar 2.1
Komposisi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Tangerang
Tahun Anggaran 2019



Sumber: APBD Perubahan Tahun 2019



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2019

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kota Tangerang selaku pengembang amanah masyarakat Kota Tangerang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tangerang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2019-2023, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahun 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).



Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Prosentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

III.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Metodologi dalam Pengukuran kinerja mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Kota Tangerang sebagai kota industri serta pusat pelayanan jasa terpadu di bidang perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam pengukuran capaian kinerja sasaran bisa jadi ditemui kinerja sasaran tidak tercapai secara maksimal. Dalam pengukuran sasaran, bagi kepentingan manajemen dilakukan penghitungan rata-rata atas setiap capaian indikator sasaran.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :



- 1) Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Tingkat Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Tingkat Pencapaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan pengukuran kinerjanya, maka untuk menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini, ditetapkan suatu skala pengukuran ordinal pencapaian kinerja berdasarkan kriteria yang tercantum dalam Tabel T-E.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1. $91\% \leq 100\%$ atau lebih	: Sangat Tinggi
2. $76\% \leq 90,99\%$: Tinggi
3. $66\% \leq 75,99\%$: Sedang
4. $51\% \leq 65,99\%$: Rendah
5. $\leq 50,99\%$: Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.



(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

➤ Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), dan hasil (outcomes).

➤ Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

III.2 CAPAIAN INDIKATOR MAKRO

Tujuan pembangunan Kota Tangerang telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Kota Tangerang telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan



tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam indikator makro pembangunan daerah, yang akhirnya bermuara terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, maka kinerja pembangunan daerah dapat diukur, melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah, ketercapaian setiap indikator makro tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh stakeholder pembangunan yang meliputi: Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Oleh karena itu dalam menyikapi kinerja kebijakan pemerintah dalam konstelasi pencapaian indikator makro, perlu diterjemahkan terlebih dahulu kerangka pikir kontribusi kebijakan dan pelaku terhadap capaian indikator makro tersebut. Sehingga gambaran pencapaian indikator makro merupakan hasil kinerja dari seluruh pelaku pembangunan.

Sebagai gambaran bahwa Perkembangan indikator makro Kota Tangerang Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada 0.

Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Kota Tangerang Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
IPM	Poin	76,08	76,81	77,01	77,92	78,43
LPE	%	5,37	5,34	5,88	5,92	4,31
Tingkat Kemiskinan	%	5,04	4,94	4,95	4,76	4,43
TPT	%	8,00	7,00	7,16	7,41	7,13
IKM	Kategori	B	B	A	A	A

Sumber: BPS Kota Tangerang (data diolah)

Kondisi Realiasi Indikator Makro Kota Tangerang dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan hasil di atas rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Banten. Demikian juga kondisi realiasi indikator makro untuk IPM dan LPE menunjukkan nilai di atas rata-rata Propinsi Banten. Hal ini berarti bahwa usaha peningkatan IPM yang dilakukan melalui peningkatan usaha di



bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Kota Tangerang relatif lebih berhasil dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten.

Tabel 3.2
Perbandingan Indikator Makro
Kota Tangerang dengan Provinsi Banten

Indikator		IPM	LPE	Tingkat Kemiskinan	TPT	IKM
Satuan		Poin	%	%	%	Kategori
2015	Kota Tangerang	76,08	5,88	5,04	8,00	B
	Provinsi Banten	70,27	5,37	5,90	9,55	
2016	Kota Tangerang	76,81	5,34	4,94	7,00	B
	Provinsi Banten	70,96	5,28	5,42	8,92	
2017	Kota Tangerang	77,01	5,91	4,95	7,16	A
	Provinsi Banten	71,42	5,75	5,45	9,28	
2018	Kota Tangerang	77,92	5,92	4,76	7,41	A
	Provinsi Banten	71,95	5,82	5,24	8,52	
2019	Kota Tangerang	78,43	4,31	4,43	7,13	A
	Provinsi Banten	72,44	5,53	5,09	8,52	

Sumber: BPS Provinsi Banten (data diolah)

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Indikator Makro Kota Tangerang Tahun 2019

No.	Indikator Makro	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	78,11	78,43	100,41
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,20	4,31	69,52
3.	Tingkat Kemiskinan (% Jumlah Penduduk Miskin)	%	4,53	4,43	102,21
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,84	7,13	95,76
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	A	A	100,00

Sumber: BPS Kota Tangerang (data diolah)

III.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Dari berbagai indikator makro ekonomi dan survey yang kerap digunakan sebagai alat ukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah, implementasinya terkadang bisa menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini terjadi karena keberhasilan pembangunan tidaklah cukup hanya diukur dengan menggunakan makro ekonomi dan survey.



Dengan demikian, untuk menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah harus menggunakan indikator yang secara resmi digunakan oleh badan dunia, yaitu The United Nations Development Programme (UNDP).

Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat merupakan program utama yang menjadi bagian dari pelaksanaan misi pembangunan daerah Kota Tangerang. Melalui pembangunan bidang ini, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, terpenuhinya kebutuhan pokok minimal dan kebutuhan dasar lainnya secara layak, serta meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat harus dapat diwujudkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.4
Komponen IPM Kota Tangerang Tahun 2015-2019

Komponen IPM Kota Tangerang	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,29	71,34	71,38	71,42	71,57
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,90	13,41	13,44	13,83	13,84
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,20	10,28	10,29	10,51	10,65
Pengeluaran (Ribu Rupiah)	13.766	13.911	14.104	14.443	14.860
Indeks Harapan Hidup	78,61	78,98	79,05	79,15	79,34
Indeks Pengetahuan	69,83	71,52	71,63	73,45	73,94
Indeks Pengeluaran	79,90	80,22	80,64	81,37	82,24
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,08	76,81	77,01	77,92	78,43

Sumber: BPS (data diolah)

Kecenderungan angka IPM Kota Tangerang menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang secara berkelanjutan telah membawa hasil yang positif.



III.2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu hal penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Kota Tangerang berusaha memaksimalkan potensi sumberdaya manusianya untuk mengolah potensi yang ada.

Pada Tahun 2019 perekonomian Kota Tangerang mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini terlihat dari laju pertumbuhan PDRB ADHK Kota Tangerang Tahun 2019 sebesar 4,31%, sedangkan periode Tahun 2015 sampai dengan 2018 pertumbuhannya di atas 5%. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2019 tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Real Estate sebesar 9,41%. Hampir semua lapangan usaha ekonomi PDRB pada Tahun 2019 mencatat pertumbuhan yang positif kecuali satu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu Transportasi dan Pergudangan sebesar -4,07%. Salah satu penyebabnya adalah turunnya tarif komoditas angkutan udara disebabkan harga angkutan udara yang telah mencapai batas tertingginya dan keluarnya keputusan pemerintah yang mengatur tarif angkutan udara, yaitu keputusan Menteri Perhubungan No. 106 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 yang menurunkan tarif batas atas sebanyak 12%-16%.

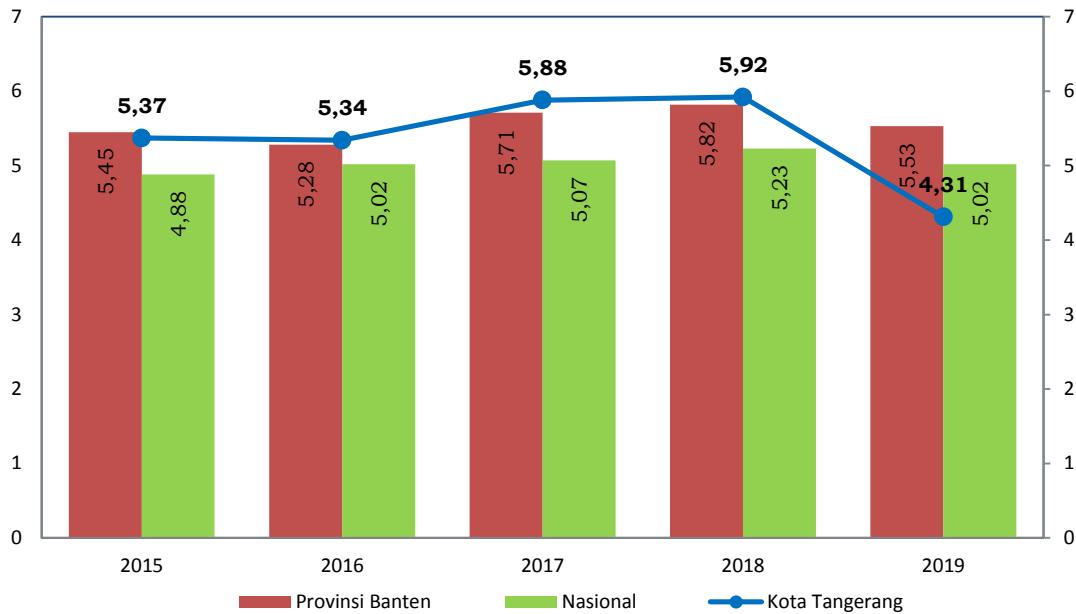
Tabel 3.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2015-2019

Tahun	LPE (%)		
	Kota Tangerang	Provinsi Banten	Nasional
2015	5,37	5,45	4,88
2016	5,34	5,28	5,02
2017	5,88	5,71	5,07
2018	5,92	5,82	5,23
2019	4,31	5,53	5,02

Sumber: BPS Kota Tangerang, Banten dan Nasional



Gambar 3.1
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang
Tahun 2015-2019 dan Perbandingannya dengan
Provinsi Banten dan Nasional



Sumber: BPS Kota Tangerang, Banten dan Nasional

Selama periode 2016-2018, laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Tingkat Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara regional Banten dan Nasional. Namun pada Tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang mengalami penurunan yang sangat signifikan bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nasional.

Secara umum, pada periode 2015-2018 pertumbuhan ekonominya cukup stabil terhadap gangguan/guncangan eksternal, baik dalam tataran global ataupun nasional. Pada Tahun 2018, di tengah masih melemahnya perekonomian global dan nasional, Kota Tangerang tetap dapat mempertahankan LPE-nya di atas Provinsi Banten dan Nasional. Akan tetapi pada Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang menurun sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan Nasional.



III.2.3 Tingkat Kemiskinan

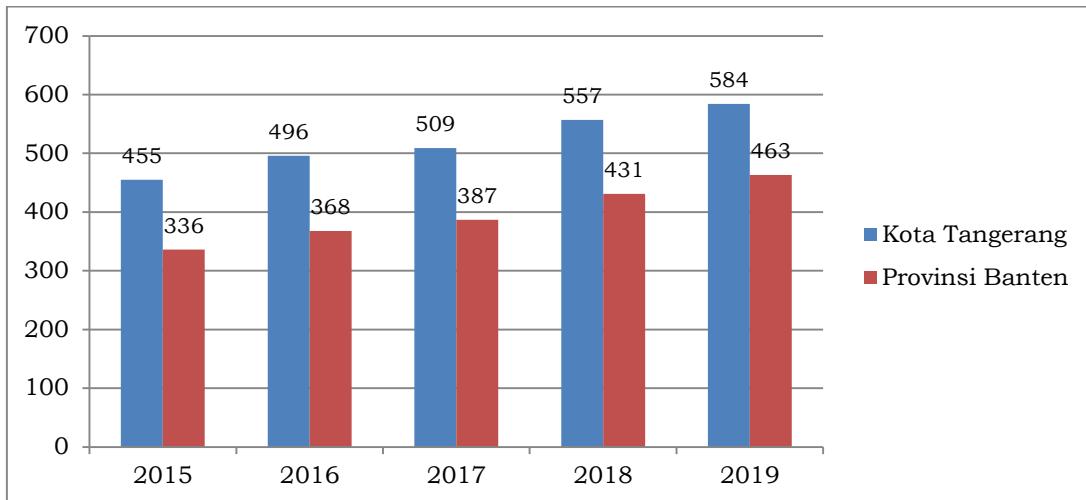
Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di manapun, termasuk Indonesia. Masalah mendasar (kemiskinan) tidak hanya menyangkut jumlah/persentase atau identifikasi penduduk miskin yang layak mendapat bantuan saja, juga menyangkut masalah definisi kemiskinan itu sendiri. Perbedaan definisi ini akan mengakibatkan perbedaan dalam mengukur tingkat kemiskinan dan perbedaan dalam persepsi atas hasil dan implementasinya.

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Standar minimal kehidupan ini berbeda antara suatu daerah dengan daerah lain, karena sangat tergantung kebiasaan/adat/budaya, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya. Kemiskinan di suatu wilayah terjadi karena beberapa hal antara lain yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingginya angka ketergantungan antara penduduk yang bekerja dan pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah dan distribusi pendapatan dan pembangunan yang tidak merata. Disamping itu, ketimpangan pendapatan yang ekstrim dapat menyebabkan *in efficiency economic*, terdapat alokasi asset yang tidak efisien dan penekanan yang terlalu tinggi pada pendidikan tinggi dengan mengorbankan kualitas universal pendidikan dasar dan kemudian menyebabkan kesenjangan yang semakin melebar.

Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan absolut sudah jelas dan tidak ada masyarakat yang dapat merasa nyaman dengan kondisi dimana rekan-rekan satu wilayahnya berada dalam kesengsaraan karena kemiskinan yang diderita mereka.



Gambar 3.2
Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Tangerang dan
Provinsi Banten Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Kota Tangerang, Banten

Garis Kemiskinan Kota Tangerang diatas rata-rata garis kemiskinan di Provinsi Banten, bahkan yang tertinggi se Provinsi Banten. Tingginya Garis Kemiskinan Kota Tangerang dikarenakan tingginya harga komoditi makanan dan bukan makanan seperti perumahan, listrik, bensin, pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya berimbas pada konsumsi masyarakat kelompok marginal di Kota Tangerang.

Tabel 3.6
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kota Tangerang Tahun 2015-2019

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/ bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2015	455.228	102.560	5,04
2016	496.349	102.880	4,94
2017	508.551	105.340	4,95
2018	556.782	103.490	4,76
2019	584.318	98.370	4,43

Sumber: BPS Kota Tangerang, Banten, 2020

Tabel 3.6 menunjukkan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Tangerang dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 berfluktuatif, dimana terjadi penurunan dan peningkatan jumlah dan



persentase penduduk miskin di Kota Tangerang dan persentase penduduk miskin di interval angka 4 sampai 5 persen.

Gambar 3.3

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Kota Tangerang, Banten (diolah)

Pemerintah Kota Tangerang melalui program kesehatan gratis, pendidikan, infrastruktur dan subsidi pangan tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan bagi warga Kota Tangerang. Masyarakat dengan pendapatan sedikit diatas garis kemiskinan tidak tergolong miskin, tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan biasanya hanya dengan sedikit goncangan masalah ekonomi mereka akan berubah menjadi miskin. Keadaan ini mengakibatkan banyak penduduk yang keluar masuk menjadi miskin.

Oleh karenanya program-program pro kemiskinan tidak hanya ditujukan untuk mereka yang berada dibawah garis kemiskinan tetapi juga masyarakat yang rentan miskin yaitu masyarakat yang dengan mudah jatuh ke bawah garis kemiskinan.



III.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

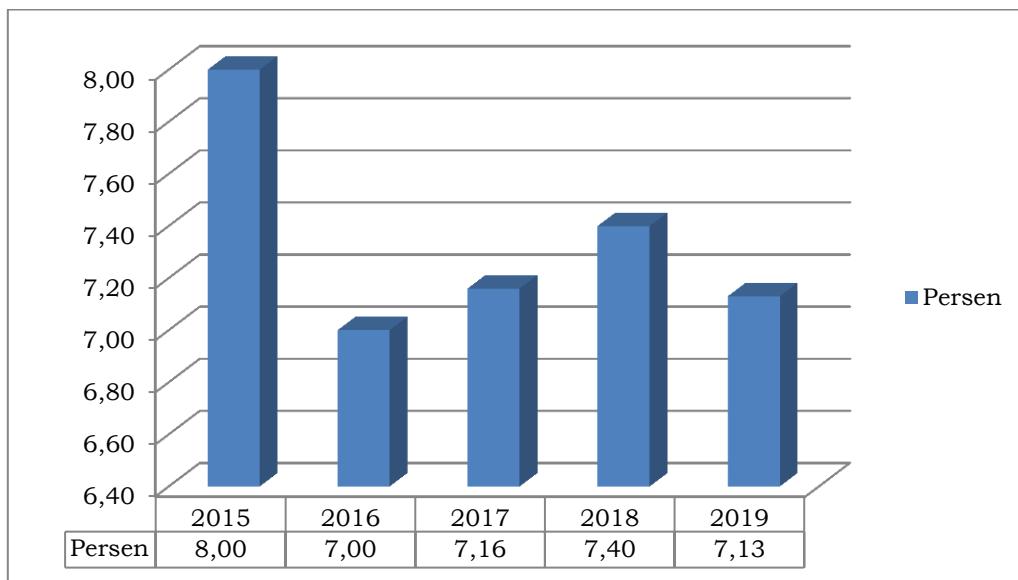
Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Indikator ini berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend ini akan menunjukkan keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Secara formulasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung melalui rasio antara jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (bukan karena alasan kekurangan fisik) dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yaitu 15 tahun sampai dengan 64 tahun ke atas.

Pada Tahun 2019, jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan di Kota Tangerang sebanyak 79.041 orang, sedangkan jumlah angkatan kerjanya sebanyak 1.108.057 orang. Sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tangerang Tahun 2019 sebesar 7,13%. Hal ini mengartikan bahwa diantara 100 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja terdapat sekitar 7 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jika dibandingkan dalam 5 tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tangerang cenderung stabil dikisaran 7 sampai dengan 8 %.



Gambar 3.4
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tangerang
Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Kota Tangerang, Banten (diolah)

Adapun realisasi TPT pada Tahun 2019 sebesar 7,13% mengalami penurunan dibanding Tahun 2018 sebesar 7,41% dan menempati posisi kedua setelah Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten dalam hal TPT terendah. Namun tidak mencapai target TPT Kota Tangerang Tahun 2019 sebesar 6,84%. Hal ini dikarenakan berbagai hal diantaranya banyaknya perusahaan yang tutup di Kota Tangerang yaitu sebanyak 32 perusahaan dan angkatan kerja mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1.049.823 orang pada Tahun 2018 menjadi sebanyak 1.108.057 orang pada Tahun 2019 (meningkat sebanyak 58.234 orang) dengan didominasi lulusan SMA sederajat.

III.2.5 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan yang menunjukkan seberapa jauh tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah selaku penyedia jasa layanan.

Metode pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Tangerang Tahun 2015-2019 mengikuti gradasi penilaian dalam angket



dengan dasar teknik skala Likert. Teknik skala Likert mengarahkan persepsi responden terhadap empat pilihan jawaban yang tersedia dalam angket, sehingga dalam hasil pengukurannya akan mendapatkan 4 kelas penilaian, yaitu :

- ⇒ Kategori A (pelaksanaan pelayanan di unit penyelenggara pelayanan yang di dinilai Sangat Baik oleh masyarakat) dengan nilai 81,26 sampai dengan 100,00.
- ⇒ Kategori B (pelaksanaan pelayanan di unit penyelenggara pelayanan yang di dinilai Baik oleh masyarakat) dengan nilai 62,51 sampai dengan 81,25.
- ⇒ Kategori C (pelaksanaan pelayanan di unit penyelenggara pelayanan yang di dinilai Kurang Baik oleh masyarakat) dengan nilai 43,76 sampai dengan 62,50.
- ⇒ Kategori D (pelaksanaan pelayanan di unit penyelenggara pelayanan yang di dinilai Tidak Baik oleh masyarakat) dengan nilai 25,00 sampai dengan 43,75.

Tabel 3.7
Nilai IKM Kota Tangerang Tahun 2015-2019

No.	Tahun Pengukuran	Nilai IKM	Kategori	Mutu
1	2015	78,77	B	Baik
2	2016	80,45	B	Baik
3	2017	82,26	A	Sangat Baik
4	2018	82,54	A	Sangat Baik
5	2019	82,62	A	Sangat Baik

Sumber: Bagian Organisasi SETDA Kota Tangerang, 2020

Berdasarkan data dalam tabel di atas, diperoleh peningkatan yang linear dan signifikan atas nilai IKM Kota Tangerang periode Tahun 2015-2019. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penilaian IKM tiap tahun yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang mampu memotivasi tiap unit-unit penyelenggara pelayanan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya.



III.3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA TANGERANG TAHUN 2019

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Tangerang Tahun 2019

Misi 1 : Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berintegritas

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2019		
			Target	Realisasi	%
1	Indeks Pendidikan (Indeks Pengetahuan)	Point	73,81	73,94	100,18
2	Indeks Kesehatan (Indeks Harapan Hidup)	Point	79,22	79,34	100,15
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,53	98,46	100,95
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	98,97	98,99	100,02
5	Angka Kematian Bayi (AKB)	Orang per 1.000 kelahiran hidup	2,99	1,15	161,54
6	Angka Kematian Ibu (AKI)	Orang per 100.000 kelahiran hidup	24,67	15,66	136,52
7	Angka Kesakitan	Orang per 100.000 penduduk	344,00	223,08	135,15
8	Tingkat Kemiskinan (persentase penduduk miskin)	%	4,53	4,43	102,21
9	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Orang	113.717	113.525	100,17



No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2019		
			Target	Realisasi	%
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,84	7,13	95,76
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	60	61,43	102,38
12	Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Daerah	A, BB, B, CC, C, D	B	B	100,00
13	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	100,00
14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik	Point	82,60	82,62	100,02

Misi 2 : Bersama Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kota Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2019		
			Target	Realisasi	%
15	Indeks Sarana Prasarana Perkotaan	Point	71,28	71,89	100,86
16	Persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai	%	85,67	86,23	100,65
17	Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan	Km/jam	21	21	100,00
18	Persentase permukiman kumuh	%	0,14	0,12	114,29
19	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100,00	100,00	100,00
20	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100,00	99,79	99,79
21	Luas banjir dan genangan	Ha	382,98	392,16	80,22
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	54,42	60,32	110,84
23	Tingkat Pengelolaan Sampah	%	100,00	100,00	100,00



Misi 3 : Bersama Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Mandiri Dan Berkeadilan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2019		
			Target	Realisasi	%
24	Nilai PDRB	Rp. Triliyun	114,12	111,89	98,05
25	Indeks Pengeluaran (daya beli)	Point	81,5	82,24	100,91
26	Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	Rp. Triliyun	7,13	7,97	111,78
27	Laju Inflasi	%	3,50	3,31	105,43
28	Indeks Gini (gini rasio)	Point	0,35	0,32	108,57

Hasil dari capaian tersebut didukung pula dengan program prioritas daerah di Kota Tangerang yang telah ditetapkan dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Tangerang.

Program-program pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tangerang 2019-2023, yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pencapaian kinerja terhadap Janji Walikota dan Wakil Walikota diuraikan dalam sub bab pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang relevan.



III.4 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Tangerang untuk mewujudkan pencapaian Misi secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2023, lebih lanjut diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019.

Dalam laporan ini, Pemerintah Kota Tangerang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran serta penilaian tingkat pencapaian target tujuan dari masing-masing indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2019-2023 maupun RKPD Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kota Tangerang Tahun 2019, RPJMD Tahun 2019-2023 dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang, telah ditetapkan 5 (lima) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9
Ketercapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Terhadap Target
Tahun 2019

No.	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan/ Sasaran	Keterangan
Misi 1 : Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berintegritas				
1.1	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	2	100,16	Melebihi Target



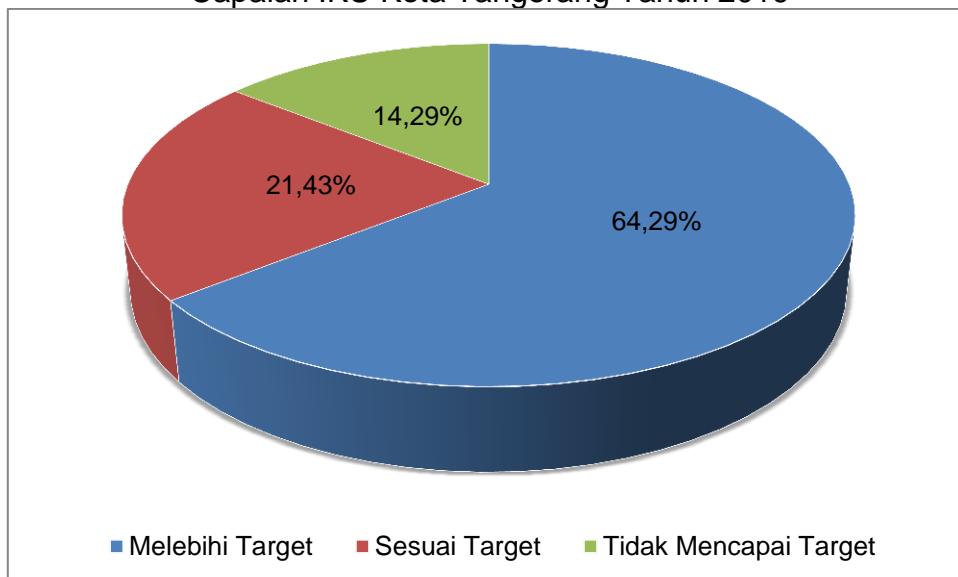
No.	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran	Keterangan
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	2	100,49	Melebihi Target
1.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3	144,40	Melebihi Target
1.2	Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1	102,21	Melebihi Target
1.2.1	Menurunnya Kemiskinan Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	100,17	Melebihi Target
1.2.2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1	95,76	Tidak Mencapai Target
1.3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	102,38	Melebihi Target
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik	3	100,01	1 Indikator Melebihi Target dan 2 Indikator Sesuai Target
Misi 2 : Bersama Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kota Yang Berkelaanjutan Dan Berwawasan Lingkungan				
2.1	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan	1	100,86	Sesuai Target
2.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Perkotaan	2	100,33	1 Indikator Melebihi Target dan 1 Indikator Sesuai Target
2.1.2	Meningkatnya Kualitas Permukiman	3	104,69	1 Indikator Melebihi Target, 1 Indikator Sesuai Target dan 1 Indikator Tidak Mencapai Target
2.1.3	Meningkatnya Kualitas Drainase Dan Sumber Daya Air	1	97,66	Tidak Mencapai Target
2.1.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2	105,42	1 Indikator Melebihi Target dan 1 Indikator Sesuai Target
Misi 3 : Bersama Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Mandiri Dan Berkeadilan				
3.1	Meningkatkan Kualitas Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing	2	99,48	1 Indikator Melebihi Target, dan 1 Indikator Tidak Mencapai



No.	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran	Keterangan
				Target
3.1.1	Meningkatnya Investasi Daerah	1	111,78	Melebihi Target
3.1.2	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	2	107,00	Melebihi Target

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tujuan dan sasaran di atas dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Kota Tangerang, 18 indikator melebihi target (64,29%), 6 indikator sesuai target (21,43%), dan 4 indikator tidak mencapai target (14,29%).

Gambar 3.5
Capaian IKU Kota Tangerang Tahun 2019



Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2019 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut:



III.4.1 TUJUAN 1

Pencapaian Tujuan 1 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Tujuan 1

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	2019		
					Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pendidikan (Indeks pengetahuan)	Point	73,45	73,81	73,94	100,18
		Indeks Kesehatan (Indeks harapan hidup)	Point	79,15	79,22	79,34	100,15

Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 1 Tahun 2019, melalui 2 indikator kinerja adalah sebesar 100,51%, dengan kategori **Sangat Tinggi**. Realisasi Tahun 2019 mengalami peningkatan 1 point dari Tahun 2018 untuk indikator Indeks Pendidikan dan peningkatan sebesar 0,19 point dari Tahun 2018 untuk indikator Indeks Kesehatan. Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan salah satu komponen penyusun dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan, yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Pada Tahun 2019 indeks Pendidikan di Kota Tangerang ditargetkan sebesar 73,81 point, dan terealisasi sebesar 73,94 point atau dengan capaian 100,18%. Realisasi di Tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (2018) yaitu 73,45 point atau sebesar 0,87%.

• Upaya yang telah dilakukan

Untuk mengoptimalkan pencapaian Indeks Pendidikan, Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan upaya yaitu meningkatkan Angka



Partisipasi Murni (APM) sekolah di tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) dengan :

- a. Memberikan akses bebas biaya pendidikan bagi warga Kota Tangerang yang tidak mampu melalui Program Pembiayaan Tangerang Cerdas SD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.788.387.500,- yang diberikan kepada siswa tidak mampu jenjang SD/MI dengan rincian 8.282-siswa SD dan 700-siswa MI dengan besaran Biaya Personal Siswa Rp.80.000,-/siswa/bln dan siswa SMP dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.625.400.000,- yang diberikan kepada siswa tidak mampu jenjang SMP/MTs sebanyak 2.926-siswa dengan besaran Biaya Personal Siswa sebesar Rp.100.000,-/siswa/bln.
- b. Meningkatkan sarana prasarana sekolah di 64 SD dan 32 SMP
- c. Mempermudah akses masyarakat untuk mengikuti pendidikan non forma melalui pemberian bantuan operasional pendidikan (Paket A,B dan C) kepada 37 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- d. Meningkatkan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan melalui subsidi Biaya Operasional Pendidikan SD/MI Negeri dan Swasta dengan alokasi anggaran sebesar Rp.167.674.924.214,- yang diberikan kepada 463 sekolah SD/MI Negeri dan Swasta, besaran BOP persekolah berdasarkan jumlah siswa dengan tarif Rp.50.000,-/siswa/bln, Adapun di tingkat SMP/MTs Negeri dan Swasta dengan alokasi anggaran sebesar Rp.83.364.785.900,- yang diberikan kepada 195 SMP/MTs Negeri dan Swasta, besaran BOP persekolah berdasarkan jumlah siswa dengan tarif Rp.105.000,/siswa/bln.

- **Kendala yang dihadapi**

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan melalui bersekolah. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor kemiskinan keluarga yang mendorong anak usia sekolah untuk



menghabiskan waktu bekerja memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

- b. Keterbatasan kapasitas sekolah negeri dan PKBM di Kota Tangerang untuk menampung siswa, sehingga subsidi yang diberikan untuk operasional sekolah belum dapat mencakup seluruh siswa yang membutuhkan.

- **Solusi tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan**

- a. Meningkatkan pembiayaan untuk akses bersekolah khususnya terhadap siswa yang tidak mampu, baik di lingkup sekolah negeri maupun swasta agar dapat memenuhi kebutuhan.
- b. Menambah kapasitas rombongan belajar untuk meningkatkan daya tamping sekolah negeri.
- c. Melakukan pendataan yang akurat terkait siswa tidak mampu yang membutuhkan pembiayaan sekolah.
- d. Meningkatkan sarana prasarana sekolah dan kompetensi guru.
- e. Meningkatkan akses pembiayaan untuk program Kejar Paket A, B dan C.

2. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan merupakan sebutan lain dari Indeks Harapan Hidup yang didasari dari penghitungan Angka Harapan Hidup di suatu wilayah. Komponen ini merupakan salah satu penyusun nilai Indeks Pembangunan Manusia. Untuk Tahun 2019 indeks kesehatan di Kota Tangerang ditargetkan sebesar 79,22 point dengan realisasi sebesar 79,34 atau capaian sebesar 100,15%. Realisasi tersebut meningkat sebesar 0,19 point dari tahun sebelumnya (2018) yaitu 79,15. Untuk mengoptimalkan pencapaian indeks kesehatan sejak Tahun 2018 hingga 2019 Kota Tangerang melakukan beberapa upaya untuk menekan angka kematian dan kesakitan yang merupakan salah satu komponen pendukung dalam penghitungan Indeks Harapan Hidup :



- **Upaya yang telah dilakukan**

- a. Mengoptimalkan program Universal Health Care yaitu pembiayaan kesehatan seluruh warga Kota Tangerang khususnya yang masuk kategori miskin dengan mengikutsertakan dalam program BPJS. Sehingga seluruh warga Kota Tangerang dapat mengakses fasilitas kesehatan gratis yang dibiayai BPJS.
- b. Meningkatkan penanganan terhadap ibu hamil dan melahirkan melalui “Gerakan Penyelamatan Ibu Melahirkan” yang mengoptimalkan seluruh fasilitas kesehatan untuk melakukan penanganan kegawatdarutan ibu melahirkan yang diperkuat dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal.
- c. Dalam upaya penguatan sistem rujukan, maka Kota Tangerang juga meluncurkan, program Sistem Rujukan Ibu dan Bayi “SIJARIEMAS” dalam bentuk Call Center SIJARIEMAS untuk melayani rujukan kegawatdaruratan selama 24 jam 7 hari seminggu.
- d. Meningkatkan status 17 puskesmas menjadi puskesmas dengan persalinan 24 jam.
- e. Meluncurkan program CAGEUR JASA (Colaborasi Kunjungan Keluarga Terintegrasi Keluarga Sehat) untuk memberikan pelayanan ke rumah warga oleh tenaga kesehatan dengan tidak membedakan status kesehatannya. Serta melakukan pendampingan Ibu hamil dan Balita dengan memperkuat Kader SRIKANDI (Sedari Dini Kawal Ibu Hamil dan Balita).
- f. Meningkatkan pelatihan tenaga kesehatan terkait surveillans TB di semua fasilitas kesehatan dan mengintensifkan surveillans untuk mengidentifikasi dan menemukan kasus TB agar dapat ditangani.



- g. Mengupayakan semua fasilitas kesehatan melakukan pengobatan TBC sesuai standar dengan mengaktifkan Koalisi Organisasi profesi TB (KOPI TB) untuk membantu pengawasannya.

• **Kendala yang dihadapi**

- a. Kurangnya ketrampilan tata kelola klinis di RS dan Puskesmas, maka diperlukan Pelatihan Penanganan Medik untuk tenaga kesehatan RS khususnya untuk mengantisipasi penanganan ibu melahirkan dan pasien penyakit menular.
- b. Belum optimalnya deteksi dini potensi penyakit menular dikarenakan keterbatasan petugas kesehatan dan peralatan pendukung
- c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan antisipasi terhadap penyakit menular, Kondisi ini juga disebabkan pendidikan, budaya dan kemiskinan.

• **Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan**

- a. Meningkatkan keterampilan petugas kesehatan dengan melaksanakan pelatihan rutin terhadap penanganan penyakit maupun antenatal care
- b. Memberdayakan kader yang diberikan pelatihan untuk mendeteksi penyakit menular sekaligus sebagai agen menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui kegiatan posyandu maupun penyuluhan.

III.4.2 TUJUAN 2

Pencapaian Tujuan 2 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Tujuan 2

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	2019		
					Target	Realisasi	%
2	Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	%	4,76	4,53	4,43	102,21



Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 2 Tahun 2019, melalui 1 indikator kinerja adalah sebesar 102,21%, dengan kategori **Sangat Tinggi**. Realisasi indikator Tingkat Kemiskinan Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,33% dari realisasi Tahun 2018. Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

3. Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)

Definisi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Kota Tangerang diatas rata-rata garis kemiskinan di Provinsi Banten, bahkan yang tertinggi se Provinsi Banten. Tingginya Garis Kemiskinan Kota Tangerang dikarenakan tingginya harga komoditi makanan dan bukan makanan seperti perumahan, listrik, bensin, pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya berimbas pada konsumsi masyarakat kelompok marginal di Kota Tangerang. Untuk Tahun 2019 persentase penduduk miskin di Kota Tangerang ditargetkan sebesar 4,53% atau menurun sebesar 0,23% dari realisasi Tahun 2018 sebesar 4,76%. Adapun berdasarkan data BPS Tahun 2019 persentase penduduk miskin di Kota Tangerang sebesar 4,43% atau mencapai 102,21% terhadap target.

- **Upaya yang telah dilakukan**

Untuk menangani kemiskinan Pemerintah Kota Tangerang telah menempuh langkah-langkah lintas sektor sebagai berikut:

- a. Mempermudah akses pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui pembiayaan siswa miskin dan asuransi kesehatan BPJS untuk seluruh warga Kota Tangerang yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
- b. Kemiskinan terkait dengan kurangnya akses terhadap lapangan kerja. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kota Tangerang mengadakan kerjasama dengan pengusaha setempat untuk memberikan prioritas lapangan kerja bagi warga Kota Tangerang



yang kompeten. Disamping itu untuk mendukung lapangan usaha, Kota Tangerang mempersiapkan Sekolah Kejuruan yang mendukung kebutuhan sekaligus memberikan keterampilan wirausaha kepada siswa. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan.

- c. Mengadakan Job Fair secara rutin dengan melibatkan lapangan usaha baik dalam dan luar Kota Tangerang yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan
- d. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Bersama, dan Koperasi yang dibina oleh Dinas Sosial dan Dinas Koperasi dan UKM. Selain itu Pemerintah Kota Tangerang juga memberikan akses kepada UKM Kota Tangerang dalam event seperti Festival Cisadane dan Tangerang Expo yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- e. Mengadakan pembinaan program Kampung Tematik untuk meningkatkan potensi pariwisata di Kota Tangerang berbasis potensi local di masing-masing wilayah
- f. Memberikan kemudahan akses tempat tinggal yang layak kepada masyarakat rentan miskin melalui program bedah rumah dan pembangunan rumah susun serta layanan air bersih
- g. Melakukan pendataan secara detail sehingga didapatkan informasi nama dan alamat warga berkategori miskin.

- **Kendala yang Dihadapi**

- a. Banyaknya perusahaan di Kota Tangerang yang berpindah lokasi ke daerah lain, dikarenakan tingginya Upah Minimum Relatif bagi buruh di Kota Tangerang.
- b. Adanya revolusi teknologi industri yang mendorong perubahan dunia usaha saat ini berbasis online.
- c. Belum optimalnya pelatihan dan pendampingan keterampilan berusaha di Kota Tangerang.



d. Belum optimalnya cakupan pelayanan pendidikan dan kesehatan karena terbatasnya fasilitas gedung sekolah dan puskesmas, sehingga dibutuhkan penambahan agar mencukupi kebutuhan yang ideal.

- **Rencana Tindak Lanjut yang Akan Dilaksanakan**

- a. Mengadakan pelatihan dan pendampingan kepada UKM untuk melaksanakan usaha berbasis online.
- b. Memberikan kredit sebagai modal usaha bagi UKM di Kota Tangerang.
- c. Menambah fasilitas Kesehatan dan Pendidikan untuk meningkatkan akses pelayanan kepada warga yang membutuhkan.
- d. Melakukan update data warga miskin secara berkala untuk memastikan program yang dilaksanakan tepat sasaran.
- e. Mengadakan kerjasama dengan pihak swasta untuk mengadakan event-event yang mendukung dalam peningkatan potensi pariwisata di Kota Tangerang, termasuk juga dengan mempromosikan tempat wisata di Kota Tangerang.
- f. Melakukan revitalisasi kawasan Pasar Anyar untuk memberikan fasilitas yang lebih memadai bagi UKM di Kota Tangerang.

III.4.3 TUJUAN 3

Pencapaian Tujuan 3 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Tujuan 3

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	2019		
					Target	Realisasi	%
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	57,49	60,00	61,43	102,38

Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 3 Tahun 2019, melalui 1 indikator kinerja adalah sebesar 102,38%, dengan kategori **Sangat Tinggi**. Realisasi indeks reformasi birokrasi Tahun 2019 terjadi peningkatan 3,94 point dari



realisasi tahun sebelumnya (2018) yaitu 57,49. Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

4. Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian Kinerja Tujuan 3 Tahun 2019, melalui indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2019 hasil penilaian mandiri sebesar 61,43 dengan kategori baik (B). Nilai tersebut merupakan hasil sistem Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi on line sesuai dengan Permenpan RB RI nomor 8 Tahun 2019. Sedangkan nilai indeks evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi menunggu informasi lebih lanjut. Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hasil penilaian pada aplikasi PMPRB on line terhadap 8 (delapan) area perubahan menggunakan 2 pola yaitu penilaian proses (60%) ditambah penilaian hasil (40%). Dari penilaian proses terdapat 8 (delapan) area penilaian yaitu :

1) Manajemen Perubahan

Indeks RB yang diperoleh dari PMPRB on line 2019 untuk area manajemen perubahan sebesar 2,5 indeks tersebut tercapai dari indikator :

- a. Tim Reformasi Birokrasi,
- b. Road Map Reformasi Birokrasi,
- c. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi,
- d. Birokrasi Perubahan pola pikir dan budaya kinerja.

Hasil yang diharapkan dari area perubahan ini adalah :

- Terciptanya mental/perilaku birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.
- Pembentukan Tim Manajemen Perubahan.
- Meningkatnya kinerja seluruh karyawan Pemerintah Kota Tangerang.



- Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi.
- Sosialisasi terhadap perubahan yang akan dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi.

Pencapaian/kemajuan untuk area ini yaitu :

- Telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Walikota nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dan Peraturan Walikota nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
- Telah ditetapkannya Keputusan Walikota Tangerang Nomor 800/Kep.664-Bag.Organisasi/2019 tentang Agen Perubahan Penerapan Budaya Kerja PRIMA pada Organisasi Perangkat Daerah.
- Telah dilaksanakan diklat Manejemen Perubahan bagi calon agen perubahan dari tanggal 9 sampai dengan 13 April 2019.
- Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di 10 (sepuluh) OPD Kota Tangerang.

Kendala yang dihadapi antara lain :

- Implementasi RB belum dilakukan secara merata pada seluruh OPD, melainkan masih fokus pada pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Tim RB di level Pemkot dan beberapa OPD saja.
- Agen perubahan belum sepenuhnya memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan RB di Kota Tangerang.
- Belum tersedianya media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan.
- Belum dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asessor PMPRB.
- Etika dan budaya malu pegawai masih perlu ditingkatkan.



- Masih terdapat pemimpin/atasan belum mencerminkan sebagai panutan dan ketauladanan.

Rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan :

- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 Kota Tangerang.
- Melaksanakan internalisasi arah perubahan yang ditetapkan kepada seluruh pegawai secara konsisten dan memastikan segala kebijakan penerapan RB dapat terimplementasi sampai ke level unit.
- Menyediakan media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan.
- Memaksimalkan peran *agent of change* sebagai penggerak perubahan di masing-masing unit kerja.
- Meningkatkan implementasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan meningkatkan kapabilitas Tim Asessor dan meningkatkan koordinasi Tim Asessor agar mencapai konsensus dalam pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi.
- Melibatkan pimpinan tinggi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Tangerang.

2) Penataan Peraturan Perundang-undangan

Indeks RB yang diperoleh dari PMPRB on line 2019 untuk area Penataan Peraturan Perundang-undangan sebesar 3,75 dengan indikator :

- a. Harmonisasi.
- b. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.



Hasil yang diharapkan dari area perubahan ini adalah :

- Meningkatnya kualitas Peraturan Perundang-undangan yang, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.
- Tersosialisasikannya produk hukum kepada masyarakat.

Pencapaian/kemajuan untuk area ini yaitu :

- Telah dilakukan evaluasi peraturan yang tumpang tindih dan dilakukan proses revisi terhadap peraturan yang tumpang tindih, disharmonis.
- Penghargaan pengelola JDIH terbaik untuk Kota Tangerang karena dinilai berperan aktif dalam membina dan mengembangkan JDIH berdasarkan 6 aspek JDIH dalam rangka mewujudkan sistem integrasi informasi hukum.
- Pembuatan aplikasi yang berguna untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi di Kota Tangerang untuk memudahkan dalam pencarian produk hukum Kota Tangerang, baik itu Perda maupun Perwal, serta layanan konsultasi hukum online.
- Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Kota Tangerang yang dilakukan di 5 (lima)kecamatan yaitu, Kecamatan Tangerang, Batuceper, Benda, Neglasari, Periuk. Adapun materi yang disampaikan kepada masyarakat adalah terkait Tipikor, Pungli dan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.
- Telah dilakukan pengkajian dan pembahasan dengan melibatkan tim program pembentukan daerah dilingkungan pemerintah kota Tangerang yang terdiri dari pejabat yang kompeten di bidangnya, stakeholder pemrakarsa, perancang peraturan perundang-undangan dari kanwil kementerian hukum dan HAM, unsur biro hukum provinsi dan praktisi tenaga ahli, sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.



- Sebanyak kurang lebih 500 Produk Hukum Daerah telah diterbitkan sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Tangerang.

Kendala yang dihadapi antara lain:

- Ketergantungan OPD dalam hal penyusunan produk hukum daerah pada Bagian Hukum dikarenakan kurangnya pengetahuan terkait legal drafting produk hukum daerah sehingga produk hukum yang disampaikan ke bagian hukum masih mentah secara format maupun substansi.

Rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan:

- Meningkatkan peran aktif Pengelola Dokumentasi Hukum di setiap OPD yang bertugas melakukan evaluasi terhadap produk hukum daerah di OPD masing-masing.
- Perlu diadakannya bintek legal drafting bagi seluruh OPD terkait penyusunan produk hukum daerah.

3) Penataan dan Penguatan Organisasi

Indeks RB yang diperoleh dari PMPRB on line 2019 untuk area Penataan dan Penguatan Organisasi sebesar 4,2 dengan indikator :

- a. Evaluasi.
- b. Penataan.

Hasil yang diharapkan dari area perubahan ini adalah :

- Penataan dan penguatan organisasi difokuskan pada penataan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, dengan berlandaskan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pembentukan perangkat daerah ini disesuaikan dengan potensi dan karakteristik, serta memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- Penyempurnaan dalam penyusunan dan evaluasi tugas fungsi perangkat daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi duplikasi/tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas fungsi.



Pencapaian/kemajuan untuk area ini yaitu:

- Sudah dilakukannya penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai hasil evaluasi kelembagaan termasuk di dalamnya revisi terkait tupoksi OPD agar lebih efektif.
- Dilaksanakannya kegiatan pembinaan kelembagaan perangkat daerah.
- Sudah dilakukannya Pemetaan Intensitas Urusan Pemerintahan dan Penentuan Beban Kerja Perangkat Daerah.
- Sudah ditetapkannya Peraturan Walikota Tangerang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Bagi Pegawai negeri Sipil tanggal 23 Oktober 2018.

Kendala yang dihadapi antara lain:

- Masih terdapat pemangku jabatan yang belum beradaptasi

Rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan:

- Melakukan pembinaan dan pengendalian perangkat daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018.
- Melaksanakan evaluasi kelembagaan sesuai dengan Permenpan No 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

4) Penataan Tata Laksana

Indeks RB yang diperoleh dari PMPRB on line 2019 untuk area Penataan Tata laksana sebesar 1,67 dengan indikator :

- a. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama.
- b. E-Government.
- c. Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Kualitas Pengelolaan Arsip.

Hasil yang diharapkan dari area perubahan ini adalah :

- Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.



- Terintegrasikannya seluruh aplikasi.
- Setiap OPD sudah mempunyai SOP untuk dijadikan pedoman dalam mensinergikan berbagai tugas pokok dan fungsi kewenangan OPD/unsur kerja.
- Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik.
- Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
- Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal.
- Semua OPD Pelayanan sudah mempunyai SPM dan SP untuk menjamin terlaksananya seluruh proses pelayanan melalui prosedur yang benar, meliputi alur, persyaratan, kelengkapan, output yang dihasilkan dalam waktu yang tetap (standard).
- Sudah memiliki peta bisnis sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Pencapaian/kemajuan untuk area ini yaitu :

- Pembuatan aplikasi SOP semua OPD Pemerintah Kota Tangerang termasuk instansi vertikal yang dapat diakses oleh publik.
- Mengimbau kepada OPD se-Kota Tangerang untuk melaksanakan evaluasi SOP sesuai Peraturan Walikota Tangerang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur.
- Adanya pembagian bidang tugas pada Asisten lingkup Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Tangerang nomor 061/128-Bag.Orgs/2017 tentang Bidang Tugas Asisten pada Sekretariat Daerah Dalam Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah dan Pemberian Fasilitasi Bagi Lembaga Non Perangkat Daerah.
- Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi yang dituangkan dalam Peraturan Walikota



Tangerang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi yang dituangkan dalam Master Plan Teknologi Informasi Tahun 2014-2019.
- Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
- Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi yaitu aplikasi data base kepegawaian dan kinerja pegawai, aplikasi evaluasi dan pelaporan, aplikasi pengelola anggaran, aplikasi perencanaan penganggaran, aplikasi tata kelola keuangan, pelaksanaan monitoring jaringan internet, pelaksanaan pengelolaan data center terpusat dan sistem monitoring jaringan internet dan intranet.
- Sudah ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Nomor : 065/Kep. 14-Sekret/2019 tentang Penetapan Dokumen Standar Kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada UPT LPSE Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tangerang.

Kendala yang dihadapi antara lain:

- Implementasi terhadap teknologi informasi belum seluruh OPD melaksanakan, misalnya dalam penerapan e-office.
- Belum adanya kebijakan yang mengatur tata naskah dinas elektronik di Kota Tangerang.
- Belum ada jabatan struktural khusus sebagai pelaksana teknis PPID
- Ruangan penyimpanan arsip OPD yang terbatas.



- Belum adanya peta proses bisnis sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.
- Belum semua OPD melakukan penginputan SOP ke dalam aplikasi SOP Kota Tangerang.
- Rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan.
- Sosialisasi pembuatan peta bisnis proses , peta relasi, peta sub proses bisnis, peta lintas fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.
- Mendorong semua OPD untuk melakukan evaluasi dan meneliti SOP serta memuat dalam menu <https://sop.tangerangkota.go.id> agar dapat diakses oleh seluruh pegawai.
- Mendorong implementasi e-office ke semua OPD.
- Menyusun Peraturan Walikota Tangerang tentang Tata Naskah Dinas Elktronik.
- Melakukan pendampingan ke OPD dalam hal penataan arsip aktif dan inaktif.

5) Penataan Sistem Manajemen SDM

Indeks RB yang diperoleh dari PMPRB on line 2019 untuk area Penataan Sistem Manajemen SDM sebesar 11,42 dengan indikator :

- a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN.
- c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi.
- d. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka.
- e. Penetapan kinerja individu.
- f. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai.



- g. Pelaksanaan evaluasi jabatan.
- h. Sistem Informasi Kepegawaian.

Area ini mempunyai hasil yang diharapkan, yaitu terciptanya SDM Aparatur yang aparatur dan profesional dengan fokus perubahan sebagai berikut :

- Membuat/menyusun konsep sistem pola karier, disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi daerah.
- Melakukan peningkatan kualitas pegawai melalui pembinaan terhadap ketentuan/peraturan dibidang kepegawaian.
- Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional.
- Meningkatkan kapasitas terhadap jabatan fungsional tertentu, dan mendorong pegawai untuk tidak berharap pada jabatan struktural.
- Mengembangkan dan updating data pada Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.
- Melakukan uji kompetensi terhadap seluruh pegawai, sebagai salah satu bahan untuk penempatan pegawai.
- Menyusun konsep peningkatkan kesejahteraan pegawai, melalui tambahan tunjangan penghasilan.

Pencapaian/kemajuan untuk area ini yaitu:

- Telah dilakukan penyusunan Analisis Jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 86 Tahun 2018.
- Telah dilakukan penyusunan Analisis Beban Kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 87 Tahun 2018.
- Pembuatan aplikasi E-Formasi untuk perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi.
- Telah dilaksanakannya proses penerimaan CPNS yang transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN.
- Telah disusunnya standar kompetensi Jabatan untuk jabatan fungsional tertentu dan jabatan pimpinan tinggi pratama.



- Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil kuesioner kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai.
- Telah dilaksanakan promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi secara kompetitif dan obyektif melalui panitia seleksi yang independent sesuai amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2014.
- Pengumuman secara terbuka melalui website Kota Tangerang seleksi untuk 9 (sembilan) jabatan pimpinan tinggi pratama
- Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja
- Sudah ditetapkannya nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai kebutuhan organisasi yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Tangerang Peraturan Walikota Tangerang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
- Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kode Etik ASN Pemerintah Kota Tangerang.
- Telah dibentuknya Majelis Kode Etik sesuai dengan Keputusan Walikota Tangerang Nomor 860.1/Kep.444-BKPSDM/2017 tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi.
- Pengembangan aplikasi kehadiran pegawai Total Egov, aplikasi untuk absensi sekaligus pelacak PNS.
- Telah ditetapkannya Peraturan Walikota Tangerang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Bagi PNS.
- Telah disusunnya informasi faktor jabatan.



- Telah ditetapkannya peta jabatan.
- Pembangunan Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASN) yang merupakan pengembangan lanjutan dari Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIKDA) yang dapat diakses oleh pegawai.
- Telah dilaksanakannya evaluasi penyelenggaraan diklat di Pemerintah Kota Tangerang yang dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu Evaluasi Penyelenggaraan dan Evaluasi Pascadiklat.
- Pengumpulan data dukung Analisis Beban Kerja dalam rangka Pembangunan sistem aplikasi Analisis Beban Kerja, yang akan dibangun dengan menginduk kepada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang telah ada.
- Penyelenggaraan Tes Seleksi Mutasi Masuk ke Pemerintah Kota Tangerang yang bertujuan untuk menyaring Aparatur Sipil Negara yang potensial dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.
- Telah dilakukan assessment kepada sebagian besar pegawai
- Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai.

Kendala yang dihadapi antara lain :

- Belum disusunnya standar kompetensi jabatan secara menyeluruh.
- Rencana redistribusi pegawai belum disusun dan diformalkan.
- Belum dilakukan assesment kepada seluruh pegawai.
- Belum dilakukan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai.
- Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) belum dilakukan secara nasional.
- Belum tersedianya pola karir pegawai.
- Hasil penilaian kinerja belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu dan belum sepenuhnya.



- penetapan kinerja belum memiliki kesesuaian dengan level di atasnya.

Rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan :

- Menyusun standar kompensi jabatan.
- Memiliki rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan.
- Mengadakan kegiatan assesment untuk sebagian pegawai yang belum melaksanakan assessment.
- Mengadakan pengembangan kompetensi untuk sebagian pegawai yang belum melaksanakan pengembangan kompetensi.
- Penerapan sanksi kepada pegawai yang melanggar disiplin.
- Penyusunan pedoman pola karir pegawai.
- Evaluasi penilaian kinerja.

6) Penguatan Akuntabilitas

Indeks RB yang diperoleh dari PMPRB on line 2019 untuk area Penguatan Akuntabilitas sebesar 2,84 dengan indikator :

- a. Keterlibatan pimpinan.
- b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja.

Hasil yang diharapkan dari area perubahan ini adalah :

- Penguatan penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.
- Memperkuat sistem akuntabilitas Pemerintah Kota Tangerang di mana setiap sistem atau perangkat pendukung laporan keuangan saling terintegrasi satu sama lain.
- Pelaporan tepat waktu.
- Pembinaan kepada pengelola keuangan OPD.



Pencapaian/kemajuan untuk area ini yaitu:

- Keterlibatan pimpinan dinilai lebih aktif dalam penyusunan perencanaan kinerja dan pemantauan pencapaian kinerja dibanding pada tahun sebelumnya.
- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk yang kedua kalinya berturut-turut berhasil meraih terbaik pertama Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah se-Provinsi Banten di Tahun 2018.
- Pemerintah Kota Tangerang melalui BKPSDM Bidang Diklat secara rutin menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa bagi aparatur sipil yang bertugas menangani kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dengan tujuan utamanya adalah membentuk tenaga – tenaga yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam proses kegiatan pengadaan barang/jasa sehingga dapat menghasilkan pengadaan barang/jasa yang sesuai kebutuhan dengan proses yang efektif dan efisien.
- Telah disusunnya pedoman akuntabilitas kinerja yaitu Peraturan Walikota Tangerang Nomor 69 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pembuatan sistem i-LPPD Kota Tangerang.
- Pengembangan basis e-data.
- Penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2018 yang diberikan dengan dasar pemerataan pembangunan infrastruktur, penerapan pengelolaan kekayaan berbasis aktual dan penataan pemerintahan yang baik melalui prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang telah memberikan dampak positif dalam penyelenggaraan pemerintahan.



- Pengembangan sistem keuangan daerah mulai dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Sistem Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Sievlap serta Sistem Akuntansi Akrual (Spektra) berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas serta amanah dari reformasi keuangan negara.
- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dua belas kali berturut-turut kepada Pemerintah Kota Tangerang atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2018.
- Telah dilaksanakannya Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018.
- Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang yang dapat diakses publik.

Kendala yang dihadapi antara lain :

- Kurangnya kapasitas dan kompetensi pegawai untuk menyusun laporan kinerja.

Rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan :

- Mendorong keterlibatan pimpinan untuk lebih aktif dalam penyusunan perencanaan kinerja dan pemantauan pencapaian kinerja kualitas dan kuantitas SDM yang menangani laporan kinerja dan Akuntasi.
- Pengembangan Teknologi Informatika untuk Aplikasi Keuangan.
- Pelatihan Akuntasi berkelanjutan.
- Mendorong kepatuhan OPD terhadap peraturan yang berlaku.
- Peningkatan Sistem Pengendalian Internal.

7) Penguatan Pengawasan

Indeks RB yang diperoleh dari PMPRB on line 2019 untuk area Penguatan Pengawasan sebesar 4,42 dengan indikator :

- a. Gratifikasi.
- b. Penerapan SPIP.
- c. Pengaduan Masyarakat.



- d. Whistle-Blowing System.
- e. Penanganan Benturan Kepentingan.
- f. Pembangunan Zona Integritas.
- g. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Hasil yang diharapkan dari area perubahan ini adalah :

- Penguatan sistem pengawasan, untuk mengubah perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya.
- Meningkatnya kapasitas manajemen APIP.
- Terevaluasinya LKIP OPD.
- pendampingan pembuatan LHKPN dan LHKASN.
- Terimplementasinya SPIP di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

Pencapaian/kemajuan untuk area ini yaitu:

- Telah ditetapkannya kebijakan tentang penanganan gratifikasi yaitu Kepwal No : 800/Kep.335-Inspektorat/2016 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
- Telah disusunnya kebijakan penanganan pengaduan masyarakat yaitu Perwal No. 15/2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
- Telah dillaksanakannya Pelatihan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat Kota Tangerang.
- Telah dilaksanakannya Bimbingan Teknis Pengisian e-Filling pada Aplikasi e-LHKPN bagi seluruh Pejabat Eseelon 2 dan 3 pada bulan September 2018 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Tangerang berkerjasama dengan Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Mengirimkan beberapa Pejabat Fungsional Tertentu / APIP Kota Tangerang untuk mengikuti diklat audit investigasi



yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada tanggal 24 s.d. 28 September 2018.

- Penyelenggaraan pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang bagi para Eselon 3 untuk mencetak pejabat pelaksana Sistim Pengendalian Intern Pemerintah Kota Tangerang yang professional, dalam membentuk pemahaman aparatur yang bertugas melaksanakan Pengendalian Intern Pemerintah.
- Progres ASN Kota Tangerang Peerintah Kota Tangerang tahun 2019 yang sudah mengisi LHKPN di Kota Tangerang mencapai 90,34%.
- Terselenggaranya Coaching Clinic Penilaian Maturitas SPIP diikuti oleh para Assesor Inspektorat Kota Tangerang.
- Indeks Internal Audit Capability Model (IACM) Pemerintah Kota Tangerang ada di level 5.
- Telah ditetapkannya Peraturan Walikota Tangerang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- Pelaksanaan pencanganan Zona Integritas Kota Tangerang yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 untuk unit kerja DMPTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD dan Kecamatan Clondon.
- Telah ditetapkannya unit Kerja RSUD Kota Tangerang sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kendala yang dihadapi antara lain :

- Belum dilaksanakannya implementasi kebijakan penanganan gratifikasi.
- Belum dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern.



- Belum adanya kebijakan tentang Whistle Blowing System.
- Belum adanya kebijakan penanganan benturan kepentingan
- Belum membangun lingkungan pengendalian.
- Belum semua unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas mendapat predikat “menuju WBK/WBBM”.

Rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan :

- Akan disusunnya kebijakan kebijakan tentang Whistle Blowing System.
- Akan dirumuskan kebijakan penanganan benturan kepentingan.
- Dilaksanakannya evaluasi penanganan gratifikasi.
- Akan dilakukan pemantauan pengendalian intern.
- Mengusulkan unit-unit kerja pelayanan lainnya untuk Zona Integritas.

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indeks RB yang diperoleh dari PMPRB on line 2019 untuk area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebesar 1,5 dengan indikator :

- a. Standar Pelayanan.
- b. Budaya Pelayanan Prima.
- c. Pengelolaan Pengaduan.
- d. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.
- e. Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Hasil yang diharapkan dari area perubahan ini adalah :

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyusun konsep regulasi dalam rangka pelayanan publik, disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi daerah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Meningkatkan kapasitas petugas pelayanan.
- Membangun/mengembangkan teknologi informasi secara optimal.
- Melakukan pendampingan dalam penyusunan SOP pelayanan.
- Meningkatkan pengelolaan pengaduan masyarakat.



Pencapaian/kemajuan untuk area ini yaitu :

- Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik untuk urusan administrasi kependudukan dan lainnya dalam satu lokasi berkerja sama dengan instansi vertikal.
- Telah ditetapkannya regulsi yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Tangerang yaitu Peraturan Walikota Tangerang Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Mal Pelayanan Publik. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 800/Kep.409-Bag.Organisasi/2018 Tentang Penetapan Lokasi Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kota Tangerang. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 800/Kep.215-Bag.Org/2018 Tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Mall Pelayanan Publik Kota Tangerang dan Instruksi Walikota Tangerang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Implementasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kota Tangerang.
- Penyelanggaraan sistem perizinan online Kota Tangeranang yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik.
- Inovasi Pemerintah Kota Tangerang meraih penghargaan dalam kompetisi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan RB) yaitu Pelayanan Kunjungan Rumah Cageur Jasa, Sapa Sehat dan Perijinan Online Terintegrasi 123.
- Pembangunan dan pengembangan Tangerang Live Room (TLR) sebagai pusat pengendali pelayanan publik.
- Pengembangan aplikasi perijinan online yaitu <https://perizinanonline.tangerangkota.go.id/>.
- Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2019 yang dihadiri oleh OPD Pelayanan, Kecamatan dan



Puskesmas serta tanggal 2 Juli 2019 yang dihadiri oleh petugas pelayanan dari kelurahan.

- Launching Pembayaran Retribusi terintegrasi oleh DPMPTSP Kota Tangerang.
- Pelayanan 1 (satu) hari jadi yakni pelayanan akta kelahiran, pelayanan kartu keluarga, dan pelayanan perekaman dan cetak KTP-el (khusus yang belum melakukan perekaman KTP-el) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada event di Kota Tangerang seperti Festival Cisadane.
- Penyediaan 2 (dua) unit mobil pelayanan yang diperuntukan untuk masyarakat yang belum melakukan perekaman dan pencetakan KTP-el.
- Pelayanan perekaman e-KTP oleh Disdukcapil Kota Tangerang dengan jemput bola kerumah warga dengan kategori ODGJ (orang dalam gangguan jiwa).
- Penghapusan denda pengurusan administrasi kependudukan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengintegrasikan pelayanan Akta Kelahiran online di rumah sakit dan kantor kelurahan.
- Pemberlakuan Tanda Tangan Elektronik (TTE) mulai tanggal 25 maret 2019 untuk dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Penyelenggaraan pelayanan pembuatan akta kelahiran di sekolah bertajuk Disdukcapil Road To School.
- Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward di RSUD Kota Tangerang bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.



- Penyediaan mobil ambulans oleh Dinas Kesehatan yaitu mobil ambulans untuk rujukan bagi pasien dan mobil kegawatdaruratan 119.
- Pelayanan mobil jenazah oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman.
- Zonasi pelayanan mobil 119 oleh Dinas Kesehatan yaitu zona timur, tengah dan barat.
- Sosialisasikan peraturan perundang-undangan dibidang pelayanan publik.
- Telah disusunnya kebijakan standar pelayanan untuk semua OPD Pelayanan di Kota Tangerang yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala OPD.
- Pembuatan dan sosialisasi maklumat pelayanan untuk semua OPD pelayanan.
- Pembuatan dan sosialisasi SOP Perizinan Terintegrasi yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Tangerang Nomor 503/Kep.588-Bagian Organisasi/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Terintegrasi.
- Informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media.
- Telah dilaksanakannya Perjanjian Kerja tentang Jasa Pengiriman di Lingkup Pemerintah Kota Tangerang.
- Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan.
- Telah ditetapkannya pendeklegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017.
- Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2018 untuk mendekatkan dan mempermudah aktifitas pelayanan kepada masyarakat.



- Pembuatan aplikasi Layanan aspirasi Kotak Saran Anda (LAKSA) sebagai sarana penyampaian pengelolaan aduan masyarakat di Kota Tangerang.
- Telah ditetapkannya SOP Penanganan Pengaduan.
- Terdapat unit kerja yang menangani pengaduan pelayanan di OPD Pelayanan.
- Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan.
- Indeks kepuasan masyarakat yang dilaksanakan Kota Tangerang pada Tahun 2018 dengan nilai 82,54 point (skala 0-100) dengan kategori baik (B), pada Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 82,62 point (kategori B).
- Telah dilakukan beberapa perbaikan terkait hasil evaluasi survey kepuasan pelanggan tahun 2016, antara lain kecepatan pelayanan.
- Pengaduan pelayanan dikelola melalui media email, telepon, konsultasi tatap muka (dengan pendaftaran konsultasi via sms) dan kontak melalui sistem via website, sosial media, telepon, sms.
- Membuka ruang partisipasi publik melalui forum konsultasi publik sesuai Peraturan Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Pembuatan aplikasi layanan publik yang dapat diakses melalui smartphone berbasis android seperti LAKSA, perizinan online, siap kerja dan lain-lain yang terintegrasi dalam single aplikasi Tangerang LIVE.
- Penetapan jabatan fungsional yang mengelola pengaduan pelayanan dalam Peraturan Walikota Tangerang Peraturan Walikota Tangerang tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.



Kendala yang dihadapi antara lain :

- Belum semua OPD pelayanan mempublikasikan hasil IKM
- Belum semua OPD menindaklanjuti hasil IKM tahun sebelumnya.
- Mall Pelayanan Publik dinilai kurang maksimal karena lokasi yang dianggap tidak strategis.
- Belum semua OPD pelayanan mengimplementasikan pemberian reward/punishment terhadap pemberi layanan.
- Beberapa pelapor menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas sehingga tidak dapat dilakukan pendataan.
- Pengaduan via kotak saran seringkali tidak mencantumkan identitas secara jelas sehingga tidak dapat dikonfirmasi kepada pelapor.
- Sistem dan prosedur pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.
- Teknologi informasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
- Kualitas pelayanan terutama dari sisi kecepatan waktu pelayanan masih harus ditingkatkan.
- Mekanisme pelayanan kedaruratan belum dikelola secara komprehensif.

Rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan :

- Medorong OPD pelayanan untuk mempublikasikan hasil IKM.
- Mendorong OPD untuk menindaklanjuti hasil IKM sebelumnya.
- Mengevaluasi penyelengaraan Mall Pelayanan Publik.
- Mendorong OPD pelayanan untuk mengimplementasikan pemberian reward/punishment terhadap pemberi layanan.
- Penunjukan petugas pengelola pengaduan pelayanan publik di semua OPD pelayanan.
- Mencantumkan catatan pada form pengaduan agar pelapor mencantumkan keluhan secara spesifik.
- Penyempurnaan media pengaduan layanan.



- Mengadakan kegiatan pembinaan pelayanan publik setiap tahunnya.
- Mendorong inovasi pelayanan untuk OPD Pelayanan.

III.4.4 TUJUAN 4

Pencapaian Tujuan 4 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Tujuan 4

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	2019		
					Target	Realisasi	%
4	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan	Indeks Sarana Prasarana Perkotaan	Point	68,65	71,28	71,89	100,86

Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 4 Tahun 2019, melalui 1 indikator kinerja adalah sebesar 100,86%, dengan kategori **Sangat Tinggi**. Realisasi Tahun 2019 meningkat 3,24 point dari realisasi Tahun 2018 (68,65). Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

5. Indeks Sarana Prasarana Perkotaan

Nilai Indeks Sarana Prasarana Perkotaan diambil dari rata-rata nilai indeks sebagai berikut :

- a. Indeks Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik yang merupakan nilai persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan limbah air domestik.
- b. Indeks Penanganan Banjir dan Genangan yang merupakan nilai rata-rata dari luas banjir dan genangan terhadap standar luas wilayah kota dan standar persentase luas banjir dan genangan sebagai pembanding
- c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
- d. Indeks Pelayanan Persampahan yang merupakan rata-rata dari tingkat pengelolaan sampah, tingkat penanganan (pengangkutan) sampah, dan tingkat pengurangan sampah



- e. Indeks Kecepatan Perjalanan Rata-rata.
- f. Persentase Kualitas Jalan dan Jembatan Yang Memadai

Untuk Tahun 2019 nilai Indeks Sarana Prasarana Perkotaan Kota Tangerang ditargetkan sebesar 71,28 point. Adapun realisasi Tahun 2019 sebesar 71,89 atau dengan capaian 100,86% melebihi yang ditargetkan di tahun 2019. Jumlah tersebut juga meningkat 3,24 point dibandingkan realisasi Tahun 2018 (68,65) yang menunjukkan adanya peningkatan di seluruh komponen indikator. Namun untuk mencapai target jangka menengah sebesar 83,93 di tahun kelima RPJMD masih terdapat gap yang harus dipenuhi, khususnya terkait komponen pelayanan sarana prasarana perkotaan seperti penanganan banjir, persampahan dan limbah domestik.

- **Upaya yang telah dilakukan**

Tahun 2019 Pemerintah Kota Tangerang telah menempuh beberapa upaya untuk mengoptimalkan pencapaian Indeks Sarana Prasarana Perkotaan, diantaranya :

- Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang melalui Program Hibah Air Limbah Setempat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyediakan akses sanitasi dasar bagi masyarakat miskin berupa pembangunan septic tank komunal untuk masyarakat menggunakan teknologi bioseptic yang memiliki banyak keunggulan yaitu ramah lingkungan, dapat merubah limbah padat menjadi cair, tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Pada tahun 2019 melalui dana hibah air limbah setempat sudah terbangun 382 SR.
- Dinas Perumahan dan Perrmukiman mengkoordinir kegiatan dana Kelurahan, pada tahun 2019 untuk pembangunan 354 unit jamban yang dilaksanakan oleh kelurahan. Dinas Perumahan dan Permukiman juga melayani pengolahan air limbah domestik melalui 13 (tiga belas) mobil truk sedot tinja yang beroperasi setiap hari.



- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan peningkatan struktur jalan sepanjang 4.388,70 km, penambahan bangunan pelengkap jalan (trotoar, pedestrian, dan median) sepanjang 1,137 km, overlay dan tambal sulam jalan sepanjang 7 km, peningkatan struktur jembatan sepanjang 0,145 km, serta pemeliharaan rutin jembatan sebanyak 42 ruas.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mengupayakan untuk menambah daerah tangkapan air seluas 0,17 Ha, menambah kapasitas saluran drainase sepanjang 104,911 km, menambah daya tampung/ kapasitas sungai dan saluran pembuang sehingga tidak terjadi limpasan air sepanjang 65 km, membangun bangunan pengendali air(dinding penahan tanah sepanjang 13,392 km, bangunan pintu air 3 unit), melaksanakan naturalisasi/mengembalikan fungsi bangunan Sumber Daya Air. melaksanakan normalisasi saluran sungai, drainase, dan saluran pembuang sepanjang 54 km. Disamping itu telah dilakukan upaya penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, kajian guna mengatasi atau mengurangi luasan genangan dan banjir serta dilakukan edukasi tata air.
- Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi tentang tertib lalu lintas kepada pengelola angkutan umum.
- Dinas Perhubungan mengadakan fasilitas angkutan massal yang murah melalui bus Tangerang Ayo.
- Dinas Perhubungan menyediakan fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan umum untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran lalu lintas.
- Dinas Lingkungan Hidup mengadakan sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Udara dengan tujuan untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat terhadap pengendalian pencemaran udara.



- Dinas Lingkungan Hidup mengadakan acara Fun Rally Eco-Driving dan Car Free Day untuk mengurangi polusi udara karena kendaraan bermotor.
- Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan penghijauan kota melalui penanaman 4.505 pohon produktif.
- Dinas Lingkungan Hidup mengajak peran serta masyarakat untuk melakukan upaya pengelolaan dan perlindungan kondisi lingkungan hidup melalui program Kampung Iklim, Adiwiyata, Pembibitan Obat dan Produktif (Bibit Tobat Aktif).
- Dinas Lingkungan Hidup melayani pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakkan hukum lingkungan hidup sebagai upaya untuk mencegah atau menghentikan pencemaran/perusakan yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup.
- Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan kualitas air, udara, dan kebisingan untuk mengetahui tingkat pencemarannya pada Sembilan lokasi sungai dan situ, dan stasiun pos pemantauan kualitas udara (2 stasiun).
- Dinas Lingkungan Hidup mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui program Bank Sampah, mengembangkan teknologi pengolahan persampahan dan mekanisme 3R di masyarakat.

- **Kendala yang dihadapi**

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah :

- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pola hidup bersih dan sehat khususnya dalam pengolahan limbah domestik.
- Peningkatan layanan IPAL perpipaan terkendala oleh kondisi lapangan yang umumnya telah terbangun oleh permukiman yang cukup padat.



- Kapasitas pengolahan IPAL/IPLT belum berfungsi secara maksimal dikarenakan kondisi bangunan yang sudah lama.
- Terdapat ruas jalan yang dipelihara atau ditingkatkan kualitasnya dengan menggunakan perkerasan hotmix mengalami kerusakan dini akibat adanya genangan air dikarenakan tingginya curah hujan dan tidak tersedianya saluran drainase.
- Terdapat ruas jalan yang ditingkatkan kualitasnya tidak sesuai dengan umur rencana dikarenakan over tonase diruas jalan tersebut.
- Banyak ruas jalan yang tidak memenuhi kriteria kelengkapan jalan dikarenakan tidak tersedianya lahan dan adanya bangunan pada damija.
- Terdapat jembatan yang memerlukan rehabilitasi sedang atau berat sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar.
- Terdapat bangunan liar yang menempati sempadan sungai, sehingga menyulitkan ketika akan dilakukan pelebaran maupun normalisasi saluran sungai dan drainase.
- Banyak masyarakat membuang sampah di sungai sehingga menyebabkan sedimentasi. Kondisi seperti ini banyak ditemui di sepanjang bantaran sungai kali cirarab di kecamatan periuk dan kali sabi di kecamatan cibodas.
- Belum terintegrasi sistem saluran drainase saluran primer-sekunder dan tersier sehingga kesulitan ketika akan membangun saluran drainase yang baru
- Kurangnya sarana dan sistem drainase yang memadai sebagai pengganti lahan yang mengalami perubahan fungsi tersebut, terlebih apabila perubahan tersebut tidak disertai dengan analisa tentang dampak lingkungan
- Berubahnya/beralihnya fungsi tata guna lahan/ahli fungsi lahan yang cepat baik di daerah hulu dan kawasan perkotaan, yang semula merupakan daerah resapan air menjadi



bangunan, perumahan, industry/pabrik, pertokoan, pergudangan dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan semakin berkurangnya areal yang berfungsi sebagai tempat penampungan air dan resapan air sebelum menuju saluran pembuangan.

- Kurangnya pemahaman masyarakat/pengguna jalan akan pentingnya tertib berlalu lintas;
- Pengaturan dan pengendalian lalu lintas belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Tangerang dikarenakan keterbatasan petugas pengendalian dan penertiban;
- Terdapat beberapa ruas jalan yang kinerja jalannya terganggu akibat gangguan samping seperti halnya pedangang kaki lima dan parkir kendaraan di bahu jalan yang tidak diperuntukan sebagai ruang parkir;
- Keterbatasan lahan yang dibutuhkan untuk fasilitas henti angkutan umum massal, sehingga terdapat beberapa titik fasilitas henti tidak sesuai dengan kebutuhan calon pengguna angkutan umum;
- Masih kurangnya pengguna angkutan umum massal atau BRT Kota Tangerang;
- Masih ditemukannya sampah rumah tangga di saluran air dan limbah cair yang dihasilkan oleh rumah tangga, industri, rumah sakit, dan pusat perdagangan dan jasa yang masih melebihi Baku Mutu Lingkungan (BML).
- Luas Ruang Terbuka Hijau harus ditambah guna meningkatkan nilai Indeks Tutupan Lahan, mengurangi polusi udara, dan meningkatkan kualitas udara.
- Masyarakat umumnya masih kurang perhatian dalam menerapkan mekanisme 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) dan masih minim pengetahuan terkait pengolahan sampah menjadi barang-barang yang bermanfaat.
- Jumlah TPS 3R masih kurang, idealnya dalam 1 kelurahan memiliki 1 fasilitas TPS 3R. Hal tersebut karena masih sulitnya



mencari lahan yang tepat dan diterima warga untuk membangun TPS 3R.

- Kurangnya ketersediaan lahan di TPA yang dibutuhkan untuk memproses sampah.

- **Tindak lanjut untuk mengatasi kendala**

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, adalah :

- Dinas Perumahan dan Permukiman akan meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya ketersediaan sanitasi dasar guna kesehatan lingkungan dan masyarakat.
- Dinas Perumahan dan Permukiman akan melakukan revitalisasi IPAL/IPLT guna memaksimalkan fungsi bangunan IPAL/IPLT.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan menyediakan bangunan pelengkap jalan pada setiap ruas jalan berupa drainase dan trotoar.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan mengupayakan penentuan kelas jalan pada seluruh ruas jalan agar sesuai dengan tonase sehingga kualitas jalan sesuai dengan umur rencana.
- Dinas Pekerjaan Umum akan membangun/melebarkan drainase dan resapan air (biopori) untuk mencegah genangan air dijalan.
- Dinas Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Satpol PP akan melakukan penertiban bangunan liar untuk menunjang ketersediaan lahan untuk pelebaran maupun normalisasi saluran sungai/drainase.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan membangun sumur-sumur resapan untuk resapan air serta mempertahankan daerah-daerah tangkapan air dan membangun bangunan penampung air berupa embung.
- Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan evaluasi teknis umur rencana fisik konstruksi (turap dan bangunan pengendali banjir).



- Dinas Perhubungan perlu menjalankan secara optimal wadah koordinasi dan komunikasi pemangku kepentingan urusan perhubungan dalam rangka penyelesaian permasalahan transportasi melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Dinas Perhubungan akan meningkatkan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dan pengadaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai kebutuhan.
- Dinas Perhubungan akan melaksanakan kampanye tertib lalulintas yang diperuntukan untuk masyarakat umum dan terus melakukan kegiatan sosialisasi BRT di setiap kecamatan. Dimana salah satu point penting dari sosialisasi adalah agar masyarakat dapat menggunakan angkutan umum massal/BRT Kota Tangerang yang telah tersedia sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 3 Koridor.
- Dinas Perhubungan akan mengoptimalkan jumlah petugas yang ada dengan pengaturan titik plotting petugas dan dibantu menggunakan APILL ATCS untuk pengaturan lalu lintas persimpangan serta dilakukan evaluasi secara berkala terkait keefektifan tugas pengaturan lalu lintas oleh personil.
- Menyikapi keterbatasan lahan yang diperuntukan untuk fasilitas henti maka Dinas Perhubungan memiliki inovasi dengan membuat fasilitas henti yang minimalis bukan berbentuk bangunan yang membutuhkan ruangan/lahan yang cukup besar sehingga kebutuhan calon pengguna angkutan umum massal pun dapat terfasilitasi sesuai dengan fungsinya.
- Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan aparat kecamatan dan kelurahan mnningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah di saluran air dan meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah.
- Dinas Lingkungan Hidup menambah luas ruang terbuka hijau, melalui kegiatan pembebasan lahan ruang terbuka hijau seluas 1.700 m², dan penanaman pohon sebanyak 1.706 pohon.



- Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan partisipasi aktif masyarakat secara berkelanjutan dalam menerapkan gerakan 3R dengan memberikan sarana dan prasarana pengangkutan dan pengolahan sampah, gerakan sedekah sampah, sosialisasi/edukasi pengolahan sampah, pendampingan/pembinaan bank sampah, dan melaksanakan acara Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN).
- Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan efektifitas operasional dan pemeliharaan terhadap 9 Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R) eksisting dan mengoptimalkan Intermediate Treatment Facility (ITF) di wilayah barat. ITF adalah TPST yang mampu mengolah sampah dalam kapasitas yang lebih besar, modern, inovatif, dan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
- Dinas Lingkungan Hidup mempersiapkan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Saat ini Kota Tangerang sedang melaksanakan berbagai tahapan lelang untuk pembangunan proyek PLTSa tersebut.

III.4.5 TUJUAN 5

Pencapaian Tujuan 5 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Tujuan 5

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	2019		
					Target	Realisasi	%
5	Meningkatkan Kualitas Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing	Nilai PDRB	Rp. Triliyun	107,46	114,12	111,89	98,05
		Indeks Pengeluaran (daya beli)	Point	81,37	81,50	82,24	100,91

Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 5 Tahun 2019, melalui 2 indikator kinerja adalah sebesar 99,48%, dengan kategori **Sangat Tinggi**. Untuk indikator Nilai PDRB realisasi Tahun 2019 meningkat sebesar 4,43 Trilyun Rupiah dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 (107,46 Trilyun Rupiah), adapun untuk indikator Indeks Pengeluaran (daya beli) dibandingkan dengan realisasi di Tahun 2018 meningkat 0,87 point, dan pencapaian di Tahun 2019



juga telah melampaui target di Tahun 2021 sebesar 82,03. Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai PDRB dan Indeks Pengeluaran (Daya Beli)

Perhitungan PDRB telah menjadi bagian yang sangat penting dalam makroekonomi, khususnya tentang analisis perekonomian suatu wilayah. Hasil perhitungan PDRB ini memberikan kerangka dasar yang digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi yang terjadi dan berlangsung dalam suatu kegiatan perekonomian. Angka- angka PDRB tersebut sebagai indikator ekonomi makro dan juga sebagai landasan evaluasi kinerja perekonomian, dan penyusunan berbagai kebijakan. Indikator ekonomi ini juga memberikan gambaran aliran seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan seluruh faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perekonomian untuk Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. Pada Tahun 2019 nilai PDRB Kota Tangerang ditargetkan sebesar 114,12 Trilyun Rupiah. Meskipun capaian terhadap target relatif tinggi (98,05%) namun tidak terpenuhinya realisasi tersebut terhadap target menunjukkan belum optimalnya program pembangunan perekonomian di Kota Tangerang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Indonesia yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pengeluaran Pemerintah Daerah, dan Tenaga Kerja.

Indeks Pengeluaran (Daya Beli) merupakan salah satu komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Untuk mengukur indeks daya beli digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan dengan komponen 27 komoditas pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan



pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Indeks Pengeluaran (Daya Beli) Kota Tangerang pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar 81,50, dan realisasinya sebesar 82,24 atau dengan tingkat capaian 100,91%. Dengan demikian dapat tergambar secara umum bahwa tingkat pengeluaran rata-rata masyarakat Kota Tangerang yang cukup tinggi menunjukkan peningkatan standar hidup dan kesejahteraan penduduk Kota Tangerang.

- **Upaya yang telah dilakukan**

Untuk meningkatkan nilai PDRB dan indeks pengeluaran (daya beli) masyarakat di Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan langkah-langkah lintas sektor yang terintegrasi dengan upaya pencapaian indikator makro lainnya yang berkaitan sebagaimana sudah dijelaskan pada pencapaian indeks pendidikan, kesehatan, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran dengan harapan dari perbaikan aspek diatas dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat Kota Tangerang. Secara umum upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui OPD lintas sektor yaitu sebagai berikut :

- Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui pembiayaan siswa miskin dan BPJS untuk warga Kota Tangerang dan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai.
- Mendorong sektor UKM melalui pendampingan dan pelatihan, kerjasama dengan perusahaan, serta meningkatkan kompetensi warga Kota sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat agar dapat berwirausaha.
- Mendorong promosi sektor pariwisata dan mengadakan event-event sebagai wadah UKM di Kota Tangerang untuk mengoptimalkan usahanya.



- Mengontrol harga kebutuhan pokok di pasaran dengan membentuk tim pengendalian inflasi daerah (TPID).
- Mendorong sektor-sektor penting yang dapat mendongkrak peningkatan pendapatan daerah, diantaranya meningkatkan pendataan PBB.
- Pemerintah Kota Tangerang juga mengoptimalkan dana APBD untuk dialokasikan bagi pembangunan infrastruktur maupun pos-pos lain yang berdampak langsung dengan masyarakat.

- **Kendala yang Dihadapi**

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah :

- Belum optimalnya pelatihan dan pendampingan terhadap UKM karena kurangnya dukungan modal usaha.
- Perlunya pendataan warga miskin secara lebih berkala untuk memastikan kebijakan yang dilakukan dapat tepat sasaran.
- Belum optimalnya cakupan ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tangerang.
- Belum optimalnya promosi dan pengembangan sarana pendukung kepariwisataan di Kota Tangerang.
- Adanya industri yang berpindah lokasi dari Kota Tangerang ke kabupaten/kota lain sehingga cukup banyak tenaga kerja yang tidak terserap.

- **Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan**

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, adalah :

- Pemerintah Kota Tangerang akan mengadakan program pemberian bantuan modal kepada UKM dengan mekanisme kredit ringan bagi kelompok usaha



- Pemerintah Kota Tangerang terus melakukan peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi warga Kota Tangerang
- Pemerintah Kota Tangerang terus mendorong promosi dan peningkatan potensi pariwisata di Kota Tangerang yang salah satunya melalui pembinaan Kampung Tematik. Contoh keberhasilan dengan terbentuknya Kampung Berkelir sebagai Kampung Wisata yang menjadi tujuan dari masyarakat luar Kota Tangerang
- Pemerintah Kota Tangerang mendorong sektor swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui alokasi dana CSR.
- Pemerintah Kota Tangerang meningkatkan sosialisasi dan pendataan agar mendorong masyarakat untuk berkontribusi membayar PBB dan BPHTB.

III.4.6 SASARAN 1

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2019		
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	%
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	94,65	94,75	95,69	97,48	97,53	98,46	100,95
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	75,22	98,18	98,91	98,97	98,97	98,99	100,02

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2019, melalui 2 indikator kinerja adalah sebesar 100,49%, dengan kategori **Sangat Tinggi**. Realisasi



pencapaian Tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 0,02% untuk indikator APM SMP/MTs/Paket B dan 0,98% untuk Indikator APM SD/MI/Paket A Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

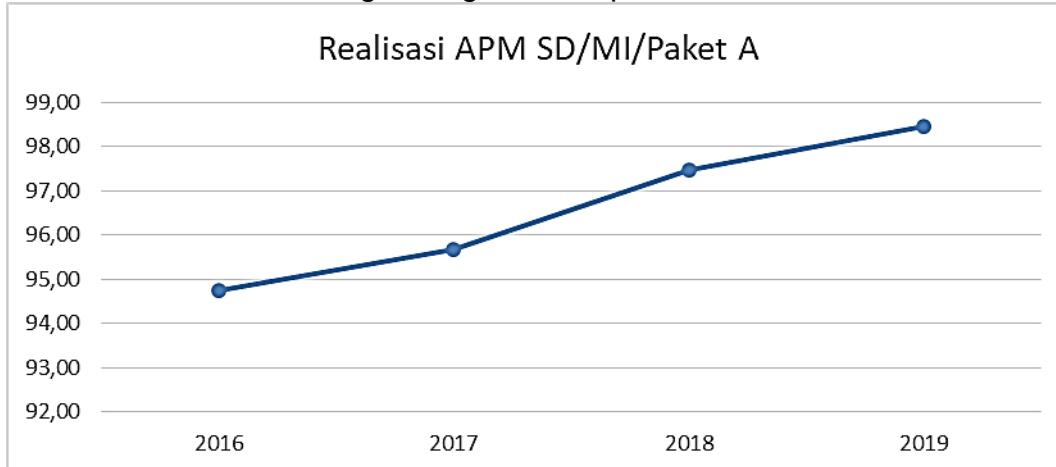
1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

a. Uraian Pencapaian Kinerja

Angka Partisipasi Murni dengan target Tahun 2019 sebesar 97,53 persen dan direalisasikan sebesar 98,46 persen atau 100,95% dari target. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan Angka Partisipasi Murni Kota Tangerang sebesar 0,95 Persen dari target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 terjadi peningkatan, dimana Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A pada Tahun 2018 sebesar 97,48 persen.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A ini dilihat dari proporsi usia siswa sekolah 7-12 Tahun yang ada di Kota Tangerang terhadap jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun yang ada di Kota Tangerang.

Gambar 3.6
Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A



b. Upaya yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A adalah sebagai berikut :



- ❖ Dengan memberikan bantuan kepada sekolah dalam meningkatkan operasional sekolah serta memberikan bantuan kepada siswa tidak mampu
 - ❖ Terus berupaya dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah
 - ❖ Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- Upaya tersebut diimplementasikan melalui kegiatan yang dianggarkan sebagai berikut :
- Pengembangan, Peningkatan dan Pembinaan Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar, dengan output kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Biaya Operasional Pendidikan SD/MI Negeri dan Swasta dengan alokasi anggaran sebesar Rp.167.674.924.214,- yang diberikan kepada 463 Sekolah -SD/MI Negeri dan Swasta, besaran BOP per sekolah berdasarkan jumlah siswa dengan tarif Rp.50.000,-/siswa/bln.
 - 2) Pengadaan Meublair dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.151.564.144,- yang di berikan kepada 7 SDN Penerima Meublair dan 50 SDN untuk meublair penunjang Laboratorium Komputer.
 - 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.401.200.000,- yang diberikan kepada 64 Sekolah Dasar Negeri Kota Tangerang.
 - 4) Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar (Bangub Banten) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.277.087.400,- yang diberikan kepada 20 sekolah SDN dengan 46 Rombel.
 - 5) Pengembangan, Peningkatan dan pembinaan kelembagaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.529.467.550,- yang diberikan kepada 338 SDN untuk peningkatan sarana prasarana yang ada di Sekolah Dasar Negeri serta penambahan alat-alat laboratorium komputer



untuk 50 laboratorium yang ada di Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kota Tangerang.

- Pengembangan, Peningkatan dan Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Sekolah Dasar, dengan output kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pembiayaan Tangerang Cerdas SD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.788.387.500,- yang diberikan kepada siswa tidak mampu jenjang SD/MI dengan rincian 8.282-siswa SD dan 700-siswa MI dengan besaran Biaya Personal Siswa Rp.80.000,-/siswa/bln.
- Pengembangan, Peningkatan dan Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal, dengan output kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (Paket A, B dan C) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.982.979.000,- yang diberikan kepada 37-lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).
- Pengembangan, Peningkatan dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Non Formal, dengan output kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pemberian Insentif guru PAUD/TK/RA/SD/MI/SMP/MTs sebanyak 16.600-Guru SD/MI/SMP/MTs, 4575-guru TK/RA sebesar Rp.650.000,-/org/bln dan 1742-guru PAUD/PKBM sebesar Rp.350.000,-/org/bln. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 173.401.601.800,-

c. Permasalahan yang dihadapi

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A seperti masih adanya sebagian kecil masyarakat usia dibawah usia 7 tahun sudah bersekolah pada jenjang Pendidikan Dasar dan usia diatas 12 tahun yang mengikuti paket A.



d. Solusi terhadap permasalahan

Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang mendukung langsung terhadap pencapaian Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A dengan lebih mengutamakan kegiatan prioritas sebagaimana tersebut diatas dengan kegiatan lanjutan.

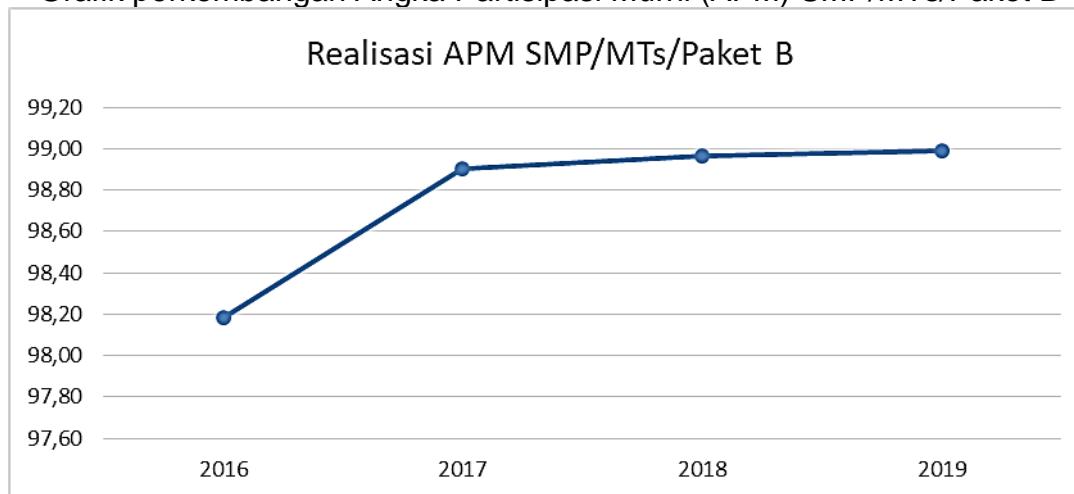
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B)

a. Uraian Pencapaian Kinerja

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B dengan target Tahun 2019 sebesar 98,97 persen dan direalisasikan sebesar 98,99 persen atau 100,02 persen dari target. Hal ini menunjukan adanya peningkatan Angka Partisipasi Murni Kota Tangerang sebesar 0,02 Persen dari target yang telah di tetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 terjadi peningkatan, dimana Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B pada Tahun 2018 sebesar 98,97 persen.

Gambar 3.7

Grafik perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B



Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B ini dilihat dari proporsi usia siswa sekolah 13-15 Tahun yang ada di Kota Tangerang terhadap jumlah penduduk usia sekolah 13-15 tahun yang ada di Kota Tangerang.

b. Upaya yang telah dilakukan



Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B adalah sebagai berikut :

- Dengan memberikan bantuan kepada sekolah dalam meningkatkan operasional sekolah serta memberikan bantuan kepada siswa tidak mampu.
- Terus berupaya dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah.
- Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Upaya tersebut diimplementasikan melalui kegiatan yang dianggarkan sebagai berikut :

- Pengembangan, Peningkatan dan Pembinaan Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan output kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Biaya Operasional Pendidikan SMP/MTs Negeri dan Swasta dengan alokasi anggaran sebesar Rp.83.364.785.900,- yang diberikan kepada 195-SMP/MTs Negeri dan Swasta, besaran BOP per sekolah berdasarkan jumlah siswa dengan tarif Rp.105.000,-/siswa/bln.
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.025.993.255,- untuk 32-Sekolah SMPN yang tersebar di 13-Kecamatan.
 - 3) Pengadaan Sarana Prasarana UNBK SMP (Bangub Banten) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.976.089.380,- sebanyak 15-jenis barang untuk 8 –SMPN.
 - 4) Pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Pertama (Bangub Banten) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.802.278.400,- yang diberikan kepada 9-SMPN yang tersebar di 13-Kecamatan.
- Pengembangan, Peningkatan dan Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan output kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pembiayaan Tangerang Cerdas SMP dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.625.400.000,- yang diberikan kepada siswa tidak



mampu jenjang SMP/MTs sebanyak 2.926-siswa dengan besaran Biaya Personal Siswa sebesar Rp.100.000,-/siswa/bln.

- Pengembangan, Peningkatan dan Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal, dengan output kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (Paket A, B dan C) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.982.979.000,- yang diberikan kepada 37-lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).
- Pengembangan, Peningkatan dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Non Formal, dengan output kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pemberian Insentif guru PAUD/TK/RA/SD/MI/SMP/MTs sebanyak 16.600-Guru SD/MI/SMP/MTs, 4575-guru TK/RA sebesar Rp.650.000,-/org/bln dan 1742-guru PAUD/PKBM sebesar Rp.350.000,-/org/bln. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.173.401.601.800,-

c. Permasalahan yang dihadapi

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B seperti masih adanya sebagian kecil masyarakat usia dibawah usia 13 tahun sudah bersekolah pada jenjang Pendidikan Menengah dan usia diatas 15 tahun yang masih dan sedang bersekolah pada paket B.

d. Solusi terhadap permasalahan

Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang mendukung langsung terhadap pencapaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B dengan lebih mengutamakan kegiatan prioritas sebagaimana tersebut diatas dengan kegiatan lanjutan yang akan diselenggarakan ditahun yang akan datang.



III.4.7 SASARAN 2

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2019		
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	%
Angka kematian bayi (AKB)	Orang per 1.000 kelahiran hidup	0,42	0,37	1,60	1,25	2,99	1,15	161,54
Angka kematian ibu (AKI)	Orang per 100.000 kelahiran hidup	55,46	49,90	19,14	15,31	24,67	15,66	136,52
Angka kesakitan	Orang per 100.000 penduduk				N/A	344	223,08	135,15

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2019, melalui 3 indikator kinerja adalah sebesar 144,40%, dengan kategori **Sangat Tinggi**. Realisasi indikator Angka Kematian Bayi mengalami peningkatan sebesar 66,6% dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2018. Begitu juga dengan indikator Angka Kematian Ibu yang mengalami peningkatan 2,2% dari pencapaian Tahun 2018. Adapun untuk angka kesakitan dapat tercapai sesuai target yang juga merupakan realisasi di Tahun 2018, sehingga terdapat peningkatan sebesar 32% dibandingkan pencapaian Tahun 2018. Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

a. Uraian Pencapaian Kinerja

- Angka kematian bayi (Infant Mortality Rate) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan. Angka kematian bayi tersebut dapat didefinisikan



sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Jumlah kematian bayi Tahun 2015 sejumlah 120, Tahun 2016 sejumlah 83, Tahun 2017 sejumlah 54, Tahun 2018 sejumlah 49 dan Tahun 2019 sejumlah 44 kematian bayi.

- Ibu meninggal karena tidak mempunyai akses ke pelayanan kesehatan yg berkualitas terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang dilatarbelakangi kejadian:
 - Terlambat mengenal tanda bahaya & mengambil keputusan.
 - Terlambat mencapai fasilitas kesehatan.
 - Terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.
- Upaya penyelamatan ibu dan bayi lahir adalah upaya yang sustainable, berkesinambungan dan tidak boleh berhenti, dalam 5 tahun terakhir telah terjadi penurunan kematian Ibu dimana Tahun, 2016 sejumlah 19 kematian ibu, Tahun 2017 sejumlah 7, Tahun 2018 dan tahun 2019 sejumlah 6 kematian ibu. Kota Tangerang akan terus berkomitmen dalam gerakan penyelamatan ibu dan bayi baru lahir menuju Kota Tangerang yang Zero Angka Kematian Ibu.
- Berdasarkan audit kasus kematian ibu terjadi pergeseran penyebab kematian ibu dimana tahun-tahun sebelumnya penyebab kematian karena perdarahan, sedangkan Tahun 2019 penyebab kematian ibu terbanyak disebabkan oleh Preeklampsia, dimana sampai saat ini tidak ada yang tahu persis apa yang menyebabkan preeklampsia.
- Karena apa yang menyebabkan preeklampsia tidak diketahui dengan pasti, tidak ada tes efektif yang dapat memprediksi kapan preeklampsia akan terjadi.

b. Permasalahan yang dihadapi

- Kurangnya ketrampilan tata kelola klinis di RS dan Puskesmas, maka diperlukan Pelatihan PONED (Penanganan Obstetri Neonatal



Essensial Dasar) untuk Puskesmas dan Pelatihan PONEK (Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) untuk RS.

- Kurangnya ANC (Antenatal Care) berkualitas, maka diperlukan pelatihan ANC Terpadu untuk FKTP dan Praktek Bidan Mandiri.
- Bila ditelusuri lebih lanjut, penyebab kematian maternal yang sesungguhnya sangat kompleks, bukan hanya disebabkan penyakit atau prosedur obstetrik selama kehamilan, persalinan dan nifas tetapi juga disebabkan oleh faktor yang lebih ke “hulu”, antara lain faktor kemiskinan, ketidaktahuan, pendidikan rendah, budaya dan lain-lain. Oleh sebab itu menurunkan AKI harus dilakukan serentak oleh segenap komponen bangsa, tidak hanya upaya oleh pemerintah dan sektor kesehatan tetapi juga masyarakat harus berupaya melalui upaya nyata peningkatan kinerja dari banyak sisi dan bukan hanya terpaku pada upaya penurunan “angka-angka”.

c. Upaya yang telah dilakukan

Berikut adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI), yaitu:

1. Dinas Kesehatan Kota Tangerang telah melakukan upaya peningkatan cakupan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir melalui “Gerakan penyelamatan Ibu melahirkan dan bayi Baru Lahir” yang terfokus pada Penanganan kegawatdaruratan ibu melahirkan dan bayi baru lahir melalui jejaring dengan 32 RS dan 36 Puskesmas se Kota Tangerang. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan terjadi jumlah penurunan kematian ibu dan jumlah kematian bayi di Kota Tangerang.
2. Sebagai bukti komitmen dalam penguatan sistem rujukan ibu dan bayi baru lahir di Kota Tangerang, pemerintah mengeluarkan Peraturan Walikota No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal. Peraturan Walikota ini memuat tentang alur rujukan, tata cara rujukan, komunikasi dan



informasi sistem rujukan, pembinaan jejaring rujukan, pembiayaan dan audit terhadap kasus kematian maternal dan neonatal.

3. Dalam upaya penguatan sistem rujukan, maka Kota Tangerang pada tanggal 24 Februari 2016, melaunching program Sistem Rujukan Ibu dan Bayi “SIJARIEMAS“ sekaligus meresmikan berdirinya Call Center SIJARIEMAS yang siap mengawal rujukan kegawatdaruratan selama 24 jam 7 hari seminggu. Dengan adanya sistem dan Call Center SIJARIEMAS , maka diharapkan mampu mengurangi rujukan touring hospital dan dapat menjembatani komunikasi antara perujuk dan tempat rujukan.
4. Upaya penyelamatan ibu dan bayi baru lahir di Kota Tangerang juga memerlukan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu juga sudah dilakukan penggalangan komitmen bersama dengan berbagai pihak antara lain Rumah Sakit, Puskesmas, BPJS, PMI, Organisasi Profesi, dan unsur masyarakat yang tergabung dalam FOPKIA (Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak) untuk bersama sama menurunkan AKI dan AKB di Kota Tangerang.
5. Mulai 1 Maret 2017 Kota Tangerang menerapkan Universal Health Coverage (UHC) dimana setiap warga Kota Tangerang dijamin pembiayaan kesehatannya melalui kepesertaan JKN-KIS, termasuk di dalamnya akses pelayanan persalinan dan perawatan bayi baru lahir
6. Fasilitas Ambulance Gratis Pemerintah Kota Tangerang yang siaga 24 jam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Tangerang agar mudah mengakses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan.
7. Dinas Kesehatan Kota Tangerang juga terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal dengan melakukan workshop kegawatdaruratan maternal dan neonatal.



8. Untuk memperbaiki tata kelola klinis, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pendampingan klinis untuk RSU Kota Tangerang dan Puskesmas PONED oleh RSU Kabupaten Tangerang dalam hal tata laksana kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
9. Saat ini jumlah fasilitas kesehatan di Kota Tangerang terdiri dari 31 RS/RSIA, 9 Rumah Bersalin, 36 Puskesmas, dan 264 Praktek Mandiri Bidan yang tersebar merata di seluruh wilayah dan mudah diakses. Dalam rangka mendekatkan akses pelayanan ke fasilitas kesehatan, Kota Tangerang juga meningkatkan status 17 Puskesmas menjadi Puskesmas dengan persalinan 24 jam. Dengan demikian, masyarakat akan semakin mudah mengakses pelayanan ke fasilitas kesehatan.
10. CAGEUR JASA (Colaborasi Kunjungan Keluarga Terintegrasi Keluarga Sehat) adalah pelayanan ke rumah warga oleh tenaga kesehatan dengan tidak membedakan status kesehatannya.
11. Pendampingan Ibu hamil dan Balita dengan memperkuat Kader SRIKANDI (Sedari Dini Kawal Ibu Hamil dan Balita)
12. Pembentukan 264 Kelas Ibu hamil dan 117 Kelas Ibu Balita tersebar di seluruh Puskesmas se-Kota Tangerang untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan ibu balita.
13. Pemberian Tablet Tambahan Darah (TTD) untuk ibu hamil juga merupakan upaya mencegah terjadinya anemia, yang merupakan salah satu penyebab terjadinya kematian ibu dan bayi. Tahun 2019 sebanyak 100% (Target 98%) ibu hamil di Kota Tangerang mendapatkan TTD minimal 90 tablet, dan Pemberian Tablet Tambahan Darah untuk Rematri (Remaja Putri) sebanyak 30,7% (Target 30%).
14. Seluruh ibu hamil yang mengalami kurang energi kronik (KEK), dilakukan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Pada tahun 2019, sebanyak 1.885 (100%) ibu hamil mendapatkan PMT.
15. Masa kehamilan dan balita terutama usia 0-23 bulan merupakan salah satu bagian dari 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Berbagai bentuk sosialisasi dan edukasi dilakukan kepada ibu hamil



dan ibu balita di Kota Tangerang, baik berupa Seminar 1000 HPK bagi ibu hamil, ibu balita dan kader pendamping, edukasi di kelas ibu hamil, kelas ibu balita puskesmas, maupun di posyandu dan masyarakat.

16. Aplikasi MOMS KEREN (Monitoring Kehamilan dan kesehatan Ibu dan anak secara terencana). Moms Keren merupakan pengembangan dari SMSBunda merupakan aplikasi berbasis android yang memuat informasi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan anak serta keluarga, agar mampu mengidentifikasi tanda bahaya sejak dini pada masa kehamilan. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat membantu ibu hamil di Kota Tangerang memperoleh informasi yang akurat terkait dengan kehamilan, persalinan dan perawatan bayi balita. Aplikasi Moms Keren berisi Content kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas, dan anak bayi baru lahir sampai anak usia 2 tahun. serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak.
17. Aplikasi EMAK IDEP (Sistem Pemantauan Kehamilan Terintegrasi dan Terpadu) merupakan pendataan, pemantauan, dan rujukan terencana ibu hamil dalam rangka mempermudah pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak.
18. Membuat Buku pedoman SOP Gawat Darurat Maternal dan Neonatal.

2. Angka Kesakitan

- Pola penyakit terbanyak yang terjadi di Kota Tangerang dalam 3 tahun terakhir tidak mengalami banyak perubahan, masih didominasi oleh penyakit-penyakit menular dan masalah perilaku.
- Salah satunya adalah Tuberculosis (TBC) dimana jumlah perkiraan kasus baru TBC yang ditemukan dan diobati sejumlah 3.951 dari jumlah penduduk sejumlah 1.771.092, Angka Kesakitan (Incidence Rate TBC) adalah 223.08 per 100.000 penduduk.

a. Permasalahan yang dihadapi



Meningkatnya Incidence Rate TBC disebabkan oleh:

- Peningkatan penemuan terduga dan kasus TBC di setiap lapisan fasilitas kesehatan, mulai dari klinik, puskesmas dan RS.
- Peningkatan penemuan terduga dan kasus TBC oleh kader di masyarakat.

b. Upaya yang telah dilakukan

Berikut adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk penanggulangan TBC, yaitu:

- 1) Meningkatkan penemuan terduga dan kasus TBC baik melalui aktif masif di masyarakat dan pasif intensif di Fasilitas Kesehatan.
- 2) Meningkatkan kasus TB yang dinotifikasi oleh fasilitas kesehatan melalui pelatihan surveilans TB ke semua fasilitas kesehatan
- 3) Mengupayakan semua fasilitas kesehatan melakukan pengobatan TBC sesuai standar dengan mengaktifkan Koalisi Organisasi Profesi TB (KOPI TB) untuk membantu pengawasannya.

III.4.8 SASARAN 3

Menurunnya Kemiskinan Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	2019		
			2018	Target	Realisasi
Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Orang	117.318	113.717	113.525	100,17

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2019, melalui 1 indikator kinerja adalah sebesar 100,17%, dengan kategori **Sangat Tinggi**. Realisasi Indikator Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Tangerang mengalami peningkatan 3,33% dibandingkan dengan pencapaian



di Tahun 2018. Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Tahun 2019 kinerja sasaran Menurunnya Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan target sebesar 113.717 orang dan realisasi sebesar 113.525 sehingga capaian kinerja sebesar 100,17%, data tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.18
Jumlah PMKS Di Kota Tangerang Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Jumlah PMKS (Orang)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
1	Batuceper	6.496	6.262
2	Benda	7.201	8.885
3	Cibodas	7.124	5.665
4	Ciledug	9.827	7.138
5	Cipondoh	9.336	8.078
6	Jatiuwung	7.965	9.254
7	Karang Tengah	7.212	5.785
8	Karawaci	11.775	11.454
9	Larangan	6.205	7.008
10	Neglasari	13.382	14.124
11	Periuk	10.378	10.544
12	Pinang	10.839	10.914
13	Tangerang	9.578	8.234
Total		117.318	113.525

Dari table di atas dapat dilihat bahwa jumlah PMKS Kota Tangerang mengalami penurunan dari Tahun 2018 ke Tahun 2019. Pada Tahun 2018 jumlah PMKS di Kota Tangerang mencapai 117.318 orang lalu di Tahun 2019 dari target penurunan jumlah PMKS di Kota Tangerang 113.717 menurun menjadi 113.525 orang sehingga dapat diketahui bahwa terjadi penurunan PMKS di Kota Tangerang melampaui target yang telah ditentukan yakni sebanyak 3.793 orang dan dari data tersebut dapat dihitung laju penurunan PMKS yaitu jumlah PMKS Tahun 2019 dibagi jumlah penduduk tahun berjalan sebesar 6,51%.

a. Upaya yang telah dilakukan



Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan PMKS antara lain melalui banyak program-program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial seperti program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pengembangan Jaminan Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma dan program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) dengan kegiatan:

- Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penumbuhan KUBE Keluarga Miskin sebanyak 800 orang dengan anggaran Rp 166.767.000,- yang tersebar di beberapa kecamatan.
- Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sebanyak 100 orang dengan anggaran Rp 113.173.000,- yang tersebar di beberapa kecamatan.
- Pelayanan Pemulangan orang terlantar, sakit dan meninggal dengan target sebanyak 233 orang akan tetapi terealisasikan sebanyak 142 orang hal ini disebabkan karena kegiatan pelayanan pemulangan orang terlantar, sakit dan meninggal ini riil cost dengan anggaran Rp. 46.127.400,-.
- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa yaitu kegiatan bantuan untuk korban bencana alam dengan jumlah korban yang ditanganin pada tahun 2019 sebanyak 1707 orang dan dengan anggaran Rp. 295.206.500,-.
- Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS sebanyak 2.160 orang hasil razia Satpol PP yang dilayani di rumah singgah Dinas Sosial dengan anggaran Rp. 511.174.500,-.
- Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi lanjut usia miskin dan terlantar sebanyak 30



lansia yang menjadi penghuni RPS dengan anggaran Rp. 1.199.151.480,-.

- Bantuan permakanan bagi anak panti yaitu sebanyak 522 orang anak panti dan diluar panti yang mendapat bantuan dengan anggaran Rp. 245.956.300,-.
- Pemberian bantuan jaminan sosial bagi lanjut usia, bantuan yang diberikan kepada 1300 orang lansia yaitu merupakan bantuan permakanan dengan anggaran Rp. 407.582.500,-.
- Pembinaan Penyandang Disabilitas Tuna Netra dengan peserta disabilitas tuna netra sebanyak 40 orang dan anggaran Rp. 59.380.000,-.
- Pembinaan Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Wicara dengan peserta yang diberikan pembinaan sebanyak 50 orang dan anggaran Rp. 49.877.500,-.
- Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebanyak 200 orang yang diberikan bantuan seperti alat bantu dengar, kruk, kursi roda dan tongkat. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 172.700.000,-.
- Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial sebanyak 108 orang dengan anggaran Rp 111.040.700,-.

Selain melalui program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial penanganan PMKS di Kota Tangerang juga dapat tercapai melalui sinergitas program dan kegiatan yang dilaksanakan baik oleh anggaran Pusat, APBD Provinsi Banten dan APBD Kota Tangerang. Hal ini menandakan bahwa penanganan PMKS mendapatkan prioritas dari tingkat nasional, provinsi dan kota. Sejumlah kegiatan yang dilaksanakan tersebut mengarah kepada beberapa jenis PMKS antara lain Fakir miskin, Lansia, Disabilitas, Wanita Korban Tindak Kekerasan, Perempuan rawan Sosial Ekonomi, Eks Napza, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Anak Terlantar dan Korban Bencana.

b. Permasalahan yang dihadapi



Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi untuk menurunkan PMKS seperti:

- Validitas pendata anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang masih diragukan disebabkan tidak adanya pendataan yang secara khusus mendata anak jalanan, gelandangan dan pengemis tanpa dukungan data yang valid menyebabkan penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis tidak maksimal dan kurang tepat sasaran.
- System pendataan dan penghitungan data PMKS yang masih manual menyebabkan keluaran data yang dihasilkan kurang valid sehingga penanganan permasalahan PMKS tidak maksimal dan kurang tepat sasaran.
- Adanya beberapa jenis PMKS yang sifatnya tertutup, seperti Tuna Susila, Orang dengan HIV/AIDS, Kelompok Minoritas dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dan data didapatkan dari OPD terkait sehingga menyulitkan para pendata untuk mendapatkan data yang valid dikarenakan belum adanya sistem integrasi data dengan OPD terkait tersebut.
- Belum adanya sistem yang terintegrasi antara dinas sosial dengan wilayah (Kecamatan dan kelurahan) serta opd terkait untuk menyelesaikan masalah PMKS khususnya keterlantaran yang berada dirumah tinggal sebagai sasaran kabupaten/kota berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2018.

c. Upaya yang akan dilakukan

Bertolak dari permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka upaya yang akan dilakukan pada tahun 2020 antara lain berupa:

- Memverifikasi dan validasi data anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan melakukan pendataan khusus untuk anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- Berkoordinasi dengan Kominfo untuk membuat system informasi data PMKS yang dapat digunakan untuk penghitungan PMKS yang lebih akurat.



- Berkoordinasi dengan kominfo dan OPD terkait untuk membuat system pendataan PMKS yang terintegrasi ada terjadi sinergisitas pendataan dan penanganan PMKS yang lebih komprehensif yang diharapkan dapat terjadi penurunan PMKS yang signifikan.
- Membentuk sistem penanganan PMKS bersama wilayah dan OPD terkait diantaranya membuat SOP penanganan PMKS dan system monitoring yang terintegrasi dalam memantau perkembangan pembinaan PMKS.

III.4.9 SASARAN 4

Meningkatnya Kesempatan Kerja

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2019		
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	%
Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	8,00	7,00	7,16	7,40	6,84	7,13	95,76

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2019, melalui 1 indikator kinerja adalah sebesar 95,76%, dengan kategori **Sangat Tinggi**. Target tersebut memang tidak tercapai, tapi capaian kinerja tahun ini mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya (2018) sebesar 7,40%. Sehingga dapat dikatakan jumlah pengangguran di Kota Tangerang telah mengalami penurunan dari Tahun 2018.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan, dikarenakan tenaga kerja sebagai motor penggerak pembangunan. Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator ekonomi yang mempunyai arti penting dalam beberapa aspek untuk



memperoleh gambaran dan permasalahan ketenagakerjaan diantaranya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan rasio antara jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (bukan karena alasan kekurangan fisik) dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yaitu 15 tahun sampai dengan 64 tahun ke atas.

Pada Tahun 2019 TPT Kota Tangerang sebesar 7,13% mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan TPT Tahun 2018 yaitu sebesar 7,40%. Namun demikian, realisasi TPT tersebut masih belum mencapai target Tahun 2019 yaitu sebesar 6,84%. Dalam pencapaiannya, telah dilakukan berbagai upaya untuk menekan TPT dimaksud oleh Kota Tangerang.

a. Upaya yang telah dilakukan

Peraturan Walikota Tangerang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Informasi Lowongan Kerja, Penerimaan dan Pelaporan Hasil Penerimaan Tenaga Kerja telah ditetapkan guna mendorong perusahaan lebih pro aktif menginformasikan lowongan kerja. Lowongan kerja tersebut memiliki peranan penting dalam menyediakan kebutuhan lapangan pekerjaan di Kota Tangerang. Peningkatan kualitas pencari kerja juga terus diupayakan melalui berbagai bentuk pelatihan baik yang berbasis kompetensi maupun wirausaha. Pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan dilaksanakan sebanyak 18 angkatan pada tahun 2019 dan pelatihan pengembangan tenaga kerja mandiri menjadi wirausaha sebanyak 3 angkatan pada Tahun 2019. Pembinaan terhadap BKK dan SMK pun selama Tahun 2019 telah dilaksanakan dengan terjadwal.

b. Permasalahan

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan TPT namun tetap dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala diantaranya yang



dijelaskan sebagai berikut. Banyak perusahaan tutup di Kota Tangerang yaitu sebanyak 32 perusahaan sampai dengan Tahun 2019. Berbagai faktor menyebabkan perusahaan tutup di Kota Tangerang salah satunya banyaknya perusahaan yang pindah dari Kota Tangerang ke daerah lain untuk menekan biaya produksi berupa upah tenaga kerja. Di sisi lain, angkatan kerja di Kota Tangerang mengalami peningkatan dari sebanyak 1.049.823 orang pada Tahun 2018 menjadi sebanyak 1.108.057 orang pada Tahun 2019 atau mengalami peningkatan sebesar 58.234 orang. Peningkatan angkatan kerja berpotensi pada peningkatan pengangguran karena tidak didukung dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Lapangan kerja yang tersedia pun harus sesuai dengan ketersediaan kompetensi pencari kerja. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kompetensi tenaga kerja di Kota Tangerang masih belum sesuai dengan lowongan kerja yang dibutuhkan perusahaan.

c. Upaya yang akan dilakukan

Menekan TPT menjadi tanggung jawab bersama namun ada beberapa upaya yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut :

- Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha serta menciptakan situasi kota yang kondusif untuk menarik calon investor dan memberikan kemudahan investor untuk berinvestasi.
- Sinergitas antar instansi terkait merupakan kunci keberhasilan peningkatan daya saing ekonomi. Koordinasi yang lebih luwes dengan instansi terkait harus dilakukan secara sistematis dan sinergis sehingga akan mendongkrak daya saing ekonomi yang nantinya akan mempertemukan antara kebutuhan perluasan kesempatan kerja/lapangan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja.
- Memperluas kesempatan kerja dengan cara memberikan pelatihan wirausaha baru dan mandiri. Bahwa memberikan pelatihan saja tidak cukup karena yang paling penting adalah keberlanjutan dari kegiatan wirausaha itu sendiri. Peran intansi terkait permodalan wirausaha juga



sangat penting. Dengan demikian perlu koordinasi dengan instansi dimaksud.

- Memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Bekerjasama dengan SMK untuk membuka jurusan yang sesuai dengan perkembangan dan/atau kebutuhan industri saat ini sehingga lulusan SMK dalam kondisi siap kerja memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri di Kota Tangerang.

III.4.10 SASARAN 5

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Dan Pelayanan Publik

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2019		
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	%
Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Daerah	A,BB,B,C C,C,D	CC	CC	B	B	B	B	100,00
Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik	Point	78,77	80,45	82,26	82,54	82,60	82,62	100,02

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2019, melalui 3 indikator kinerja adalah sebesar 100,01%, dengan kategori **Sangat Tinggi**. Realisasi di Tahun 2019 untuk Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan sebesar 0,08 point dibandingkan Tahun 2018. Sedangkan untuk nilai



Evaluasi AKIP dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

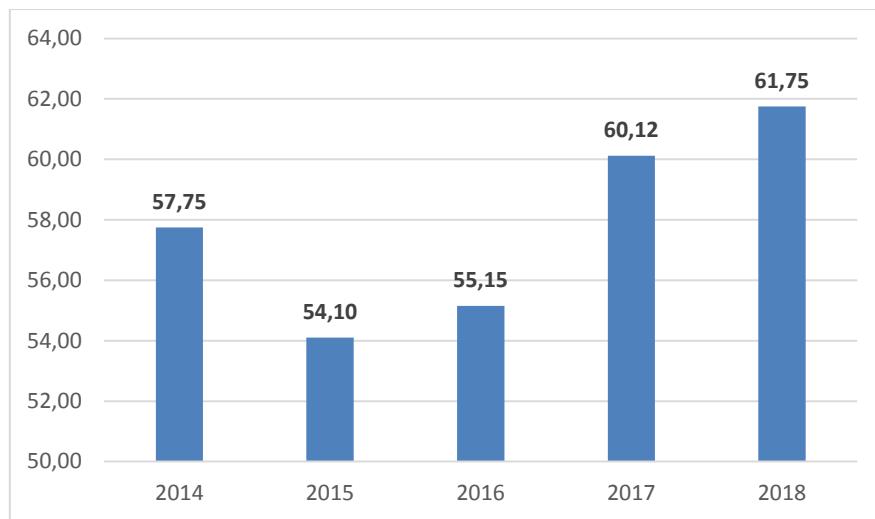
1. Nilai Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP Kota diukur sesuai dengan Permenpan No. 12/2015 tentang Pedoman Atas Implementasi SAKIP.

Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Tangerang tahun 2019 adalah 64,67 atau kategori B telah mencapai target RPJMD pada tahun 2019. Atas capaian tersebut maka kinerja akuntabilitas Kota Tangerang tahun 2019 adalah sesuai target. Capaian tersebut naik sebesar 2,92 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 61,75.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintahan Kota Tangerang sudah menunjukkan hasil yang baik.

Gambar 3.8
Capaian Nilai AKIP Kota Tangerang



Sumber: Bappeda Kota Tangerang, 2020

Untuk melihat perkembangan capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Tangerang sejak Tahun 2015 meliputi meliputi 5 komponen AKIP sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.21
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Tangerang Tahun 2015-2019

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2015	Bobot	Nilai			
					2016	2017	2018	2019
a.	Perencanaan Kinerja	35	19,83	30	19,83	21,39	21,97	21,84
b.	Pengukuran Kinerja	20	10,96	25	11,35	14,32	14,34	15,66
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,08	15	9,42	9,00	9,62	9,35
d.	Evaluasi Internal	10	4,31	10	3,75	4,96	5,06	5,67
e.	Capaian Kinerja	20	9,92	20	10,81	10,45	10,76	12,15
	Nilai Hasil Evaluasi		54,10		55,16	60,12	61,75	64,67
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC		CC	B	B	B

Sumber: Bappeda Kota Tangerang, 2020

Dari data tersebut di atas diperoleh gambaran hasil evaluasi LKIP Kota Tangerang Tahun 2019, secara umum terdapat peningkatan pada beberapa komponen SAKIP dibandingkan Tahun 2018. Sedangkan, Komponen Evaluasi Internal menempati posisi kinerja terendah sebesar 5,67 dan kinerja tertinggi pada komponen perencanaan kinerja sebesar 21,84. Terkait hal tersebut terdapat beberapa catatan evaluasi dan rekomendasi



dari Kementerian PAN-RB kepada Pemerintah Kota Tangerang dengan rincian sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi tersebut menunjukan

- 1) Cascading kinerja sudah dilakukan namun di beberapa Perangkat Daerah penjabarannya belum sepenuhnya komprehensif, terukur, relevan, dan berjenjang sesuai dengan levelnya dalam mendukung tercapainya sasaran pada unit organisasi di atasnya, serta belum diselaraskan dengan proses bisnis, sehingga efisiensi dan efektifitas program, kegiatan, dan anggaran belum optimal.
- 2) Pengukuran atas pencapaian kinerja dilevel Perangkat Daerah secara berkala telah dilakukan. Namun belum menyeluruh dan berjenjang, sehingga belum efektif menjadi cara para pimpinan Perangkat Daerah dalam mengambil keputusan dan mengubah strategi apabila target kinerja belum terpenuhi
- 3) Aplikasi perencanaan kinerja, penganggaran, dan monitoring evaluasi kinerja belum terintegrasi dan belum sepenuhnya diimplementasikan, sehingga belum efektif menjadi alat untuk memudahkan implementasi manajemen kinerja
- 4) Analisis pencapaian kinerja pada Pelaporan Kinerja telah dilakukan, meskipun belum menyeluruh. Disamping itu analisis efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan dalam mendukung ketercapaian sasaran strategis belum dilakukan, pelaporan kinerja masih banyak mengungkapkan aspek realisasi kegiatan dan penyerapan anggaran.
- 5) Evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh inspektorat belum efektif mendorong perbaikan implementasi AKIP oleh setiap Perangkat Daerah.
- 6) Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja melalui Inspektorat, akan tetapi hasil evaluasi masih belum sepenuhnya menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di tingkat OPD.



b. Rekomendasi/upaya perbaikan yang perlu dilakukan

- 1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang agar dapat menjabarkan sepenuhnya Cascading kinerja secara komprehensif, terukur, relevan, dan berjenjang sesuai dengan levelnya dalam mendukung tercapainya sasaran pada unit organisasi di atasnya, serta diselaraskan dengan proses bisnis, sehingga efisiensi dan efektifitas program, kegiatan, dan anggaran dapat dilakukan secara optimal.
- 2) Pengukuran atas pencapaian kinerja di level OPD agar dilakukan secara menyeluruh dan berjenjang , sehingga pimpinan OPD dapat secara efektif mengambil keputusan dan berjenjang, sehingga pimpinan OPD dapat secara efektif mengambil keputusan dan mengubah strategi apabila target kinerja belum terpenuhi.
- 3) Aplikasi perencanaan kinerja, penganggaran, dan monitoring evaluasi kinerja agar dapat terintegrasi dan diimplementasikan sepenuhnya, sehingga secara efektif menjadi alat untuk memudahkan implementasi manajemen kinerja.
- 4) Analisis perencanaan kinerja, penganggaran, dan monitoring evaluasi kinerja agar dapat terintegrasi dan diimplementasikan sepenuhnya, sehingga secara efektif menjadi alat untuk memudahkan implementasi manajemen kinerja.
- 5) Inspektorat Kota Tangerang agar melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara efektif untuk mendorong perbaikan implementasi AKIP oleh setiap OPD dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

c. Aksi peningkatan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019

- 1) Penyusunan Peraturan Perundangan melalui Peraturan Walikota Tangerang tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang; (Telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tangerang No. 61 Tahun 2019, tanggal 30 Oktober 2019).



- 2) Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan (e-planning) dan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev) untuk menyesuaikan dengan database hasil penyusunan RPJMD terbaru Tahun 2019-2023.
- 3) Penyelarasan indikator RPJMD dan Renstra periode 2019-2023 agar sesuai dengan kriteria SMART dan berbasis outcome kinerja dengan melakukan pendampingan dari narasumber Kementerian PAN-RB dalam proses penyusunan RPJMD dan Renstra OPD.

d. Rencana Tindak Lanjut di Tahun 2020

- 1) Pemerintah Kota Tangerang mengadakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada OPD dengan didampingi narasumber inspektorat dan Kementerian PAN-RB terkait penyusunan cascading kinerja dan komponen pendukung untuk meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP).
- 2) Pemerintah Kota Tangerang melakukan pengintegrasian Sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran (E-Planning dan E-Budgeting) dengan Sistem aplikasi Evaluasi Kinerja (E-Monev) agar dapat diimplementasikan lebih optimal untuk melakukan pengukuran kinerja secara rutin.
- 3) Inspektorat Kota Tangerang melakukan pendampingan dan monitoring kepada OPD terkait penyusunan dokumen pendukung SAKIP agar sesuai dengan pedoman yang ditentukan.

2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2019 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, BPK bertanggung jawab pada pernyataan pendapat/opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan dengan integritas tinggi, sedangkan



penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab entitas. Empat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK yaitu sebagai berikut:

a. Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau biasa disingkat WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Penjelasan atau biasa disingkat WTP-DPP. Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan, misalnya adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal.

b. Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)

Opini Wajar dengan pengecualian atau biasa disingkat WDP adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.



c. Tidak Wajar (adverse opinion)

Opini Tidak Wajar atau biasa disebut TW adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

d. Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer of opinion)

Opini Tidak Menyatakan Pendapat atau biasa disebut TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.

Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

Dalam rangka pemenuhan target indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan akuntabilitas SKPD, dilakukan kuatifikasi pengukuran dengan formulasi sebagai berikut :

- Apabila mendapatkan “Tidak Memberikan Pendapat (TMP)”, diberikan nilai 1 (satu);
- Apabila mendapatkan opini “Disclaimer”, maka nilainya adalah 2 (dua);



- Apabila mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP), maka nilainya 3 (tiga); dan
- Apabila mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP), maka nilainya adalah 4 (empat).

Berdasarkan press release BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten, tanggal 17 Mei 2019, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang merupakan opini WTP yang ke dua belas kali secara berturut-turut diperoleh Pemerintah Kota Tangerang.

Pemberian opini WTP tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Banten dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 di Kantor Perwakilan BPK-RI Provinsi Banten pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019.

Sebagaimana diketahui opini WTP merupakan penghargaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Sehingga penghargaan yang diraih untuk ke dua belas kalinya tanpa putus tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Tangerang dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Apalagi Pemerintah Kota Tangerang menjadi satu-satunya pemerintah daerah yang telah mendapat opini WTP berbasis akrual dua belas kali secara berturut-turut di Provinsi Banten.

Tabel 3.22
Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2007-2018

No.	Pemerintah Daerah	Opini Tahun											
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Prov. Banten	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
2.	Kab. Lebak	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Kab. Pandeglang	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
4.	Kab. Serang	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP							
5.	Kab. Tangerang	WDP	WTP										
6.	Kota Cilegon	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Kota Serang	-	WDP	WTP	WTP								
8.	Kota Tangerang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	Kota Tangerang Selatan	-	-	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	

Sumber: BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten



Pada Tahun 2019, target yang ditetapkan Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah WTP atau nilai 4 (empat). Realisasi capaian target kinerja Pemerintah Kota Tangerang untuk opini BPK-RI atas LKPD Tahun 2018 mendapatkan opini WTP atau mendapatkan point (4) sesuai dengan LHP No. 24b/LHP/XVIII.SRG/05/2019 dan 24c/LHP/XVIII.SRG/05/2019 dari BPK-RI. Sehingga penghitungan pencapaian target untuk indikator dimaksud adalah : WTP (4) / WTP (4) x 100% atau sama dengan 100%, artinya capaian target indikator kinerja dimaksud dapat tercapai 100%.

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Tangerang tetap menargetkan untuk bisa memperoleh opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019, sehingga dapat mempertahankan sampai dengan tiga belas kali berturut-turut.

a. Upaya yang telah dilakukan

- 1) Memberikan pemahaman dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah serta mengintegrasikan dengan aplikasi lainnya yang terkait.

b. Permasalahan yang dihadapi

- 1) Pengelolaan dan pengisian dokumen sumber belum seluruhkan dilaksanakan dengan tertib;
- 2) Pengelolaan data transaksi aset dan keuangan belum seluruhkan dilaksanakan dengan tertib;
- 3) Pemahaman akan pentingnya menjaga konsistensi data belum sepenuhnya terbangun;
- 4) Pemahaman sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah belum merata;
- 5) Perbedaan pengaturan dalam pelaksanaan keuangan daerah oleh pemerintah pusat menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan.



c. Upaya yang akan dilakukan

- 1) Memberikan pemahaman dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah serta mengintegrasikan dengan aplikasi lainnya yang terkait.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai parameter seberapa jauh tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah selaku penyedia jasa layanan.

Metode pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Tangerang Tahun 2015-2019 mengikuti gradasi penilaian dalam angket dengan dasar teknik skala Likert. Teknik skala Likert mengarahkan persepsi responden terhadap empat pilihan jawaban yang tersedia dalam angket, sehingga dalam hasil pengukurannya mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.23
Nilai IKM Kota Tangerang Tahun 2015-2019

No.	Tahun Pengukuran	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
1	2015	78,77
2	2016	80,45
3	2017	82,26
4	2018	82,54
5	2019	82,62

Sumber: Bagian Organisasi SETDA Kota Tangerang, 2020

Berdasarkan data dalam tabel di atas, diperoleh hasil peningkatan yang linear dan signifikan atas nilai IKM Kota Tangerang Tahun 2014-2019. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penilaian IKM tiap tahun yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang mampu memotivasi tiap unit-unit penyelenggara pelayanan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya.

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikemas dalam pelayanan publik. Baik buruknya pelayanan



publik yang diberikan bergantung pada kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat sebagai penerima layanan. Kualitas dari sebuah pelayanan publik menjadi suatu indikator utama dan menjadi sangat penting untuk menilai baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka pemerintah melakukan upaya dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat untuk setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh unit penyelenggara pelayanan publik.

a. Upaya yang telah dilakukan

- 1) Melakukan pembinaan terhadap unit penyelenggara pelayanan publik.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap unit penyelenggara pelayanan publik.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
- 4) Membuat regulasi terkait dengan standar pelayanan minimal pada penyelenggara pelayanan publik.

b. Permasalahan

- 1) Kurang pahamnya terkait dengan standar pelayanan minimal sebagaimana peraturan yang ada.
- 2) Belum merata kemampuan dan pemahaman pegawai pelayanan publik;
- 3) Alur proses yang berbelit-belit.
- 4) Persyaratan yang terlalu banyak.

c. Upaya yang akan dilakukan

- 1) Memperjelas aspek persyaratan yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta memberikan kemudahan terkait persyaratan.
- 2) Mempermudah tiap tahapan pelayanan dengan memotong rantai layanan serta memperjelas prosedur dan mekanisme pelayanan.
- 3) Mempersingkat waktu pelayanan setiap tahapan pelayanan dan menjamin kepastian waktu terhadap proses layanan yang diberikan.



- 4) Meningkatkan kompetensi penyedia layanan [pegawai] melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- 5) Menyediakan link kontrol atasan langsung.

III.4.11 SASARAN 6

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Perkotaan

Pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.24
Capaian Kinerja Sasaran 6

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2019		
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	%
Persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai	%	93,17	94,46	97,44	83,52	85,67	86,23	100,65
Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan	Km/jam				20	21	21	100,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 6 Tahun 2019, melalui 2 indikator kinerja adalah sebesar 100,33%, dengan kategori **Sangat Tinggi**. Untuk realisasi Indikator Persentase Kualitas Jalan dan Jembatan yang Memadai mengalami peningkatan sebesar 2,71% dibandingkan Tahun 2018, sedangkan kecepatan rata-rata kendaraan mencapai 21 km/jam atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 yang hanya sebesar 20 km/jam. Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase Kualitas Jalan dan Jembatan yang Memadai

Kualitas jalan dan jembatan yang memadai di Kota Tangerang pada Tahun 2018 tercatat sebesar 83,52% berdasarkan hasil penilaian kondisi jalan dan jembatan pada tahun tersebut. Angka prosentase tersebut ditunjukkan dari total panjang jalan kota sepanjang 262 km dan sebanyak 286 ruas jembatan, hanya sepanjang 215,02 km dan sebanyak 243 ruas jembatan dalam kualitas yang memadai, artinya masih terdapat sepanjang

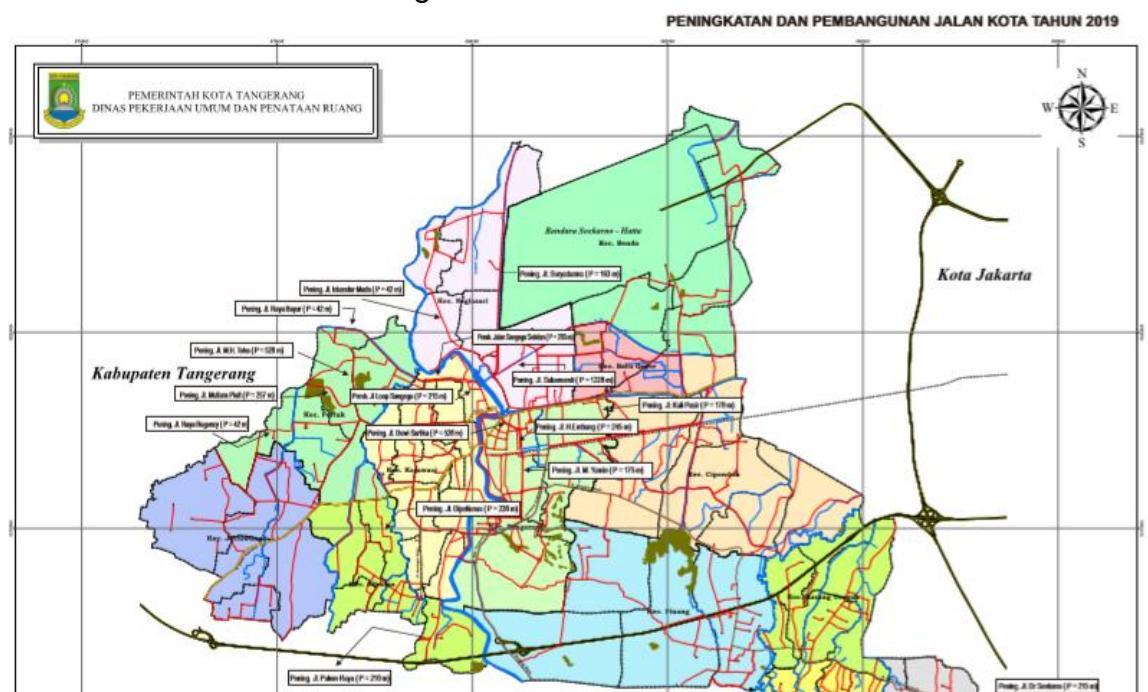


46,98 km jalan dan sebanyak 43 ruas jembatan yang kualitasnya belum memadai atau kurang lebih sebesar 16,48%. Pada Tahun 2019 ditargetkan peningkatan kualitas jalan dan jembatan sebesar 85,67% atau mengalami kenaikan sebesar 2,15% dengan rincian target peningkatan kualitas jalan sepanjang 5,6 km dan 8 ruas jembatan. Adapun realisasi pencapaian kinerja peningkatan kualitas jalan dan jembatan pada Tahun 2019 adalah meningkatnya kualitas jalan sepanjang 5,82 km dan 11 ruas jembatan atau secara prosentase sebesar 86,23% sehingga mengalami kenaikan sebesar 2,71% melebihi target yang ditetapkan dengan capaiannya sebesar 100,65%.

a. Upaya yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas jalan dan jembatan yang memadai dari 85,67% menjadi 86,23% pada Tahun 2019 atau meningkat 0,56% ditunjukkan dengan pelaksanaan peningkatan struktur jalan sepanjang 4.388,70 km, penambahan bangunan pelengkap jalan (trotoar, pedestrian, dan median) sepanjang 1,137 km, overlay dan tambal sulam jalan sepanjang 7 km, membuka akses jalan baru sepanjang 2,48 km, peningkatan struktur jembatan sepanjang 0,145 km, serta pemeliharaan rutin jembatan sebanyak 42 ruas. Adapun untuk sebaran peningkatan kualitas jalan dan jembatan pada Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.9
Sebaran Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2019





Adapun pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas jalan dan jembatan antara lain melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

- Pembangunan Jalan Kota sepanjang 8,353 km dengan anggaran Rp. 42.323.388.860,00 yang tersebar di 29 ruas jalan.
- Rehabilitasi/Peningkatan, dan Pemeliharaan jalan lingkungan sepanjang 91,764 km dengan anggaran Rp. 109.712.225.500,00 yang tersebar di Kecamatan Jatiuwung sepanjang (8.653,80 meter), Kecamatan Periuk sepanjang (6.413,50 meter), Kecamatan Cibodas sepanjang (3.630,80 meter), Kecamatan Karawaci sepanjang (4.826,95 meter), Kecamatan Tangerang sepanjang (6.851,60 meter), Kecamatan Neglasari sepanjang (3.463 meter), Kecamatan Benda sepanjang (7.649,20 meter), Kecamatan Batu Ceper sepanjang (8.311 meter), Kecamatan Cipondoh sepanjang (8.749,90 meter), Kecamatan Pinang sepanjang (9.156 meter), Kecamatan Ciledug sepanjang (9.970,50 meter), Kecamatan Karang Tengah sepanjang (5.491,30 meter), Kecamatan Larangan sepanjang (6.947,50 meter).
- Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan sebanyak 19 ruas jembatan sepanjang 144,90 meter dengan anggaran Rp. 25.412.092.000,00 yang tersebar di Kecamatan Jatiuwung



sebanyak 2 ruas; sepanjang 20 meter, Kecamatan Cibodas 1 ruas; sepanjang 9 meter, Kecamatan Karawaci sebanyak 2 ruas; sepanjang 34 meter, Kecamatan Tangerang sebanyak 4 ruas; sepanjang 35,50 meter, Kecamatan Benda sebanyak 1 ruas; sepanjang 13,50 meter, Kecamatan Batuceper sebanyak 3 ruas; sepanjang 16,80 meter, Kecamatan Cipondoh sebanyak 1 ruas; sepanjang 4 meter, Kecamatan Karang Tengah Sebanyak 2 ruas; sepanjang 9 meter, dan Kecamatan Ciledug sebanyak 1 ruas; sepanjang 3,1 meter.

- 2) Program Operasional dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air dan Drainase
 - Pemeliharaan Jalan dan Jembatan melaksanakan pemeliharaan jalan sepanjang 7 km dan pemeliharaan 42 ruas jembatan dengan anggaran Rp. 33.387.610.000,00.

b. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator ini adalah:

- 1) Terdapat ruas jalan yang dipelihara atau ditingkatkan kualitasnya dengan menggunakan perkerasan hotmix mengalami kerusakan dini akibat adanya genangan air disebabkan tingginya curah hujan dan tidak tersedianya saluran drainase.
- 2) Terdapat ruas jalan yang ditingkatkan kualitasnya tidak sesuai dengan umur rencana disebabkan over tonase diruas jalan tersebut.
- 3) Banyak ruas jalan yang tidak memenuhi kriteria kelengkapan jalan disebabkan tidak tersedianya lahan dan adanya bangunan pada damija.
- 4) Terdapat jembatan yang memerlukan rehabilitasi sedang atau berat sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar.

c. Solusi Terhadap Permasalahan

Upaya yang akan dilakukan dalam rangka pemecahan permasalahan tersebut adalah



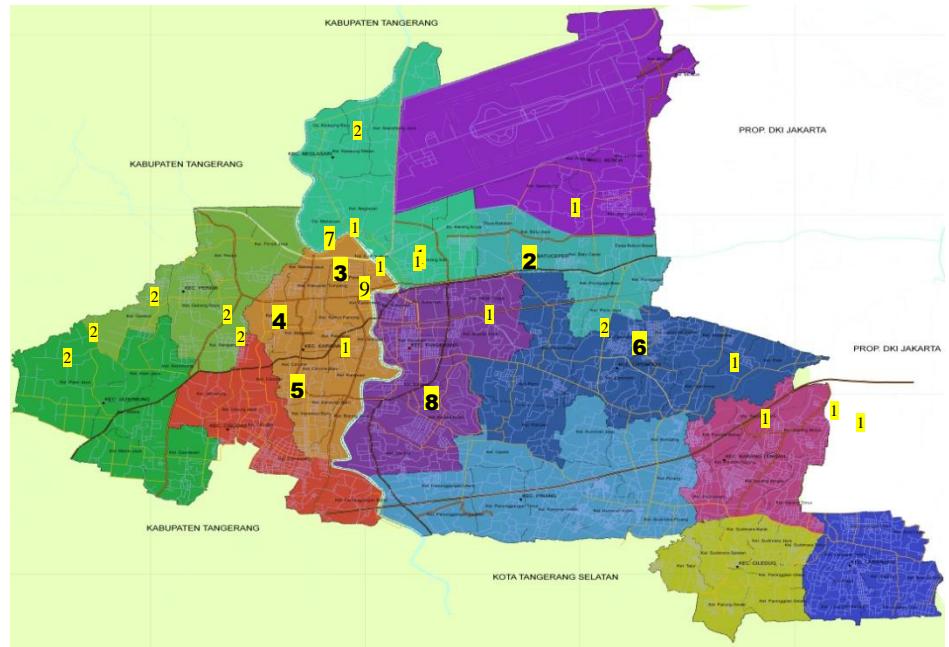
- 1) Adanya kajian atau penerapan teknologi baru terkait dengan pemeliharaan jalan dengan struktur perkerasan hotmix.
- 2) Menyediakan bangunan pelengkap jalan pada setiap ruas jalan berupa drainase dan trotoar.
- 3) Menentukan kelas jalan pada seluruh ruas jalan agar sesuai dengan tonase sehingga kualitas jalan sesuai dengan umur rencana.
- 4) Menggunakan teknologi/alternatif bahan material lain untuk meningkatkan kualitas jalan.
- 5) Membangun/melebarkan drainase dan resapan air (biopori) untuk mencegah genangan air dijalan.

2. Kecepatan Rata-Rata Perjalanan Kendaraan

Kinerja Sasaran menurunnya kemacetan melalui indikator Kecepatan Rata-Rata Perjalanan Kendaraan dengan target kenaikan pada tahun pertama RPJMD 2019 menjadi 21 Km/Jam. Kenaikan yang dimaksud adalah penanganan permasalahan kemacetan pada 5 titik kemacetan dari 26 titik kemacetan yang menjadi target RPJMD. Pencapaian tahun 2018 sebesar 20 Km/Jam dikarenakan pada periode RPJMD sebelumnya sasaran ini tidak ada, sehingga tahun akhir RPJMD periode sebelumnya menjadi baseline untuk RPJMD selanjutnya. Setelah mampu menangani kemacetan pada lima titik kemacetan berdampak kepada kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan menjadi 21 Km/Jam. Adapun jumlah titik yang telah tertangani sebanyak 5 titik dan secara prosentase mencapai 19,23% adalah sebagai berikut :

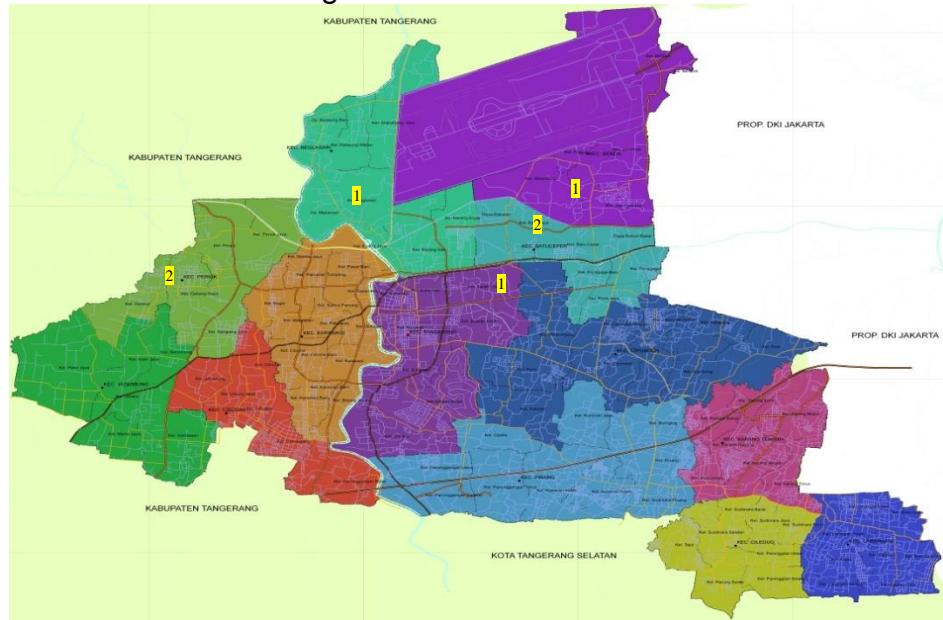


Gambar 3.10
Jumlah Titik Kemacetan 2019-2023



Adapun jumlah titik kemacetan yang tertangani pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Gambar 3.11
Titik Kemacetan Tertangani Pada Tahun 2019





Tabel 3.25
Titik Penanganan Kemacetan Kota Tangerang Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Titik Kemacetan Tahun 2018	Jumlah Titik yang Tertangani Tahun 2019	Jumlah Titik Kemacetan Tahun 2019
1.	Kecamatan Batuceper	1	1	0
2.	Kecamatan Benda	0	0	0
3.	Kecamatan Neglasari	1	0	1
4.	Kecamatan Tangerang	2	0	2
5.	Kecamatan Karawaci	7	1	6
6.	Kecamatan Jatiuwung	3	1	2
7.	Kecamatan Periuk	1	0	1
8.	Kecamatan Cibodas	5	0	5
9.	Kecamatan Cipondoh	2	2	0
10.	Kecamatan Karang Tengah	0	0	0
11.	Kecamatan Pinang	2	0	2
12.	Kecamatan Ciledug	2	0	2
13.	Kecamatan Larangan	0	0	0
Total		26 Titik	5 Titik	21 Titik

a. Upaya yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan melalui program atau kegiatan antara lain :

1) Program Pengembangan Sistem Transportasi :

- Melalui kegiatan Pengembangan Pengkajian Sistem Transportasi meliputi tiga dokumen kajian transportasi antara lain dokumen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dokumen perencanaan teknis manajemen rekayasa lalu lintas/ kawasan rawa macet dan dokumen pengkajian sistem transportasi dengan anggaran Rp. 267.299.200,-.
- Analisa dan Evaluasi meliputi tiga dokumen kajian transportasi antara lain dokumen analisa dan evaluasi penanganan transportasi, dokumen analisis dan evaluasi sistem transportasi massal dan dokumen analisis dan evaluasi keselamatan transportasi dengan anggaran Rp. 485.109.000,-.

2) Program Pengelolaan Lalu Lintas :



- Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas meliputi 2 dokumen pembahasan penanganan kemacetan dan 9 paket Fasilitas Perlengkapan Jalan Keselamatan Jalan Terpasang dengan anggaran Rp. 2.484.948.000,-.
- Teknik Prasarana Lalu Lintas Jalan meliputi 30 Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Kemacetan Terpasang dengan anggaran Rp. 4.585.486.000,-.
- Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan meliputi 12 Dokumen pengendalian dan penertiban dengan anggaran Rp. 460.000.000,-.

3) Program Pengelolaan Angkutan :

- Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Angkutan meliputi 10 eksemplar laporan kegiatan sosialisasi, 1 unit penunjang sarana angkutan umum yang terpelihara dan 8 koridor jumlah layanan angkutan umum sistem transit dengan anggaran Rp. 36.388.535.224,-.
- Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana Angkutan meliputi 60 Unit Prasarana Angkutan Terpelihara dan 5 koridor Prasarana Angkutan dengan anggaran Rp. 1.788.276.000,-.

4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum :

- Pembangunan Penerangan Jalan Umum meliputi 986 titik PJU Keselamatan Jalan Terbangun dengan anggaran Rp. 7.893.420.274
- Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum meliputi 28.922 titik PJU Keselamatan Jalan Terpelihara dengan anggaran Rp. 18.989.160.632

b. Permasalahan yang dihadapi

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi untuk mengurangi luasan genangan dan banjir seperti:

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat/pengguna jalan akan pentingnya tertib berlalu lintas;



- 2) Pengaturan dan pengendalian lalu lintas belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Tangerang dikarenakan keterbatasan petugas pengendalian dan penertiban;
- 3) Terdapat beberapa ruas jalan yang kinerja jalannya terganggu akibat gangguan samping seperti halnya pedangang kaki lima dan parkir kendaraan di bahu jalan yang tidak diperuntukan sebagai ruang parkir;
- 4) Keterbatasan lahan yang dibutuhkan untuk fasilitas henti angkutan umum massal, sehingga terdapat beberapa titik fasilitas henti tidak sesuai dengan kebutuhan calon pengguna angkutan umum;
- 5) Masih kurangnya pengguna angkutan umum massal atau BRT Kota Tangerang;
- 6) Perilaku pengguna jalan yang masih acuh terhadap himbauan keselamatan lalu lintas.

c. Solusi terhadap permasalahan

- 1) Daya dukung yang cukup akan kajian secara teknis dan evaluasi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan urusan perhubungan.
- 2) Menjalankan secara optimal wadah koordinasi dan komunikasi pemangku kepentingan urusan perhubungan dalam rangka penyelesaian permasalahan transportasi melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 3) Peningkatan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dan pengadaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai kebutuhan dan mengarahkan agar lebih tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas.
- 4) Melaksanakan kampanye tertib lalulintas yang diperuntukan untuk masyarakat umum dan terus melakukan kegiatan sosialisasi BRT di setiap kecamatan. Dimana salah satu point penting dari sosialisasi adalah agar masyarakat dapat menggunakan angkutan umum massal/BRT Kota Tangerang yang telah tersedia sampai dengan tahun 2019 sebanyak 3 Koridor;
- 5) Mengoptimalkan jumlah petugas yang ada dengan pengaturan titik plotting petugas dan dibantu menggunakan APILL ATCS untuk



pengaturan lalu lintas persimpangan serta dilakukan evaluasi secara berkala terkait keefektifan tugas pengaturan lalu lintas oleh personil;

- 6) Menyikapi keterbatasan lahan yang diperuntukan untuk fasilitas henti maka Dinas Perhubungan memiliki inovasi dengan membuat fasilitas henti yang minimalis bukan berbentuk bangunan yang membutuhkan ruangan/laahan yang cukup besar sehingga kebutuhan calon pengguna angkutan umum massal pun dapat terfasilitasi sesuai dengan fungsinya.
- 7) Terus meningkatkan pemasangan fasilitas keselamatan jalan di tiap titik rawan kemacetan serta melakukan sosialisasi berkeselamatan jalan berbentuk spanduk dan leaflet yang tersebar di beberapa titik rawan kecelakaan.
- 8) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta peningkatan pemeliharaan PJU.

III.4.12 SASARAN 7

Meningkatnya Kualitas Permukiman

Pencapaian sasaran 7 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.26
Capaian Kinerja Sasaran 7

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	2019		
			Target	Realisasi	%
Persentase Pemukiman Kumuh	%	0,18	0,14	0,12	114,29
Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100,00	100,00	99,79	99,79

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 7 Tahun 2019, melalui 3 indikator kinerja adalah sebesar 104,69%, dengan kategori **Sangat Tinggi**. Adapun



pencapaian realisasi untuk persentase permukiman kumuh mengalami peningkatan sebesar 0,04% dibandingkan Tahun 2018, sedangkan untuk persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Namun untuk indikator persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic mengalami penurunan 0,21% dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2018, dikarenakan target di Tahun 2019 yang mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memperoleh layanan. Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Permukiman Kumuh

Persentase permukiman kumuh dicapai dengan membandingkan luas permukiman kumuh di Kota Tangerang dengan luas seluruh wilayah permukiman. Pada tahun 2019, Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai Satuan Kerja Wilayah Kota Tangerang bersama KOTAKU secara intensif melaksanakan penanganan pengurangan kawasan kumuh pada 7 (tujuh) kriteria kumuh. Penanganan pengurangan kawasan kumuh diprioritaskan pada kawasan kumuh berat. Dalam Berita Acara pengurangan kumuh yang ditandatangani oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, KOTAKU dan BAPPEDA sampai dengan akhir Tahun 2019 luas kawasan kumuh berat berkurang menjadi 19,03 Ha dengan seluruh luas kawasan kumuh yang tersisa di Tahun 2019 seluas 39.21 Ha. Dengan luas seluruh wilayah Kota Tangerang 16.455 Ha (tidak termasuk Bandara Soekarno Hatta), maka persentase permukiman kumuh dari target 0,14% dapat terealisasi sebesar 0,12% atau dengan capaian 114,29%.



Tabel 3.27
Luas Kawasan Kumuh Tahun 2019

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah RT	Σ Luas Kumuh	Capaian Pengurangan Kumuh (Ha) Tahun 2019		Sisa Luasan Kumuh (Ha) Tahun 2019	Kategori Kumuh
				Tahun 2018	Tahun 2019		
Batuceper	Batuceper	4	4.64	0.71	0.00	3.93	Kumuh Berat
Batuceper	Porisgaga	1	6.30	0.36	0.00	5.94	Kumuh Berat
Batuceper	Porisgaga Baru	1	1.74	1.74	0.00	0.00	Kumuh Berat
Benda	Belendung	1	3.53	0.00	3.53	0.00	Kumuh Berat
Benda	Pajang	1	1.07	0.00	1.07	0.00	Kumuh Berat
Cibodas	Cibodas	10	4.36	0.00	4.36	0.00	Kumuh Berat
Cibodas	Jatiuwung	2	3.51	0.00	0.54	2.97	Kumuh Berat
Ciledug	Paninggilan Utara	1	1.84	0.97	0.00	0.87	Kumuh Berat
Cipondoh	Ketapang	5	7.40	0.00	7.40	0.00	Kumuh Berat
Jatiuwung	Manis Jaya	1	1.74	0.00	0.40	1.34	Kumuh Berat
Karawaci	Cimone	2	2.28	1.70	0.58	0.00	Kumuh Berat
Karawaci	Koang Jaya	1	4.76	0.78	0.00	3.98	Kumuh Berat
Karawaci	Sumur Pacing	4	2.96	0.00	2.96	0.00	Kumuh Berat
Neglasari	Karang Anyar	2	1.74	0.00	1.74	0.00	Kumuh Berat
Neglasari	Kedaung Baru	1	2.90	0.00	2.90	0.00	Kumuh Berat
Neglasari	Mekarsari	3	5.95	0.00	5.95	0.00	Kumuh Berat
TOTAL		16	40	56.72	6.26	31.43	19.03

Sumber : SK Penanganan Kumuh, 2019

a. Upaya yang telah dilakukan

Pada awal tahun anggaran 2019, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang sudah menganggarkan 500 unit rumah tidak layak huni untuk ditangani dalam kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, tetapi dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, maka pelaksanaan kegiatan bedah rumah dialihkan ke Kelurahan.

b. Permasalahan

- 1) Proses pengalihan anggaran dan kegiatan serta pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan waktu sehingga jadwal pelaksanaan



kegiatan bedah rumah harus di atur ulang dari yang sebelumnya sudah direncakan.

- 2) Proses pengumpulan data RTLH yang tertangani sulit untuk terkumpul dari Kelurahan.
- 3) Proses penanganan kawasan kumuh bersama KOTAKU hanya diprioritaskan pada kawasan kumuh berat saja, sehingga ada potensi untuk muncul kawasan kumuh baru.

c. Upaya yang akan dilakukan

Dinas Perumahan dan Permukiman melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni kepada seluruh kelurahan yang mendapatkan limpahan kegiatan pembangunan RTLH.

2. Persentase Jumlah Penduduk yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dihitung dengan formulasi jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dibagi jumlah penduduk Kota Tangerang. Sumber utama air minum yang dikonsumsi oleh penduduk Kota Tangerang antara lain berasal dari air kemasan bermerek, air isi ulang, ledeng meteran/ eceran, sumur bor/ pompa. Berdasarkan data capaian pelayanan perpipaan air minum di Kota Tangerang, sampai dengan Tahun 2019 telah terbangun 141.749 SR (PDAM dan Perkim) atau setara dengan 700 ribu jiwa, sementara untuk pelayanan jaringan air bersih non perpipaan berdasarkan data dari RISPAM Tahun 2017 sebanyak 432.716 jiwa yang sudah terlayani air bersih. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.771.092 jiwa, maka cakupan layanan yang dapat terdata adalah 63,96%. Dari data tersebut, gambaran kondisi layanan air bersih yang diperoleh oleh penduduk di Kota Tangerang seluruhnya selain berasal dari jaringan perpipaan dan jaringan non perpipaan dapat juga



diupayakan oleh pemasok air bersih dari truk tangki air yang menjual langsung ke masyarakat atau dari sumur dangkal yang dimiliki oleh masyarakat secara swadaya. Sumber utama air minum yang dikonsumsi oleh penduduk Kota Tangerang antara lain berasal dari air kemasan bermerek, air isi ulang, ledeng meteran/ eceran, sumur bor/ pompa. Secara total persentase jumlah penduduk yang memperolah kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah 100%.

Tabel 3.28
Jaringan Perpipaan Air Minum yang dibangun Tahun 2016-2019

Tahun	Jumlah SR dialiri PDAM	Σ	Jumlah SR dari Sumur Dalam	Σ
2016	1.257	1.257	710	710
2017	1.232	2.489	1.283	1.993
2018	872	3.361	323	2.316
2019	478	3.839	-	2.316

Sumber : Dinas Perkim, 2019

a. Upaya yang telah dilakukan

- 1) Cakupan layanan air minum perpipaan merupakan indikator capaian program dari Program Pengembangan Air Minum dan Air Limbah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan. Indikator ini selaras dengan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019 – 2023. Pemerintah Daerah Kota Tangerang melalui PDAM Tirta Benteng dan Dinas Perumahan dan Permukiman terus berupaya meningkatkan cakupan pelayanan sehingga pada tahun 2019 telah terbangun jaringan perpipaan untuk 478 SR. Namun penduduk Kota Tangerang juga mengupayakan secara swadaya untuk memenuhi kebutuhan air minum mereka sehari-hari.
- 2) Dilakukan pemeliharaan sumur dalam dan terminal air yang sudah ada, untuk tetap berfungsi dalam menyediakan air bersih khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.



b. Permasalahan

- 1) Masih terdapat kelompok masyarakat berkeberatan tanahnya dilalui oleh jaringan perpipaan air bersih, sehingga menyebabkan proses pelaksanaan pekerjaan sedikit terhambat dan tidak bisa mencapai atrget sebanyak 500 SR hanya terealisasi 478 SR.
- 2) Pekerjaan galian perpipaan kadangkala terbentur oleh utilitas lain seperti kabel PLN, kabel gas, kabel optic.
- 3) Pemahaman masyarakat yang sudah merasa cukup dengan sumber air minum non perpipaan (sumur dalam, sumur bor).

c. Upaya yang akan dilakukan

- 1) Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan stakeholder terkait seperti PDAM Tirta Benteng, PDAM Tirta Kerta Raharja, MOYA dan pemerintah pusat.
- 2) Dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sasaran sebelum dilaksanakan pembangunan jaringan air minum perpipaan.

3. Persentase Jumlah Penduduk yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Indikator persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan jaringan air limbah domestik dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah Kota Tangerang.

Pelayanan pengolahan lumpur tinja di Kota Tangerang dilakukan baik melalui jaringan perpipaan maupun jaringan non perpipaan. Jaringan perpipaan yang dimiliki berupa 8 (delapan) kolam oksidasi dan 1 (satu) Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dengan total kapasitas pengolahan sebesar 2867,6 m³/hari. Jaringan non perpipaan melalui pelayanan angkutan air limbah ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dengan kapasitas 90 m³/hari.

Mengacu pada data ‘Buku Putih Sanitasi’ bahwa jumlah keluarga dengan sistem sanitasi yang aman pada tahun 2016 mencapai 44,20 % dari seluruh keluarga di Kota Tangerang. Pada tahun 2019 telah dilakukan



pembangunan 382 SR dari dana hibah air limbah setempat dan 354 untuk jamban yang bersumber dana alokasi umum. Berdasarkan data sanitasi dari Dinas Kesehatan pada akhir tahun 2018 sebanyak 1.991 KK belum memiliki jamban. Maka persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dari target 100% dapat terealisasi 99,79%.

Tabel 3.29
Pembangunan Septic Tank Komunal Tahun 2019

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH KK ALS	JUMLAH KK NON ALS	TOTAL KK ALS+NON	KETERANGAN
1	BATUCEPER	BATUJAYA	10		10	
		PORIS GAGA BARU	30		30	
2	BENDA	BELENDUNG	20		20	
		JURUMUDI BARU	20		20	
3	CIBODAS	CIBODAS		30	30	
4	CILEDUG	SUDIMARA BARAT		26	26	
5	CIPONDOH	GONDONG	40		40	
6	JATIUWUNG	JATAKE	37		37	
		GANDASARI				
		PASIR JAYA				
7	KARANG TENGAH	PARUNG JAYA		9	9	
		PEDURENAN		12	12	
8	KARAWACI	GERENDENG				Teras Cisadane
		CIMONE				Kampung Hidroponik
9	LARANGAN	KREO SELATAN		10	10	
		LARANGAN SELATAN		10	10	
10	NEGLASARI	NEGLASARI	16		16	
		KARANGSARI	24		24	
11	PERIUK	PERIUK JAYA	40		40	
		PERIUK				
12	PINANG	CIPETE	33	8	41	
13	TANGERANG	BABAKAN				KWT Mawar Berseri
		CIKOKOL		7	7	Kampung Bekelir
TOTAL KK ALS DAN NON ALS			270	112	382	

Sumber : Dinas Perkim, 2019

Tabel 3.30
Pembangunan Jamban Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JAMBAN YANG DIBANGUN
1	BATU CEPEP	192



NO	KECAMATAN	JAMBAN YANG DIBANGUN
2	BENDA	53
3	JATIUWUNG	82
4	PERIUK	27
TOTAL UNIT		354

Sumber : Dinas Perkim, 2019

a. Upaya yang telah dilakukan

- 1) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang melalui Program Hibah Air Limbah Setempat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyediakan akses sanitasi dasar bagi masyarakat miskin berupa pembangunan septic tank komunal untuk masyarakat menggunakan teknologi bioseptic yang memiliki banyak keunggulan yaitu ramah lingkungan, dapat merubah limbah padat menjadi cair, tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Pada tahun 2019 melalui dana hibah air limbah setempat sudah terbangun 382 SR.
- 2) Melalui kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, pada tahun 2019 telah terbangun 354 unit jamban yang dilaksanakan oleh kelurahan. Kegiatan ini membantu Dinas Perumahan dan Permukiman untuk pencapaian target dalam layanan pengolahan air limbah domestik bagi penduduk Kota Tangerang
- 3) Dinas Perumahan dan Permukiman juga melayani pengolahan air limbah domestik melalui 13 (tiga belas) mobil truk sedot tinja yang beroperasi setiap hari.

b. Permasalahan

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pola hidup bersih dan sehat khususnya dalam pengolahan limbah domestik.
- 2) Peningkatan layanan IPAL perpipaan terkendala oleh kondisi lapangan yang umumnya telah terbangun oleh permukiman yang cukup padat.
- 3) Kapasitas pengolahan IPAL/IPLT belum berfungsi secara maksimal dikarenakan kondisi bangunan yang sudah lama.



c. Upaya yang akan dilakukan

- 1) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya ketersediaan sanitasi dasar guna kesehatan lingkungan dan masyarakat.
- 2) Melakukan revitalisasi IPAL/IPLT guna memaksimalkan fungsi bangunan IPAL/ IPLT.

III.4.13 SASARAN 8

Meningkatnya Kualitas Drainase dan Sumber Daya Air

Pencapaian sasaran 8 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Sasaran 8

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2019		
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	%
Luas Banjir dan Genangan	Ha	568,58	522,18	704,492	429,38	382,98	392,16	97,66

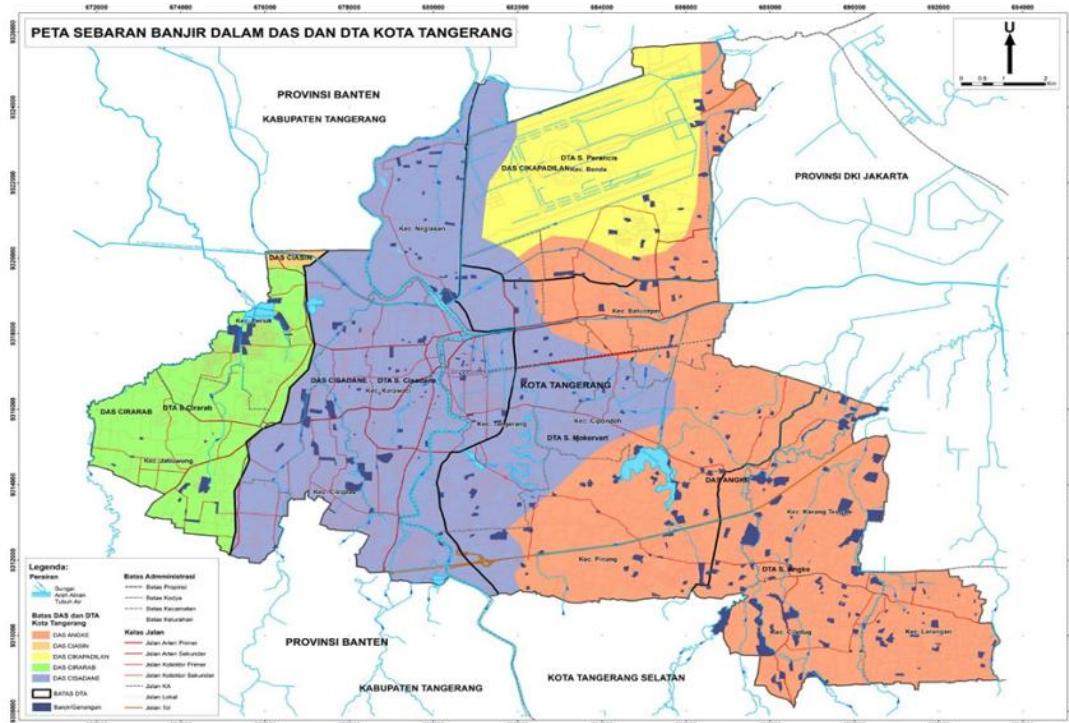
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 8 Tahun 2019, melalui 1 indikator kinerja adalah sebesar 97,66%, dengan kategori **Sangat Tinggi**. Adapun pencapaian realisasi Tahun 2019 sebesar 382,98 Ha mengalami peningkatan sebesar 11% dari tahun 2018 dimana luas banjir dan genangan sebesar 429,38 Ha Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penyusunan masterplan banjir dan genangan Tahun 2017 bahwa di Kota Tangerang tercatat luasan banjir dan genangan seluas 704,492 Ha . Adapun dari total luasan tersebut terdapat 2 (dua) kategori banjir dan genangan yaitu 1. Kategori sedang dan berat dengan luasan 429,38 Ha; 2. Kategori ringan dengan luasan 275,11 Ha. Untuk kategori sedang dan berat akan menjadi prioritas penanganan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 tahun kedepan sedangkan untuk kategori ringan diupayakan akan ditangani oleh wilayah melalui dana Kelurahan berupa penyediaan infrastruktur oleh Kecamatan dan Kelurahan.



Untuk luasan banjir dan genangan seluas 429,38 Ha yang akan di tangani kurun waktu 5 tahun kedepan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.12
Sebaran Luasan Genangan dan Banjir Tahun 2018



Tabel 3.32
Sebaran Luasan Genangan dan Banjir Tahun 2018

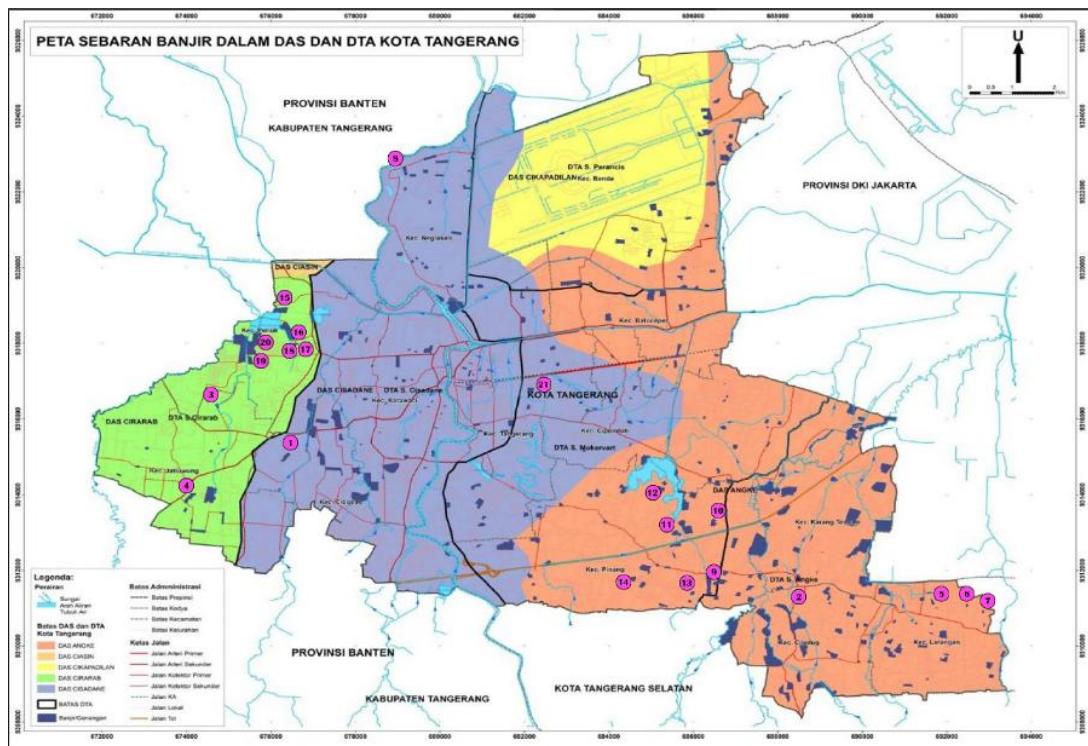
No	Kecamatan	Titik Lokasi	Kedalaman	Luas
			(m)	(Ha)
1	Tangerang	5 Kelurahan; 17 Lokasi	0.3 - 1	7,621
2	Periuk	5 Kelurahan; 18 Lokasi	0.5 - 1.5	43,167
3	Pinang	11 Kelurahan; 48 Lokasi	0.3 - 2	76,158
4	Neglasari	7 Kelurahan; 28 Lokasi	0.2 - 2	18,588
5	Larangan	8 Kelurahan; 27 Lokasi	0.2 - 2	21,147
6	Karawaci	15 Kelurahan; 32 Lokasi	0.3 - 2	13,756
7	Karang Tengah	7 Kelurahan; 24 Lokasi	0.3 - 2	77,264
8	Jatiuwung	5 Kelurahan; 17 Lokasi	0.2 - 1.5	14,93
9	Batuceper	5 Kelurahan; 9 Lokasi	0.3 - 1.5	17,693
10	Cipondoh	6 Kelurahan; 31 Lokasi	0.2 - 3	27,165
11	Ciledug	8 Kelurahan; 31 Lokasi	0.2 - 1.2	62,328
12	Cibodas	5 Kelurahan; 13 Lokasi	0.2 - 1.3	36,021



No	Kecamatan	Titik Lokasi	Kedalaman	Luas
			(m)	(Ha)
13	Benda	5 Kelurahan; 25 Lokasi	0.3 - 8	13,541
Total				429,38

Pada Tahun 2019 ditargetkan penurunan luasan genangan dan banjir seluas 429,38 Ha menjadi 382,98 Ha atau penurunan luasan banjir dan genangan seluas 46,4 Ha. Adapun target lokasi penurunan luasan genangan dan banjir seluas 46,4 Ha dapat dilihat pada gambar dan tabel sebagai berikut:

Gambar 3.13
Target Lokasi Penurunan Luas Genangan dan Banjir Tahun 2019





Tabel 3.33
Target Lokasi Penurunan Luasan Genangan dan Banjir Tahun 2019

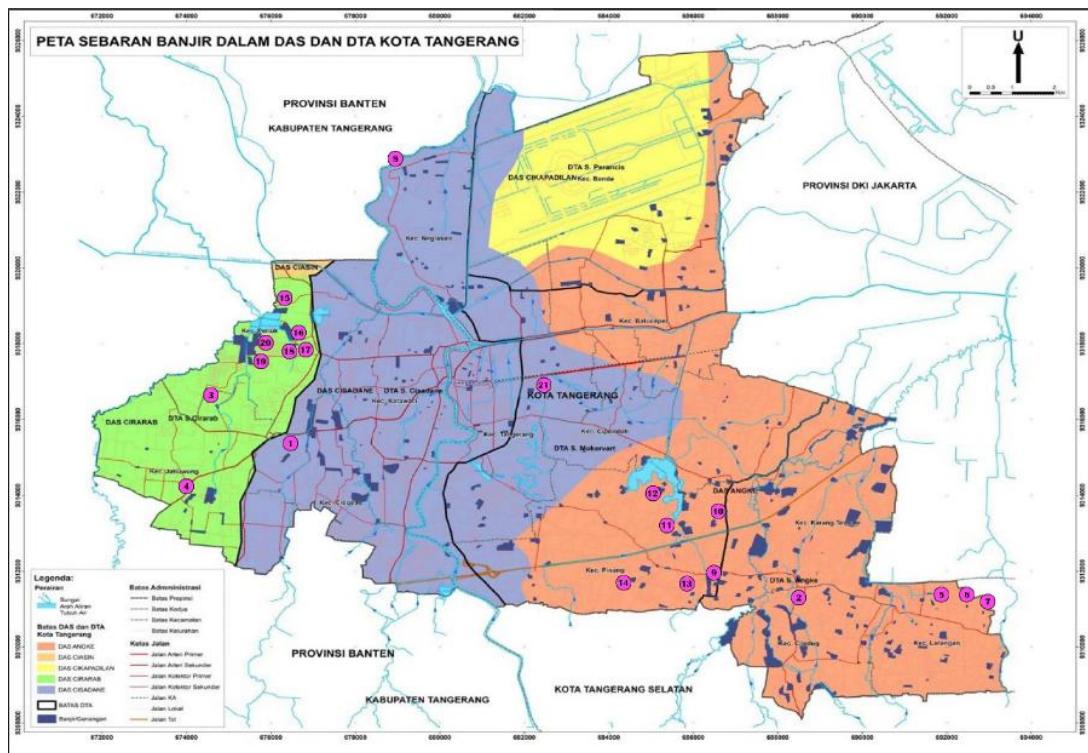
No	Titik Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Kedalaman Genangan dan Banjir (m)	Luas Genangan dan Banjir (Ha)	Keterangan
1	RW 01 Kelurahan Jatiuwung	Jatiuwung	Cibodas	1	2,175	Genangan
2	Griya Kencana RT 01/01 Genangan Drainase	Sudimara Selatan	Ciledug	0,5	2,757	Banjir
3	kelurahan Alam Jaya Jl. Baru Capiang	Alam Jaya	Jatiuwung	0,8	0,845	Genangan
4	RW 6 dan 7 Kampung Cikuning Hilir	Jatake	Jatiuwung	0,3	3,013	Genangan
5	Perumahan Griya Kencana 1 RT04/04	Padurenan	Karang Tengah	1,5	1,359	Genangan
6	Blok F RW 4	Nambo Jaya	Karawaci	2	0,853	Genangan
7	Genangan RW 12	Gaga	Larangan	0.8-2m	1,651	Genangan
8	Jalan Mawar RT 04/03 Genangan	Larangan Indah	Larangan	0.4-0.5m	0,794	Genangan
9	RW 06 Jln Muat /dalil	Kreo	Larangan	0.3m	0,337	Genangan
10	RW 13 (Masjid Al-Hasanah	Kreo	Larangan	0.2m	0,356	Genangan
11	RW 1 RW 3	Kedaung baru	Neglasari	0,2	1,839	Genangan
12	Kelurahan Selapajang Jaya RW 3 (Marsekal)	Selapajang Jaya	Neglasari	0,2	0,611	Banjir
13	RW 2	Selapajang Jaya	Neglasari	0,2	0,325	Genangan
14	RT 03/01	Pakojan	Pinang	1-2m	0,211	Genangan
15	Jln Gama RT 06/01	Pakojan	Pinang	0.2-0.3m	1,568	Genangan
16	Lokasi Rendah RT 04/03	Sudimara Pinang	Pinang	0.15-0.25m	0,909	Genangan
17	Fungsi Drainase kurang optimal Gg Ambon RT 04/01	Neroktog	Pinang	0.7m	1,970	Genangan
18	RT 01&08/01 Genangan	Pinang	Pinang	1-1.5m	2,604	Genangan
19	RT 05/02 Jalan yang berada di tengah rawa	Kunciran Jaya	Pinang	0.4m	2,280	Genangan
20	RT 02/03 Jalan Drainase terputus	Kunciran Jaya	Pinang	0.6m	1,924	Genangan
21	RT 01/10 dan RT 01/15 Genangan Jalur drainase	Kunciran Indah	Pinang	0.7m	0,907	Genangan
22	RT 01/06 Genangan	Kunciran	Pinang	0.3m	1,365	Genangan
23	Kelurahan Priuk RW 16	Periuk	Periuk	1,2	4,749	Banjir
24	Perumahan Priuk Damai RW 8	Periuk	Periuk	3	1,145	Genangan
25	Kelurahan Priuk RW 9	Periuk	Periuk	0,7	0,811	Banjir
26	Kelurahan Priuk RW 11	Periuk	Periuk	0,7	0,811	Banjir
27	Kelurahan Gebang Raya RW 21 RT 04	Gebang Raya	Periuk	1,2	2,504	Banjir
28	RW 25	Gebang Raya	Periuk	1	3,850	Banjir
29	RW 04 , 07 dn 09	Buaran Indah	Tangerang	0,2	1,887	Genangan
Total Luas					46,40	Ha

Adapun realisasi pencapaian kinerja luas banjir dan genangan pada Tahun 2019 dapat terealisasi dari target seluas 382,98 menjadi seluas 392,158 Ha atau hanya mengalami penurunan seluas 37,22 Ha sehingga tidak mencapai target atau dengan capaian sebesar 97,66%. Adapun untuk lokasi dan luasan genangan yang tertangani pada Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut :

Gambar 3.14



Realisasi Lokasi Penurunan Luas Genangan dan Banjir Tahun 2019



Tabel 3.34
Realisasi Penurunan Luasan Genangan dan Banjir Tahun 2019

No	Titik Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Kedalaman (m)	Luas (Ha)	Kode Lokasi	Keterangan
1	RW 01 Kelurahan Jatiuwung	Jatiuwung	Cibodas	1	2,175	CBD 08	Genangan
2	Griya Kencana RT 01/01 Genangan Drainase	Sudimara Selatan	Ciledug	0,5	2,757	CLD 24	Banjir
3	kelurahan Alam Jaya Jl. Baru Capiang	Alam Jaya	Jatiuwung	0,8	0,845	JWG 12	Genangan
4	RW 6 dan 7 Kampung Cikuning Hilir	Jatake	Jatiuwung	0,3	3,013	JWG 15	Genangan
8	Jalan Mawar RT 04/03 Genangan	Larangan Indah	Larangan	0.4-0.5m	0,794	LRG 18	Genangan
9	RW 06 Jln Muat /dalil	Kreo	Larangan	0.3m	0,337	LRG 24	Genangan
10	RW 13 (Masjid Al-Hasanah	Kreo	Larangan	0.2m	0,356	LRG 26	Genangan
11	RW 1 RW 3	Kedaung baru	Neglasari	0,2	1,839	NSR 03	Genangan
16	Lokasi Rendah RT 04/03	Sudimara Pinang	Pinang	0.15-0.25m	0,909	PNG 11	Genangan
17	Fungsi Drainase kurang optimal Gg Ambon RT 04/01	Neroktoq	Pinang	0.7m	1,970	PNG 25	Genangan
19	RT 05/02 Jalan yang berada di tengah rawa	Kunciran Jaya	Pinang	0.4m	2,280	PNG 36	Genangan
20	RT 02/03 Jalan Drainase terputus	Kunciran Jaya	Pinang	0.6m	1,924	PNG 37	Genangan
21	RT 01/10 dan RT 01/15 Genangan Jalur drainase	Kunciran Indah	Pinang	0.7m	0,907	PNG 45	Genangan
22	RT 01/06 Genangan	Kunciran	Pinang	0.3m	1,365	PNG 47	Genangan
23	Kelurahan Priuk RW 16	Priuk	Priuk	1,2	4,749	PRK 03	Banjir
24	Perumahan Priuk Damai RW 8	Priuk	Priuk	3	1,145	PRK 05	Genangan
25	Kelurahan Priuk RW 9	Priuk	Priuk	0,7	0,811	PRK 06	Banjir
26	Kelurahan Priuk RW 11	Priuk	Priuk	0,7	0,811	PRK 06	Banjir
27	Kelurahan Gebang Raya RW 21 RT 04	Gebang Raya	Priuk	1,2	2,504	PRK 11	Banjir
28	RW 25	Gebang Raya	Priuk	1	3,850	PRK 12	Banjir
29	RW 04 , 07 dn 09	Buaran Indah	Tangerang	0,2	1,887	TGR 07	Genangan
Total Luas					37,22	Ha	

Upaya yang telah dilakukan



Upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan target penurunan luasan banjir dan genangan adalah dengan menambah daerah tangkapan air seluas 0,17 Ha, menambah kapasitas saluran drainase sepanjang 104,911 km, menambah daya tampung/ kapasitas sungai dan saluran pembuang sehingga tidak terjadi limpasan air sepanjang 65 km, membangun bangunan pengendali air(dinding penahan tanah sepanjang 13,392 km, bangunan pintu air 3 unit), melaksanakan naturalisasi/mengembalikan fungsi bangunan Sumber Daya Air, melaksanakan normalisasi saluran sungai, drainase, dan saluran pembuang sepanjang 54 km. Disamping itu telah dilakukan upaya penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, kajian guna mengatasi atau mengurangi luasan genangan dan banjir serta dilakukan edukasi tata air. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung penurunan luasan genangan dan banjir antara lain melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Sumber Daya Air dan Drainase melalui kegiatan :

- Pembangunan Sumber Daya Air Turap 72 Lokasi; 4 Unit konstruksi bangunan pintu air; 10 unit sarana prasarana pengendali banjir; 17 Bangunan Pengendali Banjir ; Pengadaan Sarana Prasarana meliputi 1 unit amphibious excavator kelas 2,5 ton, 1 unit amphibious excavator mini kelas 2,5 ton, 2 unit amphibious excavator Spider mini, 9 unit alat berat (1 unit amphibious excavator kelas 5 ton, 1 unit amphibious excavator kelas 2,5 ton, 1 unit amphibious excavator mini kelas 2,5 ton, 2 unit amphibious excavator spider mini, 2 unit mini excavator kelas <8 ton, 1 unit vibro/drum compactors kelas 10 s/d 15 ton, 2 unit mini wheels excavator kelas <8 ton, 1 unit spider mini excavator 2 ton, 1 unit walk-behind double drum roller kelas 0,5 s/d 1 ton) dengan anggaran Rp. 54.141.820.000,00
- Pembangunan Drainase sepanjang 104,911 km atau sebanyak 159 ruas dengan anggaran Rp. 139.909.525.800,00 yang tersebar di Kecamatan Batuceper sepanjang (5.102,40 meter), Kecamatan Benda



sepanjang (1.731,50 meter), Kecamatan Cibodas sepanjang (7.111,20 meter), Kecamatan Ciledug sepanjang (11.910,50 meter), Kecamatan Cipondoh sepanjang (8.488,20 meter), Kecamatan Karawaci sepanjang (14.030,00 meter), Kecamatan Larangan sepanjang (7.483,50 meter), Kecamatan Neglasari sepanjang (9.180,35 meter), Kecamatan Pinang sepanjang (10.192 meter), Kecamatan Tangerang sepanjang (9.460,20 meter), Kecamatan Karang Tengah sepanjang (8.595,20 meter), Kecamatan Jatiuwung sepanjang (2.892,60 meter), dan Kecamatan Periuk sepanjang (8.734 meter).

- Rehabilitasi Sumber Daya Air dan Drainase melaksanakan 1 Bangunan Embung, 26 Kegiatan konstruksi, dan 1 Bangunan Sistem Pengendalian Banjir dengan anggaran Rp. 19.114.597.000,00

b. Program Operasional dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air dan Drainase

- Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air melaksanakan pemeliharaan sungai dan saluran pembuangan sepanjang 65 km dengan anggaran Rp. 40.321.859.690,00
- Operasi dan Pemeliharaan Drainase melaksanakan pemeliharaan saluran drainase sepanjang 200 km dengan anggaran Rp. 18.810.809.480,00

Permasalahan yang dihadapi

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi untuk mengurangi luasan genangan dan banjir seperti :

- Terdapat bangunan liar yang menempati sempadan sungai, sehingga menyulitkan ketika akan dilakukan pelebaran maupun normalisasi saluran sungai dan drainase.
- Banyak masyarakat membuang sampah di sungai sehingga menyebabkan sedimentasi. Kondisi seperti ini banyak ditemui di sepanjang bantaran sungai kali cirarab di kecamatan periuk dan kali sabi di kecamatan cibodas.



- Belum terintegrasi sistem saluran drainase saluran primer-sekunder dan tersier menyebabkan kesulitan ketika akan membangun saluran drainase yang baru.
- Curah hujan yang tinggi diatas curah hujan rencana (design).
- Kurangnya sarana dan sistem drainase yang memadai sebagai pengganti lahan yang mengalami perubahan fungsi tersebut, terlebih apabila perubahan tersebut tidak disertai dengan analisa tentang dampak lingkungan
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan dan pemeliharaan terhadap sarana drainase lingkungan yang menyebabkan sistem drainase lingkungan tidak dapat berfungsi
- Berubahnya/beralihnya fungsi tata guna lahan/ahli lahan yang cepat baik di daerah hulu dan kawasan perkotaan, yang semula merupakan daerah resapan air menjadi bangunan,perumahan, industri/pabrik, pertokoan, pergudangan dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan semakin berkurangnya areal yang berfungsi sebagai tempat penampungan air dan resapan air sebelum menuju saluran pembuangan.
- Topografi wilayah utara Kota Tangerang yang berada di dataran rendah bahkan sebagian permukaan tanahnya lebih rendah dari permukaan sungai yang kemudian masuk menggenangi lahan permukiman
- Alih fungsi lahan yang menyebabkan kurangnya resapan air, sehingga menyebabkan meningkatnya debit limpasan air hujan
- Tidak optimalnya infrastruktur yang ada, seperti pintu-pintu air yang gagal membendung masuknya rob dari hilir

Solusi terhadap permasalahan

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pemecahan masalah tersebut :

- Melakukan penertiban bangunan liar untuk menunjang ketersediaan lahan untuk pelebaran maupun normalisasi saluran sungai / drainase .
- Melaksanakan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah dibantaran sungai



- Melakukan pembangunan drainase perumahan, lingkungan dan makro yang terintergrasi
- Membangun sumur-sumur resapan untuk resapan air
- Mempertahakan daerah-daerah tangkapan air dan membangun bangunan penampung air berupa embung
- Mengevaluasi design terhadap debit dan curah hujan
- Evaluasi teknis umur rencana fisik konstruksi (turap dan bangunan pengendali banjir)
- Perlu tindak lanjut perencanaan detail dari setiap program yang terdapat dalam Master Plan Drainase Berwawasan Lingkungan tersebut di atas. Karena master plan ini masih bersifat kebijakan makro.
- Dalam pelaksanaan pembangunan program ini perlu melibatkan peran serta masyarakat baik dalam hal pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunannya. Dengan demikian masyarakat akan ikut terlibat dalam pembangunan dan secara otomatis akan ikut memelihara karena merasa ikut memiliki.
- Untuk pendetailan desain masing-masing bangunan perlu dilakukan pengukuran dan investigasi geoteknik lebih lanjut dan detail.

III.4.14 SASARAN 9

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pencapaian sasaran 9 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.35
Capaian Kinerja Sasaran 9

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2019		
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	%
Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Point	41,76	47,69	53,66	53,466	54,42	60,32	110,84
Tingkat pengelolaan sampah	%	92,88%	89,06%	92,99%	88,94%	100	100	100,00



Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 9 Tahun 2019, melalui 2 indikator kinerja adalah sebesar 105,42%, dengan kategori **Sangat Tinggi**. Realisasi Tahun 2019 untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 54,42 point meningkat 6,86 point dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2018. Sedangkan realisasi untuk Tingkat Pengelolaan Sampah meningkat 11,06% dari Tahun 2018. Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

A. Indeks kualitas air (IKA)

Air, terutama air sungai dan situ mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu air sungai dan situ juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya seperti industri, pertanian, dan pembangkit tenaga listrik. Di pihak lain, sungai dan situ juga dijadikan tempat pembuangan barbagai macam limbah sehingga tercemar.

Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (Pollution Index – PI).

Menurut definisinya, PI adalah indeks pencemaran bagi peruntukan j yang merupakan fungsi dari C_i/L_{ij} , dimana C_i menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i dan L_{ij} menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang akan digunakan adalah klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Formula perhitungan Indeks Pencemaran Air (IPA) adalah sebagai berikut :



$$PI_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_M^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_R^2}{2}}$$

Dimana :

adalah nilai maksimum dari Ci/Lij

adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij

Evaluasi terhadap PIj adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 < PIj < 1,0$
2. Tercemar ringan jika $1,0 < PIj < 5,0$
3. Tercemar sedang jika $5,0 < PIj < 10,0$
4. Tercemar berat jika $> 10,0$

Untuk air tanah digunakan metode *Weighted Arithmetic Index* yang direkomendasikan oleh Brown dkk. (1972) persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Q_i = \sum_{i=1}^n \{ M_i \cdot (I_i / (S_i - I_i)) \} \times 100$$

Dimana,

Qi = Quality Rating

Mi = Hasil Uji

Li = Ideal Value

Hasil perhitungan kemudian dilakukan perhitungan *Ground Water Quality Index* dengan persamaan berikut.

$$WQI = \{ (\sum_{i=1}^n Q_i W_i) / (\sum_{i=1}^n W_i) \}$$

Dimana,

WQI = Water Quality Index

Wi = Unit Weight ($1/S_i$)

Hasil perhitungan WQI kemudian dibandingkan dengan Kriteria/Skala sebagai berikut :



1. Sangat Baik jika nilai WQI 0 - 25
2. Baik jika nilai WQI 26 - 50
3. Buruk jika nilai WQI 51 - 75
4. Sangat Buruk jika nilai WQI 76 - 100
5. Tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi jika WQI > 100

Pemantauan Kualitas air di Kota Tangerang dilakukan pada Sungai (Sungai Cisadane, Saluran Mookervart, Sungai Cirarab, Kali Sabi, dan Kali Angke dan Situ (Situ Cipondoh, Situ Gede, Situ Bulakan dan Situ Cangkring) dan Air Tanah, berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan pada tahun 2019.

Hasil Pemantauan Kualitas Air di Kota Tangerang yang memenuhi baku mutu sebanyak 86 titik pantau, tercemar ringan sebanyak 25 titik pantau, mutu air tercemar sedang sebanyak 9 titik pantau dan mutu air cemar berat sebanyak 2 titik pantau. Sehingga jumlah titik sampel yang memenuhi mutu air sebanyak 122 titik. Selanjutnya perhitungan IPA untuk IKLH Kota Tangerang Tahun 2019 ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 3.36
Perhitungan IPA untuk IKLH Kota Tangerang Tahun 2019

Mutu Air	Jumlah Titik Sampel yang Memenuhi Mutu Air	Prosentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
Memenuhi	86	70%	70	49,3
Cemar Ringan	25	20%	50	10,25
Cemar Sedang	9	7%	30	2,21
cemar Berat	2	2%	10	0,16
Total	122	100%	Total	61,97
Indeks Pencemaran Air Kota Tangerang 2019				61,97

B. Indeks kualitas udara (IKU)

Data kualitas udara di Kota Tangerang didapatkan dari hasil 2 (dua) Stasiun Pos Pemantauan Kualitas Udara Otomatis yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang yang terletak di Jl. Benteng Betawi-Jl. Sudirman (mewakili sektor Transportasi) dan Kantor Kelurahan Sudimara Barat (mewakili sektor Permukiman dan Perkantoran). Parameter yang



digunakan dalam perhitungan Indeks Pencemaran Udara adalah konsentrasi NO₂ dan SO₂ Tahun 2019 dengan durasi pengukuran 24 jam selama 1 (satu) Tahun/365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender. Nilai konsentrasi tahunan adalah rata-rata dari nilai konsentrasi yang terpantau setiap bulan untuk selanjutnya dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0-100. Formula untuk konversi tersebut adalah :

$$\text{Indeks Udara IKLH} = 100 - [(50/0,9) \times \text{leu} - 0,1]$$

Perhitungan nilai Indeks Pencemaran Udara (IPU) dilakukan dengan formula sebagai berikut :

$$IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$$

Dimana:

IPU = Indeks Pencemaran Udara

IP_{NO₂} = Indeks Pencemaran NO₂

IP_{SO₂} = Indeks Pencemaran SO₂

Hasil pengukuran NO₂ dan SO₂ pada 2 (dua) stasiun pos pemantauan udara yaitu stasiun benteng betawi dan stasiun sudimara barat selama 1 tahun dari tanggal 1 januari s/d 31 desember 2019, ditemukan konsentrasi parameter NO₂ 2.55µg/Nm³ dan SO₂ 16.81µg/Nm³.

Tabel 3.37
Perhitungan Indeks Pencemaran Udara

Parameter	Rerata Pemantauan	Baku mutu	Index
NO ₂	2,55	40	0,06
SO ₂	16,81	20	0,84
Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu)			0,45
Indeks Kualitas Udara			80,44

Dari perhitungan di atas maka diperoleh Indeks Pencemaran Udara (IPU) Kota Tangerang Tahun 2019 adalah **80,44**.

C. Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)



Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Karena Kota Tangerang tidak memiliki hutan, maka untuk menghitung indeks tutupan lahan digunakan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang pada tahun 2019 adalah seluas 4.185 Ha atau 41,85 Km². Luas administratif Kota Tangerang adalah 17.835 Ha atau 178,35 Km².

Presentase tutupan lahan selanjutnya dikonversi menjadi indeks tutupan hutan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$ITH = 100 - (84,3 - (TH \times 100))$$

Perhitungan Indeks Tutupan Hutan untuk IKLH Kota Tangerang Tahun 2019 ditampilkan pada berikut ini :

Tabel 3.38
Perhitungan Indeks Tutupan Hutan/Lahan

Tahun	Luas Hutan/lahan (km ²)	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Luas Tutupan Hutan/Lahan	ITH
2019	41,85	178,35	23,47 %	43,98

* Catatan menggunakan luasan RTH

Dari perhitungan di atas maka diperoleh Indeks Tutupan Hutan (ITH) Kota Tangerang Tahun 2019 adalah **43,98**.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tangerang

Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu yang mendapat perhatian utama Pemerintah Kota Tangerang ditengah meningkatnya faktor-faktor pengaruh yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, faktor tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk Kota



Tangerang yang termasuk dalam kategori kota besar. Dalam perdebatan akan kualitas lingkungan hidup, satu hal yang sering sekali sulit untuk dijawab secara lugas berdasarkan data-data yang ada adalah apakah kualitas lingkungan hidup Kota Tangerang berada dalam kategori baik, sedang, atau buruk. Maka, untuk menjadi pedoman dalam menentukan kategori kualitas lingkungan hidup digunakanlah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mengukur Indeks Pencemaran Air (IPA), Indeks Pencemaran Udara (IPU), dan Indeks Tutupan Lahan (ITH).

Tujuan dari IKLH yaitu sebagai informasi bagi pengambil keputusan yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai alat untuk mengidentifikasi sumber masalah lingkungan hidup sehingga dapat diambil kebijakan untuk menentukan skala prioritas pembangunan lingkungan hidup, dan sebagai bahasa komunikasi yang menjadi penggerak bagi keterlibatan publik untuk ikut aktif menjaga keualitas lingkungan hidup.

IKLH dihitung berdasarkan jumlah nilai dari 3 hasil pengukuran indeks yaitu Indeks Pencemaran Air (IPA) dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara (IPU) dengan bobot 30%, dan Indeks Tutupan Lahan (ITH) dengan bobot 40%. sebagaimana rumus berikut:

$$\text{IKLH} = (\text{IPA} \times 30\%) + (\text{IPU} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%)$$

Keterangan :

- IK : Indeks Kualitas lingkungan Hidup
- IP : Indeks Pencemaran Air
- IP : Indeks Pencemaran Udara
- IT : Indeks Tutupan Lahan

Kategori IKLH :

Kategori IKLH	Nilai
---------------	-------



Unggul	$x > 90$
Sangat Baik	$82 < x \leq 90$
Baik	$74 < x \leq 82$
Cukup	$66 \leq x \leq 74$
Kurang	$58 \leq x < 66$
Sangat Kurang	$50 \leq x < 58$
Waspada	$x < 50$

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{IKLH Kota Tangerang} = (\text{IPA} \times 30\%) + (\text{IPU} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%)$$

Sehingga:

$$\begin{aligned}\text{IKLH Kota Tangerang} &= (\text{IPA} \times 30\%) + (\text{IPU} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%) \\ &= (61,97 \times 30\%) + (80,44 \times 30\%) + (43,98 \times 40\%) \\ &= \mathbf{60,32}\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas maka diperoleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tangerang tahun 2019 adalah **60,32**.

➤ Upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas udara dan tutupan lahan melalui upaya sebagai berikut :
 - Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Udara dengan tujuan untuk meningkatkan ketataan pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat terhadap pengendalian pencemaran udara.
 - Pengendalian Pencemaran Udara dengan diadakannya acara Fun Rally Eco-Driving.
 - Mengurangi polusi udara melalui kegiatan Hari Bebas Kendaraan di 7 lokasi yaitu : Puri Beta I Kecamatan Larangan, Jalan Pinang Kunciran Kecamatan Pinang, Jalan Irigasi Sipon Kecamatan



Cipondoh, Jalan M. Yamin Kecamatan Tangerang, Jalan Suryadharma Kecamatan Neglasari, Perum Kecamatan Cibodas, dan Kecamatan Karawaci.

- Meningkatkan penghijauan melalui kegiatan Peningkatan Penghijauan Kota yaitu menanam 4505 pohon produktif.
- 2. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk melakukan upaya pengelolaan dan perlindungan kondisi lingkungan hidup melalui upaya sebagai berikut:
 - **Sosialisasi Kampung Iklim** diawali dengan kegiatan launching Pembinaan Kampung Iklim yang dibuka/ Launching oleh Bapak Wakil Walikota di Benua Hijau Kelurahan Pabuaran Tumpeng yang mengundang seluruh Camat dan Lurah (13 Camat serta 104 Lurah). Setelah kegiatan launching dilaksanakan, dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi Program Kampung Iklim di setiap Kecamatan (13 Kecamatan) untuk memperkenalkan kegiatan kampung iklim kepada aparat Kelurahan dan Kecamatan. Setelah itu barulah dilaksanakan kegiatan pembinaan Kampung Iklim sebanyak 50 RW di Kota Tangerang dengan dibantu 10 Instruktur Kampung Iklim. Selain dibina oleh instruktur, Tim DLH juga melakukan pembinaan langsung ke 50 RW dengan mengajarkan kegiatan pembibitan tanaman, pembuatan lubang biopori dan juga pemilahan sampah. Pada tahun 2019 3 RW (RW 08 Ciledug Indah 2 Kelurahan Pedurenan, RW 07 Kelurahan Alam Jaya, RW 08 Kampung Markisa Kelurahan Pasar Baru) hasil pembinaan kampung iklim mendapatkan penghargaan sebagai kampong iklim kategori utama.
 - **Sosialisasi Adiwiyata** yang diawali dengan kegiatan Launching kegiatan adiwiyata tingkat kota tahun 2019, bagi Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Tangerang yang berjumlah 62 sekolah. Untuk kegiatan pembinaan sekolah calon adiwiyata, Dinas Lingkungan Hidup diperbantukan dengan pembina sebanyak 6



orang pembina yang berasal dari Guru Sekolah Adiwiyata Tingkat Mandiri. di tahun 2019 62 sekolah adiwiyata yang dibina, 9 sekolah (SDN kerongcong Mas Permai, SDN Karang Tengah 14, SDN Tangerang 9, SDN Tangerang 12, SDN Gembor 4, SDN Gembor 2, SDN Jati 5, SDN Doyong 1, SDN Gebang Raya 3) mendapatkan penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat nasional dan 1 sekolah (SMPN 24) mendapatkan sekolah adiwiyata tingkat mandiri.

- Melakukan kegiatan **inovasi Bibit Tobat Aktif** (Pembibitan Tanaman Obat dan Produktif) yaitu kegiatan inovasi Bidang PPKLH yang mana menggerakan seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan kegiatan pembibitan tanaman dengan memanfaatkan potensi tanaman yang ada diwilayah. Adapun tanah menggunakan potensi galian tanah yang ada diwilayah. Sedangkan untuk bibit tanaman, menggunakan potensi tanaman di wilayah yang dapat di stek serta bekerja sama dengan penjual jus kode untuk biji tanaman produktif. Hasil pembibitan yang sudah besar, kemudian dibagikan gratis untuk wilayah kampung iklim dan juga sekolah adiwiyata.
- Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA, Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengendalian Pencemaran Udara, dan Pengelolaan limbah B3 dengan terlaksananya kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3. Tahun 2019 tingkat penurunan emisi gas karbon sebesar 20,10%, lebih besar dengan target yang ditetapkan sebesar 20%, untuk itu capaian yang diperoleh sebesar 100,50%. Selain itu tingkat pengelolaan limbah B3 pada tahun 2019 sebesar 70,04%, lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 70%, sehingga capaian yang diperoleh 100, 06%.



3. Menangani pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakkan hukum lingkungan hidup sebagai upaya untuk mencegah atau menghentikan pencemaran/perusakan yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, melalui upaya sebagai berikut:
 - Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup. Selama tahun 2019 DLH telah menerima dan memproses 85 kasus lingkungan hidup yang diadukan oleh masyarakat.
 - Penanganan Kasus Lingkungan Hidup. Selama tahun 2019 DLH telah ditangani sebanyak 60 kasus lingkungan hidup.
4. Melakukan pemantauan kualitas air, udara, dan kebisingan untuk mengetahui tingkat pencemarannya melalui kegiatan :
 - Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Kondisi Ekologis dan Pemantauan Kualitas Air Tanah dan Air Situ di Sembilan lokasi sungai dan situ (Sungai Cisadane, Sungai Mokevart, Sungai Angke, Sungai Sabi, Sungai Cicarab, Situ Cipondoh, Situ Gede, Situ Bulakan, dan Sungai Cangkring), dan Data kualitas udara di Kota Tangerang didapatkan dari hasil 2 (dua) Stasiun Pos Pemantauan Kualitas Udara Otomatis yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang yang terletak di Jl. Benteng Betawi-Jl. Sudirman (mewakili sektor Transportasi) dan Kantor Kelurahan Sudimara Barat (mewakili sektor Permukiman dan Perkantoran). Parameter yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pencemaran Udara adalah konsentrasi NO₂ dan SO₂ Tahun 2019 dengan durasi pengukuran 24 jam selama 1 (satu) Tahun/365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

➤ Permasalahan yang dihadapi

Masalah yang dihadapi dalam mewujudkan indikator sasaran yaitu :



1. Kualitas air secara umum masih tergolong baik, tetapi masih ditemukan nilai indeks pencemaran air di beberapa titik air sungai dan situ yang tercemar sedang. Hal tersebut disebabkan oleh masih ditemukannya sampah rumah tangga di saluran air dan limbah cair yang dihasilkan oleh rumah tangga, industri, rumah sakit, dan pusat perdagangan dan jasa yang masih melebihi Baku Mutu Lingkungan (BML).
2. Kualitas udara secara umum berada pada kondisi cukup baik, tetapi tahun 2019 ditemukan konsentrasi parameter NO₂ yang lebih rendah dari tahun 2018 meskipun masih berada dalam batas wajar sebagaimana kualitas SO₂.
3. Luas ruang terbuka hijau yang perlu ditambah, karena hingga saat ini luas RTH seluas 4.185 Ha atau 41,85 Km². Luas administratif Kota Tangerang adalah 17.835 Ha atau 178,35 Km². Sehingga luasan harus ditambah guna meningkatkan nilai Indeks Tutupan Lahan, mengurangi polusi udara, dan meningkatkan kualitas udara.

➤ **Upaya yang akan dilakukan**

Upaya meningkatkan Indeks Kualitas Air :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah di saluran air dan meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah.
2. Upaya meningkatkan Indeks Kualitas Udara dengan melaksanakan kegiatan hari bebas kendaraan setiap hari minggu.
3. Upaya meningkatkan Indeks Tutupan Lahan dengan menambah luas ruang terbuka hijau, adapun kegiatan yang akan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan kegiatan pembebasan lahan ruang terbuka hijau seluas 1700 m², dan penanaman pohon sebanyak 1706 pohon.
4. Meningkatkan pengawasan melalui kegiatan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.

2. Tingkat Pengelolaan Sampah

A. Persentase pengelolaan sampah di perkotaan



Pengelolaan sampah secara modern yang dilakukan di kota besar seperti Kota Tangerang tidaklah cukup hanya sampai pada tahap pelayanan pengangkutan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pengelolaan sampah harus dilakukan hingga tahap pengurangan volume sampah di sumber. Dengan pengurangan volume sampah di sumber, sampah yang dibuang ke TPA hanya berupa residu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memperpanjang usia operasional TPA dan untuk mendayagunakan sampah agar lebih bernilai ekonomis. Paradigma baru pengelolaan sampah ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yakni menerapkan mekanisme mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang atau sering disebut 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle).

Target Tahun 2019 diharapkan sebanyak 16,00 % dari total timbulan sampah dapat direduksi di sumber, sehingga residu yang terangkut ke TPA dapat terkurangi. Realisasi dari target tersebut, sebesar 16,001 % sampah telah tereduksi, artinya pencapaian kinerja berhasil mencapai 100 %. Indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah pembatasan timbulan sampah, jumlah sampah yang termanfaatkan, dan jumlah sampah yang didaur ulang. Pembatasan timbulan sampah dilakukan di berbagai tempat, seperti sekolah adiwiyata dan non adiwiyata, pondok pesantren, perkantoran, pasar, retail modern, penginapan/hotel/wisma, rumah makan/restoran, serta kegiatan gerakan sumber bersih. Selanjutnya, pengurangan dari sampah yang termanfaatkan melalui mekanisme bank sampah, lapak, serta pemulung di sumber maupun TPA. Sementara itu, daur ulang sampah dilakukan dengan kegiatan komposting skala rumah tangga, sedekah sampah anorganik, sedekah ampas kopi, dan pembuatan biopori.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 2.262.380 jiwa pada tahun 2019, Kota Tangerang menghasilkan timbulan sampah sebanyak 1.583,67 ton per hari atau setara dengan 623.925,55 ton per tahun. Jumlah tersebut sangat besar, sehingga harus dilakukan upaya pengurangan sampah secara



maksimal demi kelestarian lingkungan. Oleh karena itu pengurangan sampah pada sumber harus ditingkatkan, sehingga dapat memperpanjang masa layanan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Berikut data rincian pengurangan sampah yang telah dilakukan :

Tabel 3.39
Pengurangan Sampah Di Kota Tangerang Tahun 2019

A. Pembatasan Timbulan Sampah								
No.	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Timbulan Sampah (ton/hari)	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sampah yang Dibatasi (ton/hari)	Sampah yang Dibatasi (ton/tahun)	Sisa Sampah (ton/tahun)	Persentase Sampah Terkelola (%)
1	Sekolah Adiwiyata (orang)	255.178	1.583,67	623.925,55	25,52	9.314,00	614.611,55	1,493%
2	Sekolah Non Adiwiyata	31.128	1.583,67	623.925,55	3,11	1.136,17	622.789,38	0,182%
3	Pondok Pesantren	2.400	1.583,67	623.925,55	0,05	17,52	623.908,03	0,003%
4	Perkantoran (orang)	14.000	1.583,67	623.925,55	1,40	511,00	623.414,55	0,082%
5	Pasar (orang)	2.500	1.583,67	623.925,55	0,48	173,38	623.752,18	0,028%
6	Retail Modern (orang)	50.000	1.583,67	623.925,55	18,50	6.752,50	617.173,05	1,082%
7	Penginapan/Hotel/Wisma (orang)	2.750	1.583,67	623.925,55	1,35	491,84	623.433,71	0,079%
8	Rumah Makan/Restoran (orang)	18.500	1.583,67	623.925,55	1,85	675,25	623.250,30	0,108%
9	Kegiatan Gerakan Sumber Bersih (HPSN, Jumat Bersih, Bersih-Bersih Pantai, Event Lainnya)	10	1.583,67	623.925,55	1,011	369,11	623.556,44	0,059%
Total		376466	1.583,67	623.925,55	53,26	19.440,76	568.461,95	3,116%

B. Jumlah Sampah Termanfaatkan

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Timbulan Sampah (ton/hari)	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sampah Terkelola (ton/hari)	Sampah Terkelola (ton/tahun)	Sisa Sampah (ton/tahun)	Persentase Sampah Terkelola (%)
1	Bank Sampah Unit dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	179	1.583,67	623.925,55	80,55	29.400,75	594.524,80	4,712%
2	Bank Sampah Induk dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	1	1.583,67	623.925,55	0,04	14,60	623.910,95	0,002%
3	Pengumpulan di Lapak dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	25	1.583,67	623.925,55	101,10	36.901,50	587.024,05	5,914%
4	Pemulung di Sumber	936	1.583,67	623.925,55	11,70	4.270,50	619.655,05	0,684%
5	Pemulung TPA	1000	1.583,67	623.925,55	10,00	3.650,00	620.275,55	0,585%
Total				623.925,55	203,39	74.237,35	563.673,15	11,898%

C. Jumlah Sampah yang di Daur Ulang

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Timbulan Sampah (ton/hari)	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sampah Terkelola (ton/hari)	Sampah Terkelola (ton/tahun)	Sisa Sampah (ton/tahun)	Persentase Sampah Terkelola (%)
1	Komposting skala rumah tangga	3000	1.583,67	623.925,55	6	2.190,00	621.735,55	0,3510%
2	Sedekah Sampah	2	1.583,67	623.925,55	0,07	25,55	623.900,00	0,004%
3	Sedekah Ampas Kopi	35	1.583,67	623.925,55	0,039	14,24	623.911,32	0,002%
4	Biopori	5.380	1.583,67	623.925,55	10,76	3.927,40	619.998,15	0,629%
Total				623.925,55	16,87	6.157,19	563.673,15	0,987%
Total Pengurangan Sampah								
16,001%								

Berdasarkan data pembatasan timbulan sampah di atas, pengurangan sampah terbesar dilakukan di sekolah adiwiyata yaitu sebesar 1,493 %. Hal ini tentu sejalan dengan tujuan program sekolah adiwiyata, di mana sekolah harus peduli terhadap kelestarian lingkungan, salah satunya terhadap sampah. Selain itu, pengurangan sampah yang cukup besar juga dilakukan oleh retail modern mengingat akhir-akhir ini retail modern mulai membatasi timbulan sampahnya. Contoh retail modern yang telah melakukan



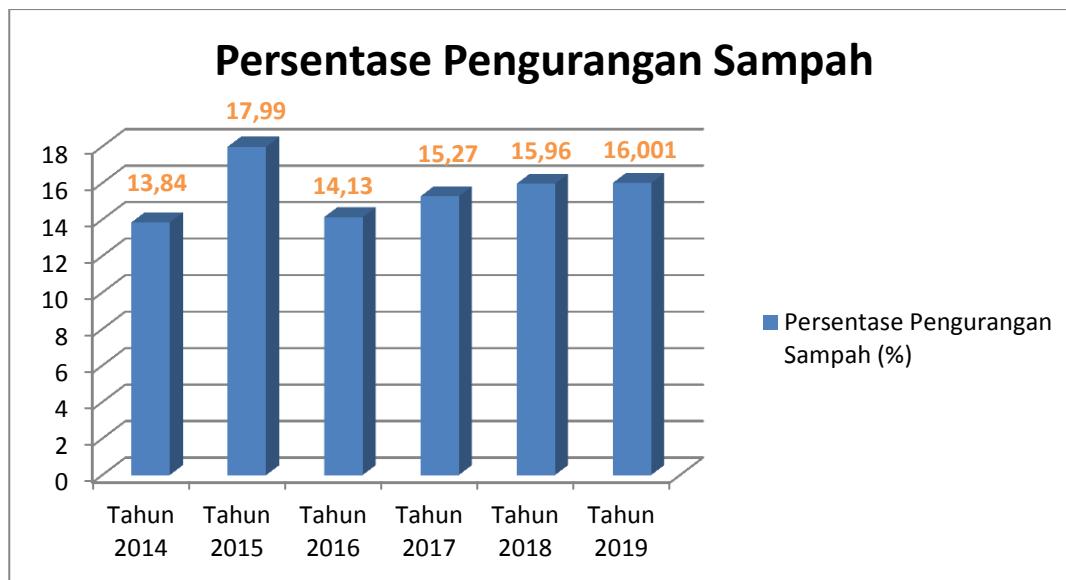
pengurangan sampah dengan baik adalah TangCity mall. Program terbaru pembatasan timbulan sampah telah dilakukan di Pondok Pesantren melalui sosialisasi pengelolaan sampah di berbagai Pondok Pesantren. Meskipun persentasenya masih kecil, namun pengurangan sampah sudah mulai dilakukan di beberapa Pondok Pesantren.

Dari segi jumlah sampah yang termanfaatkan, pemanfaatan sampah yang memiliki persentase cukup signifikan dalam mengurangi sampah di sumber adalah dari bank sampah dan lapak. Jenis sampah yang banyak terkurangi dalam hal ini adalah jenis sampah anorganik. Sampah seperti botol plastik, kardus, kertas, kantong plastik, kaca, dan besi yang dikelola oleh bank sampah maupun lapak dapat dijual kembali sehingga menjadi bernilai ekonomis. Selain itu, terdapat pemulung baik di TPA maupun di sumber yang juga memberikan kontribusi terhadap pengurangan sampah.

Dalam hal pengurangan sampah melalui proses daur ulang, terdapat program baru yaitu sedekah ampas kopi. Meskipun persentasenya tidak terlalu besar, ampas kopi dapat dimanfaatkan untuk mengurangi bau akibat proses pengomposan. Ampas kopi ini diperoleh dari kedai-kedai kopi maupun cafe-cafe.

Persentase pengurangan sampah dari Tahun 2014-2019 disajikan dalam grafik berikut ini.

Gambar 3.19
Persentase Pengurangan Sampah Tahun 2014-2019

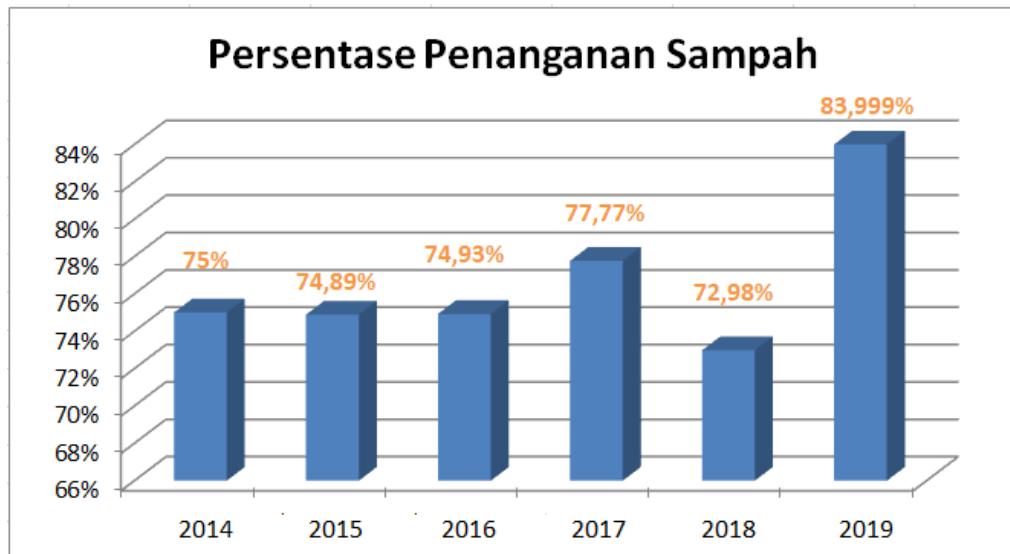


Tahun 2015 pengurangan sampah telah mencapai 17,99 % karena adanya kontribusi pengurangan dari banyak bank sampah yang baru terbentuk dan penambahan pembangunan TPS 3R. Akan tetapi, pada tahun 2016 terjadi penurunan, tetapi penurunan realisasi tersebut sudah sesuai dengan target pengurangan sampah tahun 2016. Penurunan tersebut terjadi karena penambahan jumlah timbulan sampah akibat penambahan jumlah penduduk dan aktivitas perekonomian tidak diimbangi dengan penambahan pembangunan TPS 3R (tidak ada pembangunan TPS 3R tahun 2016) serta sejumlah bank sampah dan aktivitas masyarakat pengolah sampah yang pernah dibina oleh Pemerintah sudah tidak aktif. Tahun 2017 pengurangan sampah meningkat menjadi 15,27% sesuai target yang telah ditetapkan. Tahun 2018 pengurangan sampah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 15,96% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Kemudian pada tahun 2019 persentase pengurangan sampah sedikit meningkat menjadi 16,001% dan sudah sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 16,00%.

Gambar 3.20



Persentase Penanganan Sampah Tahun 2014 - 2019



Persentase penanganan sampah relatif stabil dari tahun ke tahun, yaitu berkisar di angka 74% - 75%. Akan tetapi, pada Tahun 2019 persentase penanganan sampah mengalami peningkatan, yaitu menjadi 83,999%. Hal ini berarti kinerja penanganan sampah sudah sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 84%.

Tabel 3.40
Penanganan Sampah Di Kota Tangerang Tahun 2019

A. Terolah menjadi Bahan Baku								
No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Timbulan Sampah (ton/hari)	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sampah Terkelola (ton/hari)	Sampah Terkelola (ton/tahun)	Sisa Sampah (ton/tahun)	Persentase Sampah Terkelola (%)
1	TPS 3R dikelola oleh sistem kota (pemda)	8	1.583,67	623.925,55	9,00	3.285	620.640,55	0,527%
2	Intermediate Treatment Facility (ITF) dikelola oleh sistem kota (pemda)	1	1.583,67	623.925,55	12,00	4.380,00	619.545,55	0,702%
Total		9	1.583,67	623.925,55	21,00	7.665,00	573.659,55	1,229%
C. Pemrosesan Akhir								
No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (ton/hari)	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sampah Terkelola (ton/hari)	Sampah Terkelola (ton/tahun)	Sisa Sampah (ton/tahun)	Persentase Sampah Terkelola (%)
Masuk ke TPA								
1	Sampah yang hanya di Landfill TPA (sanitary landfill / control landfill) dengan kapasitas maksimum Ton	1	1.583,67	623.925,55	1.376,28	502.342	121.583,35	80,513%
2	Kompos di TPA	1	1.583,67	623.925,55	2,580	942	622.983,85	0,151%
3	Penangkapan dan Pemanfaatan Gas Metan Sebagai Sumber Energi Listrik	1	1.583,67	623.925,55	36,00	13.140,00	610.785,55	2,106%
Total Pengelolaan di TPA				623.925,55	1.414,86	516.423,90	169.239,55	82,770%
Total Penanganan Sampah								
83,999%								

Berdasarkan data penanganan sampah di atas, kontribusi Intermediate Treatment Facility (ITF) cukup besar dalam mengolah sampah



dan mengurangi sampah yang masuk ke TPA yaitu sebesar 0,702 %. TPS 3R yang dikelola oleh Pemda pun juga memberikan kontribusi yang cukup besar, meskipun jumlahnya masih sedikit (9 TPS 3R dan 1 ITF). Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya diperlukan pembangunan TPS 3R baru agar dapat meningkatkan persentase dalam pengolahan sampah. Dari segi pemrosesan akhir, 80,513 % sampah telah diproses di Landfill, 0,151 % sampah organik diolah menjadi kompos di TPA, dan 2,106 % sampah telah termanfaatkan gas metannya. Target tahun 2019 diharapkan sebanyak 84,00 % dari total timbulan sampah tertangani dan terolah. Realisasi dari target tersebut, sebesar 83,999 % sampah telah tertangani dan terolah. Dengan demikian, pencapaian kinerja telah berhasil mencapai 100%.

➤ **Upaya yang telah dilakukan**

Pada tahun 2019 pengurangan sampah mencapai 16,001 %. Upaya yang telah dilakukan untuk merealisaasikan terget tahun 2019 yaitu:

- ✓ Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- ✓ Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan
- ✓ Pembangunan dan Pemeliharaan TPST
- ✓ Pengembangan Mekanisme 3R di Masyarakat

➤ **Permasalahan/hambatan yang dihadapi**

Meskipun pencapaian kinerja pengurangan sampah telah mencapai target, tetapi masih ada sejumlah masalah yang harus diselesaikan sebagai berikut:

- ✓ Sebagian besar masyarakat masih belum melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Hal ini dapat menyulitkan petugas TPS 3R dan ITF dalam mengolah sampah karena sampah yang ditampung sementara di TPS 3R dan ITF harus dipilah dahulu sebelum diolah. Selain itu juga menyebabkan banyak sampah anorganik yang sebenarnya masih memiliki nilai ekonomis menjadi terbuang ke TPA.



- ✓ Masyarakat umumnya masih kurang perhatian dalam menerapkan mekanisme 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) dan masih minim pengetahuan terkait pengolahan sampah menjadi barang-barang yang bermanfaat.
 - ✓ Jumlah TPS 3R masih kurang, idealnya dalam 1 kelurahan memiliki 1 fasilitas TPS 3R. Hal tersebut karena masih sulitnya mencari lahan yang tepat dan diterima warga untuk membangun TPS 3R.
 - ✓ TPS 3R yang aktif dalam upaya pengurangan sampah sebanyak 9 TPS 3R dan 1 ITF. Komunitas masyarakat peduli sampah yang telah diberikan fasilitas TPS 3R perlu diberikan pembinaan secara lebih intensif agar lebih optimal dalam upaya pengurangan sampah.
 - ✓ Ketersediaan lahan di TPA semakin sedikit dan berangsur-angsur habis. Apabila keadaan ini dibiarkan terus terjadi, akibatnya tidak ada lagi lahan untuk memproses sampah dan sampah akan menumpuk di mana-mana.
- **Upaya yang akan dilakukan**

Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi di atas pada tahun 2020 antara lain:

- ✓ Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat secara berkelanjutan dalam menerapkan gerakan 3R dengan memberikan sarana dan prasarana pengangkutan dan pengolahan sampah, gerakan sedekah sampah, sosialisasi/edukasi pengolahan sampah, pendampingan/ pembinaan bank sampah, dan melaksanakan acara Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN).
- ✓ Meningkatkan efektifitas operasional dan pemeliharaan terhadap 9 Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R) eksisting dan mengoptimalkan *Intermediate Treatment Facility* (ITF) di wilayah barat. ITF adalah TPST yang mampu mengolah sampah dalam kapasitas yang lebih besar, modern, inovatif, dan menerapkan teknologi ramah lingkungan.



- ✓ Mempersiapkan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Propinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makasar, disamping itu terdapat Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, bahwa Kota Tangerang ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur energi asal sampah. Saat ini Kota Tangerang sedang melaksanakan berbagai tahapan lelang untuk pembangunan proyek PLTSA tersebut. Untuk menunjang kegiatan tersebut Kota Tangerang telah memiliki Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 800/Kep.279-DKP/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Kota Tangerang Tahun 2016 dan Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 800/Kep.320-DKP/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Tim Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Kota Tangerang Tahun 2016.

III.4.15 SASARAN 10

Meningkatnya Investasi Daerah

Pencapaian sasaran 10 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.41
Capaian Kinerja Sasaran 10

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2019		
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	%
Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	Rp. Trilyun	5 ,07	6,86	7,69	6,79	7,13	7,97	111,78

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 10 Tahun 2019, melalui 1 indikator kinerja adalah sebesar 111,78%, dengan kategori **Sangat Tinggi**. Jumlah



nilai investasi Tahun 2019 bertambah sebesar 1,18 Trilyun Rupiah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2018). Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai Investasi (PMA dan PMDN)

Persetujuan dan perizinan penanaman modal baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mempunyai pengaruh dalam pengembangan penanaman modal di Indonesia. Proses persetujuan dan perizinan penanaman modal yang mudah, cepat, efisien serta tidak berbelit-belit dan birokrasi yang panjang merupakan suatu kendala yang sangat memberatkan bagi pelaku usaha. Dalam upaya pemberian pelayanan perizinan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang menyediakan pelayanan perizinan secara Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi secara elektronik. Pelayanan izin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dilakukan secara online atau daring atau dikenal dengan Online Single Submission (OSS) dalam arti penanaman modal tidak perlu hadir secara fisik untuk mendapatkan pelayanan. Dalam peraturan pemerintah tersebut, perizinan telah banyak disederhanakan serta dapat diterbitkan berdasarkan komitmen bahkan waktu yang dibutuhkan dalam penerbitan perizinan juga telah ditentukan namun terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelumnya.

Kinerja sasaran Meningkatnya Investasi Daerah dicapai melalui indikator kinerja Nilai Investasi (PMA dan PMDN) dengan target sebesar Rp. 7,13 triliun dan terealisasi sebesar Rp. 7,97 triliun atau 111,78% dari target, menunjukkan bahwa realisasi dari Penanaman Modal pada tahun 2019 melebihi target. Pencapaian target indikator jumlah penanaman modal (investasi) terdiri dari Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Izin Usaha Penanaman Modal Asing (PMA).

a. Upaya yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan investasi diantaranya:



1. Melakukan sosialisasi terkait Kegiatan Penanaman Modal di Kota Tangerang dengan mengundang perusahaan dalam dan luar negeri, khususnya dengan materi mengenai kebijakan penanaman modal dan cara pengisian laporan kegiatan penanaman modal secara online
2. Melakukan sosialisasi berkala kepada masyarakat mengenai pelayanan perijinan
3. Meningkatkan kemudahan pelayanan melalui pengadaan mall pelayanan public
4. Mengoptimalkan koordinasi melalui rapat rutin untuk pertimbangan dalam mengeluarkan IMB
5. Melakukan survey kepuasan masyarakat untuk mengevaluasi hal-hal yang perlu diperbaiki dalam meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal

Upaya tersebut diatas diimplementasikan dalam program kegiatan yang dilaksanakan DPMPTSP sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pameran Investasi dengan anggaran Rp.155.800.000,- yang dilaksanakan 4 kali yaitu 2 kali pameran keluar Daerah, 1 kali Tangerang Expo dan 1 kali Festival Cisadane.
2. Sosialisasi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dengan anggaran Rp.73.786.500,- yang dilaksanakan dengan mengundang 100 perusahaan PMA dan PMDN dengan materi Arah Kebijakan Penanaman Modal di kota Tangerang Serta Praktik Cara Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara Online.
3. Sosialisasi Pelayanan Perijinan dengan anggaran Rp.541.888.500,- yang dilaksanakan mengundang 1.300 orang/masyarakat dengan materi informasi jenis-jenis perizinan, persyaratan & biaya. Banner informasi pelayanan perijinan (Jenis Perizinan yang dilayani oleh DPMPTSP Kota Tangerang) yang terpasang di Kelurahan dan Kecamatan, Jasa Publikasi Iklan media cetak mengenai Sosialisasi tentang perizinan sebanyak 23 kali tayang.



4. Rapat-Rapat Koordinasi Bidang Pembangunan dengan anggaran Rp.65.550.000,- melaksanakan rapat pertimbangan yang dipimpin oleh Walikota dan SKPD terkait. Rapat ini bertujuan untuk mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) yang berdampak skala besar terhadap investasi dan lingkungan.
5. Pengadaan sarana dan prasarana promosi dengan anggaran Rp.176.350.000,- yaitu menyediakan media promosi (Leaflet, CD, Souvenir, Banner), pemeliharaan Billboard/Baliho dan Belanja Jasa Publikasi dalam Majalah.
6. Kajian Potensi dan prasarana investasi dengan anggaran Rp.144.640.000,- yaitu penyusunan profil kemudahan berusaha di Kota Tangerang, Pemukhtakhiran Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Tangerang.
7. Mal Pelayanan Publik dengan anggaran Rp.110.000.000,- yaitu penyediaan sewa gudang arsip dalam mendukung tersedianya mal pelayanan publik yang memadai.
8. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dengan anggaran Rp.44.207.900,-
9. Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Penataan Pelayanan berbentuk Mal Pelayanan Publik) untuk memberikan kenyamanan kepada Masyarakat dalam mengurus proses perizinan dan Pelayanan Publik lainnya dengan anggaran Rp.91.614.000,-.
10. Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk memberikan fasilitas kebutuhan counter Mal Pelayanan Publik kepada Masyarakat dalam mengurus proses perizinan dan pelayanan publik lainnya dengan anggaran Rp.1.060.866.550,-.
11. Melaksanakan Rapat koordinasi pelayanan penanaman modal dengan anggaran Rp.6.600.000,- yaitu melaksanakan Rapat koordinasi dengan mengundang SKPD teknis terkait dan menghadirkan Narasumber.



12. Melaksanakan Rapat koordinasi pelayanan perizinan pemerintahan dengan anggaran Rp.3.437.500,- yaitu melaksanakan Rapat koordinasi dengan mengundang SKPD teknis terkait dan menghadirkan Narasumber.
13. Melaksanakan Rapat koordinasi pelayanan perizinan kesra dengan anggaran Rp.4.625.000,- yaitu melaksanakan Rapat koordinasi dengan mengundang SKPD teknis terkait dan menghadirkan Narasumber.
14. Melaksanakan Rapat koordinasi pelayanan perizinan IMB dengan anggaran Rp.4.725.000,- yaitu melaksanakan Rapat koordinasi dengan mengundang OPD teknis terkait dan menghadirkan Narasumber.
15. Melaksanakan Rapat koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan dengan anggaran Rp.4.725.000,- yaitu melaksanakan Rapat koordinasi dengan mengundang SKPD teknis terkait dan menghadirkan Narasumber.
16. Pengolahan Data Pelaporan Perizinan dengan anggaran Rp.4.500.000,- yaitu menyediakan laporan pelayanan perizinan.

b. Permasalahan

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Tidak tersedianya data peluang pasar investasi Di Kota Tangerang sebagai acuan Perusahaan untuk berinvestasi Di Kota Tangerang
2. Masih banyaknya Perusahaan PMA dan PMDN yang belum melaporkan (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal untuk mengetahui perkembangan investasi Di Kota Tangerang. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal. LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi. LKPM mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan di setiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan. Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman modal di bidang usaha perdagangan, LKPM cukup



berdasarkan lokasi yang telah dinyatakan pada Izin Prinsip. Masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan LKPM.

3. Masih banyaknya Masyarakat atau Investor yang belum mengetahui tentang prosedur dan kemudahan perizinan di Kota Tangerang
4. Masih adanya oknum perantara yang meminta imbalan
5. Masih adanya SDM yang Kurang professional
6. Masih kurangnya pengetahuan Masyarakat dalam pengurusan perizinan

c. Upaya yang akan dilakukan

Upaya yang akan dilakukan yaitu dilaksanakannya kegiatan:

1. Penyusunan Kajian Potensi dan prasarana investasi dengan anggaran Rp. 165.000.000,-.
2. Pelaksanaan Sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan mengundang 100 perusahaan dengan anggaran Rp. 59.903.000,-.
3. Ikut serta dalam Pameran investasi dengan anggaran Rp.407.165.000,-.
4. Melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dengan anggaran Rp. 48.075.000,-untuk mengevaluasi hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pelayanan perizinan di tahun 2020.
5. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM dalam pelayanan perizinan dengan mengadakan Bimbingan Teknis pegawai dengan anggaran Rp.34.800.000,-.

III.4.16 SASARAN 11

Meningkatnya Perekonomian Masyarakat

Pencapaian sasaran 11 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.42
Capaian Kinerja Sasaran 11

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	2019		
			Target	Realisasi	%
Laju inflasi	%	3,46	3,50	3,31	105,43%
Indeks gini (gini rasio)	Point	0,36	0,35	0,32	108,57%



Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 11 Tahun 2019, melalui 2 indikator kinerja adalah sebesar 107,00%, dengan kategori **Sangat Tinggi**. Realisasi Tahun 2019 untuk indikator Laju inflasi sebesar 3,31% meningkat 0,25% dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2018. Sedangkan realisasi untuk indikator Indeks Gini (Gini Rasio) meningkat 0,04 point dari Tahun 2018. Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Inflasi

Inflasi dapat digambarkan sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang pada umumnya berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di suatu wilayah meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Atas dasar hal tersebut maka laju inflasi kerap dijadikan sebagai salah satu indikator pembangunan suatu daerah atau negara. Tingginya nilai inflasi mengindikasikan semakin terbebaninya perekonomian masyarakat karena terjadinya kenaikan harga-harga kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, semakin rendah nilai inflasi atau bahkan bernilai negatif (deflasi), maka hal tersebut menunjukkan relatif stabilnya perekonomian masyarakat.

Mencermati kondisi perkembangan inflasi di Kota Tangerang dalam lima tahun terakhir, secara umum dapat dikatakan lajunya relatif stabil dan terkendali, walaupun pergerakannya fluktuatif dari tahun ke tahun. Kondisi yang cukup positif adalah fluktuasi laju inflasi di Kota Tangerang tersebut selalu berada di bawah 2 (dua) digit, bahkan tidak sampai menyentuh angka 5%. Dalam lima tahun terakhir, inflasi tertinggi Kota Tangerang terjadi pada Tahun 2015 yang mencapai 4,28%. Tahun-tahun selanjutnya laju inflasi cenderung terus bergerak stabil di angka sekitar 3%.

Demikian pula dengan kondisi capaian laju inflasi pada Tahun 2019, dimana angkanya tetap dapat dikendalikan di bawah dua digit dan bahkan



angkanya lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2018 inflasi di Kota Tangerang tercatat sebesar 3,46%, pada tahun 2019 angkanya mengalami penurunan menjadi sebesar 3,31%. Realisasi nilai laju inflasi Kota Tangerang pada tahun 2019 tersebut juga berada di bawah target yang ditetapkan sebelumnya yakni sebesar 3,50%. Dengan demikian maka jika diperbandingkan angka target dengan angka realisasi indikator laju inflasi pada tahun 2019 tersebut, terlihat capaiannya sangat baik yakni sebesar 105,43%.

Relatif stabil dan terkendalinya laju inflasi di Kota Tangerang tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Sebagaimana diketahui bahwa angka inflasi diperoleh dari besar kecilnya pergeseran nilai harga-harga barang kebutuhan masyarakat atau kerap disebut Indeks Harga Konsumen (IHK). Untuk menjaga stabilitas IHK tersebut agar dapat terkendali maka diperlukan adanya intervensi yang intensif dan berkesinambungan dari berbagai pihak, utamanya pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan pasar.

2. Indeks Gini (Gini Rasio)

Indeks Gini (Gini Rasio) merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran-pengeluaran konsumsi atau variabel-variabel lain yang terkait dengan distribusi di mana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik. Dalam bahasa lain Indeks Gini dijelaskan sebagai salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Bila nilai Indeks Gini mendekati satu maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sedangkan semakin kecil atau mendekati nol nilainya maka semakin merata distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi.

Pada Tahun 2019 Indeks Gini Kota Tangerang mencapai angka 0,32, dimana angka tersebut berada di bawah angka target yakni sebesar 0,36.



Dengan demikian jika dihitung tingkat capaian realisasi terhadap target pada Tahun 2019 capaiannya yakni sebesar 108,57%. Capaian kinerja indikator Indeks Gini di Kota Tangerang pada tahun 2019 tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi. Data tersebut memberikan gambaran bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Tangerang hingga Tahun 2019 kondisinya cenderung membaik atau dalam kata lain ketimpangannya semakin menipis. Capaian Indeks Gini Kota Tangerang Tahun 2019 tersebut juga mengandung arti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Tangerang pada Tahun 2019 dikategorikan sebagai tingkat “ketimpangan sedang”.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang penting karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Tingginya ketimpangan pendapatan atau kemiskinan relatif, berarti kebijakan pembangunan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan capaian nilai Indeks Gini Kota Tangerang yang semakin membaik hingga tahun 2019, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan yang ditetapkan Pemda Kota Tangerang sejauh ini (khususnya kebijakan di bidang ekonomi) telah cukup efektif melayani seluruh lapisan masyarakat secara merata.

a. Upaya yang telah dilakukan

Upaya-upaya Pemerintah Daerah Kota Tangerang yang sejauh ini telah dilakukan nampaknya dalam lima tahun terakhir telah cukup sukses dalam mengendalikan angka inflasi di Kota Tangerang. Upaya intervensi pasar, di saat terjadi kenaikan harga komoditas yang signifikan di momen-momen tertentu (seperti: Ramadhan, Idul Fitri, Natal, dll), melalui kegiatan operasi pasar, pasar murah, bazar, dan lain-lain, terlihat cukup efektif dalam menjaga stabilitas harga sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.

Secara umum upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui OPD lintas sektor yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui pemberian bantuan siswa miskin dan BPJS untuk warga Kota Tangerang dan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai.



2. Mendorong sektor UKM melalui pendampingan dan pelatihan, kerjasama dengan perusahaan, serta meningkatkan kompetensi warga Kota sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
3. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat agar dapat berwirausaha.
4. Mendorong promosi sektor pariwisata dan mengadakan event-event sebagai wadah UKM di Kota Tangerang untuk mengoptimalkan usahanya.
5. Mengontrol harga kebutuhan pokok di pasaran dengan membentuk tim pengendalian inflasi daerah (TPID).
6. Mendorong sektor-sektor penting yang dapat mendongkrak peningkatan pendapatan daerah, diantaranya meningkatkan pendataan PBB.
7. Pemerintah Kota Tangerang juga mengoptimalkan dana APBD untuk dialokasikan bagi pembangunan infrastruktur maupun pos-pos lain yang berdampak langsung dengan masyarakat.

b. Kendala yang dihadapi

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah :

1. Belum optimalnya pelatihan dan pendampingan terhadap UKM karena kurangnya dukungan modal usaha.
2. Perlunya pendataan warga miskin secara lebih berkala untuk memastikan kebijakan yang dilakukan dapat tepat sasaran.
3. Belum optimalnya cakupan ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tangerang.
4. Belum optimalnya promosi dan pengembangan sarana pendukung kepariwisataan di Kota Tangerang.

c. Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, adalah :

1. Pemerintah Kota Tangerang akan mengadakan program pemberian bantuan modal kepada UKM dengan mekanisme kredit ringan bagi kelompok usaha.



2. Pemerintah Kota Tangerang terus melakukan peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi warga Kota Tangerang.
3. Pemerintah Kota Tangerang terus mendorong promosi dan peningkatan potensi pariwisata di Kota Tangerang yang salah satunya melalui pembinaan Kampung Tematik. Contoh keberhasilan dengan terbentuknya Kampung Berkelir sebagai Kampung Wisata yang menjadi tujuan dari masyarakat luar Kota Tangerang
4. Pemerintah Kota Tangerang mendorong sektor swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan melalui alokasi dana CSR.
5. Pemerintah Kota Tangerang meningkatkan sosialisasi dan pendataan untuk mendorong masyarakat untuk berkontribusi membayar PBB dan BPHTB.



III.5 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

Selama Tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Tangerang penganggarannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang sebesar Rp.5.039.952.537.109,08 dan direalisasikan sebesar Rp.4.371.084.765.016,00 (86,73%). Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk pendanaan belanja tidak langsung sebesar Rp.1.490.076.361.648,00 dan belanja langsung sebesar Rp.2.881.008.403.368,00. Alokasi anggaran belanja langsung tersebut diperuntukan bagi pendanaan program dan kegiatan pada 46 OPD yang meliputi 6 urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 5 Urusan Pilihan dan 8 Urusan Penunjang. Program dan kegiatan serta anggaran dialokasikan dalam 3 (tiga) kelompok yakni anggaran berdasarkan OPD, anggaran berdasarkan urusan dan anggaran berdasarkan prioritas.

Alokasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2019 diprioritaskan pada pendanaan untuk:

1. Pelayanan sarana-prasarana dan pengendalian banjir (fasilitas dan utilitas umum) yang layak dan memadai;
2. Pelayanan pendidikan yang lengkap, berkualitas dan terjangkau;
3. Pelayanan kesehatan yang lengkap, berkualitas dan terjangkau;
4. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pelayanan kesejahteraan sosial;
5. Pengetahuan dan kebudayaan, ekonomi kreatif, inovasi teknologi, serta daya saing masyarakat;
6. Kondusivitas iklim investasi daerah dan iklim usaha daerah
7. Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat
8. Daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingkungan)



9. Tata kelola dan tata kerja birokrasi pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
10. Ketahanan pangan daerah;
11. Pengelolaan energi.

Anggaran dan realisasi belanja daerah yang tersusun atas belanja tidak langsung dan belanja langsung seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.43

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)*	%
2.1 Belanja Tidak Langsung	1.571.939.645.164,57	1.490.076.361.648,00	94,79
2.1.1 Belanja pegawai	1.457.242.662.622,57	1.390.365.395.321,00	95,41
2.1.2 Belanja bunga	-	-	-
2.1.4 Belanja hibah	51.754.193.460,00	38.677.963.960,00	74,73
2.1.5 Belanja bantuan sosial	-	-	-
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	2.367.949.000,00	2.367.949.000,00	100,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga	60.574.840.082,00	58.665.053.367,00	96,85
2.2 Belanja Langsung	3.468.012.891.944,51	2.881.008.403.368,00	83,07
2.2.1 Belanja pegawai	65.265.215.719,00	61.290.720.882,00	93,91
2.2.2 belanja barang dan jasa	2.168.204.160.471,89	1.939.371.523.263,00	89,45
2.2.3 belanja modal	1.234.543.515.753,62	880.346.159.223,00	71,31
Jumlah Belanja	5.039.952.537.109,08	4.371.084.765.016,00	86,73

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2020

* Data Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang TA 2019 Unaudited

Untuk Tahun 2019 anggaran belanja langsung mencakup 68,81% dari total anggaran belanja daerah. Sedangkan untuk realisasi belanja daerah sebesar Rp4.371.084.765.016,00 (86,73%) berada dibawah target realisasi sebesar Rp5.039.952.537.109,08, dengan capaian realisasi terendah adalah belanja langsung sebesar 83,07%.

Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 dengan komposisi belanja APBD Kota Tangerang, sebagai berikut :

Tabel 3.44

Komposisi Belanja Pemerintah Kota Tangerang
Tahun Anggaran 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No.	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)*	Komposisi	
				Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	Belanja Tidak Langsung	1.571.939.645.164,57	1.490.076.361.648,00	31,19	34,09

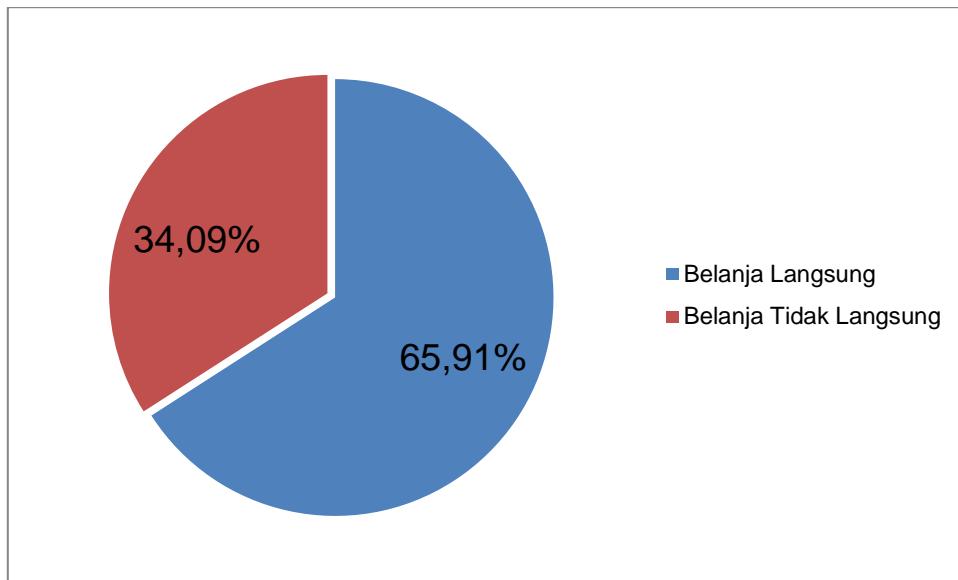


No.	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)*	Komposisi	
				Anggaran (%)	Realisasi (%)
2	Belanja Langsung	3.468.012.891.944,52	2.881.008.403.368,00	68,81	65,91
	Jumlah	5.039.952.537.109,09	4.371.084.765.016,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2020

* Data Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang TA 2019 Unaudited

Gambar 3.15
Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Kota Tangerang
Tahun Anggaran 2019



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2020

* Data Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang TA 2019 Unaudited

Dari pelaksanaan belanja langsung Tahun 2019 terdapat sisa anggaran sebesar Rp.587.004.488.576,51. Dengan demikian terdapat efisiensi 16,92% dari pelaksanaan program-kegiatan yang didanai belanja langsung APBD 2019.

a. Upaya yang telah dilakukan

Untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan beberapa upaya diantaranya :

1. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada semester 1 untuk mengoptimalkan efisiensi dari pelaksanaan lelang lebih awal agar dapat dialokasikan pada anggaran perubahan tahun berjalan.



2. Mendorong pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersifat non fisik dan dapat dimajukan jadwalnya ke semester 1 untuk dapat diselesaikan lebih awal. Ini dilakukan untuk mendorong penyerapan anggaran lebih maksimal dan agar sisa anggaran hasil pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan pada anggaran perubahan tahun berjalan.
3. Memaksimalkan pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis teknologi informasi untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya. Diantaranya yang sudah dilakukan melalui evaluasi dan pelaporan online, dan kebijakan paperless dimana kegiatan surat menyurat dilakukan melalui penggunaan aplikasi e-office. Hal ini berdampak positif dalam meminimalisir penggunaan kertas, printer dan biaya pengiriman dokumen. Selain itu juga meningkatkan efisiensi waktu pelaksanaan kegiatan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan untuk mengontrol capaian pelaksanaan pembangunan, khususnya yang bersifat fisik dan mengawal apabila ada kendala dalam pelaksanaannya untuk segera di ambil langkah antisipasi dengan tujuan kegiatan dapat diselesaikan tepat pada waktunya
5. Melakukan koordinasi rutin dengan OPD untuk mengevaluasi capaian indikator RPJMD dan realisasi kegiatan OPD.
6. Mengadakan kerjasama dengan akademisi dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan melalui kajian yang disusun perguruan tinggi atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan fisik swakelola yang dikoordinir OPD Kecamatan
7. Mengadakan kerjasama dengan dunia usaha agar dapat berkontribusi melalui dana CSR dalam rangka melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



b. Kendala yang dihadapi

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemerintah daerah masih terdapat permasalahan yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut:

1. Adanya program-program lanjutan strategis, terutama program dan kegiatan fisik dengan nilai anggaran yang cukup besar, sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan rencana alokasi anggaran belanja;
2. Beberapa kegiatan pembangunan fisik terkendala proses pengadaan, sehingga mengalami kegagalan atau lelang ulang, sehingga waktu pelaksanaan tidak berjalan sesuai rencana;
3. Beberapa kegiatan pembangunan fisik terkendala pengadaan lahan untuk lokasi pembangunan. Hal ini berdampak pada tidak terealisasinya kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran
4. Program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan belum terukur secara optimal khususnya terkait manfaat dan efektifitasnya terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang ditargetkan dalam RPJMD dan RKPD Kota Tangerang periode berjalan.

c. Solusi/rencana tindak lanjut

Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan strategi yang lebih mengutamakan pada pencapaian sasaran program pembangunan dimana alokasinya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
2. Penanganan masalah-masalah khusus yang perlu segera ditangani serta menampung aspirasi masyarakat yang mendesak dan membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah.
3. Meningkatkan koordinasi evaluasi dan pelaporan secara berkala dengan mengintegrasikan system perencanaan, penganggaran dan evaluasi, sehingga diharapkan usulan program kegiatan yang diajukan dapat



dianalisis lebih mendalam dengan memperhatikan aspek evaluasi atau pencapaian sesuai indikator yang ditargetkan dalam RPJMD

4. Mendorong inspektorat untuk meningkatkan pemantauan secara berkala agar dapat menghasilkan evaluasi yang lebih akurat terkait efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan di setiap OPD
5. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui program pemberdayaan masyarakat, diantaranya dengan pembinaan kampung tematik di setiap kelurahan

III.6 ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA

Realisasi Urusan-Program-Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kota Tangerang Tahun 2019, adalah :

No	Urusan	Jml Program	Jml Kegiatan	Anggaran (Rp)	Persentase Terhadap APBD	Realisasi (Rp)*
1	2	3	4	5		6
I	Wajib	180	1.906	3.093.145.757.181,83	89,19%	2.544.943.516.287,00
A	Wajib Pelayanan Dasar	76	857	2.198.526.506.583,09	63,39%	1.921.380.212.302,00
1	Pendidikan	8	62	735.336.507.506,09	21,20%	695.899.401.543,00
2	Kesehatan	20	136	511.504.531.999,00	14,75%	445.515.418.158,00
3	Pekerjaan Umum Dan PenataanRuang	16	355	710.347.542.235,00	20,48%	601.635.032.309,00
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	9	180	117.388.672.562,00	3,38%	60.470.461.710,00
5	Ketenteraman, KetertibanUmum Dan Perlindungan Masyarakat	12	63	68.573.757.256,00	1,98%	64.287.893.382,00
6	Sosial	11	61	55.375.495.025,00	1,60%	53.572.005.200,00
B	Wajib Non Pelayanan Dasar	104	1.049	894.619.250.598,74	25,80%	623.563.303.985,00
7	Tenaga Kerja	8	45	13.127.925.380,00	0,38%	12.578.393.389,00
8	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7	21	6.981.546.000,00	0,20%	6.667.228.567,00
9	Pangan	4	28	5.293.241.100,00	15,26%	5.060.190.264,00
10	Pertanahan	7	28	175.084.350.134,74	5,05%	33.864.723.991,00
11	Lingkungan Hidup	9	66	200.815.561.315,00	5,79%	190.917.819.307,00
12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4	27	14.066.395.330,00	0,41%	13.601.907.357,00
13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2	207	71.128.741.032,00	2,05%	54.585.063.277,00
14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3	119	13.808.950.468,00	0,40%	10.256.963.491,00
15	Perhubungan	9	140	194.979.011.581,00	5,62%	160.128.567.176,00



No	Urusan	Jml Program	Jml Kegiatan	Anggaran (Rp)	Persentase Terhadap APBD	Realisasi (Rp)*
1	2	3	4	5		6
16	Komunikasi Dan Informasi	8	62	46.414.806.268,00	1,34%	44.225.705.406,00
17	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	8	30	9.849.162.800,00	0,28%	9.304.921.879,00
18	Penanaman Modal	7	32	7.841.074.050,00	0,23%	7.318.365.591,00
19	Kepemudaan Dan Olah Raga	11	171	108.034.447.171,00	3,12%	51.801.226.291,00
20	Statistik	1	3	750.109.300,00	0,02%	686.053.900,00
21	Persandian	1	4	481.962.500,00	0,01%	469.065.500,00
22	Kebudayaan	7	25	18.271.330.336,00	0,53%	15.819.736.213,00
23	Perpustakaan	4	30	6.998.286.233,00	0,20%	5.596.022.786,00
24	Kearsipan	4	11	692.349.600,00	0,02%	681.349.600,00
II Pilihan		22	56	12.847.190.868,00	0,37%	11.987.445.726,00
1	Kelautan Dan Perikanan	1	2	503.006.000,00	0,01%	489.602.800,00
2	Pariwisata	3	10	2.931.875.800,00	0,08%	2.553.314.512,00
3	Pertanian	5	10	2.329.852.788,00	0,07%	2.271.469.319,00
4	Perdagangan	4	7	1.348.045.680,00	0,04%	1.328.606.330,00
5	Perindustrian	9	27	5.734.410.600,00	0,17%	5.344.452.765,00
III Penunjang Urusan		49	377	362.019.943.894,68	10,44%	324.077.441.355,00
1	Perencanaan	10	43	13.035.845.210,00	0,38%	12.834.957.721,00
2	Keuangan	5	58	28.328.671.915,68	0,82%	27.207.183.133,00
3	Kepegawaian	7	49	21.749.896.518,00	0,63%	19.198.329.347,00
4	Penelitian Dan Pengembangan	1	2	2.081.619.000,00	0,06%	2.045.359.000,00
5	Sekretariat Daerah	9	135	104.058.835.167,00	3,00%	87.040.403.138,00
6	Sekretariat DPRD	5	32	96.985.092.913,00	2,80%	84.473.691.015,00
7	Pengawasan	7	30	6.651.804.800,00	0,19%	5.818.954.933,00
8	Kecamatan	5	28	89.128.178.371,00	2,57%	85.458.563.068,00
JUMLAH		251	2.339	3.468.012.891.944,51	100,00	2.881.008.403.368,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2020

* Data Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang TA 2019 Unaudited

Indikator kinerja utama Kota Tangerang berdasarkan RPJMD Periode 2019-2023 terdapat 5 tujuan yang didukung 11 sasaran dengan total jumlah indikator keseluruhan sebanyak 28 indikator. Untuk mencapai sasaran Kota Tangerang telah dilaksanakan sebanyak 251 program dan 2.339 kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar 83,07%. Adapun dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memenuhi pencapaian indikator kinerja utama beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang yaitu :

a. Upaya Yang Telah Dilakukan Pemerintah Kota Tangerang

- Melakukan pemantauan secara berkala setiap bulan melalui rapat koordinasi evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan melalui rapat koordinasi pengendalian evaluasi RKPD



Triwulan yang dilaksanakan Bappeda dengan mengundang seluruh OPD untuk menyampaikan data progress pencapaian sasaran dan program untuk dibahas dan menjadi bahan pengambilan kebijakan baik dilingkup perencanaan maupun penganggaran. Progress pencapaian indikator setiap triwulan juga dibahas pada koordinasi rutin yang dilaksanakan di masing-masing bidang pemegang urusan. Hasil evaluasi secara berkala juga menjadi dasar untuk penajaman pada proses perencanaan dan penganggaran kegiatan saat penyusunan KUA-PPAS hingga APBD Kota Tangerang baik pada anggaran perubahan maupun murni, sehingga kegiatan yang dilaksanakan OPD dioptimalkan untuk mendukung pencapaian indikator yang ada di RPJM maupun RKPD setiap tahunnya.

2. Mempermudah proses penginputan laporan evaluasi secara berkala melalui ketersediaan system informasi evaluasi dan pelaporan serta system informasi monitoring dan evaluasi.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Tangerang telah menempuh beberapa upaya strategis untuk memenuhi target pencapaian indikator kinerja utama, namun dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala/hambatan yaitu :

b. Kendala Pencapaian Indikator Kinerja Utama

1. Keterbatasan kelengkapan data pendukung yang disampaikan oleh OPD terkait, khususnya pada komponen indikator makro dikarenakan instansi yang menjadi sumber data belum merilis update terbaru dari data-data terkait. Sehingga data yang ditampilkan seringkali bersifat proyeksi atau prediksi (data diolah oleh tim Bappeda).
2. Keterbatasan pemahaman OPD terhadap definisi maupun rumusan operasional indikator kinerja sehingga berpengaruh terhadap perencanaan kegiatan yang diusulkan OPD, dimana tujuan dan rincian kegiatan yang diusulkan belum sepenuhnya mengarah pada pencapaian sasaran dan program RPJMD. Hal tersebut juga menjadi kendala dalam



mengkoordinasikan dan memberikan arahan serta panduan penyusunan rencana anggaran pada masing-masing OPD.

3. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan LHP inspektorat dikarenakan kurangnya koordinasi antara OPD dan inspektorat untuk memahami rekomendasi hasil LHP.
4. Belum terintegrasinya system penganggaran, perencanaan dan evaluasi kinerja, sehingga pengukuran capaian kinerja tidak dapat terlaksana dengan optima dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan.

Untuk mengatasi kendala/hambatan yang terjadi di tahun 2019, Pemerintah Kota Tangerang akan menempuh beberapa upaya lintas sector diantaranya :

c. Tindak Lanjut terhadap Permasalahan/Kendala yang Dihadapi

1. Meningkatkan koordinasi secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian kinerja RPJMD yang dilaksanakan oleh OPD terkait, termasuk diantaranya melibatkan tidak hanya kasubag perencanaan dalam rapat koordinasi namun juga bidang terkait pada OPD, sebagai sumber data indikator. Koordinasi juga dilakukan dalam bentuk pembahasan secara detail terkait definisi maupun rumusan operasional indikator untuk meningkatkan pemahaman OPD terkait indikator kinerja sesuai tanggungjawabnya dan memastikan validitas data yang disampaikan OPD.
2. Melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi vertikal yang menjadi sumber data seperti BPS, untuk mendapatkan informasi terupdate terkait data prediksi dan proyeksi indikator.
3. Mengintegrasikan system informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi untuk mempermudah akses pengumpulan data kinerja dari OPD dan mempermudah penilaian terhadap usulan kegiatan OPD pada saat penajaman usulan program dan kegiatan pembangunan agar mendukung pencapaian sasaran dan program RPJMD. Dengan adanya evaluasi berkala baik di lingkup koordinasi maupun system informasi dapat memberikan gambaran terkait ketercapaian indikator RPJMD sebagai



bahan pengambilan kebijakan bagi pimpinan untuk menentukan program dan kegiatan yang akan diprioritaskan.

4. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparatur terkait tugas dan fungsi perencanaan khususnya dalam menyiapkan konsep rencana kerja dengan berpedoman pada dokumen rencana kerja serta berdasarkan tupoksi OPD agar selaras dengan visi-misi-tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2019-2023.
5. Meningkatkan kemampuan fungsional dan akuntabilitas secara berkesinambungan bagi fungsional APIP khususnya dalam mengevaluasi kinerja OPD.
6. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait secara inten untuk mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan mengundang OPD dan objek pemeriksaan secara periodik.

Berikut ini adalah rincian Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mendukung pencapaian target perjanjian kinerja Tahun 2019.



Tabel 3.45

Anggaran yang Digunakan dan yang Telah Digunakan untuk Mendukung Pencapaian Target Perjanjian Kinerja
Tahun 2019

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	SKPD Pelaksana
Misi 1 : Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berintegritas										
1.1	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia						1.069.904.112.662,09	978.981.020.748,00	91,50%	
		Indeks Pendidikan (Indeks Pengetahuan)	Point	73,81	74,45	100,87%				
		Indeks Kesehatan (Indeks Harapan Hidup)	Point	79,22	79,34	100,15%				
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat						735.582.972.006,09	699.017.535.193,00	95,03%	DINAS PENDIDIKAN, DISPERKIM
		Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,53	98,46	100,95%				
		Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	98,97	98,99	100,02%				
1.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat						334.321.140.656,00	279.963.485.555,00	83,74%	DINAS KESEHATAN, RSUD, DISPERKIM



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	SKPD Pelaksana
		Angka kematian bayi (AKB)	Orang per 1.000 kelahiran hidup	2,99	1,15	260,00%				
		Angka kematian ibu (AKI)	Orang per 100.000 kelahiran hidup	24,67	15,66	157,54%				
		Angka kesakitan	Orang per 100.000 penduduk	344	223,08	154,20%				
1.2	Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat						62.874.850.413,00	59.786.629.987,00	95,09%	
		Tingkat Kemiskinan (persentase penduduk miskin)	%	4,53	4,43	102,26%				
1.2.1	Menurunnya Kemiskinan Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)						25.544.445.828,00	24.165.065.009,00	94,60%	DINAS SOSIAL, DP3AP2KB, , DKP
		Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Orang	113.717	113.525	100,17%				
1.2.2	Meningkatnya Kesempatan Kerja						37.330.404.585,00	35.621.564.978,00	95,42%	DISNAKER, DISPORA
		Tingkat pengangguran	%	6,84	7,13	95,93%				



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	SKPD Pelaksana
	terbuka (TPT)									
1.3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						802.647.700.106,68	689.120.897.238,00	85,86%	
	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	60	63,61	106,02%					
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik						802.647.700.106,68	689.120.897.238,00	85,86%	SETDA, SETWAN, DISKOMINFO, BKPSDM, BAPPEDA, BAPENDA, BPKD, DISBUDPAR, INSPEKTORAT, BPBD, SATPOL PP, DPAD, DISDUKCAPIL, KESBANGPOL, KECAMATAN
	Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Daerah	A, BB, B, CC, C, D	B	B	100,00%					
	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	100,00%					
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik	Point	82,60	82,62	100,02%					



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	SKPD Pelaksana
Misi 2 : Bersama Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kota Yang Berkelaanjutan Dan Berwawasan Lingkungan										
2.1	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan						1.478.451.220.444,74	1.192.687.830.339,00	80,67%	
		Indeks Sarana Prasarana Perkotaan	Point	71,28	71,89	100,86%				
2.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Perkotaan						437.256.397.500,00	374.876.803.316,00	85,73%	DINAS PUPR, DISHUB
		Percentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai	%	85,67	86,23	100,65%				
		Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan	Km/jam	21	21	100,00%				
2.1.2	Meningkatnya Kualitas Permukiman						189.635.442.173,00	73.844.105.173,00	38,94%	DISPERKIM
		Percentase permukiman kumuh	%	0,14	0,12	116,67%				
		Percentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100,00	100,00	100,00%				
		Percentase	%	100,00	99,79	99,79%				



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	SKPD Pelaksana
		jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik								
2.1.3	Meningkatnya Kualitas Drainase Dan Sumber Daya Air						649.727.711.156,74	550.953.595.166,00	84,80%	DINAS PUPR, DINAS PERTANAHAN
		Luas banjir dan genangan	Ha	382,98	392,16	97,66%				
2.1.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup						201.831.669.615,00	193.013.326.684,00	95,63%	DINAS LH, DISBUDPAR
		Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Point	54,42	60,32	110,84%				
		Tingkat pengelolaan sampah	%	100,00	100	100,00%				
Misi 3 : Bersama Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Mandiri Dan Berkeadilan										
3.1	Meningkatkan Kualitas Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing						32.278.108.538,00	31.056.651.516,00		
		Nilai PDRB	. Triliyun	114,12	111,89	98,05%				
		Indeks Pengeluaran (daya beli)	Point	81,5	82,24	100,91%				
3.1.1	Meningkatnya Investasi Daerah						7.760.254.050,00	7.402.981.496,00	95,40%	DPMPTSP
		Nilai investasi	. Triliyun	7,13	7,97	111,78%				



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	SKPD Pelaksana
		(PMA dan PMDN)								
3.1.2	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat						24.517.854.488,00	23.653.670.020,00	96,48%	DINAS INDAG, DINAS KOP-UKM, DKP
		Laju inflasi	%	3,5	3,31	105,74%				
		Indeks gini (gini rasio)	Point	0,35	0,32	108,57%				



III.7 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dalam melaksanakan amanahnya Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Pemerintah Kota Tangerang telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai. Berikut Prestasi dan penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun 2019.

Tabel 3.46
Prestasi dan Penghargaan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019

No.	Tanggal	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tempat
1	23 Juli 2019	Penghargaan Pejabat Milenial untuk Wali Kota Tangerang dalam Anugerah Banten Maju 2019 yang diinisiasi oleh Rakyat Merdeka Group di Merdeka Ballroom Intermark Swissbell Hotel, Tangerang Selatan	Rakyat Merdeka Gorup	Swiss Bell Hotel
2	30 Agustus 2019	Penghargaan Terpopuler di Media Online 2019 dari Majalah PR Indonesia dalam ajang Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2019 di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang	Majalah PR	Jakarta
3	30 Agustus 2019	Penghargaan Ruang Pelayanan Informasi Publik Terinovatif (Gold) dari Majalah PR Indonesia dalam ajang Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2019 di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang	Majalah PR	Jakarta



No.	Tanggal	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tempat
4	30 Agustus 2019	Penghargaan Best Leader Supporting PR dan Communication (Gold) dari Majalah PR Indonesia dalam ajang Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2019 di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang	Majalah PR	Jakarta
5	26 September 2019	Penghargaan Indonesia Property & Bank Award Tahun 2019 dengan kategori Tokoh Khusus untuk Wali Kota Tangerang.		Jakarta
6	31 Oktober 2019	Penghargaan Insan PR Indonesia 2019 dari Majalah PR Indonesia di Hotel Prime Plaza Sanur, Bali	Majalah PR Indonesia	Hotel Prime Plaza, Sanur Bali
7	14 Januari 2019	Penghargaan Nirwasita Tantra Award Green Leadership kategori Kota Besar 2018 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia	Kementerian LH	Jakarta
8	18 Juli 2019	Penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (KemenpanRB) RI di Ballroom Hotel Gumaya Tower, Semarang	Kemenpan RB	Semarang



No.	Tanggal	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tempat
9	14 Januari 2019	Adipura Tahun 2018 kategori metropolitan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) Republik Indonesia	Kementrian LH	Jakarta
10	25 Oktober 2019	Penghargaan Anugrah Pandu Negeri 2019 dengan predikat Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Tata Kelola Baik dari Indonesian Institute Publik Governance (IIPG), di Aula Bina Karna, Hotel Bidakara, Jakarta	Institute Publik Governance	Jakarta
11	07 November 2019	Penghargaan Badan Publik 2019 kategori Informatif Pemerintah Daerah Kabupaten – Kota di Aula Pendopo Gubernur Banten		Serang
12	28 Januari 2019	Penghargaan atas Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)	Kementrian PAN-RB	Bandung
13	23 Juli 2019	Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Nasional dengan peringkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA)	Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA)	Makassar



No.	Tanggal	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tempat
		(KPPA) Republik Indonesia di Hotel Four Point by Sheraton Makassar		
14	07 Oktober 2019	Penghargaan Natamukti dari International Indonesia Council for Small Bussiness (ICSB) Indonesia City Awards 2019	Intenational Indonesia Council	Bogor
15	31 Oktober 2019	Penghargaan Insan PR Indonesia 2019 dari Majalah PR Indonesia di Hotel Prime Plaza Sanur, Bali	Majalah PR	Bali
16	25 Oktober 2019	Penghargaan Siaran Pers Terbaik Anugrah Media Humas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemeninfo) Republik Indonesia di Ballroom Hotel Novotel, Pangkal Pinang	Kementrian Komunikasi dan Informasi	Pangkal Pinang
17	19 November 2019	Penghargaan Swasti Saba, Kategori Kabupaten Kota Sehat Tahun 2019, di Kementerian Dalam Negeri	Kementrian Dalam Negeri	Jakarta
18	15 Oktober 2019	Penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Public Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Istana wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta	Kemenpan RB	Jakarta



No.	Tanggal	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tempat
		Pusat		
19	31 Oktober 2019	Penghargaan Most Popular Leader in Social Media 2019 kategori Walikota dari Majalah PR Indonesia di Hotel Prime Plaza Sanur, Bali	Majalah PR	Jakarta



BAB IV

PENUTUP

Hasil pengukuran indikator kinerja Tahun 2019 terhadap 28 (Dua Puluh Delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat digambarkan bahwa 18 indikator capaiannya melebihi target (64,29%), 6 indikator capaiannya sesuai target (21,43%), dan 4 indikator belum mencapai target (14,29%). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, rata-rata capaian kinerja indikator Tahun 2019 adalah sebesar 105,11%, atau kategori Sangat Tinggi. Hal ini mengindikasikan keberhasilan pencapaian target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tangerang 2019-2023.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak yang terkait, termasuk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam pencapaian Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah pada indikator nilai SAKIP Kota Tangerang yang telah mencapai nilai B. Penilaian ini menunjukkan adanya perbaikan pada tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja. Untuk itu, prinsip efisiensi harus sudah dimulai dengan memperbaiki pola pemanfaatan anggaran sejak pertama kali merencanakan program/ kegiatan yang berorientasi pada hasil.

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja, Pemerintah Kota Tangerang akan melaksanakan beberapa upaya, diantaranya adalah :

- 1) Menjabarkan Cascading kinerja secara lebih komprehensif, terukur, relevan, dan berjenjang sesuai dengan levelnya dalam mendukung tercapainya sasaran pada unit organisasi di atasnya.
- 2) Melakukan pengukuran atas pencapaian kinerja di level OPD secara menyeluruh dan berjenjang, dari tingkat kepala OPD hingga unit kerja terendah,.



- 3) Melakukan integrasi terhadap aplikasi perencanaan kinerja, penganggaran, dan monitoring evaluasi kinerja.
- 4) Meningkatkan evaluasi internal terhadap akuntabilitas kinerja untuk mendorong perbaikan implementasi AKIP oleh setiap OPD dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap Sasaran pada Tahun 2019 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Tangerang.

**PERNYATAAN TELAH DIREVIEW
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA TANGERANG TAHUN 2019**

Kami telah mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja, substansi informasi yang dimuat dalam laporan ini menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kota Tangerang

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal dan valid

Berdasarkan review Kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

INSPEKTUR KOTA TANGERANG



DADI BUDAERI SE,Ak
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1964102319850310076

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

MISI 1 : Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1 Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks pendidikan (indeks pengetahuan)	Point	73,81
	Indeks kesehatan (Indeks harapan hidup)	Point	79,22

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,53
	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	98,97
1.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka kematian bayi (AKB)	Orang per 1.000 kelahiran hidup	2,99
	Angka kematian ibu (AKI)	Orang per 100.000 kelahiran hidup	24,67
	Angka kesakitan	Orang per 100.000 penduduk	344

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.2 Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat	Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	%	4,53

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.2.1 Menurunnya kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Orang	113.717
1.2.2 Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	6,84

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	Point	60,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.3.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Daerah	A, BB, B, CC, C, D	B
	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik	Point	82,60

MISI 2 : Bersama Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2.1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar perkotaan	Indeks sarana prasarana perkotaan	Point	71,28

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi perkotaan	Persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai	%	85,67
	Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan	Km/Jam	21
2.1.2 Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase permukiman kumuh	%	0,14
	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100,00
	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100,00
2.1.3 Meningkatnya kualitas drainase dan sumber daya air	Luas banjir dan genangan	Ha	382,98
2.1.4 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Point	54,42
	Tingkat pengelolaan sampah	%	96,00

MISI 3 : Bersama Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berkeadilan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
3.1 Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat yang berdaya saing	Nilai PDRB	Rp Trilyun	114,12
	Indeks pengeluaran (daya beli)	Point	81,50

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
3.1.1 Meningkatnya investasi daerah	Nilai investasi (PMA dan PMDN)	Rp Trilyun	7,13
3.1.2 Meningkatnya Perekonomian masyarakat	Laju Inflasi	%	3,50
	Indeks gini (gini rasio)	Point	0,35

Program Pada	Anggaran
Sekretariat Daerah	92.555.362.280,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	99.573.290.413,00
Inspektorat	6.700.804.800,00
Dinas Pendidikan	663.038.346.711,09
Dinas Kesehatan	277.827.943.386,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	738.101.174.381,74
Dinas Perumahan dan Permukiman	280.920.392.738,00
Satuan Polisi Pamong Praja	25.016.492.950,00
Dinas Sosial	12.877.631.880,00
Dinas Ketenagakerjaan	11.140.225.380,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	12.004.529.468,00
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Dinas Ketahanan Pangan	8.052.549.888,00
Dinas Pertanahan	2.911.487.340,00
Dinas Lingkungan Hidup	164.469.566.460,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.008.290.430,00
Dinas Perhubungan	193.112.347.372,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	34.919.373.568,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.201.426.280,00
Dinas Koperasi dan UKM	9.926.162.800,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.760.254.050,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	26.190.179.205,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	50.911.996.526,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	6.352.635.833,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.575.047.510,00
Badan Pengelola Keuangan Daerah	16.199.701.272,00
Badan Pendapatan Daerah	11.599.590.643,68
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.853.896.518,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.267.136.136,00
Rumah Sakit Umum Daerah	174.715.999.343,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	5.495.138.070,00
Kecamatan Batuceper	25.208.620.076,00
Kecamatan Benda	22.742.531.862,00
Kecamatan Cibodas	29.788.182.701,00
Kecamatan Ciledug	38.491.565.893,00
Kecamatan Cipondoh	40.055.700.971,00
Kecamatan Jatiuwung	22.749.675.101,00
Kecamatan Karang Tengah	37.872.792.836,00
Kecamatan Karawaci	47.295.505.848,00
Kecamatan Larangan	29.554.839.088,00

Program Pada	Anggaran
Kecamatan Neglasari	25.653.067.128,00
Kecamatan Periuk	28.910.154.492,00
Kecamatan Pinang	41.519.792.552,00
Kecamatan Tangerang	27.138.617.764,00
Jumlah	3.430.260.019.944,52



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2019 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tangerang adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Wali Kota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kota Tangerang dan Perangkat Daerah dibawahnya.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019 – 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota

Tangerang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 -2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
7. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Tangerang.
8. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
12. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
13. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
14. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang ditetapkan.

16. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBD.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengelahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU PD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Setiap PD wajib menyusun IKU PD.
- (2) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB II

DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Perjanjian Kinerja;
- c. menyusun Laporan Kinerja; dan
- d. melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Tahun 2019-2023.
- (2) Penetapan IKU PD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Tahun 2019-2023.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
 - b. IKU PD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;

- b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja PD.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 30 Oktober 2019

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 30 Oktober 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

TATANG SUTISNA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 61

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 61 TAHUN 2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA
TANGERANG TAHUN 2019-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA TANGERANG TAHUN 2019 – 2023

Visi : TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG SEJAHTERA, BERAKHLAKUL KARIMAH DAN BERDAYA SAING

Misi 1: Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
1.1	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks pendidikan (indeks pengetahuan)	Point	Indeks pendidikan (Indeks pengetahuan) pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sama dengan Rata-rata hasil penjumlahan dari indeks harapan lama sekolah (HLS) dan indeks rata-rata lama sekolah (RLS).	BPS, Dinas Pendidikan	<p>Indeks Pendidikan atau Indeks Pengetahuan adalah penggabungan dua indikator pendidikan, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)</p> <ul style="list-style-type: none">• Harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.• Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
		Indeks kesehatan (Indeks harapan hidup)	Point	Indeks Kesehatan (Indeks Harapan Hidup) pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	BPS, Dinas Kesehatan	Indeks kesehatan merupakan derajat kesehatan sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Data dasar yang dibutuhkan untuk menghitung indeks ini adalah angka harapan hidup (AHH) yang sumbernya berasal dari Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
1.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun dikali 100 persen	BPS, Dinas Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.
		Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun dikali 100 persen	BPS, Dinas Pendidikan	
1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka kematian bayi (AKB)	Orang per 1.000 kelahiran hidup	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu dibagi Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu dikali 1000	BPS, Dinas Kesehatan	jumlah kematian bayi dalam usia 28 hari pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
		Angka kematian ibu (AKI)	Orang per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama dikali100.000	BPS, Dinas Kesehatan	Kematian ibu yaitu kematian dari setiap wanita selama kehamilan, bersalin atau dalam 42 hari sesudah berakhirknya kehamilan oleh sebab apapun, tanpa melihat usia dan lokasi kehamilan oleh setiap penyebab yang berhubungan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukanoleh kecelakaan atau incidental (faktor kebetulan)
		Angka kesakitan	Orang per 100.000 penduduk	Jumlah Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktivitas dibagi jumlah penduduk dikali 100.000	BPS, Dinas Kesehatan	Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
1.2	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat	Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	%	Jumlah penduduk miskin (berdasarkan garis kemiskinan) dibagi jumlah penduduk Kota Tangerang dikali 100 persen	BPS, Dinas Sosial	Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
1.2.1	Menurunnya kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Orang	PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.	Dinas Sosial	Jenis, Definisi dan Kriteria PMKS berdasarkan Permendes RI No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
1.2.2	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 persen	BPS, Dinas Ketenagakerjaan	Angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan adalah mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja, atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
1.3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	Point	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh KemenPAN-RB	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Kriteria dan ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi berdasarkan Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2011
1.3.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Daerah	A, BB, B, CC, C, D	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kota Tangerang	Bappeda	Nilai Evaluasi AKIP Kota Tangerang diukur sesuai dengan Permenpan No. 25/2012 tentang Pedoman atas Implementasi SAKIP serta perubahannya
		Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP/ TMP	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik	Point	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya, berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Misi 2: Bersama Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
2.1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar perkotaan	Indeks sarana prasarana perkotaan	Point	Rata-rata hasil penjumlahan dari Indeks Kualitas Jalan dan Jembatan yang Memadai (KJJM), Indeks Kecepatan Perjalanan Rata-Rata (KPR), Indeks Penanganan Permukiman Kumuh (PPK), Indeks Pelayanan Air Minum (PAM), Indeks Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik (PPLD), Indeks Penanganan Banjir dan Genangan (PBG), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH), dan Indeks Pelayanan Persampahan (PP).	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup	<p>Mengukur simpangan/selisih dari kondisi eksisting terhadap kondisi ideal dari masing-masing indeks yang diukur.</p> <p>Sarana Perkotaan adalah fasilitas dalam lingkungan perkotaan yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.</p> <p>Prasarana Perkotaan adalah fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota, yang akan menentukan perkembangan kota.</p>

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
2.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi perkotaan	Persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai	%	Rata-rata hasil penjumlahan dari proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik (panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik dibagi panjang seluruh jaringan jalan kota dikali 100 persen) dan rasio jumlah jembatan dalam kondisi baik (jumlah jembatan dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh jembatan dikali 100 persen)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>Kualitas jalan dan jembatan yang memadai adalah kondisi jalan dan jembatan dalam keadaan baik.</p> <p>Kondisi jalan dan jembatan dalam keadaan baik adalah Prosantase BatasanKerusakan kurang dari 6 persen (Permen PU Nomor : 13 /PRT/M/2011)</p>

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
		Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan	Km/jam	Rata-rata dari jarak tempuh dibagi waktu tempuh perjalanan kendaraan	Dinas Perhubungan	Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan adalah kecepatan rata-rata dari seluruh kendaraan yang menempati atau melintasi penggalan jalan selama periode tertentu dan mencakup waktu perjalanan dan hambatan
2.1.2	Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase permukiman kumuh	%	Luas Permukiman Kumuh dibagi Luas Wilayah Permukiman dikali 100 persen	Dinas Perumahan dan Permukiman	Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)
		Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	Jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dibagi Jumlah penduduk Kota Tangerang dikali 100 persen	Dinas Perumahan dan Permukiman	Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya
		Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dibagi jumlah penduduk Kota Tangerang dikali 100 persen	Dinas Perumahan dan Permukiman	Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama
2.1.3	Meningkatnya kualitas drainase dan sumber daya air	Luas banjir dan genangan	Ha	Luas genangan dan banjir di wilayah Kota Tangerang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Genangan adalah tidak berfungsiya sistem drainase, dan waktu surut kurang dari 6 jam,

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
						<p>serta tinggi air kurang atau sama dengan 30 cm.</p> <p>Banjir adalah aliran permukaan dalam sungai maupun dalam badan air yang lainnya yang meluap serta limpah atau menggenangi daerah perkotaan. Atau genangan yang waktu surutnya lebih dari 6 jam dan tinggi air lebih dari 30 cm.</p>
2.1.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Point	$\text{IKLH} = (\text{IPA} \times 30\%) + (\text{IPU} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%)$ <p>IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IPA : Indeks Pencemaran Air IPU : Indeks Pencemaran Udara ITH : Indeks Tutupan Lahan</p>	Dinas Lingkungan Hidup	<p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menggambarkan kondisi lingkungan hidup Kota Tangerang yang difokuskan pada media lingkungan air, udara dan tutupan lahan. IKLH juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>
		Tingkat pengelolaan sampah	%	<p>volume sampah yg dikelola dibagi Volume Potensi timbulan sampah dikali 100%</p> <p>Sampah yang dikelola = sampah yang dikurangi dan sampah yang ditangani.</p> <p>Potensi timbulan sampah = $0,7 \text{ kg/org/hari} \times \text{jumlah penduduk}$</p>	Dinas Lingkungan Hidup	<p>Pengelolaan sampah, yaitu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU No. 18 tahun 2008).</p> <p>Sampah yang dikurangi adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang dikurangi, berdasarkan indikator pada Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2018.</p> <p>Sampah yang ditangani adalah sampah rumah tangga dan</p>

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
						sampah sejenis rumah tangga yang ditangani, berdasarkan indikator pada Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2018.

Misi 3: Bersama Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berkeadilan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
3.1	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat yang berdaya saing	Nilai PDRB	Rp. Triliyun	Nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) Kota Tangerang	BPS, Bappeda, Dinas Kominfo	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah Kota Tangerang yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.. PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.
		Indeks pengeluaran (daya beli)	Point	Nilai Indeks pengeluaran (daya beli) pada pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	BPS, Bappeda, Dinas Kominfo	Perhitungan paritas daya beli menggunakan 96 komoditas, dengan 66 komoditasnya merupakan komoditas makanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
3.1.1	Meningkatnya investasi daerah	Nilai investasi (PMA dan PMDN)	Rp. Triliyun	Hasil penjumlahan dari nilai (jumlah) penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kota Tangerang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Tangerang
3.1.2	Meningkatnya Perekonomian masyarakat	Laju Inflasi	%	IHK tahun tertentu - IHK tahun sebelumnya)/(IHK tahun sebelumnya) x 100%	BPS, Bappeda, Dinas Kominfo, Bagian Kerjasama dan Perekonomia SETDA	Inflasi adalah kecenderungan naiknya barang dan jasa yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Laju inflasi diukur dengan menggunakan perubahan indeks harga konsumen (IHK). Dari waktu ke waktu.
		Indeks gini (gini rasio)	Point	Nilai Indeks Gini (Gini Rasio) Kota Tangerang	BPS, Bappeda, Dinas Kominfo	Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan.

WALI KOTA TANGERANG



ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 61 TAHUN 2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2019-2023

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA OPD
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
(...*nama OPD*...)

KOP SURAT SESUAI INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA (...*nama OPD*...)
NOMOR : /.....
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(...*nama OPD*....)

KEPALA (...*nama OPD*....)

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Peraturan Wali Kota Nomor Tahun tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019-2023, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (...*nama OPD*...);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (...*nama OPD*...) tentang Indikator Kinerja Utama (...*nama OPD*...);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 -2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3);
12. Dst.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (...*nama OPD*...) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan

oleh (...*nama OPD*...) dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...*nama OPD*...) Kota Tangerang Tahun 2019-2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal
KEPALA (...*nama OPD*.....),

(*Nama Lengkap tanpa Titel,
Pangkat / Golongan, dan NIP*)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA (...*nama OPD*.....)
NOMOR :
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(...*nama OPD*.....)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

OPD :

Tugas dan Fungsi :

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Formulasi Pengukuran	Sumber Data	Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tujuan....					
1.1	Sasaran					

KEPALA (...*nama OPD*.....),

(*Nama Lengkap tanpa Titel
Pangkat / Golongan, dan
NIP*)

Keterangan:

1. Pada kolom (1) diisi nomor urut Tujuan dan Sasaran;
2. Pada kolom (2) diisi dengan Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis Perangkat Daerah;
3. Pada kolom (3) diisi dengan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada kolom (2);
4. Pada kolom (4) diisi dengan Satuan Indikator Kinerja Utama pada kolom (3);
5. Pada kolom (5) diisi dengan penjelasan atau cara pengukuran/perhitungan indikator kinerja utama pada kolom (3);
6. Pada kolom (6) diisi dengan sumber data indikator kinerja utama, bisa dari dokumen yang dikeluarkan oleh internal Perangkat Daerah maupun eksternal Perangkat Daerah;
7. Pada kolom (7) diisi dengan Penanggungjawab pencapaian Indikator Kinerja Utama.

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH